

LAPORAN **TRIWULANAN**

Triwulan I - 2019



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [OtoritasJasaKeuangan](https://www.youtube.com/OtoritasJasaKeuangan)

Kata Pengantar



Wimboh Santoso, Ph.D

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan dan bimbingan-Nya, OJK dapat senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan guna menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

Perkembangan ekonomi global pada triwulan I-2019 masih berada dalam tren melambat. Pertumbuhan perekonomian global dan juga negara maju direvisi turun oleh World Bank dan IMF sehingga bank sentral di negara maju mempertahankan kebijakan yang lebih akomodatif. The Fed mengumumkan untuk tidak menaikkan suku bunga kebijakan *Federal Funds Rate* (FFR) di tahun 2019 dan *European Central Bank* (ECB) juga akan tetap mempertahankan kebijakan longgarnya. Sedikit berbeda, perkembangan ekonomi regional Asia tergolong cukup baik di mana perekonomian Tiongkok tumbuh 6,4%.

Sementara itu, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2019 mencatatkan sejumlah perkembangan positif. Ekonomi masih tumbuh solid 5,07% (yoy) dengan tingkat inflasi stabil. Namun demikian, keseimbangan eksternal masih menjadi tantangan mengingat ketergantungan ekspor kita terhadap komoditas dan

ketergantungan impor kita terhadap migas. *Current Account Deficit* triwulan I-2019 masih cukup besar di level 2,6% terhadap PDB, atau sebesar USD7 miliar (Q4 2018: 3,6% PDB, USD9,2 miliar), adapun neraca pembayaran pada periode yang sama tercatat surplus sebesar USD2,4 miliar.

Kinerja makroekonomi domestik tersebut mendukung performa industri jasa keuangan. Kinerja perbankan nasional secara umum dalam keadaan yang solid, didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai serta fungsi intermediasi yang semakin baik dengan pertumbuhan kredit sebesar 11,55% (yoy) dan tren *Non Performing Loan* yang menurun. Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga bergerak positif tercermin dari piutang pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 5,17% (yoy) disertai dengan kualitas pembiayaan yang cukup baik. Perbaikan perekonomian dalam negeri juga turut mempengaruhi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG ditutup di level 6.468,8 atau menguat sebesar 4,43% (ytd).

Dalam lingkup pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan 14 Peraturan OJK (POJK) dan tujuh Surat Edaran OJK (SEOJK) selama triwulan I-2019. POJK yang diterbitkan terdiri dari empat POJK yang mengatur sektor Perbankan, sembilan yang mengatur sektor Pasar Modal dan satu

POJK yang mengatur sektor IKNB, yaitu ketentuan pemberian uang muka nol persen bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sehat.

Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan kegiatan edukasi masif untuk berbagai kalangan melalui pagelaran wayang, *OJK Goes to Campus* dan *Financial Expo*. OJK juga memperluas akses keuangan di area terpencil melalui penguatan TPAKD dan fasilitasi BUMDes dan BUMR, serta Bank Wakaf Mikro. Selain itu, OJK juga melakukan serangkaian persiapan untuk penghitungan indeks inklusi keuangan yang akan dilaksanakan pada 2019.

Pada triwulan I-2019, OJK mempublikasikan 5 Arah Kebijakan Strategis 2019 yang fokus utamanya antara lain pada pembiayaan sektor prioritas pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, inovasi teknologi Informasi dan pembenahan proses bisnis. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan proses bisnis, OJK senantiasa melakukan simplifikasi proses bisnis dengan mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas antara lain dengan penggunaan

aplikasi OJK-BOX dan penggunaan *big data analytics* dalam pemantauan potensi investasi ilegal.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen internal, OJK juga terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Beberapa hal terkait seperti *website* dan Majalah Internal OJK mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan *Silver Winner* untuk Kategori *Website* Lembaga Negara dari PR Indonesia Awards dan *InMA Gold Winner Award* dalam kategori *The Best Government Internal Magazine* setelah bersaing dengan ratusan lembaga lainnya.

Akhir kata, atas nama segenap Anggota Dewan Komisiner, saya mengapresiasi seluruh pegawai OJK yang senantiasa memegang teguh komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, serta menjaga nama baik organisasi sebagai garda terdepan OJK. Kami bersama segenap jajaran pejabat dan pegawai OJK juga berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan agar industri jasa keuangan terus berkembang dengan sehat dan stabil serta semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso, Ph.D



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
DUKUNGAN OJK TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH	xx
INDIKATOR UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN	xxii

BAB 1

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	27
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global	27
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik	29
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan	31
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	33
1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional	33
1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	36
1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	37
1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	39
1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	41
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek	41
1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi	46
1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	48
1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	51
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	53
1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	54
1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	57
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	58
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	62
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	63
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	64
1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	67
1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	68
1.4.9 Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	68
1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PENDUKUNG SEKTOR PRIORITAS PEMERINTAH	69
1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)	69
1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	69
1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	69

BAB 2
TINJAUAN
OPERASIONAL
SEKTOR
JASA
KEUANGAN

1.5.4	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	70
1.5.5	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	70
1.5.6	Program 1.000 Aktuaris	71
1.5.7	Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)	71
1.5.8	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	72
1.5.9	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	72
1.5.10	Asuransi Nelayan	72
1.5.11	Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	72
1.5.12	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	72

2.1	AKTIVITAS PENGATURAN	75
2.1.1	Pengaturan Bank	75
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	75
2.1.3	Pengaturan IKNB	75
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	76
2.2.1	Pengawasan Perbankan	76
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	80
2.2.3	Pengawasan IKNB	84
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	104
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	104
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	105
2.3.3	Pengembangan IKNB	108
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	108
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	109
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	109
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	111
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	111
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	112
2.5.1	Penelitian dan Pengaturan	112
2.5.2	Inklusi Keuangan	112
2.5.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	113
2.5.4	Perlindungan Konsumen	115
2.5.5	Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen	118
2.5.6	<i>Market Conduct</i>	120
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	122
2.6.1	Penanganan Perkara	122
2.6.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	122
2.6.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	122
2.6.4	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	122

BAB 3
TINJAUAN
INDUSTRI DAN
OPERASIONAL
SEKTOR JASA
KEUANGAN
SYARIAH

2.7	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN	123
	PENDANAAN TERORISME	
2.7.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	123
2.7.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	123
2.7.3	Koordinasi Kelembagaan	123
2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	123
2.8.1	Kerjasama Domestik	124
2.8.2	Kerjasama Internasional	124
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	129
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	129
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	134
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	138
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	140
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	140
3.2.2	Pengaturan Industri Pasar Modal Syariah	140
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	141
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	141
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	141
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	142
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	142
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	143
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	143
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	143
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	145

BAB 4
MANAJEMEN
STRATEGIS
DAN TATA
KELOLA
ORGANISASI

4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	149
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	149
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	149
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK	149
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	155
4.2.1	Pelaksanaan Audit dan Peningkatan Kualitas Proses Bisnis Satuan Kerja	155
4.2.2	Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal	155
4.2.3	Transformasi <i>Risk and Quality Officer</i> (RQO)	155
4.2.4	<i>Lesson Learnt</i> AIMRPK	155
4.2.5	Implementasi Standar Pengendalian Kualitas	155
4.2.6	Program Pengendalian Gratifikasi	155
4.2.7	<i>Whistle Blowing System</i>	155
4.2.8	Pengelolaan e-LHKPN	155
4.2.9	Penguatan Integritas	156

4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	156
4.4	KOMUNIKASI	157
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	157
4.4.2	Layanan Informasi	159
4.4.3	OJK TV	159
4.5	KEUANGAN	162
4.5.1	Realisasi Anggaran	162
4.5.2	Implementasi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015	162
4.6	SISTEM INFORMASI	162
4.6.1	Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022	162
4.6.2	Pertukaran Informasi Antar Lembaga	162
4.6.3	Jaringan Komunikasi Antar Lembaga	163
4.6.4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	163
4.7	LOGISTIK	167
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	167
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	167
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	167
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	168
4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia	168
4.8.2	Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)	168
4.8.3	Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar	168
4.8.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	168
4.8.5	Pengembangan Sistem Informasi	169
4.9	OJK INSTITUTE	169
4.9.1	Program Pengembangan SDM SJK	169
4.9.2	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	169
4.9.3	Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	170
4.9.4	Program <i>Visit</i> OJK	170
4.9.5	OJK Mengajar	170
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	170
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	170
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	171
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	171

SINGKATAN DAN AKRONIM

174

Daftar Tabel

Tabel I - 1	<i>World Economic Outlook</i> IMF	29
Tabel I - 2	Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global	32
Tabel I - 3	Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5	32
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	33
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	33
Tabel I - 6	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	34
Tabel I - 7	Kondisi Umum BPR	36
Tabel I - 8	Konsentrasi Penyaluran UMKM	38
Tabel I - 9	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	39
Tabel I - 10	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	39
Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	43
Tabel I - 12	Perkembangan IHSG dan Net Asing	43
Tabel I - 13	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	44
Tabel I - 14	Jumlah Perusahaan Efek	45
Tabel I - 15	Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek Selain Kantor Pusat	45
Tabel I - 16	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	45
Tabel I - 17	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	45
Tabel I - 18	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	46
Tabel I - 19	Perkembangan Pengelolaan Investasi	46
Tabel I - 20	Perkembangan Jumlah Reksa Dana	46
Tabel I - 21	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	47
Tabel I - 22	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	47
Tabel I - 23	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	48
Tabel I - 24	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2019	48
Tabel I - 25	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	49
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	49
Tabel I - 27	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi I	49
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	50
Tabel I - 29	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2019 Berdasarkan Sektor Industri	51
Tabel I - 30	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	51
Tabel I - 31	Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>	52
Tabel I - 32	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	53
Tabel I - 33	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)	53
Tabel I - 34	Total Aset IKNB	53
Tabel I - 35	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	54
Tabel I - 36	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	55
Tabel I - 37	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	56
Tabel I - 38	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	56
Tabel I - 39	RBC Industri Asuransi	56
Tabel I - 40	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	57
Tabel I - 41	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	57
Tabel I - 42	Portofolio Investasi Dana Pensiun	58
Tabel I - 43	Jumlah Dana Pensiun	58
Tabel I - 44	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	60

Tabel I - 45	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	60
Tabel I - 46	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	61
Tabel I - 47	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	62
Tabel I - 48	Rasio Keuangan Modal Ventura	63
Tabel I - 49	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	64
Tabel I - 50	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	67
Tabel I - 51	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	67
Tabel I - 52	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro	68
Tabel I - 53	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	68
Tabel I - 54	Perkembangan Industri <i>Fintech (Peer To Peer Lending)</i>	68
Tabel I - 55	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)	69
Tabel I - 56	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim	69
Tabel I - 57	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	70
Tabel I - 58	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	72
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	76
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	76
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU	78
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	79
Tabel II - 5	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	79
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2019	80
Tabel II - 7	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	80
Tabel II - 8	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	82
Tabel II - 9	Laporan Berkala	82
Tabel II - 10	Sanksi Administratif Pasar Modal	84
Tabel II - 11	Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	84
Tabel II - 12	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	85
Tabel II - 13	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	86
Tabel II - 14	Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun	87
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	88
Tabel II - 16	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Pembiayaan	88
Tabel II - 17	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	89
Tabel II - 18	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha	89
Tabel II - 19	Pelaksanaan Pendampingan LKM	90
Tabel II - 20	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)	90
Tabel II - 21	Jumlah Pemeriksaan Langsung	90
Tabel II - 22	Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)	90
Tabel II - 23	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB	91
Tabel II - 24	Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan I-2019	91
Tabel II - 25	Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan Triwulan I-2019	92
Tabel II - 26	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	92
Tabel II - 27	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	92
Tabel II - 28	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB selama periode Triwulan I-2019	93
Tabel II - 29	Pemberian Izin Usaha IKNB selama periode Triwulan I-2019	93
Tabel II - 30	Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian	94
Tabel II - 31	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB	95
Tabel II - 32	Pencabutan Izin IKNB	95
Tabel II - 33	Jumlah IKNB Konvensional	96
Tabel II - 34	Rekapitulasi Likuidasi IKNB	97
Tabel II - 35	Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB selama periode Triwulan I-2019	97
Tabel II - 36	Persetujuan Pengambilalihan IKNB selama periode Triwulan I-2019	98
Tabel II - 37	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB	98
Tabel II - 38	Rekapitulasi Perubahan Nama	99
Tabel II - 39	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB	99
Tabel II - 40	Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB	100

Tabel II - 41	Rekapitulasi Pelaporan Produk	101
Tabel II - 42	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB	102
Tabel II - 43	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB	103
Tabel II - 44	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB	103
Tabel II - 45	Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal	104
Tabel II - 46	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB	104
Tabel II - 47	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	111
Tabel II - 48	Penerimaan Layanan OJK	117
Tabel II - 49	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS	119
Tabel II - 50	Penyidikan	122
Tabel II - 51	Kerjasama Domestik	124
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	129
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	131
Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	132
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	134
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	134
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	135
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	135
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	135
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	136
Tabel III - 10	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	137
Tabel III - 11	Aset IKNB Syariah	138
Tabel III - 12	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	139
Tabel III - 13	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	140
Tabel III - 14	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank dan DPS	141
Tabel III - 15	Permohonan Perizinan	141
Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers Triwulan I-2019	158
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan <i>Media Briefing</i> Triwulan I-2019	159
Tabel IV - 3	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2019	165
Tabel IV - 4	Daftar Lokasi KR/KOJK Posisi Desember Tahun 2019	167

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Tingkat Pengangguran AS dan Tingkat <i>Initial Jobless Claims</i>	27
Grafik I - 2	Kinerja Eksternal Tiongkok	27
Grafik I - 3	Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara	28
Grafik I - 4	Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara	28
Grafik I - 5	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	28
Grafik I - 6	<i>Leading Indicator</i> Perekonomian Global	28
Grafik I - 7	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	29
Grafik I - 8	Indeks Penjualan Riil SPE	29
Grafik I - 9	Tingkat Inflasi Indonesia	30
Grafik I - 10	Neraca Perdagangan Indonesia	30
Grafik I - 11	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa	31
Grafik I - 12	Perkembangan Pasar Saham Global	31
Grafik I - 13	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	32
Grafik I - 14	Indeks VIX	32
Grafik I - 15	Perkembangan Aset BUK	34
Grafik I - 16	Tren Pertumbuhan DPK	34
Grafik I - 17	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	34
Grafik I - 18	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	35
Grafik I - 19	Tren NPL (%)	35
Grafik I - 20	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	35
Grafik I - 21	Tren Aset BPR	36
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	36
Grafik I - 23	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik I - 24	Tren ROA dan BOPO BPR	37
Grafik I - 25	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	38
Grafik I - 26	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (<i>yoy</i>)	40
Grafik I - 27	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	41
Grafik I - 28	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	42
Grafik I - 29	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	42
Grafik I - 30	Perkembangan IHSG dan Net Asing	43
Grafik I - 31	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	43
Grafik I - 32	Perkembangan Jumlah SID	44
Grafik I - 33	Rencana Penggunaan Dana	50
Grafik I - 34	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien	52
Grafik I - 35	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan I-2019	52
Grafik I - 36	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2019	54
Grafik I - 37	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	57
Grafik I - 38	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	59
Grafik I - 39	Piutang Perusahaan Pembiayaan	59
Grafik I - 40	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	62
Grafik I - 41	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	62
Grafik I - 42	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	63
Grafik I - 43	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	64
Grafik I - 44	Pertumbuhan Aset LJKK	64
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	65
Grafik I - 46	<i>Outstanding</i> Penjaminan	65
Grafik I - 47	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	65
Grafik I - 48	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	65

Grafik I - 49	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	66
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	66
Grafik I - 51	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	66
Grafik I - 52	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	66
Grafik I - 53	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	67
Grafik I - 54	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	67
Grafik I - 55	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	69
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	79
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2019	80
Grafik II - 3	Kelulusan Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama	102
Grafik II - 4	Penyelenggara IKD	108
Grafik II - 5	Kinerja Intermediasi IJK	109
Grafik II - 6	CAR Perbankan	110
Grafik II - 7	RBC Industri Perasuransian	110
Grafik II - 8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	110
Grafik II - 9	Rasio NPL Perbankan	110
Grafik II - 10	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	110
Grafik II - 11	Penerimaan Layanan Triwulan I-2019	115
Grafik II - 12	Layanan Pertanyaan Triwulan I-2019	115
Grafik II - 13	Layanan Informasi Triwulan I-2019	115
Grafik II - 14	Layanan Pengaduan Triwulan I-2019	115
Grafik II - 15	5 Besar Jenis Produk Perbankan	116
Grafik II - 16	5 Besar Jenis Produk Pasar Modal	116
Grafik II - 17	5 Besar Jenis Produk Perasuransian	116
Grafik II - 18	5 Besar Jenis Produk Dana Pensiun	116
Grafik II - 19	5 Besar Jenis Produk Lembaga Pembiayaan	116
Grafik II - 20	5 Besar Jenis Produk IKNB - Lainnya	116
Grafik II - 21	5 Besar Jenis Permasalahan Perbankan	116
Grafik II - 22	5 Besar Jenis Permasalahan Pasar Modal	116
Grafik II - 23	5 Besar Jenis Permasalahan Perasuransian	117
Grafik II - 24	Jenis Permasalahan Dana Pensiun	117
Grafik II - 25	5 Besar Jenis Permasalahan Lembaga Pembiayaan	117
Grafik II - 26	5 Besar Jenis Permasalahan IKNB - Lainnya	117
Grafik II - 27	Tingkat Penyelesaian Layanan	117
Grafik II - 28	Kanal Layanan	117
Grafik II - 29	Penerimaan Layanan Triwulan I-2019	118
Grafik II - 30	Data SLIK	118
Grafik II - 31	Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK	118
Grafik II - 32	Permohonan Layanan yang Disetujui LAPS	119
Grafik II - 33	Pelanggaran Iklan	121
Grafik II - 34	Tren Pelanggaran Iklan	121
Grafik II - 35	Entitas yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi	122
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	130
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)	131
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qtq</i>)	131
Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	133
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	134
Grafik III - 6	Laba dan ROA Perbankan Syariah	134
Grafik III - 7	Judul Siaran Pers Triwulan I-2019	134
Grafik III - 8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	136
Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	137
Grafik III - 10	Jumlah Entitas IKNB Syariah	138

Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	149
Grafik IV - 2	Topik Materi Rapat Dewan Komisaris	156
Grafik IV - 3	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK Triwulan I-2019	157
Grafik IV - 4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK Triwulan I-2019	157
Grafik IV - 5	Jumlah Publikasi di Media Sosial OJK Periode Triwulan I-2019	158
Grafik IV - 6	Jumlah Pemberitaan Triwulan I-2019	158
Grafik IV - 7	Persentase <i>Tone</i> Berita Triwulan I-2019	158
Grafik IV - 8	Siaran Pers OJK Triwulan I-2019	158
Grafik IV - 9	Jumlah Layanan Informasi Triwulan I-2019	159
Grafik IV - 10	Liputan OJK TV Triwulan I-2019	159
Grafik IV - 11	Statistik OJK TV Triwulan I-2019	160
Grafik IV - 12	Realisasi Anggaran Triwulan I	162
Grafik IV - 13	Topologi Jaringan Ekstranet	163
Grafik IV - 14	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK	163
Grafik IV - 15	Alur Informasi O-BOX	164

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan I-2019 *leading indicators* menunjukkan bahwa perekonomian global berada dalam tren melambat. International Monetary Fund (IMF) merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019, terutama untuk perekonomian negara maju. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan moneter bank sentral negara maju tahun 2019 akan menjadi lebih akomodatif. The Fed telah mengumumkan untuk tidak menaikkan suku bunga kebijakan *Federal Funds Rate* (FFR) di 2019 dan *European Central Bank* (ECB) juga akan tetap mempertahankan kebijakan longgarnya. Hal ini demi mendorong perekonomian AS lebih lanjut, yang tumbuh solid 3,2% pada triwulan I-2019 di atas ekspektasi pasar antara lain akibat didorong oleh perbaikan kinerja perdagangan AS dan kenaikan pengeluaran investasi pemerintah. Pertumbuhan perekonomian Uni Eropa relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju lainnya.

Sedikit berbeda, perekonomian regional Asia menunjukkan sentimen positif, antara lain ditandai dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang tumbuh stabil pada triwulan I-2019 di level 6,4% dan kinerja eksternal Tiongkok yang juga kembali membaik dengan ekspor naik 14,2% (*yoy*) dan impor turun -7,6% (*yoy*). Sama halnya, perekonomian Jepang juga tumbuh di atas ekspektasi pasar sebesar 0,8% (*yoy*) dengan inflasi terjaga di level 0,5% (*yoy*).

Perekonomian global secara umum dalam tren melambat. Data terkini menunjukkan bahwa volume perdagangan dunia berkontraksi -0,38%, sedangkan tingkat produksi pabrik tumbuh melambat 2,12% (*yoy*). Data indikator *new orders of manufacturing* dari *Purchasing Manager Index* juga mulai turun menyentuh angka 50, sehingga kegiatan manufaktur ke depan diperkirakan akan stagnan.

Kendati ekonomi global yang cenderung melambat, perekonomian domestik pada triwulan I-2019 mencatat sejumlah perkembangan positif. Perekonomian domestik masih tumbuh solid sebesar 5,07% (*yoy*) dengan tingkat inflasi stabil pada rentang target inflasi yang ditetapkan.

Neraca perdagangan pun mencatatkan surplus dalam dua bulan terakhir akibat kontraksi impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Surplus ini merupakan yang pertama setelah sebelumnya mengalami defisit berturut-turut di 2018. Indikator sektor riil menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan akan tumbuh semakin solid. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona ekspansi di level 51,2.

Defisit transaksi berjalan triwulan I-2019 tercatat sebesar USD7,0 miliar (2,6% terhadap PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD9,2 miliar (3,6% terhadap PDB). Penurunan defisit neraca transaksi berjalan terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan non migas dan perbaikan defisit neraca perdagangan migas.

Di samping itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang tinggi sebesar USD10,1 miliar. Surplus itu terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Peraturan terkait Ketentuan Uang Muka Nol Persen

OJK menerbitkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan Industri Pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Salah satu ketentuan yang diatur antara lain Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan uang muka nol persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih

yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

2. Aplikasi OJK BOX untuk Pemenuhan Kebutuhan Data Pengawas yang Efisien

OJK-BOX (O-BOX) merupakan sistem yang dibangun untuk mengefisienkan pemenuhan kebutuhan Pengawas atas data detil dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat dilakukan secara *case-by-case* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mekanisme penyediaan data dilakukan oleh LJK secara rutin pada *repository* masing-masing. Pengawas dapat memantau ketersediaan data pada *repository* setiap LJK di bawah pengawasannya dan melakukan penarikan data yang dibutuhkan melalui *user interface web* aplikasi O-BOX untuk Pengawas.

3. Kajian mengenai Pengaturan *Stock Split* dan *Reverse Stock Split* oleh Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia

Dalam rangka mewujudkan sektor Pasar Modal yang tangguh, stabil dan berdaya saing tinggi melalui penelitian yang bertujuan untuk pengembangan dan pengawasan Pasar Modal Indonesia, OJK melakukan penyusunan kajian mengenai pengaturan *stock split* dan *reverse stock split* oleh Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni (i) belum adanya pengaturan khusus mengenai *stock split* dan *reverse stock split* dalam peraturan pasar modal, (ii) dalam 10 tahun terakhir rata-rata terdapat 10 perusahaan yang melakukan *stock split* dan dua perusahaan yang melakukan *reverse stock split* tiap tahunnya, dan (iii) perlunya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pelaksanaan *stock split* dan *reverse stock split* oleh Perusahaan Terbuka.

4. Inovasi Keuangan Digital (IKD)

OJK menerima 67 Penyelenggara IKD yang mengajukan pencatatan di OJK dan 55 Penyelenggara IKD masuk ke dalam forum panel dan diputuskan bahwa 34 Penyelenggara IKD mendapatkan status tercatat yang terbagi dalam 12 klaster model bisnis IKD dan 23 Penyelenggara IKD diantaranya menjadi sampel objek *Regulatory Sandbox*.

5. Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

Indonesia resmi mulai mengikuti proses *Mutual Evaluation Review* (MER) sebagai salah satu prosedur yang harus dilalui dalam rangka memperoleh keanggotaan dalam *Financial Action Task Force* (FATF). MER bertujuan untuk menentukan kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga pengawas di Indonesia dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan kegiatan terkait persiapan penghitungan indeks inklusi keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pemahaman mengenai sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan kegiatan edukasi masif kepada berbagai kalangan masyarakat dalam bentuk pagelaran wayang di Kabupaten Ciamis, Lampung Timur, Langkat, Temanggung, dan Wonosobo, *Financial Expo* dan *OJK Goes to Campus* di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur serta Kota Ambon dan Makassar. Selain itu, OJK juga senantiasa mempercepat perluasan jangkauan akses keuangan daerah antara lain dengan pengukuhan empat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (Kabupaten Wonogiri dan Purbalingga serta Kota Magelang dan Makassar), juga fasilitasi terhadap tiga BUMDesa Center (Desa Traktakan, Kabupaten Bondowoso; Desa Tunjungtirta, Kabupaten Malang dan Desa Wonorejo, Kabupaten Sukoharjo) dan dua BUMR (Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan dan Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang).

Penguatan Kapasitas Organisasi

Pada aspek manajemen strategis, OJK merumuskan dan mempublikasikan 5 Arah Kebijakan Strategis 2019 pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2019. Kebijakan tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, OJK memanfaatkan teknologi *Big Data Analytics* untuk pemantauan investasi ilegal melalui informasi aduan masyarakat dan informasi pendukung lainnya yang berasal dari data media *online*, sosial media, forum, dan blog. Pemanfaatan teknologi ini akan juga diperluas untuk kepatuhan iklan yang dikeluarkan oleh PUJK.

Dalam rangka pemberian manfaat balik terhadap pemangku kepentingan khususnya masyarakat, selama triwulan I-2019 OJK menerima 13 kunjungan *Visit OJK* dari instansi maupun pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 1.095, melaksanakan tiga kegiatan OJK mengajar di Serang, Banjarmasin dan Palangkaraya serta menerima 62 mahasiswa yang melakukan penelitian tugas akhir. OJK juga menerbitkan 10 Siaran Pers dan 91 liputan OJK TV serta melaksanakan enam Jumpa Pers.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan I-2019 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan I-2019.

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Hingga triwulan I-2019 OJK telah memberikan **43** izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Total pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp18,54 miliar** kepada **15.235** nasabah yang terbentuk ke dalam **2.404 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank *partner* dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING tumbuh **12,53%** (*yoY*) menjadi Rp31,53 triliun dan **NPL gross 3,48%**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Sampai dengan triwulan I-2019, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **77.703 ha** dengan jumlah petani **129.044 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp13,98 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **21.130 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **10.999 peternak** dengan realisasi klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar **Rp132 juta**.



Asuransi Nelayan

Asuransi yang mewajibkan nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut. Sampai triwulan I-2019 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **2.996 orang nelayan** dari **27 provinsi** dengan realisasi premi **Rp948,93 juta**.



Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil

Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha budidaya komoditas ikan kecil seperti udang, ikan bandeng, nila, patin dan polikultur karena penyakit/bencana alam. Luas lahan Asuransi Usaha Budidaya ikan kecil yang terdaftar sampai dengan triwulan I-2019 adalah sebesar **10.220 ha** dengan premi sebesar **Rp2,99 miliar**. Nilai klaim sampai dengan triwulan I-2019 adalah sebesar **Rp950,71 juta** di **12 provinsi**.



Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
314 Bank



Jumlah Rekening
17.230.308



Total Saldo
Rp6,408 triliun



Perjanjian Kerjasama
330.475



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

- Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar **Rp661 miliar**.
- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah lima dengan dana kelolaan sebesar **Rp3,26 triliun** atau turun sebesar **2,40% (qtq)**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar **10,09%** menjadi **Rp23,69 triliun** dan jumlah kontrak RDPT naik menjadi **64 RDPT**.
- Jumlah kontrak KIK EBA tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,98 triliun**.
- KIK-DIRE tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan **Rp0,92 triliun**.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar **1,62%** menjadi 502 KPD dengan dana kelolaan sebesar **Rp214 triliun** atau meningkat sebesar **4,51%**.
- Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) tetap sebanyak empat KIK dengan dana kelolaan sebesar **Rp0,64 triliun**.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan I-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp548,9 miliar**.



Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Jumlah Bank Penyelenggara
30 Bank



Jumlah Agen
1.073.134 Agen



Jumlah Outstanding Rekening Nasabah
23.340.281 Nasabah



Jumlah Outstanding Tabungan
Rp2,51 triliun



Jumlah Provinsi Tempat Agen
34 Provinsi

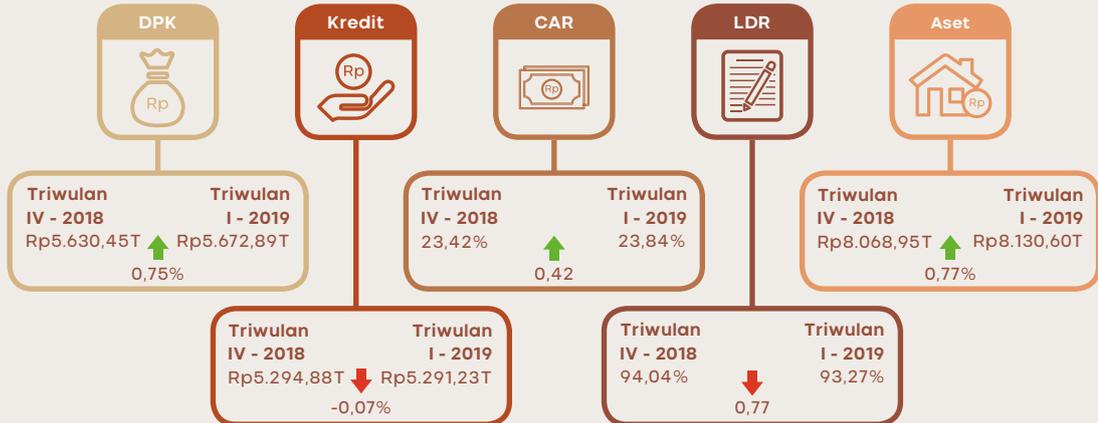


Jumlah Kab/Kota
510 Kab/Kota

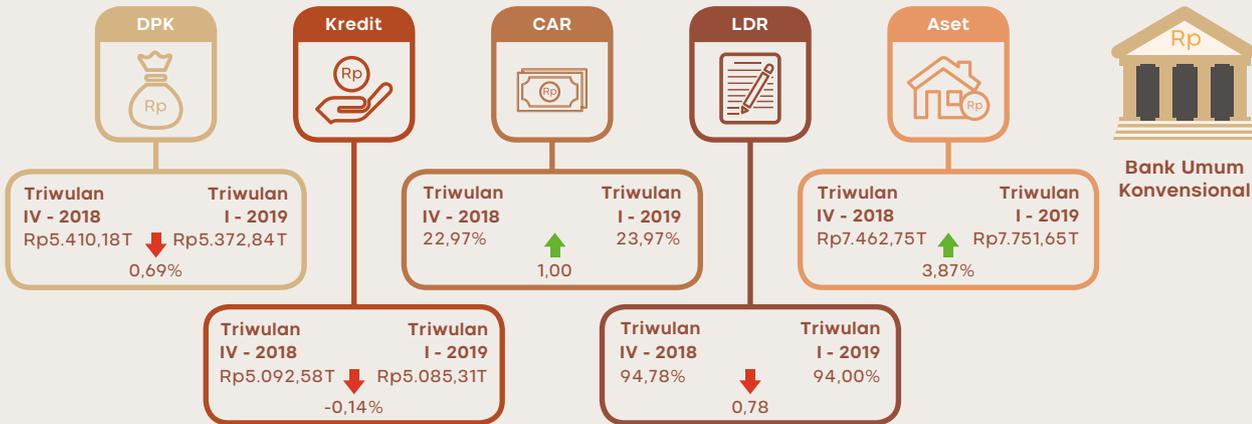
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



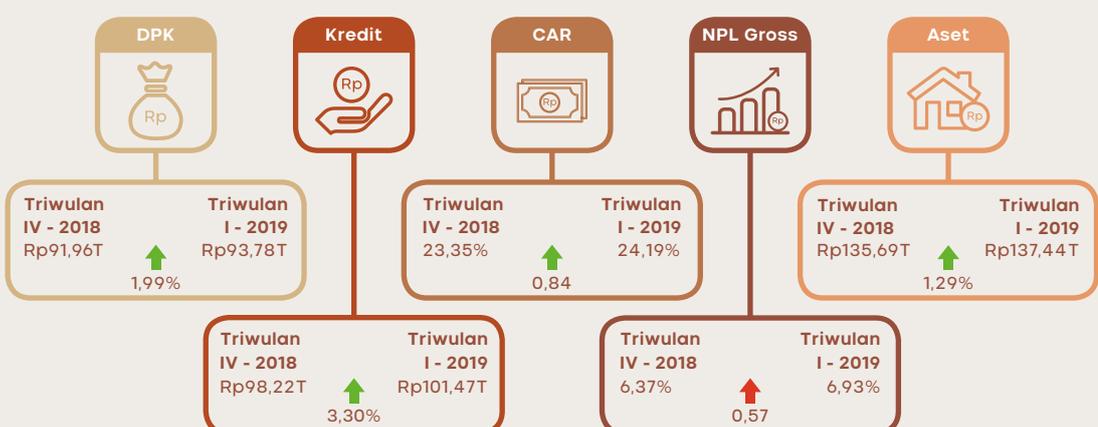
Bank Umum

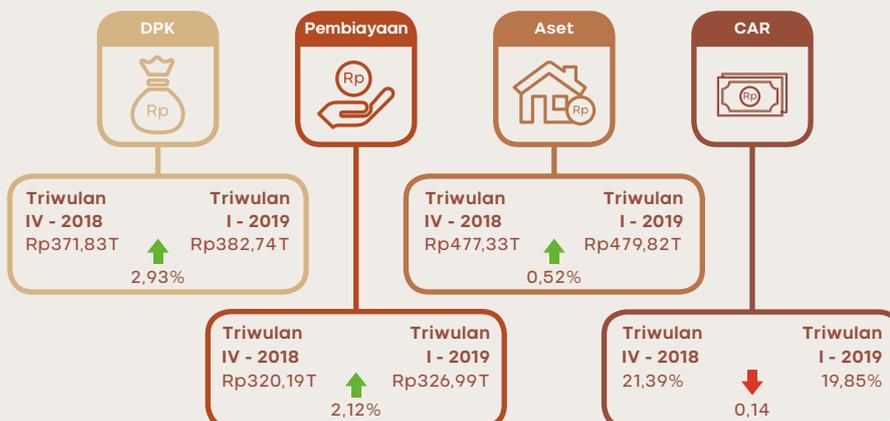
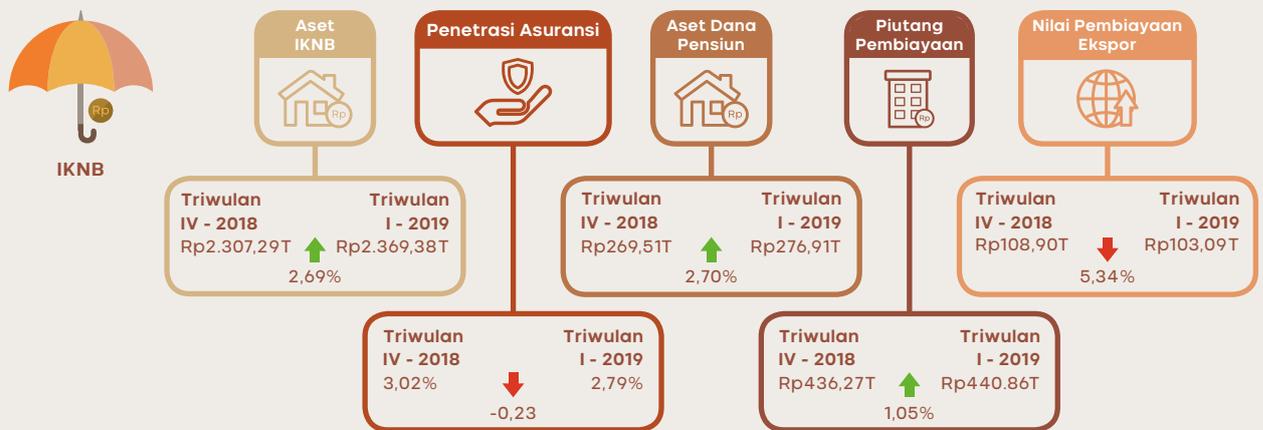


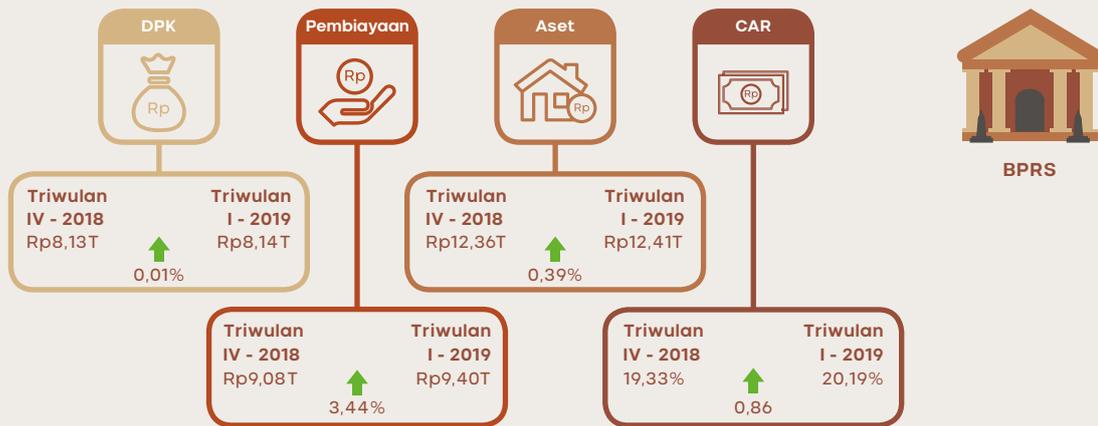
Bank Umum Konvensional



Bank Perkreditan Rakyat (BPR)









01

Tinjauan Industri
Sektor Jasa Keuangan



1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

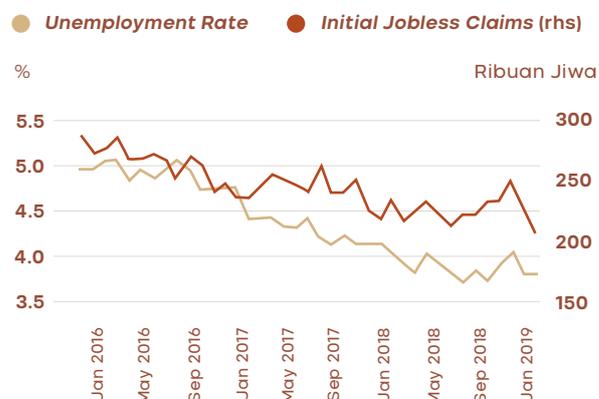
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Leading indicators triwulan I-2019

menunjukkan bahwa perekonomian global berada dalam tren melambat. IMF merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019, terutama untuk perekonomian negara maju. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan moneter bank sentral tahun 2019 akan menjadi lebih akomodatif. The Fed telah mengumumkan untuk tidak menaikkan suku bunga kebijakan *Federal Funds Rate* (FFR) di tahun 2019 dan ECB juga akan tetap mempertahankan kebijakan longgarnya. Hal ini demi mendorong perekonomian AS lebih lanjut, yang masih tumbuh solid pada triwulan I-2019 di atas ekspektasi pasar.

Amerika Serikat (AS) tumbuh solid pada triwulan I-2019, naik sebesar 3,2% (yoy) (triwulan IV-18: 3,0% yoy). Tingkat pertumbuhan ini jauh di atas ekpektasi pasar di rentang 2,3% - 2,5%. Akselerasi pertumbuhan ini terutama didorong oleh perbaikan kinerja perdagangan AS dan kenaikan pengeluaran investasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi AS ini masih melanjutkan tren naik sejak pertengahan 2016. Inflasi inti AS pada triwulan I-2019 tercatat sebesar 2,0%, sesuai dengan target inflasi 2,0% The Fed. Beberapa *leading indicator* menunjukkan sinyal perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi AS. Tingkat pengangguran triwulan I-2019 turun ke 3,8% (triwulan IV-2018: 3,9%). Penurunan tingkat pengangguran ini sejalan dengan pergerakan *initial jobless claims* yang turun ke 204 ribu di akhir Maret 2019 (akhir Desember 2018: 231 ribu). Indikator *Markit Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur menunjukkan perusahaan AS masih berada dalam fase ekspansi di level 52,4 (triwulan IV-18: 53,8). Pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) tanggal 19-20 Maret 2019, The Fed memberikan sinyal *dovish* dengan mengumumkan bahwa perekonomian AS telah mendekati *full employment* dengan inflasi yang terjaga stabil pada target 2,0%. Oleh karena itu, suku bunga kebijakan diumumkan tetap berada di rentang 2,25% - 2,5%. Rentang nilai tersebut akan dijaga hingga akhir tahun sesuai *Projection Materials* yang dirilis.

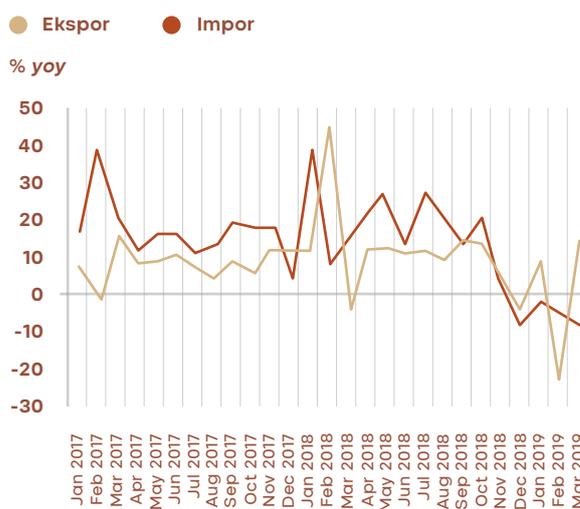
Grafik I - 1 ◊ Tingkat Pengangguran AS dan Tingkat *Initial Jobless Claims*



Sumber: US Bureau of Labor Statistics dan Department of Labor

Rilis data pertumbuhan Tiongkok terkini menunjukkan bahwa perekonomian Tiongkok tumbuh stabil pada triwulan I-2019 di level 6,4%, (triwulan IV-2018: 6,4% yoy). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bergerak relatif stabil di 2,3% yoy (Des 18: 1,9% yoy). Indikator PMI manufaktur kembali masuk ke zona ekspansi di 50,8 (triwulan IV-2018: 49,7). Kinerja eksternal Tiongkok juga mulai kembali membaik dengan ekspor naik 14,2% yoy (triwulan IV-18: -4,4% yoy) dan impor turun -7,6% yoy (triwulan IV-18: -7,6% yoy).

Grafik I - 2 ◊ Kinerja Eksternal Tiongkok

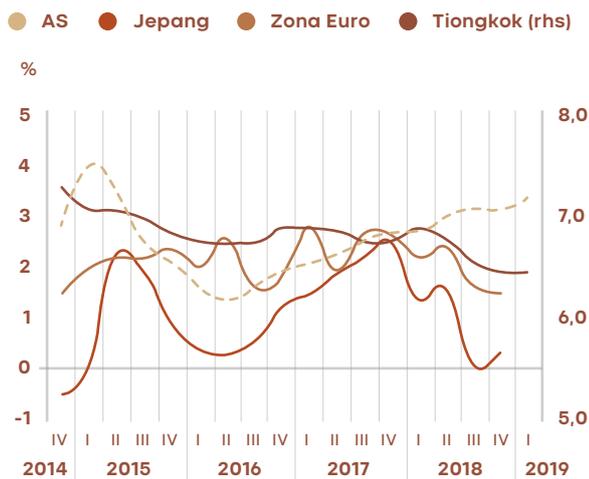


Sumber: CEIC

Perekonomian Jepang tumbuh di atas ekspektasi pasar sebesar 0,8% di triwulan I-2019 (triwulan IV-18: 0,3% yoy) dengan inflasi rendah di level 0,5% yoy (Des 18: 0,3% yoy). Pada siaran pers *Monetary Policy Meeting* 24-25 April 2019, Bank of Japan menyatakan akan terus mempertahankan posisi kebijakan moneternya guna mendorong inflasi secara bertahap mencapai ke target 2,0% yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan perekonomian Uni Eropa relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju lainnya. PDB Uni Eropa tumbuh melambat 1,4% yoy (triwulan IV-18: 1,4% yoy), dengan inflasi meningkat 1,4% yoy di triwulan I-2019 (Des 18: 1,5% yoy). Sejalan dengan hal tersebut, European Central Bank (ECB) mengumumkan rencananya untuk tidak menaikkan suku bunga kebijakannya hingga akhir 2019, sesuai dengan siaran pers hasil rapat *Governing Council* bulan April. Uni Eropa dan Jepang masih berada pada zona kontraksi yang diindasikan dari nilai PMI triwulan I-2019 yang masing-masing sebesar 47,9 dan 49,5 (Des 18: 51,4 dan 52,6).

Grafik I - 3 ◊ Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara



Sumber: CEIC

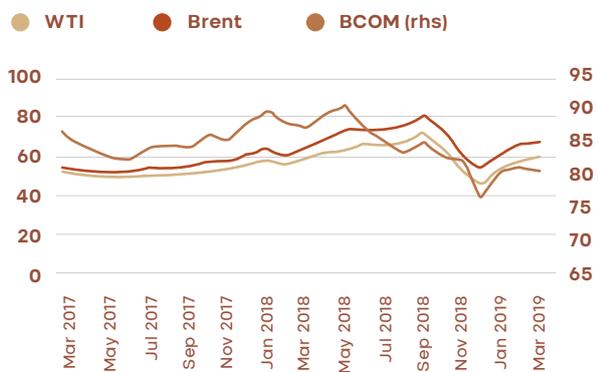
Grafik I - 4 ◊ Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara



Sumber: CEIC

Harga minyak dunia *West Texas Intermediate* (WTI) dan Brent triwulan IV-2018 masing-masing naik ke level USD46,5/brl (29,31% qta) dan USD54,6/brl (23,84% qta). Harga minyak mulai kembali naik sejak awal tahun sejalan dengan upaya pembatasan produksi oleh anggota *The Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga meningkat 5,7% qta. Namun demikian, laju kenaikan cenderung melambat seiring turunnya permintaan batu bara dan kelapa sawit yang disebabkan masih berlanjutnya perlambatan perekonomian Tiongkok dan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan biodiesel di Uni Eropa.

Grafik I - 5 ◊ Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya



Sumber: Bloomberg

Perekonomian global secara umum dalam tren melambat. Data terkini menunjukkan bahwa volume perdagangan dunia berkontraksi -0,38% yoy, sedangkan tingkat produksi pabrik tumbuh melambat 2,12% yoy. Data indikator *new orders of manufacturing* dari *Purchasing Manager Index* juga mulai turun menyentuh angka 50, sehingga kegiatan manufaktur ke depan diperkirakan akan stagnan.

Grafik I - 6 ◊ *Leading Indicator* Perekonomian Global



Sumber: IMF

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 kembali direvisi turun pada rilis *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* April 2019. Penurunan tingkat keyakinan dalam menjalankan bisnis menjadi sumber penyebab utama perlambatan perekonomian global di tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh eskalasi perang dagang AS-Tiongkok, pengetatan regulasi kredit Tiongkok, ketidakpastian perundingan Brexit, dan tekanan di perekonomian sebagian besar negara utama global. Pertumbuhan harga komoditas migas dan non-migas juga diperkirakan juga akan turun sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

Tabel I - 1 ◇ *World Economic Outlook IMF*

% yoy	2019	
	WEO Jan	WEO April
Global	3,5	3,3
Negara Maju	2,0	1,8
Negara Berkembang	4,5	4,4
Harga Minyak	-14,1	-13,4
Harga Komoditas Non Migas	-2,7	-0,2

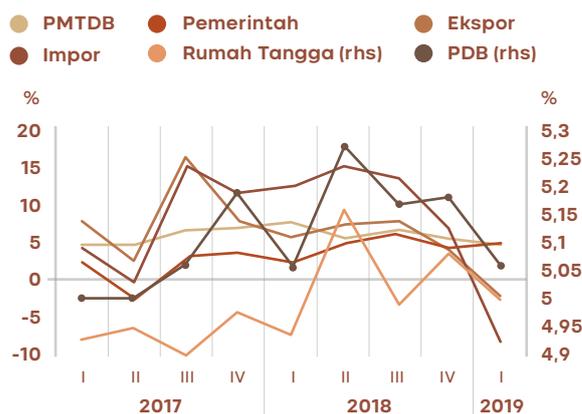
Sumber: IMF

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik pada triwulan I-2019 mencatat sejumlah perkembangan positif di tengah perlambatan ekonomi global. Perekonomian tumbuh solid dengan tingkat inflasi stabil pada rentang target inflasi yang ditetapkan. Neraca perdagangan pun mencatatkan surplus dalam dua bulan terakhir, setelah sebelumnya mengalami defisit berturut-turut di 2018.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I-2019 tercatat tumbuh positif sebesar 5,07% (yoy) (triwulan-I 18: 5,06% (yoy)). Angka pertumbuhan ini sedikit berada di bawah konsensus pasar sebesar 5,20%. Tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di 5,00% (yoy) (triwulan I-2018: 4,94% (yoy)). Tingkat investasi yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan utama tumbuh melambat di 5,02% (yoy) (triwulan I-2018: 7,94 yoy). Namun demikian, kinerja eksternal mencatatkan surplus untuk pertama kalinya karena impor yang berkontraksi lebih dalam dibandingkan ekspor. Pada triwulan berjalan, ekspor berkontraksi -2,7% yoy (triwulan I-2018: 5,94% (yoy)) dan impor berkontraksi -7,75% (yoy) (triwulan I-2018: 12,64% (yoy)).

Grafik I - 7 ◇ *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*



Sumber: BPS

Indikator sektor riil menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan akan tumbuh semakin solid. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona ekspansi di level 51,2 (triwulan IV-18: 51,2). Penjualan semen dan kendaraan bermotor bergerak *mixed* masing-masing naik sebesar 4,47% (yoy) dan -11,42% (yoy). Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Maret 2019 dalam tren meningkat dan tercatat berada pada level 8,05% (yoy). Kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I-2019 sebesar 8,65% (triwulan IV-2018: 6,19%).

Grafik I - 8 ◇ *Indeks Penjualan Riil SPE*

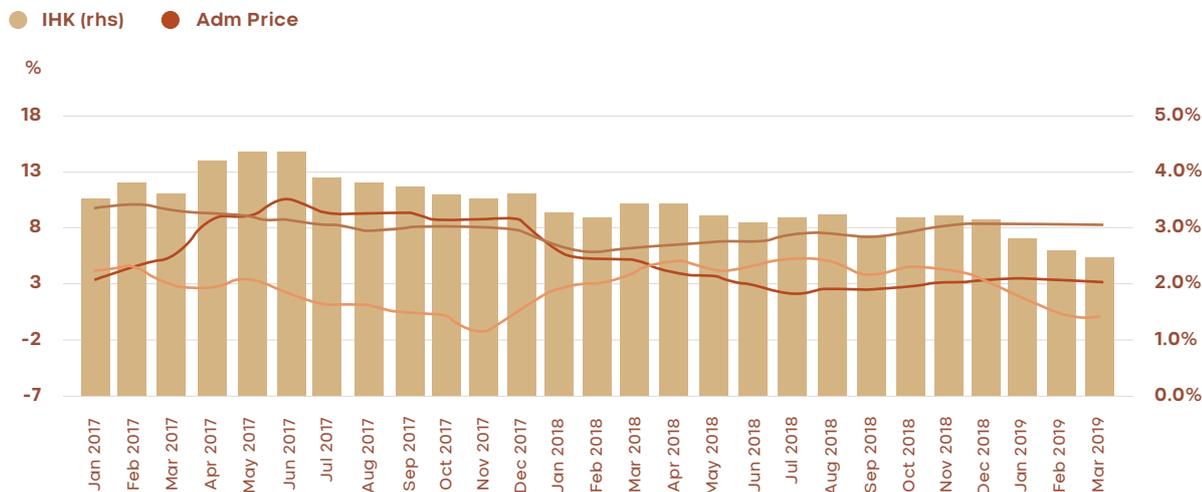


Sumber: Bank Indonesia

Inflasi triwulan I-2019 sedikit berada pada batas bawah kisaran rentang target inflasi 3,5±1% sebesar 2,48% (yoy) (Triwulan IV-2018: 3,13% (yoy)). Turunnya inflasi triwulan I-2019 terutama disebabkan karena kenaikan stabilnya harga pangan sepanjang tahun.

Harga pangan yang bergejolak di saat bersamaan hanya naik 0,16% yoy (Triwulan IV-2018: 3,39% (yoy)). Pertumbuhan harga pangan ini merupakan yang terendah sejak awal 2018.

Grafik I - 9 ◇ Tingkat Inflasi Indonesia



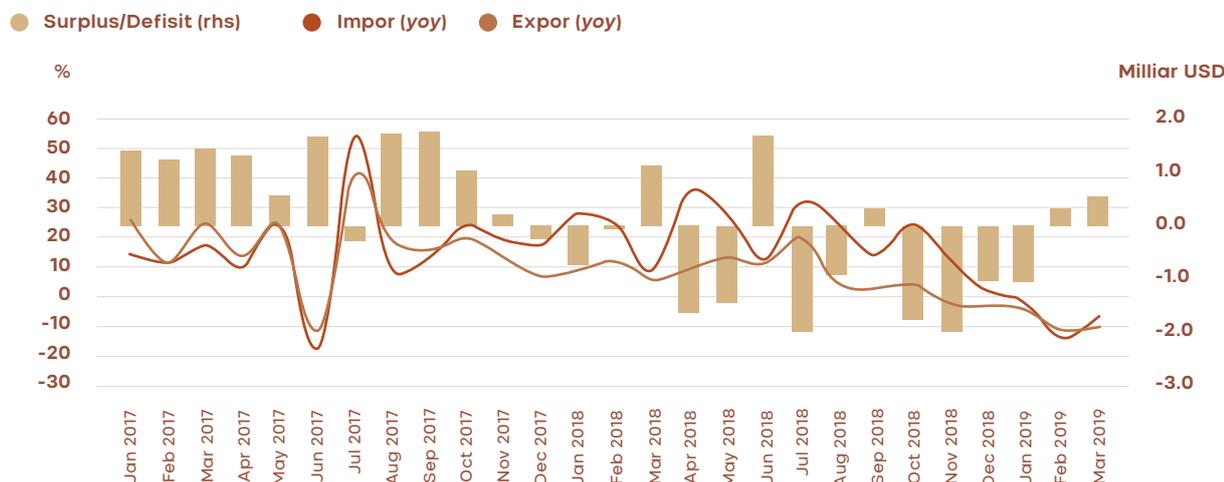
Sumber: BPS

Rilis data terkini menunjukkan defisit neraca transaksi berjalan triwulan IV-2018 kembali melebar. Defisit transaksi berjalan triwulan IV-2018 tercatat sebesar USD9,1 miliar (3,57% terhadap PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8,6 miliar (3,28% terhadap PDB). Peningkatan defisit tersebut terutama didorong oleh turunnya kinerja neraca perdagangan non migas. Kegiatan impor meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat. Namun demikian, kinerja neraca pendapatan primer dan jasa dapat menahan laju kenaikan defisit tersebut. Hal ini terutama didorong oleh pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih rendah dan kenaikan surplus jasa perjalanan. Secara tahunan, defisit transaksi

berjalan tahun 2018 masih berada dalam batas aman, sebesar USD31,1 miliar (2,98% terhadap PDB)

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia triwulan I-2019 mengalami defisit sebesar USD0,19 miliar (Tw I-2018: surplus USD0,31 miliar). Impor turun -6,76% yoy di Maret 2019 (Des 18: 2,02% yoy). Kontraksi impor ini merupakan yang pertama kali sejak Juni 2017. Hal ini disebabkan oleh penundaan rencana impor sebagian besar pengusaha karena menunggu hasil pemilihan umum. Namun demikian, ekspor juga ikut berkontraksi di level -10,01% yoy (Des 18: -3,10% yoy). Neraca migas menjadi penyumbang utama defisit sebesar USD1,34 miliar, sedangkan neraca non migas mencatat surplus sebesar USD1,15 miliar.

Grafik I - 10 ◇ Neraca Perdagangan Indonesia

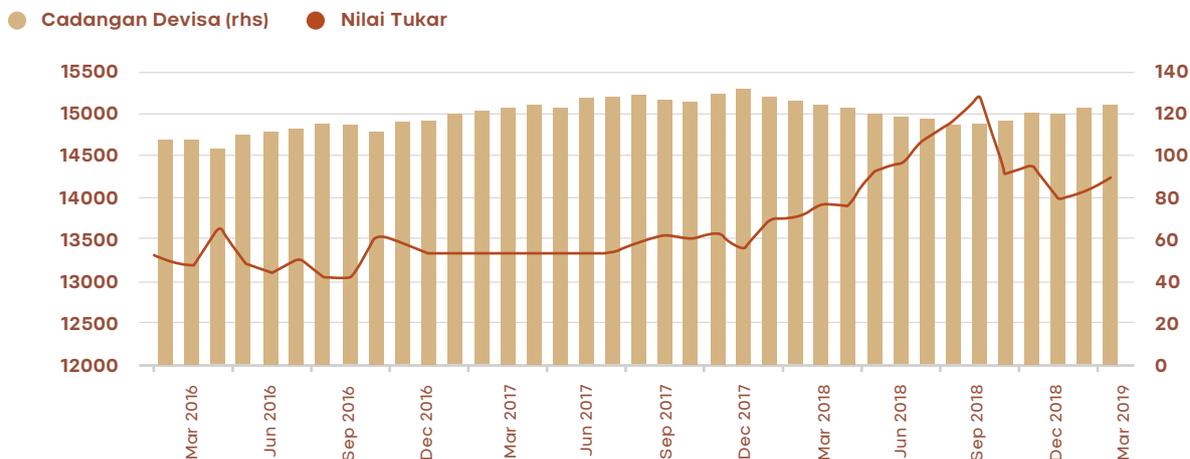


Sumber: BPS

Cadangan devisa Indonesia kembali meningkat seiring meningkatnya penerimaan devisa migas. Cadangan devisa tercatat naik ke USD124,54 miliar (Des 18: USD120,6 miliar). Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan tujuh bulan

impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor. Mata uang Rupiah terapresiasi ke Rp14.235/USD di akhir Maret sejalan dengan kenaikan cadangan devisa tersebut.

Grafik I - 11 ◇ Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa



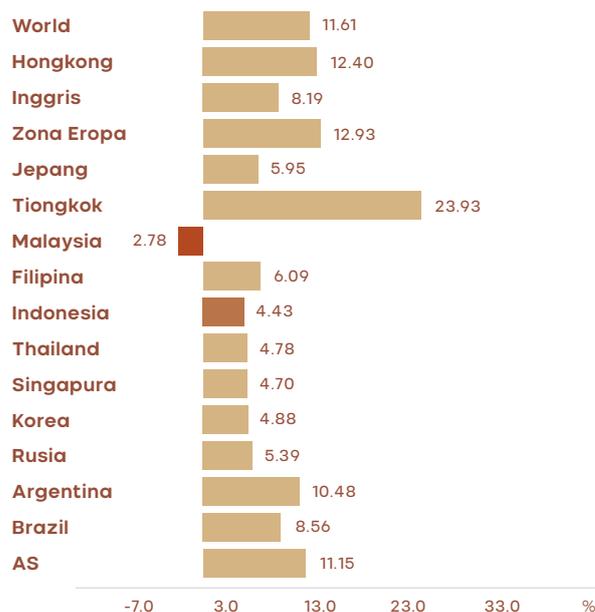
Sumber: Bank Indonesia dan Bloomberg

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan global menguat di triwulan I-2019. Hal ini terutama didorong oleh pernyataan The Fed dan *European Central Bank* (ECB) untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga kebijakannya di 2019. Namun demikian, peningkatan volatilitas pasar ke depan tetap perlu diwaspadai sesuai perkembangan kesepakatan perang tarif dagang AS-Tiongkok, hasil perundingan Brexit, dan perkembangan indikator perekonomian terkini.

Pasar saham global tumbuh solid dengan indeks MSCI *World* naik sebesar 11,61% *qtq*. Kenaikan tertinggi dialami oleh Tiongkok sebesar 23,93% *qtq* seiring ekspektasi pasar terhadap kesepakatan tarif dagang AS-Tiongkok. Harga saham perusahaan AS sendiri menjadi salah satu yang naik tertinggi pada triwulan ini. Pertumbuhan solid pendapatan perusahaan AS pasca kebijakan pemotongan tarif perusahaan 2018 dan perbaikan kinerja indikator sektor riil AS menjadi dua faktor pendorong utama. Pada saat yang bersamaan, IHSG tumbuh naik 4,43% (*qtq*) melanjutkan pertumbuhan solid di triwulan IV-2018 seiring masuknya dana non-residen ke pasar saham sebesar Rp12,13 triliun.

Grafik I - 12 ◇ Perkembangan Pasar Saham Global 29 Maret 2019 vs 31 December 2018



Sumber: Bloomberg

Pasar surat utang global triwulan I-2019 secara umum bergerak membaik. *Yield* surat utang tenor 10 tahun di berbagai negara turun setelah The Fed dan ECB mengumumkan tidak akan menaikkan suku bunga kebijakannya. Tren perbaikan *yield* ini diperkuat pula oleh tingkat inflasi global yang cenderung moderat. *Yield* surat utang Jepang turun 8,4 bps dan masih dalam zona negatif di akhir triwulan I-2019. Pada saat bersamaan, *yield* surat utang Indonesia turun 39,2 bps didorong oleh masuknya dana non-residen ke pasar SBN sebesar Rp73,87 triliun.

Tabel I - 2 ◇ Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global

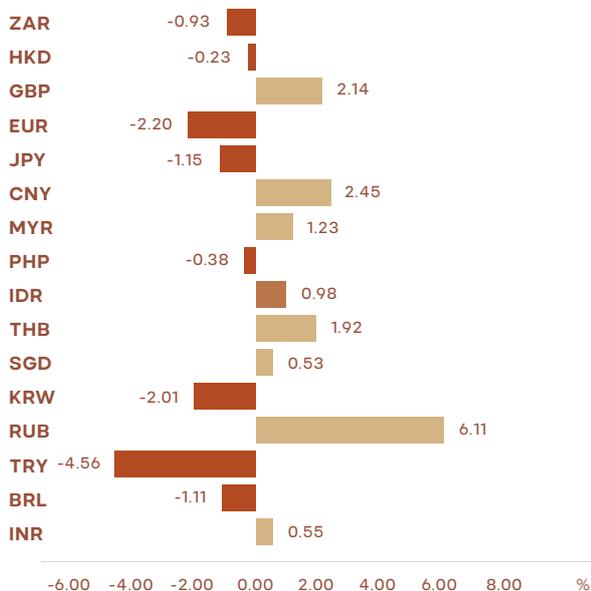
	Sep 18	Des 18	Mar 19	Δqtq (bps)
Indonesia	8,12	8,03	7,63	-39,2
Filipina	7,44	7,07	5,61	-146,1
Malaysia	4,07	4,07	3,77	-30,3
Thailand	2,80	2,48	2,43	-5,0
Tiongkok	3,63	3,31	3,07	-24,1
Jepang	0,13	0,00	-0,08	-8,4
Inggris	1,57	1,28	1,00	-27,7
AS	3,00	2,83	2,57	-26,0

Sumber: Bloomberg

Pergerakan nilai tukar global triwulan I-2019 relatif stabil. Mata uang Rupiah sendiri terapresiasi 0,98% *qtq* ke Rp14.235/USD. Menguatnya nilai tukar Rupiah ini terutama didorong oleh masuknya dana non-residen yang kemudian meningkatkan supply valas. Investor masih melihat Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi seiring suku bunga kebijakan Indonesia dan AS yang diekspektasikan tidak akan berubah di tahun ini dan stabilnya inflasi domestik di triwulan I-2019.

Grafik I - 13 ◇ Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

29 Maret 2019 vs 31 Desember 2018

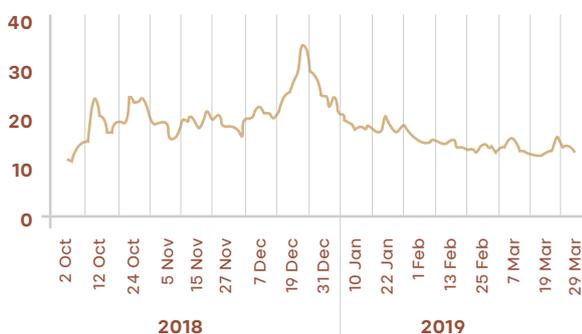


Sumber: Reuters

Pasar keuangan global triwulan I-2019 relatif lebih stabil dengan triwulan sebelumnya. Nilai rata-rata index VIX pada triwulan I-2019 naik ke 16,21 (Tw IV-18:

19,33). Refleksi penurunan volatilitas ini dapat dilihat dari membaiknya hampir seluruh harga indeks saham dunia di triwulan yang sama.

Grafik I - 14 ◇ Indeks VIX



Sumber: Bloomberg

Di kawasan ASEAN-5, risiko jangka menengah triwulan I-2019 terpantau turun. Besar credit default swap (CDS) tenor 5 tahun rata-rata turun sebesar 31,4 *bps* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tren penurunan ini relatif sejalan dengan pergerakan VIX Index. Penurunan tertinggi dialami oleh Indonesia sebesar 45,7 *bps*, sedangkan kenaikan terendah dialami Thailand sebesar 1,4 *bps*.

Tabel I - 3 ◇ Perkembangan Indikator CDS Jangka Menengah Negara ASEAN-5

	Sep 2018	Des 2018	Mar 2019	Δqtq (bps)
Indonesia	130,1	137,5	91,8	-45,7
Filipina	76,70	88,2	58,3	-29,8
Malaysia	92,6	109,8	65,9	-43,9
Vietnam	157,3	172,2	136,0	-36,2
Thailand	41,3	44,0	42,6	-1,4



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Tabel I - 4 ◇ Kondisi Bank Umum

Indikator	2018		2019	qta		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019
Total Aset (Rp Miliar)	7.429.891	8.068.346	8.130.604	+3,85%	+0,77%	+8,79%	+9,43%
Kredit (Rp Miliar)	4.743.237	5.294.882	5.291.231	+3,41%	-0,07%	+8,54%	+11,55%
DPK (Rp Miliar)	5.293.098	5.630.448	5.672.886	+2,70%	+0,75%	+7,66%	+7,18%
- Giro (Rp Miliar)	1.233.539	1.315.034	1.316.606	+0,05%	+0,12%	+7,64%	+6,73%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.642.999	1.825.259	1.749.477	+5,86%	-4,15%	+10,30%	+6,48%
- Deposito (Rp Miliar)	2.415.681	2.490.155	2.606.803	+1,89%	+4,68%	+5,90%	+7,91%
CAR (%)	22,71	23,42	23,84	56	42	3	113
ROA (%)	2,50	2,50	2,56	4	6	5	6
NIM/NOM (%)	4,93	5,00	4,74	(1)	(26)	(30)	(19)
BOPO (%)	79,22	78,33	83,08	(117)	475	(146)	386
NPL/NPF Gross (%)	2,75	2,37	2,51	(29)	15	(29)	(24)
NPL/NPF Net (%)	1,25	1,04	1,15	(18)	11	(9)	(10)
LDR/LFR (%)	89,61	94,04	93,27	65	(77)	73	366

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi BUK cukup solid tercermin dari peningkatan CAR menjadi sebesar 23,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Intermediasi BUK juga mengalami pertumbuhan tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 11,69% (yoy). Di sisi lain, terdapat perlambatan pertumbuhan

DPK sebesar 7,17% (yoy). Kondisi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK, mengakibatkan LDR naik menjadi 94,00%. Selain itu, risiko kredit BUK secara gradual membaik, terlihat dari turunnya NPL gross dan NPL net yang masing-masing menjadi 2,47% dan 1,11%.

Tabel I - 5 ◇ Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Mar 2018	Des 2018	Mar 2019	Des 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019
Total Aset (Rp Miliar)	7.135.601	7.751.655	7.812.547	+3,87%	+0,79%	+8,58%	+9,49%
Kredit (Rp Miliar)	4.553.173	5.092.584	5.085.310	+3,47%	-0,14%	+8,62%	+11,69%
DPK (Rp Miliar)	5.048.278	5.372.841	5.410.178	+2,71%	+0,69%	+7,33%	+7,17%
- Giro (Rp Miliar)	1.207.182	1.287.480	1.281.672	+0,31%	-0,45%	+7,41%	+6,17%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.568.534	1.737.216	1.663.094	+5,71%	-4,27%	+10,05%	+6,03%
- Deposito (Rp Miliar)	2.272.562	2.348.146	2.465.412	+1,91%	+4,99%	+5,49%	+8,49%
CAR (%)	22,65	22,97	23,97	7	100	(23)	132
ROA (%)	2,55	2,55	2,60	5	5	5	5
NIM (%)	5,07	5,14	4,86	(0)	(28)	(32)	(20)
BOPO (%)	78,76	77,86	82,92	(127)	506	(139)	416
NPL Gross (%)	2,67	2,33	2,47	(28)	14	(30)	(20)
NPL Net (%)	1,20	1,00	1,11	(17)	11	(9)	(8)
LDR (%)	90,19	94,78	94,00	70	(79)	107	380

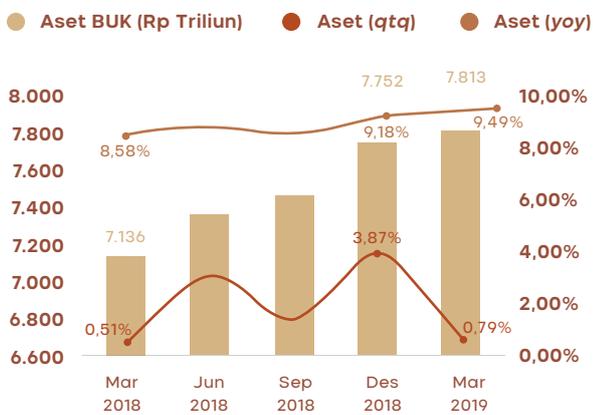
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Maret 2019

A. Aset

Selama triwulan I-2019, total aset BUK tumbuh 9,49% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan modal. Dilihat dari kelompok bank, pertumbuhan aset utamanya terjadi pada kelompok bank BUMN dan KCBA.

Secara triwulanan pertumbuhan aset BUK tumbuh sebesar 0,79% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,87% (qtq). Hal tersebut didorong oleh penurunan aset pada kelompok bank BUMN yang berkontraksi -1,14% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (qtq). Secara umum, aset perbankan Indonesia terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 48,88% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,83% dari aset perbankan.

Grafik I - 15 ◇ Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, Maret 2019

Tabel I - 6 ◇ Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2014	45,94	79,79
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar 19	48,88	80,83

Sumber: OJK, olah

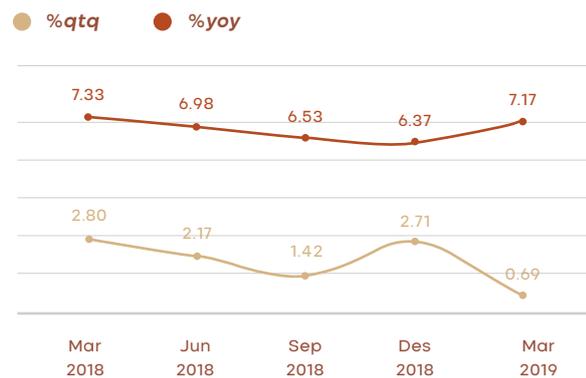
B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BUK tumbuh melambat 7,17% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,33% (yoy). Perlambatan terdapat pada giro dan tabungan masing-masing tumbuh 6,17% (yoy) dan 6,03% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya tumbuh 7,41%

(yoy) dan 10,05% (yoy). Di sisi lain, deposito tercatat tumbuh 8,49% (yoy). Secara umum, pengumpulan DPK masih terpusat di pulau Jawa, yaitu sebesar 77,99% dari total DPK BUK perbankan Indonesia, sebesar 50,86% di antaranya berpusat di DKI Jakarta.

Secara triwulanan DPK BUK tumbuh 0,61% (qtq), melambat triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,17% (qtq). Perlambatan DPK triwulanan didorong oleh berkontraksinya pertumbuhan giro dan tabungan, masing-masing -0,45% (qtq) dan -4,27% (qtq). Di sisi lain, deposito tercatat tumbuh 4,99% (qtq).

Grafik I - 16 ◇ Tren Pertumbuhan DPK

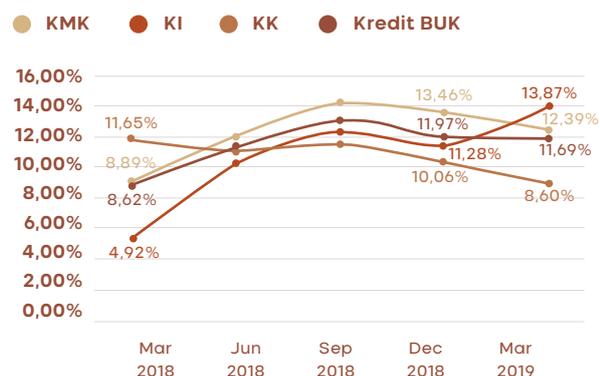


Sumber: SPI, Maret 2019

C. Kredit

Pada triwulan I-2019, kredit BUK tumbuh 11,69% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,62% (yoy). Peningkatan tersebut mengindikasikan perekonomian yang mulai membaik, tercermin dari tumbuhnya Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing 12,39% (yoy) dan 13,87% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,89% (yoy) dan 4,92% (yoy). Di sisi lain, Kredit Konsumsi (KK) tercatat mengalami perlambatan yaitu tumbuh 8,60% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,65% (yoy).

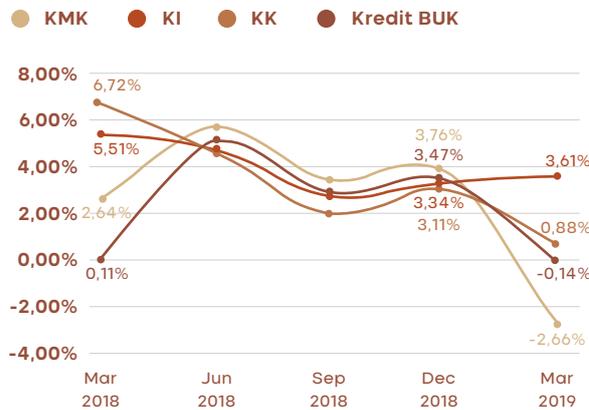
Grafik I - 17 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2019

Secara triwulanan kredit berkontraksi -0,14% (qta) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,47% (qta). Hal tersebut utamanya didorong oleh berkontraksinya KMK pada periode ini. Selain itu, KK juga tercatat berkontraksi. Perlambatan kredit di awal tahun merupakan siklus yang umum terjadi pada kredit perbankan.

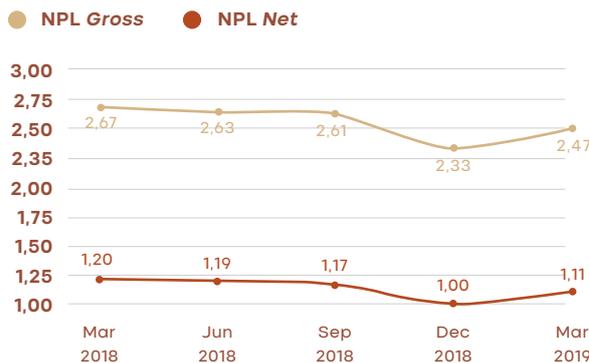
Grafik I - 18 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qta)



Sumber: SPI, Maret 2019

Di tengah pertumbuhan kredit, kualitas kredit secara terus menerus menunjukkan tren perbaikan. Rasio NPL gross BUK turun 20 bps (yoy) menjadi 2,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,67%. Rasio NPL KMK dan KI masing-masing turun 20 bps dan 48 bps, menjadi 3,06% dan 2,24%. Di sisi lain, rasio NPL KK tercatat meningkat 3 bps menjadi 1,70%.

Grafik I - 19 ◇ Tren NPL (%)



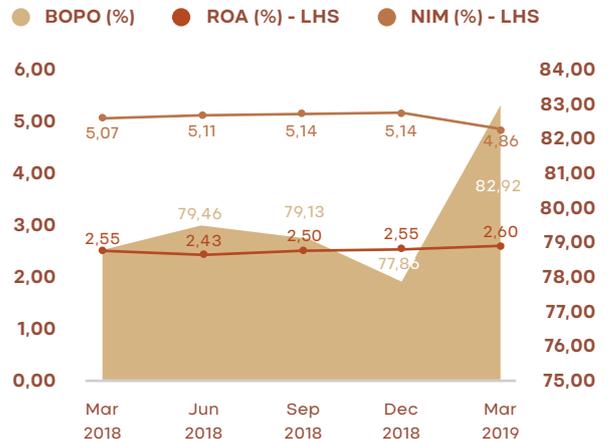
Sumber: SPI, Maret 2019

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan masih terjaga tercermin dari naiknya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,55% menjadi 2,60%. Di sisi lain, peningkatan beban bunga dan kerugian transaksi spot dan derivatif berimbas pada naiknya rasio BOPO dari 78,76% menjadi 82,92%.

Sementara itu, kenaikan suku bunga deposito mendorong pertumbuhan beban bunga DPK lebih tinggi dari pendapatan kredit. Di sisi lain, rata-rata total aset produktif perbankan tumbuh lebih tinggi dari pendapatan bunga bersih. Hal tersebut menyebabkan NIM perbankan turun dari 5,07% menjadi 4,86%.

Grafik I - 20 ◇ Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, Maret 2019

E. Permodalan

Pada triwulan I-2019 kondisi permodalan BUK masih solid, meningkat dari tahun sebelumnya dengan CAR menjadi 23,97%. Peningkatan CAR dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan modal yang didorong oleh melambatnya laba tahun berjalan. Di sisi lain, pertumbuhan ATMR melambat sebesar 7,21% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,59% (yoy). Penurunan terbesar terjadi pada ATMR Pasar, seiring dengan meredanya volatilitas nilai tukar pada periode laporan.



1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Maret 2019, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, meskipun masih dibayangi DPK yang tumbuh melambat. Ketahanan

BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL).

Tabel I - 7 ◊ Kondisi Umum BPR

Indikator	2018		2019	qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019
Total Aset (Rp Milyar)	127.528	135.693	137.440	+3,18%	+1,29%	+11,02%	+7,77%
Kredit (Rp Milyar)	91.655	98.220	101.465	+2,53%	+3,30%	+8,67%	+10,70%
DPK (Rp Milyar)	86.361	91.956	93.782	+3,62%	+1,99%	+11,85%	+8,59%
- Tabungan (Rp Milyar)	26.999	29.491	29.609	+5,57%	+0,40%	+14,40%	+9,66%
- Deposito (Rp Milyar)	59.362	62.465	64.173	+2,72%	+2,73%	+10,73%	+8,11%
CAR (%)	24,10	23,35	24,19	60	84	38	9
ROA (%)	2,68	2,48	2,42	(1)	(6)	(8)	(26)
BOPO (%)	80,59	80,74	81,92	(50)	118	(22)	133
NPL Gross (%)	6,81	6,37	6,94	(79)	57	13	13
NPL Net (%)	5,10	4,74	5,28	(63)	54	21	18
LDR (%)	75,43	76,54	77,36	(40)	82	(157)	193
CR (%)	16,93	18,84	15,01	266	(383)	167	(192)

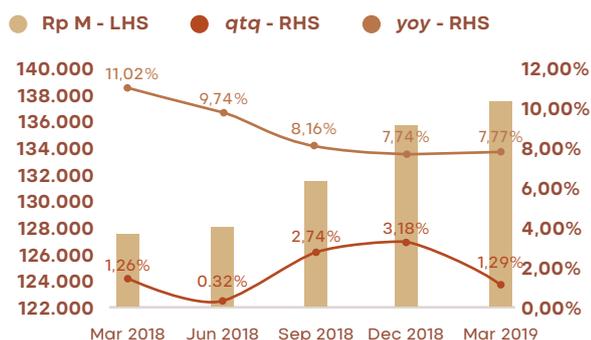
Sumber: SPI, Maret 2019

A. Aset

Aset BPR pada Maret 2019 tumbuh 7,77% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,02% (yoy). Melambatnya pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya DPK BPR.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (57,31%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 23,34%. Dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 59,14% (yoy), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 0,13% dari total aset BPR. Sementara peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 11,02% (yoy).

Grafik I - 21 ◊ Tren Aset BPR

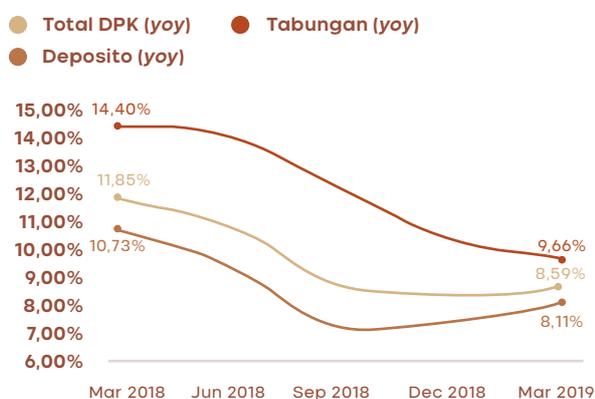


Sumber: SPI BPR, Maret 2019

B. DPK

DPK BPR pada Maret 2019 tumbuh 8,59% (yoy) menjadi Rp93,78 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2018 sebesar 11,85% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen, baik pada deposito dan tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 8,11% (yoy) (Mar'18=10,73%, yoy) dan 9,66% (yoy) (Mar'18=14,40%, yoy). Dilihat dari persinya, deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 68,43%, diikuti tabungan sebesar 31,57%.

Grafik I - 22 ◊ Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



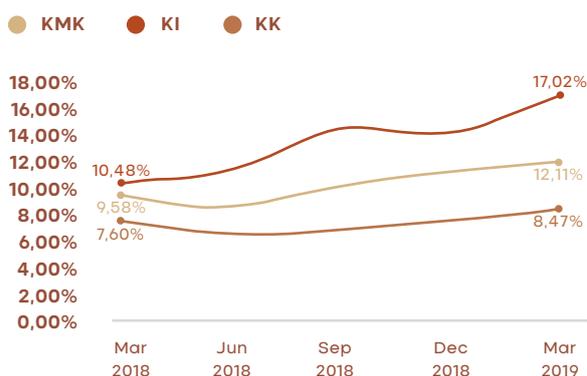
Sumber: SPI BPR, Maret 2019

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Maret 2019 tumbuh 10,70% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,55% (yoy). Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit produktif, yaitu sebesar 52,61%. Sedangkan porsi kredit untuk tujuan konsumsi tercatat sebesar 47,39%. Kenaikan kredit ditopang oleh semua jenis penggunaan kredit utamanya kredit produktif, yaitu KMK dan KI yang masing-masing tumbuh sebesar 12,11% (yoy) dan 17,02% (yoy). Selain itu, KK BPR juga tumbuh sebesar 8,47% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,96%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,67%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas (4.732 BPR) berada di wilayah Jawa (75,15%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,10% dari total BPR Nasional (132 BPR).

Grafik I - 23 ◊ Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

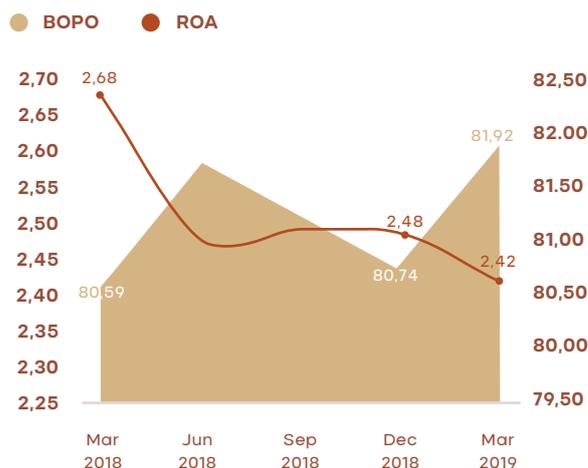


Sumber: SPI BPR, Maret 2019

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Maret 2019 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari turunnya ROA menjadi 2,42% yang disebabkan utamanya oleh melambatnya laba operasional yang hanya tumbuh 1,71% (yoy). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 133 bps menjadi 81,92%. Perlambatan laba BPR terjadi seiring dengan meningkatnya beban bunga kontraktual deposito yang tumbuh 11,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,85% (yoy).

Grafik I - 24 ◊ Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, Maret 2019

E. Permodalan

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR tercatat meningkat dari 24,10% pada Maret 2018 menjadi 24,19%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan I-2019, kredit UMKM tumbuh 11,36% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,95% (yoy). Peningkatan kredit UMKM masih ditopang oleh penyaluran ke sektor perdagangan besar, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke sektor pertambangan dan penggalian tumbuh tertinggi yaitu sebesar 26,25% (yoy).

Kualitas kredit UMKM juga membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 4,47% menjadi 3,58%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 3,32%.

Tabel I - 8 ◇ Konsentrasi Penyaluran UMKM

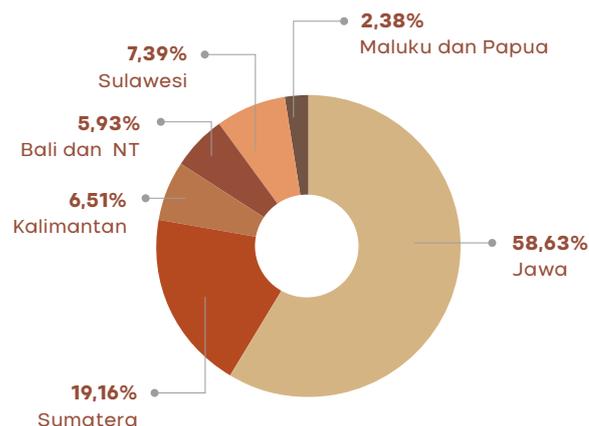
Indikator	Nominal (Rp M)			Porsi	qta		yoy	
	Mar 2018	Des 2018	Mar 2019	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	462.998	499.248	508.620	51,96%	2,50%	1,88%	6,79%	9,85%
NPL	18.914	17.170	18.552	3,65%	-9,44%	8,05%	-1,10%	-1,91%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	90.551	99.028	99.130	10,13%	4,63%	0,10%	7,61%	9,47%
NPL	3.534	3.292	3.551	3,58%	-9,56%	7,87%	-0,06%	0,48%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	81.509	89.560	92.741	9,47%	6,77%	3,55%	19,91%	13,78%
NPL	2.592	2.073	2.354	2,54%	-7,00%	13,56%	-10,37%	-9,18%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	3.457	4.307	4.513	0,46%	48,98%	4,78%	25,75%	30,55%
NPL	708	135	150	3,32%	-9,06%	6,89%	11,61%	-22,39%
Lainnya								
Baki Debet	240.468	277.829	273.867	27,98%	8,13%	-1,43%	13,97%	13,89%
NPL	13.524	9.751	10.423	3,81%	-9,06%	6,89%	11,61%	-22,93%
Baki Debet UMKM	878.983	969.972	978.871		4,81%	0,92%	9,95%	11,36%
NPL UMKM	39.272	32.421	35.030	3,58%	-9,12%	8,05%	3,87%	-10,80%

Sumber: SPI, Maret 2019

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,63%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,21%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Sulawesi Barat dan Maluku yang tumbuh masing-masing 25,39% (yoy) dan 23,74% (yoy).

Grafik I - 25 ◇ Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Maret 2019

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,73%) dan BUSN (34,29%). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit UMKM

KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar 24,62% (yoy), diikuti pertumbuhan kredit UMKM BUMN sebesar 12,26% (yoy).

Tabel I - 9 ◇ Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qta		yoy	
	Mar 2018	Des 2018	Mar 2019		Des 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019
BUMN	503.402	551.935	565.123	57,73%	3,56%	2,39%	10,90%	12,26%
BUSN	305.460	338.455	335.700	34,29%	7,84%	-0,81%	8,48%	9,90%
BPD	62.705	70.089	68.805	7,03%	-1,22%	-1,83%	10,19%	9,73%
KCBA dan Campuran	7.416	9.493	9.242	0,94%	24,03%	-2,64%	6,05%	24,62%
Total UMKM	878.983	969.972	978.871	100%	4,81%	0,92%	9,95%	11,36%

Sumber: SPI, Maret 2019

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,38% dan

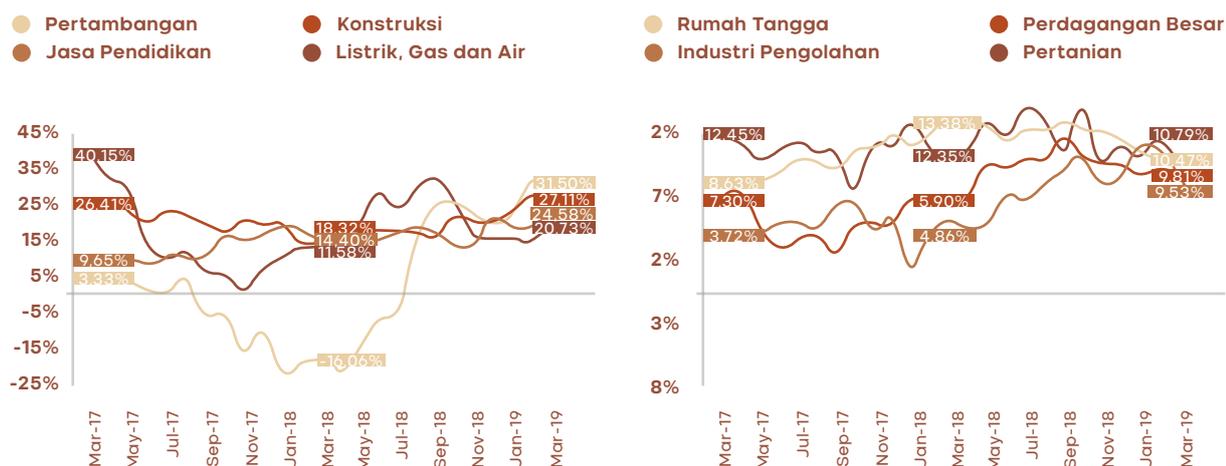
16,42%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,72% terhadap total kredit.

Tabel I - 10 ◇ Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qta		yoy		Porsi
		Mar 2018	Des 2018	Mar 2019	Des 2018	Mar 2019	Mar 2018	Mar 2019	
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	319,60	354,88	354,08	4,82%	-0,23%	12,35%	10,79%	6,69%
2.	Perikanan	10,64	12,14	12,34	5,36%	1,70%	8,74%	16,01%	0,23%
3.	Pertambangan dan Penggalian	104,75	70,089	68,805	0,53%	-0,12%	-16,06%	31,50%	2,60%
4.	Industri Pengolahan	793,33	899,09	868,89	3,47%	-3,36%	4,86%	9,53%	16,42%
5.	Listrik, Gas, dan Air	154,24	170,19	186,86	-1,90%	9,80%	11,58%	21,15%	3,53%
6.	Konstruksi	254,71	316,10	323,78	8,67%	2,43%	18,32%	27,11%	6,12%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	885,84	975,99	972,70	1,51%	-0,34%	5,90%	9,81%	18,38%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	97,37	99,75	100,37	2,00%	0,62%	3,14%	3,08%	1,90%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	192,10	217,32	213,97	3,45%	-1,54%	12,29%	11,38%	4,04%
10.	Perantara Keuangan	211,49	244,49	232,26	8,21%	-5,00%	7,72%	9,82%	4,39%
11.	Real Estate	225,52	248,22	253,84	4,13%	2,26%	9,02%	12,56%	4,80%
12.	Administrasi Pemerintahan	21,98	25,07	26,01	1,92%	3,74%	-2,91%	18,31%	0,49%
13.	Jasa Pendidikan	10,17	12,32	12,66	9,76%	2,77%	14,40%	24,58%	0,24%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,80	22,70	23,12	11,92%	1,84%	19,52%	16,76%	0,44%
15.	Jasa Kemasyarakatan	70,72	79,91%	81,27	6,24%	1,70%	20,89%	14,93%	1,54%
16.	Jasa Perorangan	2,70	2,72	2,73	0,86%	0,69%	2,30%	1,14%	0,05%
17.	Badan Internasional	0,15	0,17	0,17	28,99%	-0,62%	-20,40%	13,00%	0,00%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	3,49	2,26	1,59	-11,27%	-0,62%	45,69%	-54,34%	0,03%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.136,12	1.237,82	1.254,41	3,68%	1,34%	13,38%	10,41%	23,71%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	228,53	235,84	232,42	0,20%	-1,45%	3,01%	1,70%	4,39%
Industri		4.743	5.295	5.291	3,41%	-0,07%	8,54%	11,55%	100%

Sumber: SPI, Maret 2019

Grafik I - 26 ◇ Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan I-2019 tumbuh 11,55% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,54% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kredit seiring dengan masih kuatnya konsumsi domestik.

Dilihat dari pertumbuhannya, sektor pertambangan dan penggalan mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 31,50% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -16,06% (yoy). Pertumbuhan kredit di semua subsektor pertambangan mengalami peningkatan, namun tingginya pertumbuhan di sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh 77,44% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi sangat dalam -32,75% (yoy). Secara umum, pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan tersebut sesuai dengan harga minyak dalam satu tahun terakhir yang cenderung stabil dan mulai mengalami peningkatan sejak awal tahun 2019. Penyaluran di sektor ini masih didominasi oleh Bank BUMN.

Pada periode laporan, kredit ke sektor konstruksi juga mencatat pertumbuhan kredit yang tinggi, yaitu sebesar 27,11% (yoy), seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil utamanya dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 82,22% (yoy). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah untuk membangun jalan tol 1.070 km pada tahun 2019, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah serta efisiensi waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik.

Sektor jasa pendidikan juga masih tumbuh tinggi, 24,58% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil (0,23%). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh tingginya kredit pada sub sektor jasa pendidikan dasar yang tumbuh 40,87% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi pada jasa pendidikan dasar didorong oleh penyaluran yang besar dari bank BUMN. Selain itu, sub sektor jasa pendidikan tinggi juga tumbuh 32,54% (yoy).

Selain itu, sektor listrik, gas dan air juga tumbuh cukup baik sebesar 3,38% (yoy), utamanya dari ketenagalistrikan lainnya. Hal ini sesuai dengan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang masih berjalan selama periode 2015 – 2019, dimana kebutuhan investasi untuk pengembangan sektor kelistrikan sangat besar, baik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun *Independent Power Producer* (IPP). Pembiayaan ke sektor ini dari perbankan dilakukan secara bilateral (bank langsung kepada debitur di sektor ini) maupun secara sindikasi.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini penyaluran kredit perbankan Indonesia masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,71%) yang tumbuh 10,41% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,38% (yoy). Kredit sektor ini utamanya disalurkan untuk subsektor kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan kendaraan bermotor yang pada periode ini masing-masing tumbuh 12,85% (yoy) dan 9,46% (yoy). Selama 1 tahun terakhir, kredit subsektor kepemilikan rumah tinggal memiliki tren peningkatan, di sisi lain, kredit subsektor kepemilikan kendaraan bermotor justru menunjukkan tren perlambatan.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,38%). Kredit di sektor ini juga mencatatkan pertumbuhan 9,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 5,90% (yoy). Pertumbuhan sektor ini utamanya berasal dari perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor makanan, minuman dan tembakau – utamanya beras yang masih tumbuh 30,32% (yoy), meskipun mulai menunjukkan tren perlambatan.

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,42% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 9,53% (yoy), meningkat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,86% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,69% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring

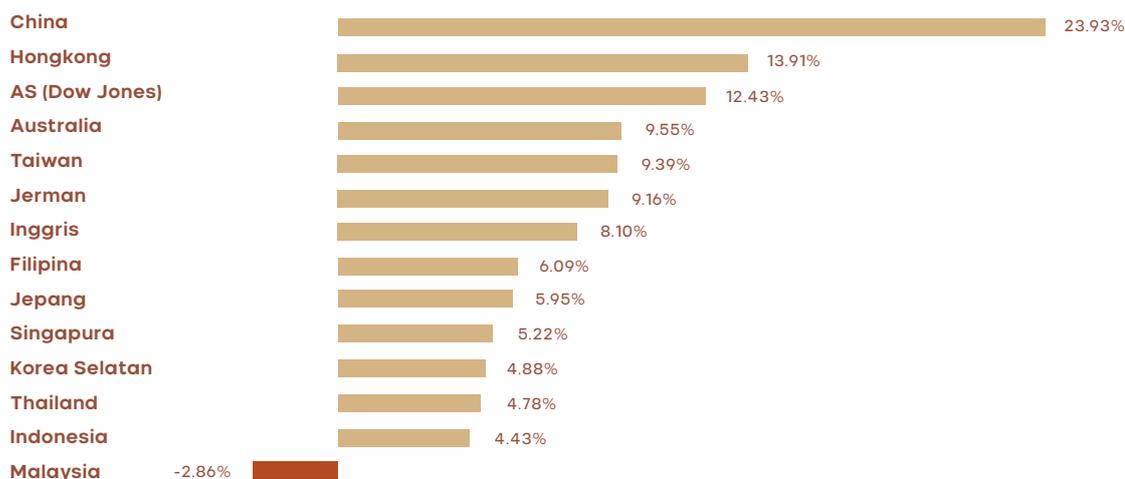
dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Selama periode laporan, Perdagangan Efek dipengaruhi oleh sentimen global dan sentimen domestik. Beberapa sentimen global yang mempengaruhi antara lain ketidakpastian penyelesaian perang dagang antara China dan Amerika Serikat, serta kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan AS pada kisaran 2,25%-2,50%. Selain itu, berita yang turut memberikan sentimen yaitu proyeksi pertumbuhan perekonomian global yang diturunkan oleh IMF ke level 3,5% atau turun 0,2% dari proyeksi sebelumnya imbas perang dagang AS-China dan AS-Eropa. Adapun untuk negara ASEAN 5 diprediksikan turun tipis 0,1% di level 5,1% dari prediksi sebelumnya di level 5,2%.

Grafik I - 27 ◇ Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)

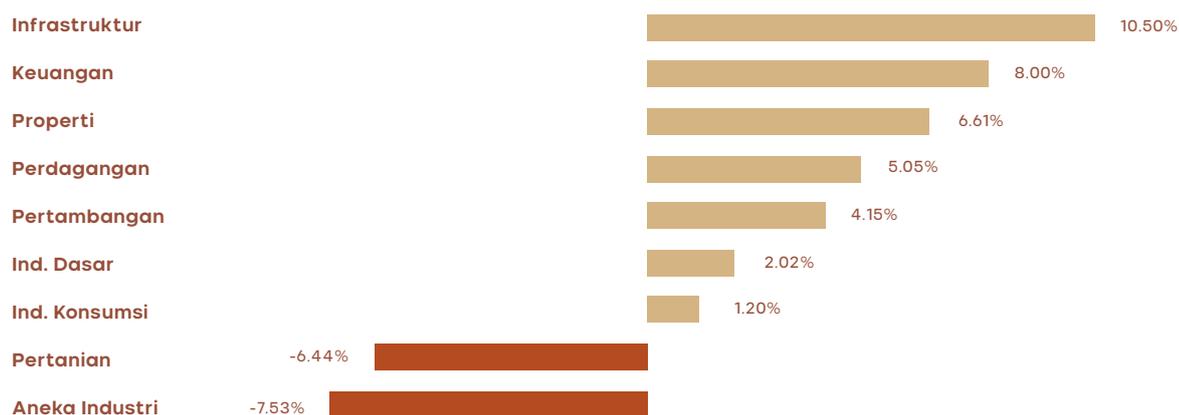


Sumber: Bloomberg

Sedangkan di domestik, kondisi yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya kebijakan Bank Indonesia mempertahankan *BI 7-days Repo Rate* di level 6,00%, dengan suku bunga *Deposit Facility* di level 5,25% dan *Lending Facility* turun di 6,75%, penilaian Lembaga Pemeringkat Fitch Rating yang mengafirmasi peringkat utang (*Sovereign Credit Rating/SCR*) Indonesia pada level BBB dengan *outlook* stabil (*Investment Grade*).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada posisi 6.468,76 atau mengalami peningkatan sebesar 4,43% (qtq). Secaca regional IHSG menempati peringkat 13 setelah Thailand dan Korea Selatan. Perdagangan Efek, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan penguatan sebesar 2,24% menjadi Rp 14.241,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 28 ◇ Perkembangan Indeks Industri (qtq)

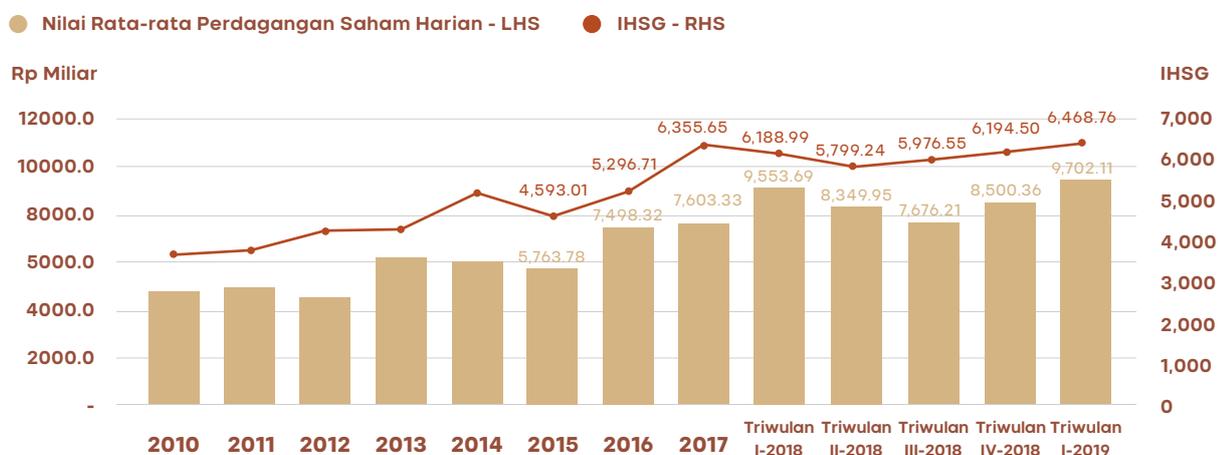


Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 4,74% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp7.356,38 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami kenaikan masing-masing sebesar 13,61%, 29,59% dan 14,49% menjadi masing-masing sebesar Rp9.702,11 miliar, Rp14,20 miliar dan 442 ribu kali transaksi.

Indeks sektor infrastruktur pada triwulan ini mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu sebesar

10,50%. Hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat menjadi fokus utama pemerintah selama empat tahun terakhir. Pada 2019, Pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415,- triliun atau naik sebesar 1,04% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan indeks sektor aneka industri yang mengalami penurunan terdalam yaitu sebesar -7,53%. Penurunan indeks aneka industri dipengaruhi oleh sentimen global yaitu perang dagang AS-China.

Grafik I - 29 ◇ Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 11 ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata harian)	2018				2019
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	9,553.69	8,349.94	7,676.20	8,402.19	9,702.11
Investor Asing (Rp Miliar)					
Beli	3,516.68	3,120.26	2,791.47	2,731.24	6,363,62
Jual	3,895.62	3,600.51	2,819.62	2,724.36	6,562,49
Investor Domestik (Rp Miliar)					
Beli	6,037.01	5,224.68	4,884.73	5,670.95	3,338,48
Jual	5,658.07	4,749.44	4,856.59	5,677.83	3,139,61
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	384,845	409,065	369,900	386,281	442,245

Grafik I - 30 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing

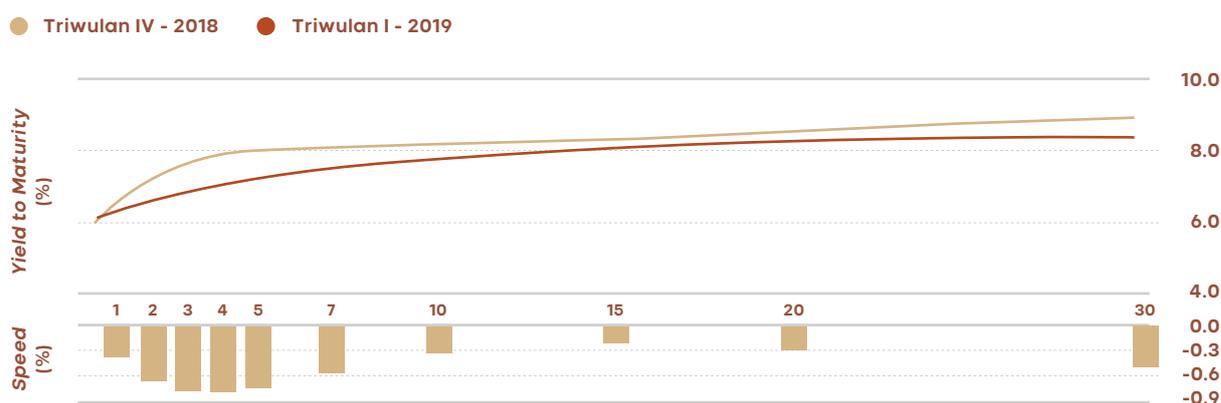


Tabel I - 12 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing

Periode	IHSG	Net Sell/Buy
2015	4.593,01	(22.589,03)
2016	5.296,71	16.169,49
2017	6.355,65	(39.896,15)
Triwulan I - 2018	6.188,98	(23.494,31)
Triwulan II - 2018	5.799,24	(25.933,08)
Triwulan III - 2018	5.976,55	(1.744,96)
Triwulan IV - 2018	6.194,50	426,51
Total		(50,745,84)
Triwulan I - 2019	6.488,75	12.131,14

Selama triwulan I-2019 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp12,13 triliun.

Grafik I - 31 ◇ Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Selama triwulan I-2019, kinerja pasar Obligasi mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield*

untuk seluruh tenor turun sebesar -39,7 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing- masing sebesar -64,2 bps, -64,1 bps, dan -32,3 bps.

Tabel I - 13 ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan I-2018			Triwulan IV-2018			Triwulan I-2019		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	63,36	64,23	7.130	72,52	72,13	7.337	76,95	76,52	8.119
SBN	1.512,90	1.572,01	74.853	1.260,53	1.143,54	48.348	1.796,71	1.663,09	60.268
Total	1.576,26	1.636,24	81.983	1.333,05	1.215,66	48.355	1.873,66	1.739,61	68.387
Repo	154,84	156,64	600	391,18	304,14	405	382,92	241,68	566

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Volume, nilai dan frekuensi transaksi perdagangan Obligasi Pemerintah masing-masing meningkat sebesar 42,54%, 45,43% dan 24,65% menjadi Rp1.796,71 triliun, Rp1.663,09 triliun dan 60.268 kali.

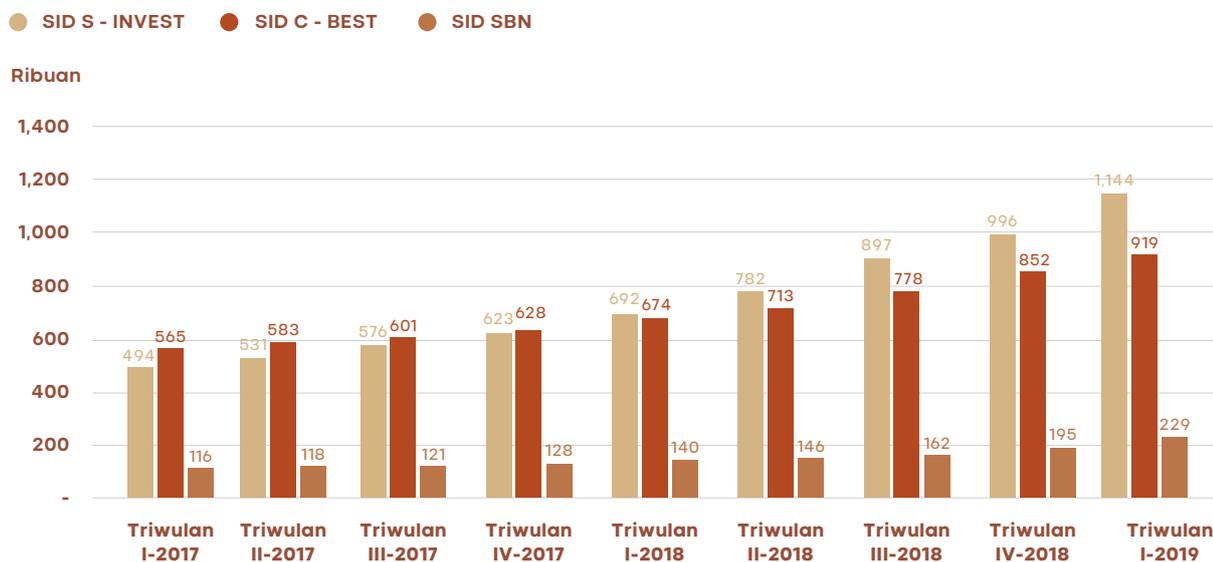
Selain itu, aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan I-2019 juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2018.

Volume, nilai dan frekuensi perdagangan Obligasi Korporasi masing-masing naik sebesar +6,10%, +6,09% dan +10,66% menjadi Rp76,95 triliun, Rp76,52 triliun dan 8.119 kali.

Perkembangan Jumlah SID

Pada Triwulan I-2019, jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,82%, 14,90% dan 17,51% masing-masing menjadi 918.887, 1.143.801 dan 229.464.

Grafik I - 32 ◇ Perkembangan Jumlah SID



Tabel I - 14 ◇ Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	33
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	83
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

OJK telah mencabut satu izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK

sebanyak 124 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah enam lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah lima lokasi selain Kantor Pusat.

Tabel I - 15 ◇ Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek Selain Kantor Pusat

Periode	2018	2019
	s.d Triwulan IV	s.d Triwulan I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	695	696

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 182 izin dengan rincian 150 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 32 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 10.038 WPPE dan 2.176 WPEE.

Tabel I - 16 ◇ Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan IV-2018		Triwulan I-2019		Izin Total s/d Triwulan I	Total Pemegang Izin sampai dengan Triwulan I-2019
	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	113	113	182	150	150	10.038
WPEE	21	18	42	32	32	2.176
Total	134	131	224	182	182	13.214

Pada periode laporan, OJK juga menerbitkan satu perpanjangan izin WPPE. Di sisi lain, tidak terdapat penerbitan izin WPEE.

Tabel I - 17 ◇ Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan IV-2018		Triwulan I-2019		Izin Total s/d Triwulan I	Total Pemegang Izin sampai dengan Triwulan I-2019
	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	3.042	1.912	331	1	1	1
WPEE	407	430	15	0	0	0
Total	3.449	2.342	346	1	1	1

Pada periode laporan, OJK menerima 149 dokumen perizinan dengan rincian 142 dokumen permohonan izin WPPEP dan 7 permohonan WPPEPT. OJK juga

menerbitkan 121 izin WPPEP dan enam untuk izin WPPEPT, sehingga total izin WPPEP sebanyak 1.203 dan WPPEPT sebanyak 87.

Tabel I - 18 ◇ Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan IV-2018		Triwulan I-2019		Izin Total s/d Triwulan I	Total Pemegang Izin sampai dengan Triwulan I-2019
	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen Masuk	Pemberian Ijin		
WPPEP	238	215	142	121	121	1.203
WPPEPT	0	0	7	6	6	87
Total	238	215	149	127	127	1.290

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama triwulan I-2019, pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami peningkatan sebesar 1,92% menjadi Rp515,09 triliun. NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu Rp6,92 triliun (16,17%), diikuti oleh Reksa Dana

Pendapatan Tetap sebesar Rp3,42 triliun (3,37%). Di sisi lain, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Indeks masing-masing mencatatkan penurunan NAB sebesar Rp3,78 triliun (-2,67%), Rp1,20 triliun (-0,83%), dan Rp0,53 triliun (-9,94%).

Tabel I - 19 ◇ Perkembangan Pengelolaan Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana	2018 (Rp triliun)				2019 (Rp triliun)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
RD Pasar Uang	59,45	49,99	45,22	42,79	49,71
RD Pendapatan Tetap	104,06	101,89	102,66	101,60	105,02
RD Saham	138,91	137,44	136,94	143,80	142,60
RD Campuran	25,35	23,93	23,64	24,40	25,49
RD Terproteksi	122,07	126,61	139,20	141,41	137,63
RD Indeks	4,99	4,71	5,02	5,33	4,80
ETF	10,54	9,82	10,62	11,56	12,75
RD Syariah*	31,11	32,17	31,80	34,49	37,08
Total	496,50	486,56	495,09	505,39	515,09

*) termasuk ETF Saham Syariah

Tabel I - 20 ◇ Perkembangan Jumlah Reksa Dana

Jenis Investasi	2018				2019
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana					
Jumlah Reksa Dana	1.849	1.921	2.035	2.098	2.089
Total NAB	496,50	486,56	495,09	505,39	515,09

OJK menerbitkan 78 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya

ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 21 ◇ Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	5
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Pendapatan Tetap	6
Reksa Dana Pasar Uang	5
Reksa Dana Terproteksi	29
Reksa Dana Indeks	1
ETF-Indeks	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Syariah Campuran	1
Reksa Dana Syariah Saham	3
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	5
Reksa Dana Syariah Terproteksi	13
Total	78

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 87 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 81 Reksa Dana Konvensional dan enam Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari:

- 68 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 59 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, delapan Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Dua Reksa Dana Campuran dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Enam Reksa Dana Saham terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Satu Reksa Dana Pasar Uang yang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Tiga Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari satu Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan satu dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Satu Reksa Dana Indeks yang dibubarkan karena kesepakatan MI & BK;
- Lima Reksa Dana Syariah Terproteksi yang dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- Satu Reksa Dana Syariah Campuran yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.

Tabel I - 22 ◇ Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2018				2019
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.101	2.165	2.215	2.332	2.430
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	25.714	26.450	26.958	27.466	27.970
Penasehat Investasi (PI)	4	4	5	6	4
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	90	90	90	92	93
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Bank & PPE Khusus	35	37	37	37	41
Penasehat Investasi (PI)	3	4	4	5	5
MI sebagai PI	1	3	5	6	7
APERD sebagai PI	-	-	-	1	1
PE sebagai APERD	17	17	18	21	21

Selama triwulan I-2019, OJK memberikan empat Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dua izin Manajer Investasi (MI) dan satu pencabutan izin MI. Pada periode laporan, OJK juga memberikan izin satu izin MI sebagai PI, sehingga jumlah MI sebagai PI. Selain itu OJK tidak mengeluarkan izin baru PI Institusi, APERD sebagai PI, dan PE sebagai APERD, sehingga

PI Institusi tetap berjumlah lima PI, APERD sebagai PI tetap berjumlah satu APERD, dan PE sebagai APERD tetap berjumlah 21 PE.

WMI dan WAPERD masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,20% dan 1,83% menjadi 2.332 dan 27.970. Di sisi lain, OJK mencabut dua izin PI Individu sehingga jumlah PI Individu menurun menjadi empat.

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-2019, jumlah Penawaran Umum sebanyak 24, terdiri dari enam Penawaran Umum

Perdana Saham, tiga Penawaran Umum Terbatas dan 15 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Tabel I - 23 ◇ Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-2018		Triwulan I-2019		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	6	900	6	661	0%	- 36%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ Rights Issue)	3	851	3	5.491	0%	85%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	13	29.394	15	21.818	13%	-35%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	0	-	0	-	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	2	1.500	2	2.053	0%	27%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	11	27.894	13	19.765	15%	-41%
Total Emisi	22	31.145	24	27.971	4%	-19%

Tabel I - 24 ◇ Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2019

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	-	640.500
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	200.750	12.778.823
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	-	-	3.309.000
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	43.200	-	4.000.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	385.022	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	200.000	583.000	800.000
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	33.264	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	290.000
12.	Industri Dasar	-	-	-
13.	Industri Logam	-	4.707.294	-
14.	Industri Kimia	-	-	-
15.	Agrobisnis	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-
	Total	661.486	5.491.044	21.818.323

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan I-2019, terdapat 28 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak enam Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 22 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari enam Emiten tersebut sebesar Rp661miliar.

Tabel I - 25 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/ Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Citra Putra Realty Tbk	Properti dan Perhotelan	Rp93.600.000.000
2.	PT Nusantara Properti Internasional Tbk	Properti dan Perhotelan	Rp206.000.000.000
3.	PT Armada Berjaya Trans Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	Rp43.200.000.000
4.	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	Barang Konsumsi	Rp33.264.000.000
5.	PT Meta Epsi Tbk	Real Estate dan Konstruksi	Rp200.000.000.000
6.	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	Properti dan Perhotelan	Rp85.421.875.000
Total			661.485.875.000

Tabel I - 27 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi I

PUB Obligasi I			
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Perdagangan	53.000.000.000
2.	PT Indosat Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	2.000.000.000.000
Total			2.053.000.000.000

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Selama triwulan I-2019, terdapat enam perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan tiga perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dengan nilai emisi sebesar Rp5,5triliun

Tabel I - 26 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/ Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Renuka Coalindo Tbk	Industri Logam	Rp4.707.293.704.250
2.	PT Kirana Megatara Tbk	Real Estate dan Konstruksi	Rp583.000.000.000
3.	PT Alkindo Naratama Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	Rp200.750.000.000
Total			5.491.043.704.250

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Selama triwulan I-2019 terdapat dua Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 13 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya dengan total nilai emisi sebesar Rp21,8triliun.

Tabel I - 28 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

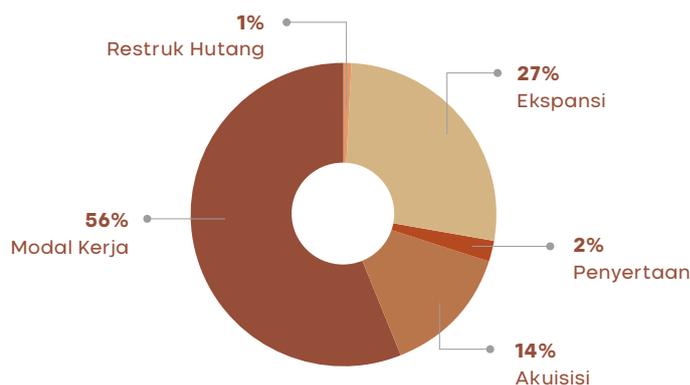
PUB Obligasi Tahap II dst				
No.	Emiten/ Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap IV	618.000.000.000
		Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap III	214.000.000.000
2.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap VII	1.850.500.000.000
3.	PT XL Axiata Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi I Tahap II	1.000.000.000.000
		Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II	1.000.000.000.000
4.	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	2.225.000.000.000
5.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap III	2.393.000.000.000
		Perdagangan	PUB Sukuk Ijarah III Tahap III	863.000.000.000
6.	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	1.000.000.000.000
7.	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap II	800.000.000.000
8.	PT Federal International Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	2.360.323.000.000
9.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.000.000.000.000
10.	PT Aneka Gas Industri Tbk	Aneka Industri Lainnya	PUB Obligasi I Tahap III	180.000.000.000
		Aneka Industri Lainnya	PUB Sukuk Ijarah I Tahap III	110.000.000.000
11.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap VIII	2.511.000.000.000
12.	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	1.000.000.000.000
13.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap IV	640.500.000.000
Total				19.765.323.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan I-2019 adalah

untuk modal kerja yaitu sebanyak 55,60% atau sekitar Rp15,5triliun.

Grafik I - 33 ◇ Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 29 ◇ Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2019 Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	-	-	-	640.212	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	198.000	12.776.665	-	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	-
4.	Perdagangan	3.251.670	-	-	-	25.925	25.925
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	3.986.260	-	-	98	-	40.674
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	32.997	249.480	-	88.917	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	119.350	260.068	-	1.046.210	146.004	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	29.668	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	53.218	-	-	-	235.448	-
12.	Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Logam	-	-	3.766.000	937.340	-	-
14.	Industri Kimia	-	-	-	-	-	-
15.	Agrobisnis	-	-	-	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
Total		4.907.621	7.443.494	509.547	3.964.000	15.519.110	407.378

1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek

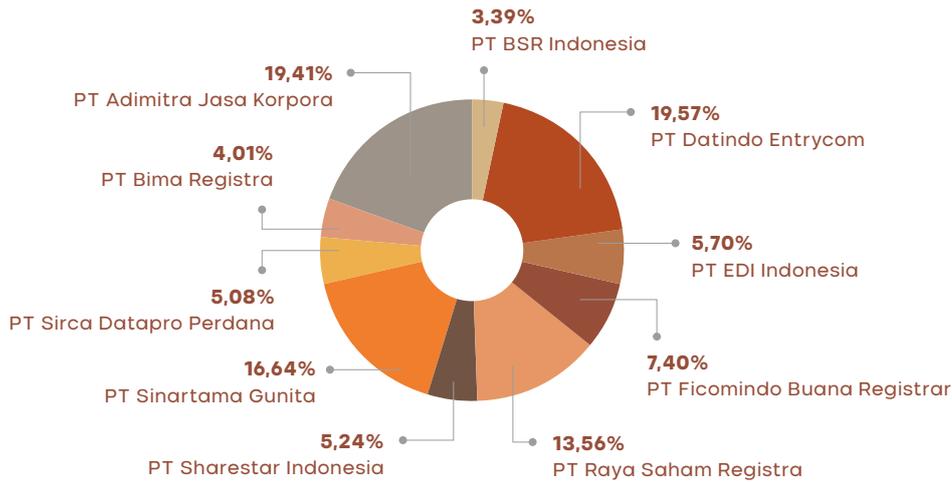
Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatannya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali

Amanat, Pemeringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 30 ◇ Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Jenis
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	20	23	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	13	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

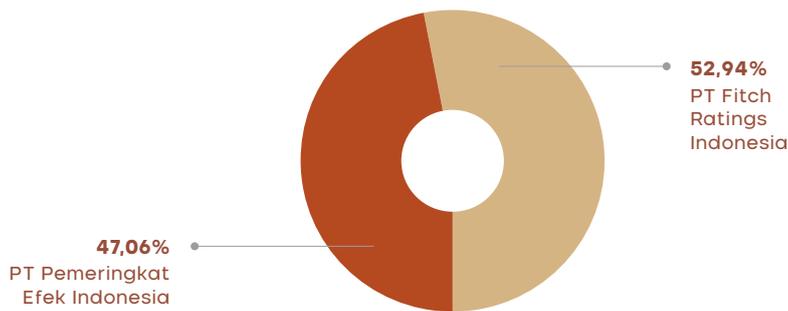
Grafik I - 34 ◇ Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien



Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19.57%, diikuti oleh PT

Adimitra Jasa Korpora sebanyak 19.41%, dan PT Sinartama Gunita.

Grafik I - 35 ◇ Market Share Company Rating Triwulan I-2019



Dari 187 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 177 Perusahaan masuk

kategori *Investment Grade* dan sebanyak 10 Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*.

Tabel I - 31 ◇ Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
PT Pemeringkat Efek Indonesia	64	79	10	9
PT Fitch Ratings Indonesia	97	98	1	1
Total	161	177	11	10

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan I-2019.

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 31 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan enam Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:
 - a. Akuntan: 17 STTD Daftar baru
 - b. Konsultan Hukum: 7 STTD Daftar baru
 - c. Penilai: 3 STTD

- d. Notaris: 4 STTD Daftar baru
 - e. ASPM: 6 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan
2. OJK telah menetapkan sebanyak satu Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD terhadap Akuntan.
 3. OJK menerima informasi mengenai Profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari Akuntan: 5 (lima) orang

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 32 ◇ Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
Akuntan	653	641*
Konsultan Hukum	237	254
Penilai	245	233*
Notaris	1290	178*
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	92	98

*Jumlah Akuntan, Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang aktif tersebut merupakan jumlah Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang telah mengajukan daftar ulang sampai dengan 22 Desember 2018 dan jumlah Akuntan, Penilai, Notaris dan Konsultan Hukum yang mengajukan pendaftaran baru.

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang Triwulan I-2019, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif.

Tabel I - 34 ◇ Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.147,14	1.150,10	1.175,11	1.209,63	1.249,17
2.	Dana Pensiun Konvensional	262,68	260,71	263,54	269,51	276,91
3.	Lembaga Pembiayaan*)	560,27	577,83	593,69	589,57	596,31
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	211,99	219,13	224,14	228,50	236,91
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	8,05	8,98	8,98	9,61	9,61
6.	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,33	0,34	0,40	0,47	0,47
Total Aset		2.192,46	2.217,09	2.265,86	2.307,29	2.369,38

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

***) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan IV 2018 menggunakan data per Semester II 2018

****) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan IV 2018 menggunakan data kuartal III 2018

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

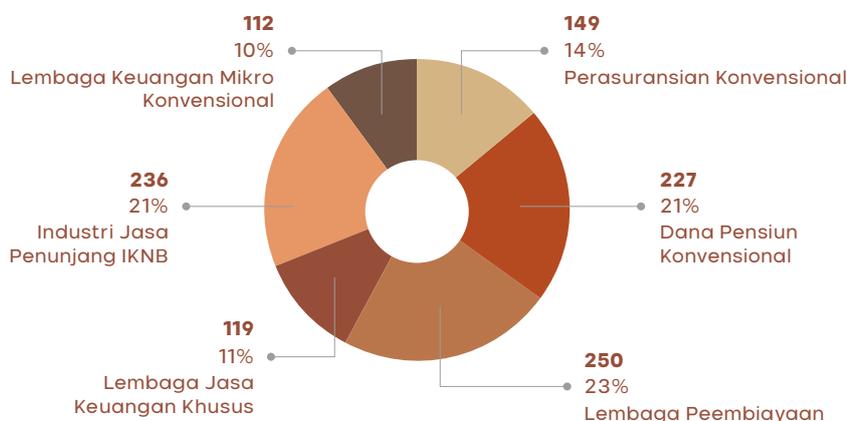
Tabel I - 33 ◇ Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)

No.	Judul Kegiatan	Profesi	Tempat	Jumlah Peserta Teraftar di OJK
1.	Standar Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum Berdasarkan Standar Profesi Terbaru	Konsultan Hukum	Jakarta	131 orang
2.	Dampak RUU BUMN Bagi PT. Tbk. dan Perkembangan Pasar Modal	Konsultan Hukum	Jakarta	52 orang
3.	Reviu Perhitungan Proyeksi pada Laporan Penilaian Properti dan Bisnis	Penilai	Bogor	56 orang

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 250 pelaku,

diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Asuransi Konvensional serta BPJS, Lembaga Jasa Keuangan Khusus serta Lembaga Keuangan Mikro.

Grafik I - 36 ◇ Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2019



1. Data Pelaku IKNB per Maret 2019

2. Pelaku Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 3,27% menjadi Rp1.249,17 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset ini sejalan dengan peningkatan jumlah investasi yang naik sebesar 3,69% menjadi Rp1.074,92 triliun. Portofolio investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang tumbuh Rp18,66 triliun, diikuti oleh Reksa Dana yang naik Rp6,94 triliun, dan Saham yang tumbuh Rp5,61 triliun seiring dengan membaiknya

kondisi pasar dan stabilnya perekonomian. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS dan asuransi jiwa menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar Rp17,73 triliun dan Rp10,09 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 40,2%, diikuti oleh BPJS sebesar 34,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,7%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,7%.

Tabel I - 35 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	516,27	509,37	516,34	520,64	534,75
	Asuransi Umum dan Reasuransi	154,99	159,71	161,65	166,46	171,83
	Asuransi Wajib	131,12	128,23	129,07	133,73	139,94
	BPJS	344,76	352,79	368,05	388,80	407,65
	Jumlah	1.147,14	1.150,10	1.175,11	1.209,63	1.249,17
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	458,97	453,06	458,88	463,96	474,05
	Asuransi Umum dan Reasuransi	80,22	79,93	82,21	83,20	86,84
	Asuransi Wajib	116,77	112,88	114,33	117,19	124,01
	BPJS	328,72	334,85	351,02	372,29	390,02
	Jumlah	984,67	980,71	1.006,44	1.036,64	1.074,92

3. Total Pendapatan Premi					
Asuransi Jiwa	49,54	95,47	141,14	186,05	44,28
Asuransi Umum dan Reasuransi	21,58	43,44	62,74	88,28	24,99
Asuransi Wajib	2,92	5,67	8,87	12,07	3,00
BPJS	32,55	70,32	107,18	146,90	37,98
Jumlah	106,59	214,90	319,93	433,30	110,25
4. Total Klaim Bruto					
Asuransi Jiwa	34,74	72,93	108,88	142,36	36,39
Asuransi Umum dan Reasuransi	7,77	15,57	25,20	37,02	10,24
Asuransi Wajib	3,33	6,46	10,18	13,74	3,67
BPJS	31,60	55,88	88,80	123,01	33,34
Jumlah	77,44	150,84	233,06	316,13	83,64
5. Total Liabilitas					
Asuransi Jiwa	425,40	425,71	435,42	445,65	459,66
Asuransi Umum dan Reasuransi	93,40	98,90	100,06	102,63	106,08
Asuransi Wajib	104,90	108,60	109,02	112,46	113,61
BPJS	57,42	64,19	64,61	67,27	74,49
Jumlah	681,11	697,39	709,11	728,02	753,83

Tabel I - 36 ◇ Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Deposito Berjangka	117,20	108,60	108,24	124,93	127,61
2.	Sertifikat Deposito	0,32	0,39	0,34	0,25	0,27
3.	Saham	214,85	214,80	221,64	227,75	233,36
4.	Obligasi	109,67	110,51	114,57	109,13	113,36
5.	MTN	2,36	1,95	2,16	2,74	3,08
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	264,87	269,42	277,71	280,29	298,95
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,86	0,90	0,90	0,90	0,53
8.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	0,00	-	-	-
9.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0,02	-	0,00	0,00	0,00
10.	Reksa Dana	236,41	233,53	238,29	245,45	252,39
11.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	2,93	2,72	3,54	3,42	3,34
12.	Dana Investasi Real Estat	0,20	0,21	0,21	0,08	0,24
13.	REPO	-	-	-	-	-
14.	Penyertaan Langsung	16,31	18,20	18,64	18,51	18,58
15.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	14,88	15,42	16,07	19,42	19,38
16.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,50	0,53	0,53	0,54	0,55
17.	Emas murni	0,00	0,00	0,00	-	0,00
18.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,24	0,26	0,30	0,20	0,21
19.	Pinjaman Polis	2,03	2,10	2,13	2,15	2,14
20.	Investasi Lain	1,03	1,03	1,18	0,89	0,95
	Jumlah	984,67	980,71	1.006,44	1.036,64	1.074,92

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (27,8%), Reksa Dana (23,5%), Saham (21,7%) dan Deposito Berjangka (11,9%).

Terdapat perubahan jumlah pelaku yaitu penambahan pada asuransi umum konvensional, sehingga jumlah pelaku menjadi 139 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 37 ◇ Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Auransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	30	30	30	30	29
	c. Patungan	22	22	22	22	23
	Sub Total	53	53	53	53	53
2.	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	50	50	50	50	52
	c. Patungan	22	22	22	22	21
	Sub Total	74	74	74	74	75
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	138	138	138	138	139

Tabel I - 38 ◇ Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
GDP (miliar Rupiah)	13.588.797	13.588.797	13.588.797	13.588.797	14.837.400
Premi Bruto (miliar Rupiah)	405.234	420.331	411.158	411.022	414.082
Jumlah Penduduk (juta)	257	257	257	257	265
Penetrasi	2,98%	3,09%	3,03%	3,02%	2,79%
Densitas (ribu Rupiah)	1.576,79	1.635,53	1.569,90	1.569,39	1.562,57

1. Angka Premi Bruto merupakan premi per Desember 2018
2. Angka GDP merupakan GDP per Triwulan 4 2017 berdasarkan press release BPS
3. Penetrasi: Premi Bruto/GDP
4. Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi menurun sebesar 0,44% menjadi Rp1.562.574 per tahun. Selain itu, tingkat

penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,79% atau turun 0,23%.

Tabel I - 39 ◇ RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
Asuransi Jiwa	480,6%	455,1%	430,5%	440,6%	456,6%
Asuransi Umum dan Reasuransi	321,9%	333,0%	315,3%	332,5%	314,6%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC meningkat

sebesar 16,0% menjadi 456,6%. Di sisi lain, RBC Asuransi Umum, mengalami penurunan sebesar 17,9% menjadi 314,6% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan I-2019, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar 2,20% (qta) menjadi Rp276,91 triliun. Peningkatan aset terbesar dialami oleh DPPK-PPMP sebesar Rp3,22 diikuti oleh DPLK

triliun sebesar Rp3,27 triliun, dan DPPK-PPIP sebesar Rp0,91 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, investasi industri Dana Pensiun naik sebesar Rp5,75 triliun menjadi Rp266,70 triliun.

Tabel I - 40 ◇ Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

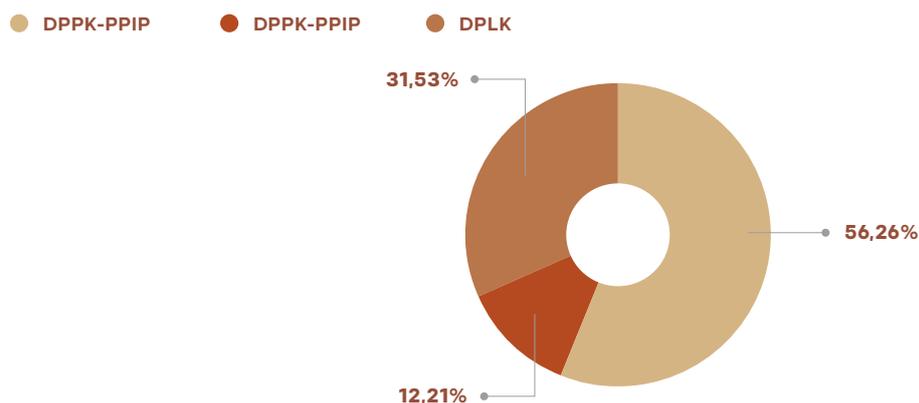
Jenis Program	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
DPPK-PPMP	154,60	150,25	151,48	154,02	157,24
<i>Growth</i>	0,07%	-2,81%	0,81%	1,69%	2,09%
DPPK-PPIP	31,55	31,43	31,84	32,70	33,61
<i>Growth</i>	1,94%	-0,38%	1,29%	2,70%	2,79%
DPLK	78,53	79,03	80,22	82,78	86,06
<i>Growth</i>	4,01%	0,63%	1,51%	3,19%	3,95%
Total Aset (Rp Triliun)	264,68	260,71	263,53	269,51	276,91
<i>Growth</i>	0,8%	1,4%	-1,5%	1,08%	2,7%

Tabel I - 41 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
DPPK-PPMP	149,10	144,42	144,38	147,45	150,05
<i>Growth</i>	-0,034%	-3,13%	-0,03%	2,12%	1,77%
DPPK-PPIP	30,84	30,62	31,15	32,04	32,57
<i>Growth</i>	1,58%	-0,71%	1,73%	2,87%	1,63%
DPLK	77,08	77,55	78,90	81,45	84,08
<i>Growth</i>	3,44%	0,61%	1,74%	3,24%	3,23%
Total Investasi (Rp Triliun)	257,02	252,60	254,43	260,94	266,70
<i>Growth</i>	1,00%	-1,72%	0,73%	2,6%	2,2%

Grafik I - 37 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 42 ◇ Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Surat Berharga Negara	58,46	57,24	57,96	59,30	62,02
2.	Tabungan	0,68	0,58	0,50	0,40	0,44
3.	Deposito <i>On Call</i>	1,47	2,06	1,05	1,06	1,55
4.	Deposito Berjangka	66,27	66,44	66,04	68,31	70,46
5.	Sertifikat Deposito	1,42	1,36	1,21	1,49	1,52
6.	Sertifikat Bank Indonesia	0,05	-	-	-	-
7.	Saham	31,14	29,11	30,29	30,60	32,07
8.	Obligasi	54,15	53,50	55,18	55,29	55,30
9.	Sukuk	3,32	3,15	3,24	3,34	3,10
10.	Unit Penyertaan Reksadana	16,07	16,01	15,78	16,88	16,03
11.	<i>Medium Term Note</i>	0,16	0,17	0,19	0,17	0,19
12.	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	1,14	1,06	1,05	1,01	0,98
13.	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,12	0,13	0,11	0,11	0,09
14.	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15.	<i>Repurchase Agreement</i>	-	-	-	-	-
16.	Penempatan Langsung pada Saham	8,55	8,67	8,79	9,37	9,28
17.	Tanah	4,82	3,99	4,03	4,08	4,08
18.	Bangunan	2,11	2,27	2,09	2,53	2,49
19.	Tanah dan Bangunan	7,09	6,84	6,91	7,00	7,09
Total		257,02	252,60	254,43	260,94	266,70

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (26,42%), obligasi (20,74%), SBN (23,25%), dan saham (12,02%).

Selama periode Triwulan-I 2019 terdapat tiga pembubaran Dana Pensiun sehingga jumlah pelaku adalah 227 entitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 43 ◇ Jumlah Dana Pensiun

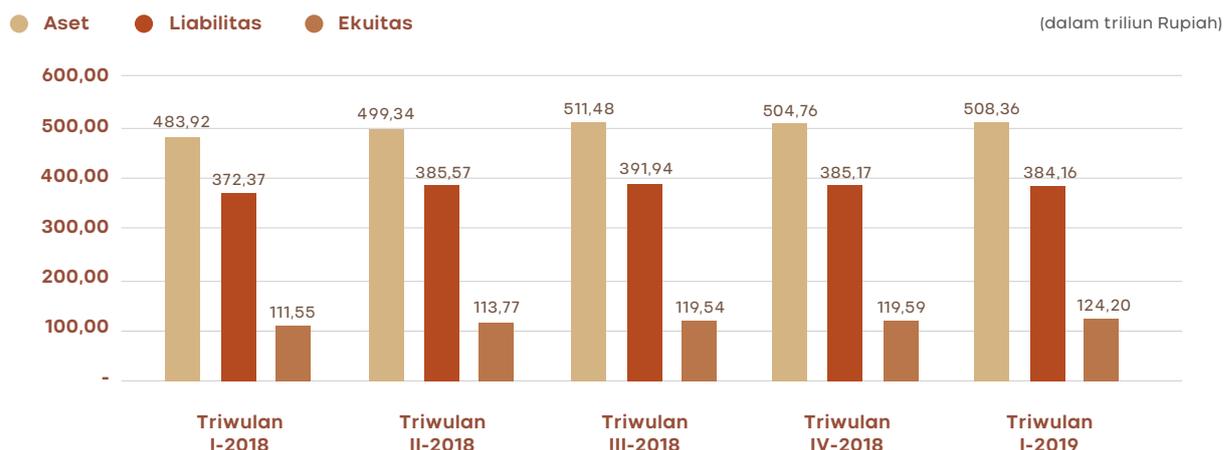
Jenis Dana Pensiun	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
DPPK PPMP	167	167	164	164	162
DPPK PPIP	44	44	44	44	41
DPLK	23	23	24	24	24
Jumlah	234	234	232	232	227

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,71% dan 3,86% dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, total liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 0,26% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 38 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



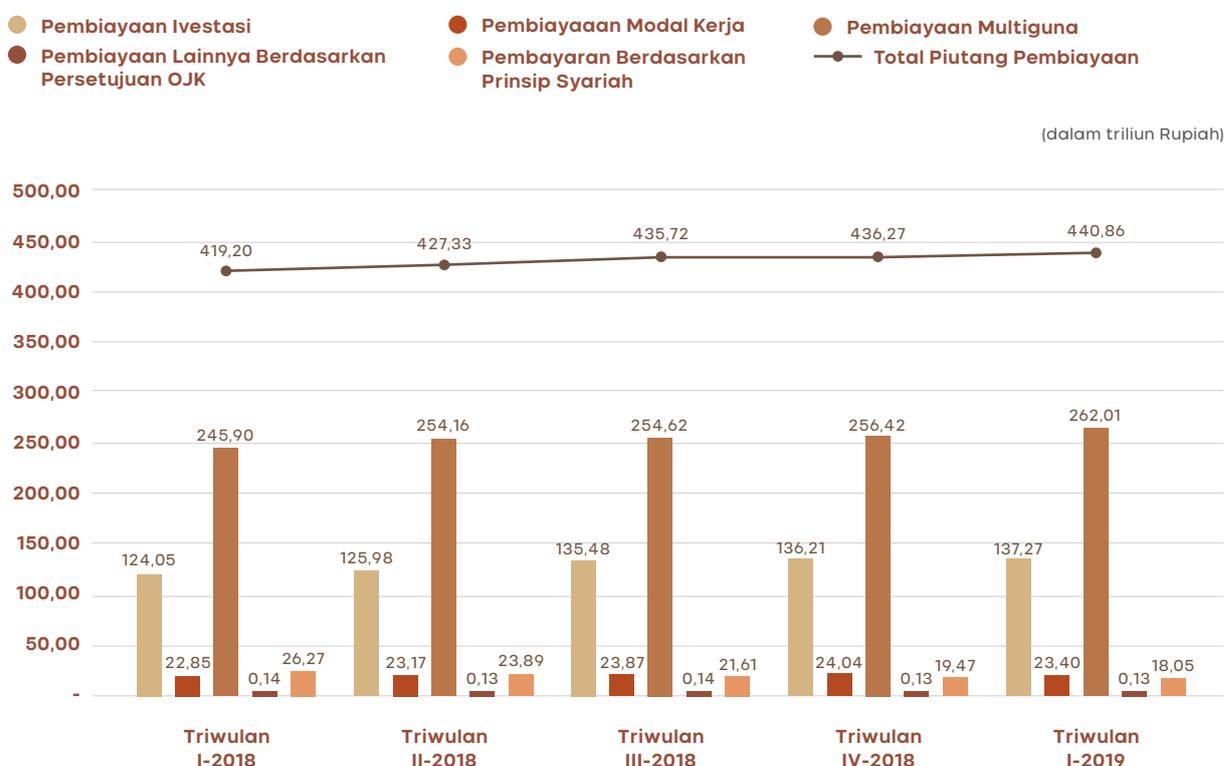
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan, terdapat satu pencabutan izin usaha dan dua penerbitan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada Triwulan I-2019 sebesar 186 perusahaan. Berdasarkan total aset, sebanyak 72 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%, sedangkan 114 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp4,59 triliun atau 1,05% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 59,43% dan 31,14%. Berdasarkan proporsi pembiayaan yang disalurkan maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 76,65% (Rp350,86 triliun).

Grafik I - 39 ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan



Tabel I - 44 ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	335,16	340,96	347,72	349,18	350,86
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	20,17	18,18	18,43	18,59	18,37
2.	Pertambangan dan penggalian	24,65	26,21	28,95	29,56	29,53
3.	Industri pengolahan	39,88	37,55	38,17	38,29	37,58
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	21,66	18,79	19,83	16,25	17,38
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,35	0,36	0,40	0,41	0,38
6.	Konstruksi	14,64	16,58	16,46	16,14	15,76
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	69,37	73,65	75,18	77,51	80,71
8.	Transportasi dan pergudangan	27,82	29,23	30,51	31,62	32,42
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,93	10,01	9,98	9,73	9,12
10.	Informasi dan komunikasi	3,73	3,96	3,71	3,00	2,89
11.	Jasa keuangan dan asuransi	4,44	4,87	4,98	6,23	5,95
12.	<i>Real Estate</i>	2,04	2,07	2,16	2,49	2,68
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,48	2,95	3,21	3,40	3,47
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	40,63	42,39	43,44	44,46	44,15
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,01	7,34	7,25	7,06	6,71
16.	Jasa pendidikan	4,73	4,71	4,62	4,76	4,62
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,28	9,28	9,19	9,08	8,74
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,22	2,27	2,30	2,41	2,22
19.	Kegiatan jasa lainnya	20,58	21,46	21,27	21,01	21,43
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	9,48	9,01	7,61	7,06	6,61
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,07	0,09	0,11	0,11	0,14
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	99,58	102,59	103,95	103,38	106,88
1.	Rumah tangga	61,55	63,99	65,68	65,35	72,25
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	38,03	38,59	38,27	38,03	34,63
	Jumlah	434,74	443,55	451,67	452,57	457,74

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 45 ◇ Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
FAR (%)	86,63%	85,58%	85,19%	86,43%	86,72%
NPF (%)	3,25%	3,15%	3,17%	2,71%	2,71%
Gearing Ratio (kali)	3,08	3,14	3,03	2,99	2,84

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*), kualitas piutang pembiayaan (NPF) dan *Gearing Ratio* masih terjaga di

atas batas ketentuan yaitu masing-masing pada rasio 86,72%, 2,71% dan 2,84 kali.

Tabel I - 46 ◇ NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,36%	3,28%	3,23%	2,67%	2,67%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,18%	1,86%	2,27%	2,66%	3,15%
2.	Pertambangan dan penggalian	5,36%	4,99%	5,75%	5,14%	4,13%
3.	Industri pengolahan	2,08%	2,52%	2,96%	2,28%	2,43%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,12%	0,16%	0,15%	0,18%	0,16%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	1,78%	2,69%	2,34%	1,36%	1,88%
6.	Konstruksi	2,84%	2,47%	2,19%	2,28%	2,42%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3,59%	3,77%	3,01%	1,83%	1,83%
8.	Transportasi dan pergudangan	12,00%	11,39%	9,99%	8,97%	8,55%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5,11%	1,82%	1,98%	1,84%	2,13%
10.	Informasi dan komunikasi	0,86%	0,98%	0,91%	0,89%	0,87%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	2,78%	1,47%	1,82%	1,42%	1,46%
12.	Real Estat	4,02%	3,92%	3,92%	2,93%	3,16%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,49%	2,24%	2,02%	1,31%	1,36%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,69%	1,56%	1,51%	1,40%	1,53%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,51%	1,41%	1,35%	1,17%	1,36%
16.	Jasa pendidikan	1,58%	1,82%	1,62%	1,53%	1,78%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,68%	1,40%	1,26%	1,23%	1,68%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,92%	1,06%	1,13%	1,13%	1,20%
19.	Kegiatan jasa lainnya	1,75%	1,79%	3,35%	1,55%	1,96%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,87%	2,42%	2,08%	1,54%	1,73%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,86%	1,52%	1,70%	2,44%	1,70%
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,89%	2,73%	2,95%	2,85%	2,85%
1.	Rumah tangga	2,15%	2,27%	2,28%	2,15%	2,09%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,08%	3,50%	4,09%	4,05%	4,44%
	NPF Industri	3,25%	3,15%	3,17%	2,71%	2,71%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 19,55% menjadi Rp4,47 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Pada Triwulan I-2019 jumlah pinjaman yang diterima

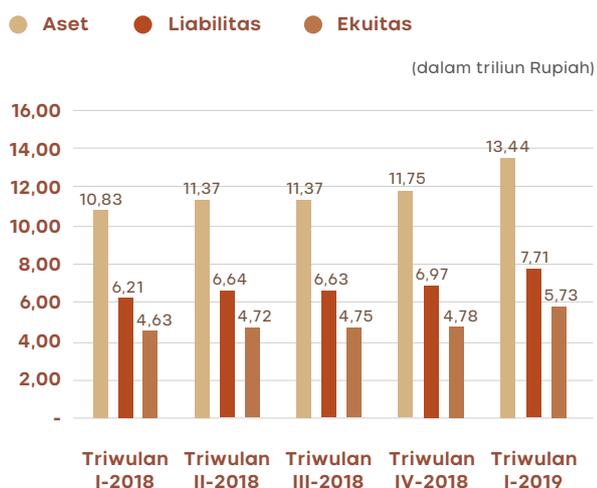
sebesar Rp277,54 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 51,00% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 40,27%, Yen Jepang 8,66%, Euro 0,04%, dan Singapore Dollar 0,02%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 14,32%, 10,63%, dan 19,70% menjadi Rp13,44 triliun, Rp7,71 triliun, dan Rp5,73 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 40 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

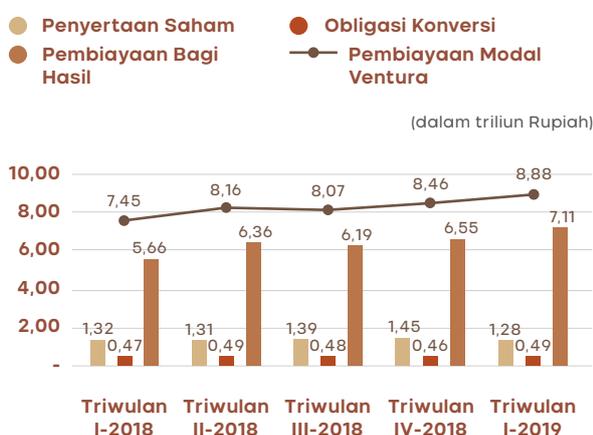
Selama periode laporan terdapat empat pencabutan izin usaha dan satu penerbitan izin usaha Perusahaan

Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura sebanyak 62 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 4,94% menjadi Rp8,88 triliun. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 80,06% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp7,11 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp4,21 triliun atau sebesar 46,98%.

Grafik I - 41 ◇ Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



Tabel I - 47 ◇ Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	761	814	668	707	678
2.	Pertambangan	481	485	490	507	501
3.	Perindustrian	526	567	735	745	778
4.	Konstruksi	422	462	497	490	443
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	3.362	3.772	3.597	3.716	4.214
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	142	157	137	135	144
7.	Jasa Pendukung Bisnis	770	797	787	932	902
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	174	182	177	174	203
9.	Lain-Lain	889	1.007	1.064	1.132	1.107
Jumlah		7.528	8.243	8.152	8.538	8.970

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi

Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 96,23%, 66,07%, 2,72%, 4,38%.

Tabel I - 48 ◇ Rasio Keuangan Modal Ventura

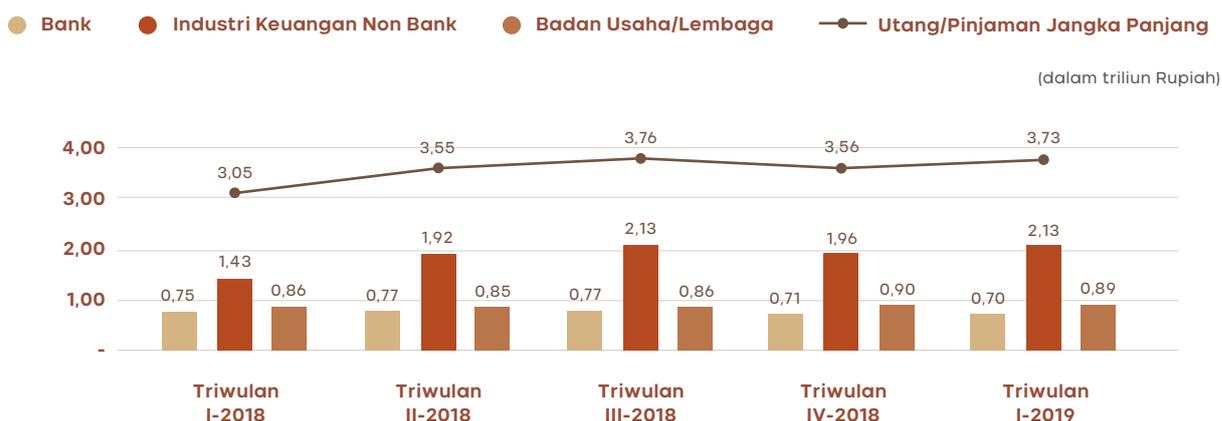
Rasio Keuangan	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Δ
BOPO	91,49%	96,23%	4,74%
IFAR	71,98%	66,07%	-5,91%
ROA	1,93%	2,72%	0,79%
ROE	3,37%	4,38%	1,01%

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal

dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2019 adalah sebesar Rp3,73 triliun atau naik sebesar 4,63%.

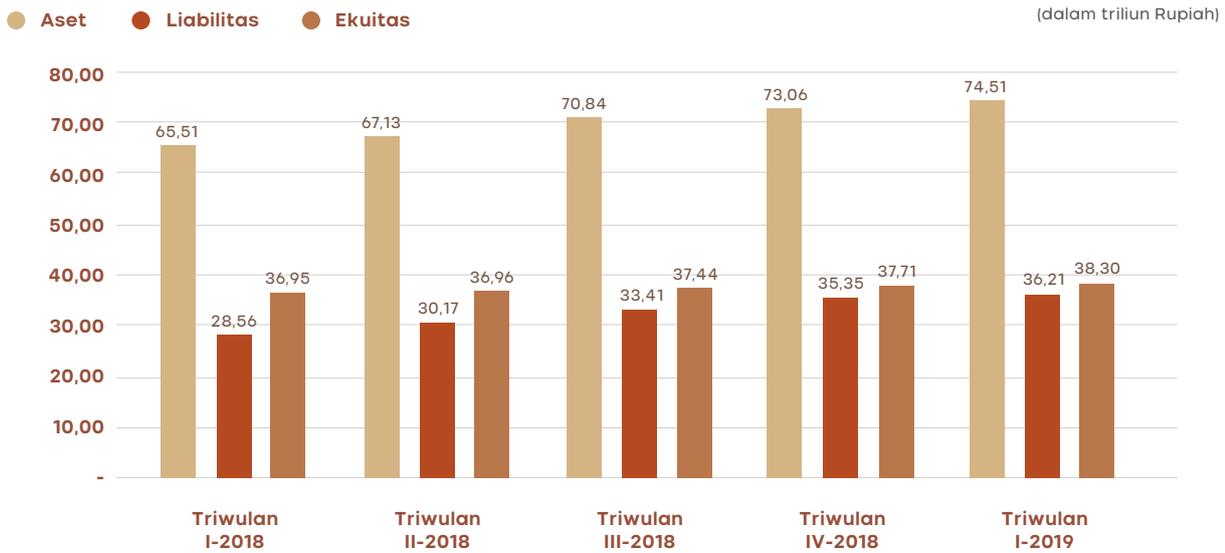
Grafik I - 42 ◇ Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset mengalami kenaikan sebesar 1,99% menjadi Rp74,51

triliun. Total liabilitas serta ekuitas juga masing-masing meningkat sebesar 2,45% dan 1,57% menjadi Rp36,21 triliun dan Rp38,30.

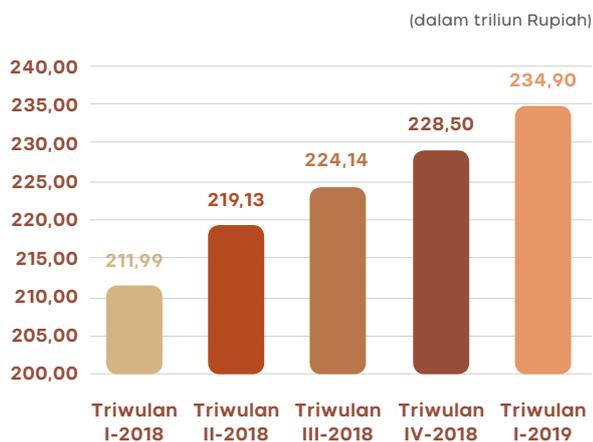
Grafik I - 43 ◇ Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**Tabel I - 49** ◇ Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
Air Minum	0,84	1,24	1,24	1,43	1,61
Jalan	8,76	10,63	12,51	13,95	14,83
Ketenagalistrikan	15,28	15,14	17,68	18,56	18,50
Lainnya	4,13	4,40	5,47	6,62	6,48
Minyak & Gas Bumi	3,15	3,38	3,49	2,83	2,78
Telekomunikasi	1,95	1,92	1,92	3,34	3,27
Transportasi	4,46	3,15	4,24	5,57	6,87
Total	38,58	39,85	46,54	52,29	54,34

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

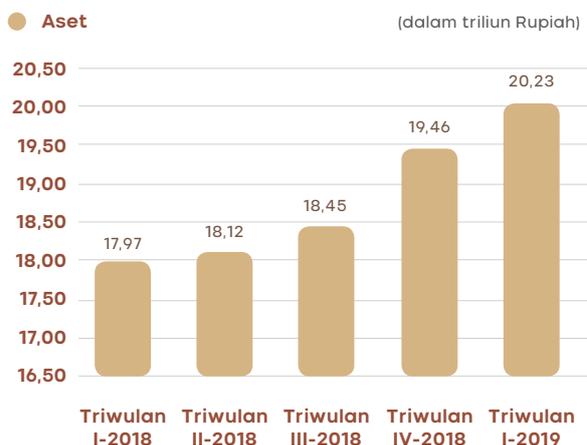
Total Aset LJKK naik 2,80% menjadi Rp234,90 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 ◇ Pertumbuhan Aset LJKK

A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 3,95% menjadi Rp20,23 triliun.

Grafik I - 45 ◇ Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



*) data termasuk syariah

Outstanding penjaminan mengalami kenaikan 9,00% menjadi Rp253,58 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif dan usaha non produktif masing-masing sebesar 4,97% dan 13,99% menjadi Rp134,95 triliun dan Rp118,63 triliun.

Grafik I - 46 ◇ *Outstanding* Penjaminan

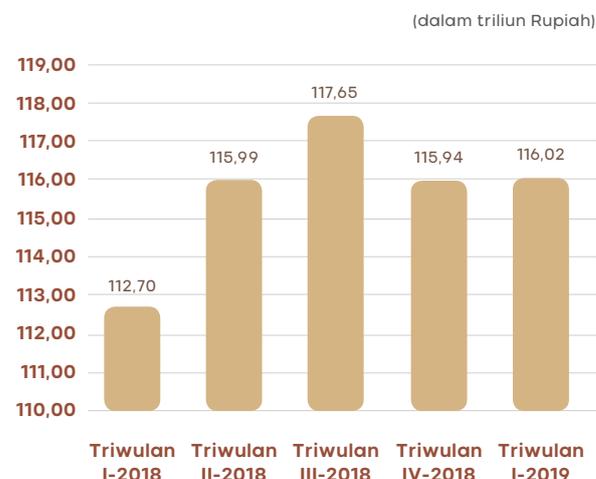


B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI meningkat 0,07%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp116,02 triliun.

Grafik I - 47 ◇ Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Pada periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp103,09 triliun, atau turun 5,34% dari periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya pembiayaan konvensional 5,95% menjadi Rp87,70 triliun dan piutang syariah sebesar 1,65% menjadi Rp15,39 triliun.

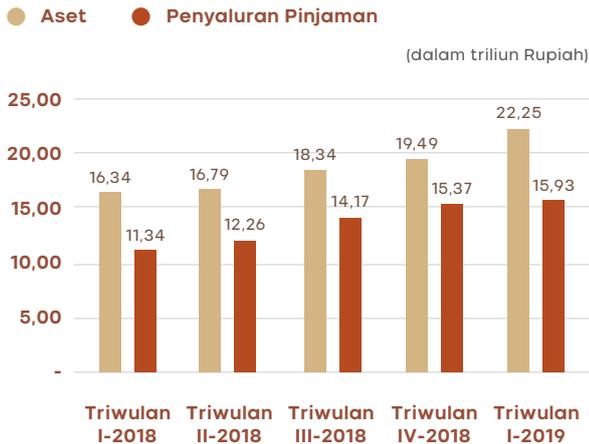
Grafik I - 48 ◇ Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) naik 14,12% menjadi Rp22,25 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami kenaikan sebesar 3,60% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp15,93 triliun.

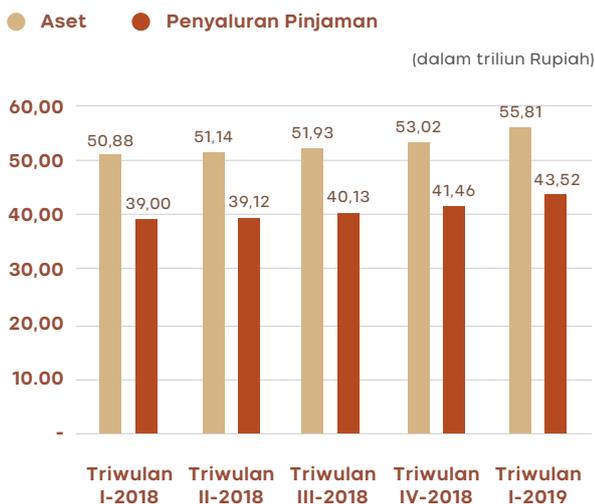
Grafik I - 49 ◇ Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 71 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri (67 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan empat perusahaan pergadaian swasta syariah) dimana 22 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK (20 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan dua perusahaan pergadaian swasta syariah). Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 5,27% menjadi Rp55,81 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan naik 4,97% sebesar Rp43,52 triliun.

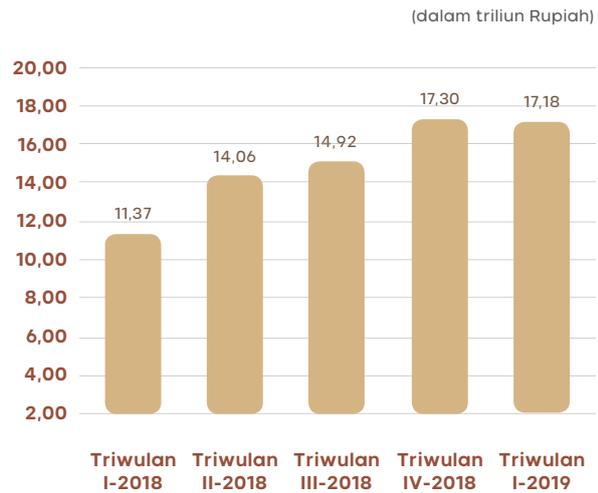
Grafik I - 50 ◇ Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian



E. PT PNM (Persero)

Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp17,18 triliun, turun 0,70% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 51 ◇ Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Pada triwulan I-2019, pemberian pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari periode sebelumnya menjadi Rp12,42 triliun.

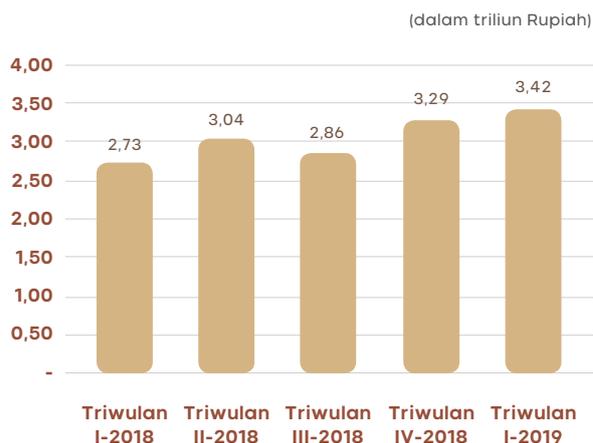
Grafik I - 52 ◇ Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



F. PT Danareksa (Persero)

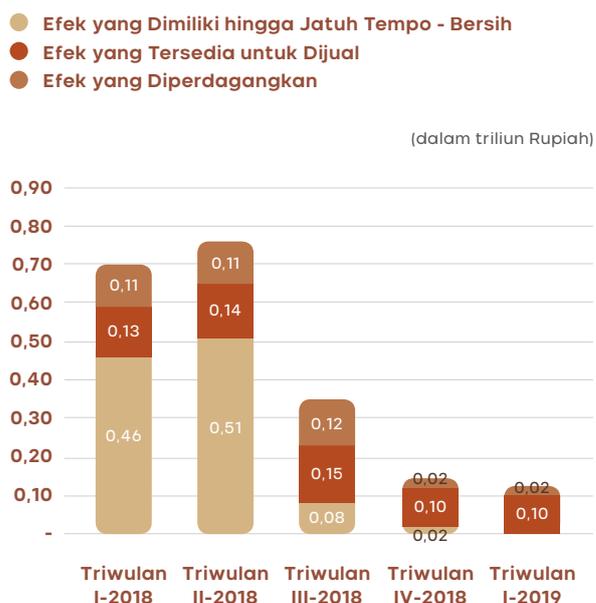
PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu: PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek; PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan. Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan I-2019 mengalami kenaikan 3,78% menjadi sebesar Rp3,42 triliun.

Grafik I - 53 ◇ Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa (Persero) turun 10,74% pada triwulan I-2019 tercatat menjadi sebesar Rp0,12 triliun.

Grafik I - 54 ◇ Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2018 naik 7,02% menjadi Rp9,61 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan

mengalami kenaikan 24,61% menjadi Rp2,38 triliun dibandingkan semester II-2017.

Tabel I - 50 ◇ Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester I-2017	Semester II-2017	Semester I-2018	Semester II-2018
1.	Aset	8,26	8,05	8,98	9,61
2.	Liabilitas	5,78	5,64	6,31	6,94
3.	Modal Sendiri	5,06	2,41	2,67	2,67
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,92	1,91	1,21	2,38
5.	Laba/ (Rugi)	0,21	0,57	0,30	0,69

Selama periode pelaporan terdapat satu izin perubahan nama Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah

Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 237 perusahaan.

Tabel I - 51 ◇ Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018
1.	Pialang Asuransi	168	165	167	166	167
2.	Pialang Reasuransi	43	43	43	43	43
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		238	235	237	236	237

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode kuartal III-2018 adalah sebanyak 183 LKM dengan 123 LKM

Konvensional dan 60 full syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan kuartal III-2018 adalah sebesar Rp470,10 miliar.

Tabel I - 52 ◇ Jumlah Lembaga Keuangan Mikro

No.	Jenis Badan Usaha	Kuartal III-2017	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018
1.	Konvensional				
	Koperasi	132	133	125	101
	PT	19	21	21	22
2.	Syariah				
	Koperasi	29	38	46	59
	PT	-	1	1	1
	Jumlah	180	193	193	183

Tabel I - 53 ◇ Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Kuartal III-2017	Kuartal I-2018	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018
1.	Aset	332,95	339,89	402,49	470,10
2.	Liabilitas	214,11	216,61	236,25	268,46
3.	Ekuitas	118,84	123,29	166,23	201,65
4.	Pinjaman Yang Diberikan	264,98	288,22	335,30	344,99
5.	Simpanan/Tabungan	186,76	188,52	195,22	219,88

*Data Triwulan IV 2018 menggunakan data laporan kuartal III 2018

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan I-2019 sebanyak 106 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp33,2 triliun

atau naik 46,5% dari periode sebelumnya sebesar Rp22,7 triliun.

Tabel I - 54 ◇ Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	39	64	70	88	106
2.	Jumlah Pemberi Pinjaman	145.965	123.633	161.297	207.507	272.548
3.	Jumlah Penerima	1.032.776	1.090.306	2.300.007	4.359.448	6.961.993
4.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp)	4.5	7.6	13.8	22.7	33.2

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PENDUKUNG SEKTOR PRIORITAS PEMERINTAH

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian BWM di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan I-2019, jumlah BWM terus meningkat menjadi 43 BWM. BWM yang diberikan izin selama triwulan I-2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel I - 55 ◇ LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

No.	Nama LKM syariah	Nomor Izin Usaha
1.	Koperasi LKMS BWM Fajar Pelita Harapan	KEP-24/KO.053/2019
2.	Koperasi LKMS Al Hidayah Rokan Hulu	KEP-25/KO.053/2019

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara pelatihan pengelola BWM, evaluasi, dan monitoring dalam rangka pengembangan BWM.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

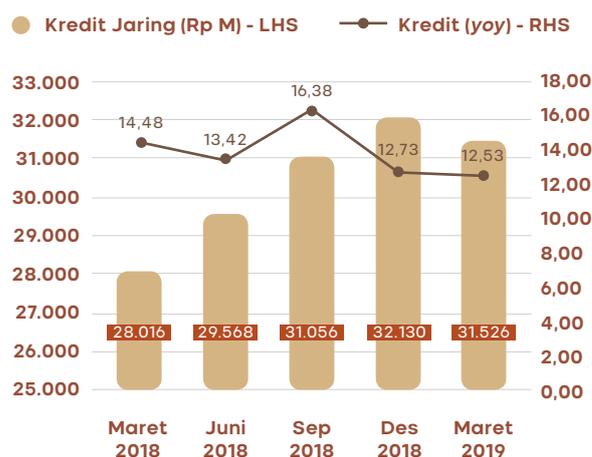
Pada triwulan I-2019, terdapat 30 bank yang menjadi Penyelenggara Laku Pandai. Jumlah Agen Laku Pandai mencapai 1.073.134 Agen yang tersebar di 510 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Jumlah rekening tabungan BSA juga bertambah menjadi sebanyak 23.340.281 dengan *outstanding* tabungan mencapai Rp2,51 triliun.

1.5.3 Jangkauan, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan I-2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp31,53 triliun atau tumbuh 12,53% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (14,48%, yoy). Perlambatan terjadi utamanya pada subsektor budidaya dan industri pengolahan yang masing-masing hanya tumbuh 6,67% (yoy) dan 6,21% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan perdagangan dalam negeri maupun ekspor hasil perikanan yang masing-masing tumbuh 22,88% (yoy) dan 14,21% (yoy).

Risiko kredit kelautan dan perikanan masih terjaga di bawah 5%, meskipun meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,48%. Naiknya NPL kredit ini di dorong oleh kenaikan NPL utamanya pada subsektor penangkapan ikan tuna dan budidaya biota laut udang. Sementara itu, perbaikan kualitas kredit terdapat pada subsektor jasa sarana produksi dan perdagangan.

Grafik I - 55 ◇ Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 56 ◇ NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Maret	Desember	Maret
Penangkapan	3,06	2,16	8,89
Budidaya	1,44	1,20	5,20
Jasa sarana produksi	4,40	2,92	3,70
Industri pengolahan	0,38	0,34	0,42
Perdagangan	2,50	1,75	2,13
NPL	1,84	1,38	3,48

Sumber: OJK

*Program JARING (Jangkauan, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

1.5.4 Simpanan Pelajar (SimPel)



Bank Peserta
314



Jumlah Rekening
17.230.208



Sekolah
330.475



Saldo Total
Rp6.408 miliar

Selama triwulan I-2019, OJK melaksanakan kampanye budaya menabung bagi pelajar, yaitu *SimPel goes to School* bagi pelajar SMP 19 Percontohan di Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah.

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi kepada BPR/BPRS yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 BPR/BPRS serta perwakilan PERBARINDO dan BPD Sulselbar.

Pada triwulan I-2019 telah dilakukan pertemuan dalam rangka evaluasi dan rencana program Simpanan Pelajar (SimPel) dengan bank peserta SimPel dengan pembahasan yang dilakukan antara lain kegiatan

sinergi terkait program SimPel pada tahun 2019, yakni:

- Pencanangan Hari Indonesia Menabung dalam bentuk Keputusan Presiden bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- Mendorong SimPel menjadi program nasional yang wajib diikuti seluruh siswa dalam bentuk Instruksi Presiden atau Surat Edaran Kementerian/Lembaga terkait.
- Mengupayakan pencantuman Budaya Menabung sebagai salah satu aspek dalam program Penguatan Pendidikan Karakter Kemdikbud.
- Menyelenggarakan kegiatan SimPel Day 2019 secara berkesinambungan dan masif bersinergi dengan industri keuangan perbankan.

1.5.5 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Tabel I - 57 ◇ Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Jenis Investasi	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
Reksa Dana					
Jumlah	1.849	1.921	2.035	2.098	2.089
Total NAB	496,50	486,56	495,09	505,39	515,09
RDPT					
Jumlah	55	62	59	62	64
Total NAB	18,57	23,39	26,58	26,65	23,96
EBA					
Jumlah	7	7	8	8	7
Nilai Sekuritisasi	6,59	6,32	7,49	7,21	6,98
EBA-SP					
Jumlah	5	5	5	5	5
Nilai Sekuritisasi	4,11	3,75	3,66	3,46	3,26
DIRE					
Jumlah	3	3	4	7	7
Total Nilai	0,59	0,61	0,62	0,72	0,92
KPD					
Jumlah	423	440	478	494	502
Total Nilai	197,59	189,30	196,72	204,77	214,00
DINFRA					
Jumlah	-	-	2	4	4
Total Nilai	-	-	0,33	0,34	0,64

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 10,09% menjadi Rp23,96 triliun pada triwulan I-2019. Namun demikian, jumlah kontrak RDPT justru mengalami kenaikan sebesar 3,22% menjadi 64 RDPT dari sebelumnya 62 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan I-2019 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama periode laporan OJK menerbitkan satu surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA menjadi tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,98 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,26 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada Triwulan I-2019 tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,92 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan I-2019, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 1,62% menjadi 502 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp214,00 triliun atau meningkat sebesar 4,51% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada Triwulan I-2019 tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,64 triliun.

1.5.6 Program 1.000 Aktuaris

Program 1.000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan I-2019, OJK melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 17 orang, sehingga terdapat 585 aktuaris yang terdiri dari 296 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 289 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

1.5.7 Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan I-2019, yaitu melakukan koordinasi internal OJK (Bidang IKNB dengan OJK *Institute*) terkait penyusunan SKKNI Bidang Perasuransian.

1.5.8 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan I-2019, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp13,98 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 129.044 orang dan luas lahan terdaftar adalah 77.703,28 ha (7,77%). Jumlah luas lahan yang diklaim adalah 49 ha dengan nilai klaim berjalan sebesar Rp293,62 juta.

1.5.9 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pada triwulan I-2019, premi AUTS adalah sebesar Rp4,226 miliar,- dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp3,380 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp845, 20 juta. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 21.130 ekor sapi (17,61%) di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 10.999 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp132 juta.

1.5.10 Asuransi Nelayan

Pada triwulan I-2019 belum dilaksanakan Asuransi Nelayan dengan program bantuan premi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, Asuransi Nelayan Mandiri telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 2.996 orang. Jumlah realisasi premi adalah sebesar Rp451,95 juta. Sementara itu, jumlah nilai klaim per triwulan I-2019 adalah sebesar Rp948,931 juta dari sebanyak 55 orang.

1.5.11 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha

dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000,- sampai dengan Rp225.000,- sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Sampai dengan triwulan I-2019, luas lahan terdaftar pada Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil adalah 102,206 juta m2 dengan total premi sebesar Rp2,987 miliar. Nilai klaim per triwulan I-2019 adalah sebesar Rp950,709 juta untuk di 12 provinsi.

1.5.12 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan I-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp548,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 58 ◇ Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo (Rp juta)
1.	Periklanan	9.274
2.	Arsitektur	28.443
3.	Pasar Barang Seni	9.807
4.	Kerajinan	98.110
5.	Desain	2.943
6.	Fashion	62.437
7.	Video, Film, dan Fotografi	11.933
8.	Permainan Interaktif	590
9.	Musik	2.176
10.	Seni Pertunjukan	601
11.	Penerbitan dan Percetakan	44.584
12.	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	5.860
13.	Televisi dan Radio	267
14.	Riset dan Pengembangan	2.665
15.	Kuliner	269.153
Total		548.843



02

Tinjauan Operasional
Sektor Jasa Keuangan



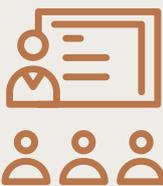
Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan empat POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan Konvensional, sembilan POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal dan satu yang mengatur Pengawasan IKNB Konvensional
- Pemberian Tanda Terdaftar kepada Penyelenggara *Fintech Lending* mencapai 106 entitas
- Penghentian kegiatan Usaha 47 Entitas Investasi Ilegal dan 399 *Fintech P2P Lending* Tanpa Izin



Pengembangan

- Penyelesaian *tools* pemenuhan kebutuhan data pengawas berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX
- Penandatanganan Kerja Sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Kemendagri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Mahkamah Agung dan Bank Indonesia terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK
- Pendirian Sekretariat Bersama LAPS dan Penyusunan *Roadmap* Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam rangka integrasi LAPS
- Pemberian Surat Tanda Terdaftar kepada 34 Penyelenggara Industri Keuangan Digital dan 23 di antaranya menjadi sampel objek *Regulatory Sandbox*
- Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan OJK *Goes to Campus* dan *Financial Expo* di Universitas Pattimura, Ambon dan Universitas Muhammadiyah Makassar
- Penyelenggaraan *Financial Expo* di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
- Peluncuran tiga BUMDesa di Kabupaten Bondowoso, Malang dan Sukoharjo serta dua BUMR di Balikpapan dan Semarang
- Asistensi Layanan Konsumen OJK dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Cirebon, Tegal, Jember, Jayapura, Riau, Samarinda dan Malang
- Edukasi Keuangan bekerja sama dengan Perbanas *Institute*, OJK *Goes to School* di Wonosobo dan Edukasi Keuangan bagi investor saham pemula untuk karyawan dan profesional

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan I-2019, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait bank umum, sebagai berikut:

1. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan *best practice* fungsi audit intern yang diterbitkan oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* serta standar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. Pokok-pokok ketentuan, antara lain adalah kewajiban bank memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI, etika profesional, tanggung jawab dan hubungan kerja sama SKAI dengan unit kerja lainnya. OJK juga mewajibkan penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern tersebut.

2. POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum

Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas PBI 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum agar sesuai dengan standar Basel 3. Pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain:

- a. Dalam sekuritisasi aset, Bank dapat melakukan aktivitas sebagai:
 1. Kreditur awal (*Originator*);
 2. Penyedia kredit pendukung (*Credit Enhancement*);
 3. Penyedia fasilitas likuiditas (*Liquidity Facility*);
 4. Penyedia jasa (*Servicer*);
 5. Investor; dan/atau
 6. Bank kustodian
- b. Perubahan ketentuan Bank yang dapat melakukan kegiatan sekuritisasi aset.
- c. Pengean bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk eksposur sekuritisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Basel 2.
- d. Perubahan penyampaian laporan kepada OJK yaitu disampaikan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan OJK.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan I-2019 OJK menerbitkan ketentuan Industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

- a. POJK Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif
Pokok-pokok ketentuan yang dimuat antara

lain mengenai kegiatan usaha PPA, permodalan dan pemegang saham PPA, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PPA dan Operasional dan Pengendalian Internal PPA.

b. POJK Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain Definsi PPE-EBUS, Ketentuan transaksi Efek bersifat utang dan sukuk (EBUS), Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS, Persyaratan pihak yang melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS dan Kegiatan yang dapat dilakukan oleh PPE-EBUS, Pengecualian bagi Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pengaturan mengenai ketentuan peralihan.

2. Konversi Peraturan Bapepam dan Peraturan Bapepam-LK

- a. POJK Nomor 2/POJK.04/2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek
- b. POJK Nomor 3/POJK.04/2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring Dan Penjaminan
- c. POJK Nomor 4/POJK.04/2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian
- d. POJK Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi
- e. POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum
- f. POJK Nomor 7/POJK.04/2019 tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, Atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

- a. SEOJK Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah secara Elektronik melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
- b. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2019 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan I-2019, OJK menetapkan sebanyak dua ketentuan terkait Industri Jasa Keuangan Non Bank dengan detail sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan ini merupakan ketentuan mengenai laporan aktuaris tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan amanat ketentuan Pasal 16 ayat (10) POJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh OJK. Adapun pokok-pokok pengaturan mencakup ketentuan Bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian Laporan Aktuaris Tahunan.

2. SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun

Peraturan ini merupakan ketentuan mengenai laporan berkala Dana Pensiun sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) POJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan

Berkala Dana Pensiun. Adapun pokok-pokok pengaturan mencakup bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Berkala bagi Dana Pensiun.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan I-2019, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 ◇ Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank (KB)	Kasus (PKP)
1. PKP yang diterima	1	4	4	15	5	19
2. PKP dalam proses analisis *)	2	3	9	10	5	19
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	0	0	0	0	0	0
4. PKP yang diinvestigasi *)	3	6	6	18	9	24
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	1	1	3	5	2	8
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	2	5	3	13	7	16
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	8	0	24	8	24
6. Pengambilalihan kasus oleh Satker Penyidikan (tanpa melalui Proses Pelimpahan)	0	0	0	0	0	0

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan I-2019 terdapat 24 kasus dugaan tipibank, diantaranya pada bidang perkreditan sebanyak 15 kasus (62%), bidang pendanaan sebanyak 3 kasus (13%), bidang penyalahgunaan aset sebanyak lima kasus (21%), dan bidang lainnya sebanyak satu kasus (4%).

Mengingat penyebab dugaan tipibank antara lain bersumber dari internal bank, manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan independent review oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan I-2019 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 ◇ Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	0	11	11
2.	Kejaksaan RI	3	10	13
Total		2	21	24

Ketentuan Uang Muka (Down Payment) 0%: Sangat Selektif

OJK mengeluarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan Industri Pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. POJK yang merupakan perbaikan dari POJK sebelumnya ini diterbitkan juga untuk meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam perekonomian nasional, meningkatkan pengaturan prudensial, dan meningkatkan perlindungan konsumen. POJK ini mengatur bisnis Perusahaan Pembiayaan mulai dari jenis kegiatan usaha dan perluasannya serta cara pembiayaan, termasuk pembiayaan infrastruktur serta penggunaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi oleh setiap Perusahaan Pembiayaan.

POJK ini juga mengatur pemberian uang muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan berbagai persyaratan tergantung Tingkat Kesehatan Keuangan dan nilai Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Neto. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan uang muka nol persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan multiguna. Ketentuan uang muka nol persen ini sangat selektif karena hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat dan NPF nya di bawah 1 persen dan diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko sangat baik. Karakteristik perusahaan pembiayaan yang sehat ditandai dengan pemilihan atau seleksi segmen market yang jelas dan proses *underwriting* yang hati-hati. Ketentuan uang muka nol persen ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan alternatif transportasi yang sesuai kemampuannya.

Jenis Kendaraan	Sebelumnya (SEOJK 47/2016)					Perubahan (POJK 35/2018)				
	NPF ≤ 1% TKK min Sehat	1% < NPF ≤ 3% TKK min Sehat	3% < NPF ≤ 5% TKK min Sehat	NPF ≤ 5% TKK ≠ Sehat	NPF > 5%	NPF ≤ 1% TKK min Sehat	1% < NPF ≤ 3% TKK min Sehat	3% < NPF ≤ 5% TKK min Sehat	NPF ≤ 5% TKK ≠ Sehat	NPF > 5%
	5%	10%	15%	15%	20%	0%	10%	15%	15%	20%
	5%	10%	15%	15%	20%	0%	10%	15%	15%	20%
	5%	10%	15%	20%	25%	0%	10%	15%	20%	25%

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3. Sosialisasi

Dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan I-2019 dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan dan mahasiswa di Semarang. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan di dua tempat yaitu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (Untag).

B. Kelembagaan Bank Umum

Pada tahun 2019, OJK mengeluarkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu reformasi internal berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan I-2019, telah diselesaikan 79 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 38 perizinan dan perubahan status Kantor Cabang (KC) menjadi KCP sebanyak 14 perizinan.

Adapun persetujuan perubahan nama bank diberikan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk menjadi PT BANK BTPN, Tbk per 28 Januari 2019. PT BANK BTPN merupakan hasil merger PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI), sehingga berpengaruh pada penurunan jumlah bank.

Tabel II - 3 ◇ Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU*

No.	Jenis Perizinan	Triwulan I-2019
1.	Pembukaan Bank umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	2
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2
	d. Kantor Fungsional (KF)	2
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
2.	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	38
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	9
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KP menjadi KC	1
	- KK menjadi KCP	4
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	14
	- KCP ke KF/KK	-
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger Bank Umum	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	1
	Jumlah	79

*) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

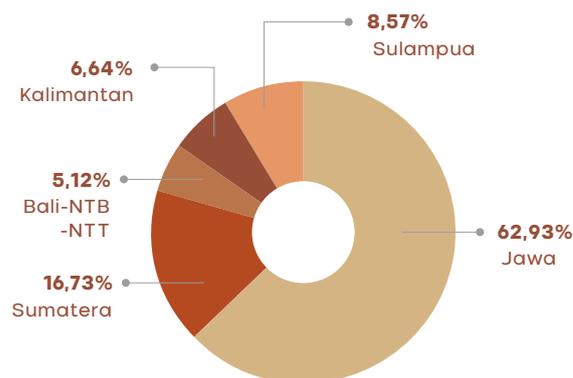
Pada triwulan I-2019, jaringan kantor BUK bertambah 1.509 unit dari triwulan sebelumnya 138.063 jaringan kantor menjadi 139.572 jaringan kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 4 ◇ Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Kantor Pusat Operasional	48	48
2.	Kantor Pusat Non Operasional	54	53
3.	Kantor Cabang Bank Asing	9	9
4.	Kantor Wilayah	174	173
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.877	2.888
6.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	1
7.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	26	25
8.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.143	16.158
9.	Kantor Kas	10.326	10.318
10.	Kantor Fungsional	1.076	1.111
11.	Payment Point	2.056	2.056
12.	Kas Keliling/ Kas Mobil/ Kas Terapung	1.330	1.420
13.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	12	12
14.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	2
15.	ATM/ADM	103.932	105.298
Total		138.063	139.572

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 87.838 jaringan kantor (62,93%), diikuti pulau Sumatera 23.348 (16,73%), Sulampua 11.968 (8,57%), Kalimantan 9.266 (6,64%), dan Bali-NTB-NTT 7.152 (5,12%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada ATM/ADM dan kas keliling/kas mobil/kas terapung yang masing-masing bertambah 734 unit dan 68 unit.

Grafik II - 1 ◇ Penyebaran Jaringan Kantor BUK



3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2019, dari 81 pemohon terdapat 34 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 32 calon yang lulus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi BUK dan mendapatkan Surat Keputusan (SK), termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel II - 5 ◇ FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditindaklanjuti	TW I-2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
Dewan Komisaris	17	3	15	1	1	37
Direksi	17	5	17	2	3	44
Total	34	8	32	3	4	81

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan I-2019, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu proses *merger* dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

a. Proses *Merger*, yaitu pada:

1. PT BPR Dhana Sewu ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.

2. PT BPR Phidectama Sentani ke dalam PT BPR Phidectama Abepura.
3. PT BPR Bumibekasi Artha ke dalam PT BPR Karyajatnika Sadaya; dan
- b. Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pancadana dan PT BPR Artha Panggung Perkasa.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2019, terdapat 1.593 BPR dengan 14.912 jaringan kantor. 6.297 di antaranya

merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan empat BPR, sementara kantor BPR bertambah sebanyak 24 kantor.

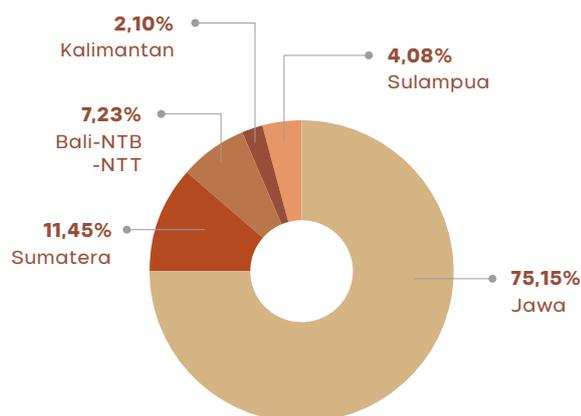
Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,15% (4.732 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,45% (721 kantor). Penurunan empat BPR tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, peningkatan kantor BPR sebagian besar terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tabel II - 6 ◇ Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2019

Jaringan Kantor	2018		2019
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
Kantor Pusat (KP)	1.615	1.597	1.593
Kantor Cabang (KC)	1.651	1.682	1.700
Kantor Kas (KK)	2.960	2.994	3.004
ATM	228	226	177
Payment Point	8.832	8.846	8.438
Total	15.286	15.345	14.912

Sumber: OJK

Grafik II - 2 ◇ Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2019



Sumber: OJK, Maret 2019

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Pada triwulan I-2019, telah dilakukan FPT New Entry¹ kepada 400 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 318 calon (79,50% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 82 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel II - 7 ◇ Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan I-2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	156	56	212
Komisaris	130	23	153
PSP	32	3	35
Jumlah	318	82	400

1) *Fit and Proper New Entry* adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai triwulan I-2019, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- Monitoring* terhadap 27 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	4
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	4
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	3
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	16

- Penelaahan terhadap enam perdagangan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, empat saham sedang dilakukan penelaahan, sementara dua saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.
- Pemeriksaan teknis terhadap empat saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk

membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, satu saham sedang dilakukan pemeriksaan, sementara tiga saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan I-2019, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

- a. *Review alert* pada bulan Januari, Februari dan Maret yang menghasilkan 3.122 alert Obligasi Pemerintah, 2.644 alert Obligasi Korporasi dan 543 alert waran. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap satu seri Waran, penelaahan terhadap tiga Obligasi Pemerintah, dan *monitoring* terhadap delapan seri Obligasi Pemerintah, lima seri Obligasi Korporasi dan tujuh seri Waran.
- b. Penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA) bulan Januari, Februari dan Maret 2019.

3. Pengawasan Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan I-2019, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). OJK mengakomodasi penyampaian tanggapan atas hasil RUPS-LB PT PHEI, Rekomendasi atas pencalonan BEI sebagai pemegang saham PT Pefindo Biro Kredit, penyampaian tanggapan atas laporan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko P3IEI, penyampaian tanggapan atas penyampaian realisasi KPI unggulan PT BEI tahun 2018, penyampaian tanggapan atas laporan kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek PT KSEI bulan Desember 2018, penyampaian tanggapan atas laporan pencapaian KPI PT KSEI tahun 2018, penetapan jumlah kebutuhan dan jabatan direksi PT KSEI masa jabatan 2019-2022, penyampaian tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja PT KSEI.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Selama triwulan I-2019, OJK memberi persetujuan terhadap 17 perubahan susunan direksi, 15 perubahan susunan komisaris, dan tiga proses persetujuan perubahan pemegang saham.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan I-2019 sebesar

Rp23,74 triliun atau naik sebesar 1,11% dari rata-rata triwulan IV-2018. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 106 Perusahaan Efek Anggota Bursa, semuanya memenuhi nilai MKBD di bawah MKBD yang dipersyaratkan.

Selain itu, OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 27 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 22 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.

Atas pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan I-2019 terdapat lima Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan Desember 2018, empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan Januari 2019, dan tiga Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada bulan Februari 2019. Adapun Perusahaan Efek dimaksud yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.

5. Pemeriksaan terhadap Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

OJK melakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan setempat terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang telah diperiksa pada akhir tahun 2018. Pada periode ini juga telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun fokus pemeriksaan PT BEI adalah pencatatan efek, edukasi dan pemasaran, serta keamanan informasi. Sampai dengan berakhirnya triwulan I-2019, sedang disusun Hasil Pemeriksaan Sementara atas PT BEI.

6. Pemeriksaan Kepatuhan dan Teknis Perusahaan Efek

OJK melakukan pemeriksaan setempat terhadap delapan Kantor Pusat Perusahaan Efek. Adapun fokus pemeriksaan adalah hasil *Risk Based Supervision* (RBS) atas masing-masing Perusahaan Efek tersebut, dan *Risk Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU-PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan I-2019, sedang dilakukan penyusunan hasil pemeriksaan sementara atas delapan Kantor Pusat Perusahaan Efek.

Terkait pemeriksaan teknis, telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap 60 Perusahaan Efek yang diperiksa tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan pembiayaan penyelesaian transaksi oleh Perusahaan Efek. Pada triwulan I-2019, sedang dilakukan pemeriksaan teknis terhadap dua Perusahaan Efek. Sampai dengan berakhirnya triwulan I-2019, sedang dilakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan teknis.

B. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

OJK telah menyelesaikan empat LHP atas pemeriksaan MI sebelumnya. Di samping itu enam LHP masih dalam proses permintaan konfirmasi, dan dua dalam tahap finalisasi. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu PE APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi.

Terkait pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, OJK telah menyelesaikan satu LHP dan dua LHP masih dalam proses permintaan konfirmasi. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, dua BK masih dalam proses permintaan konfirmasi.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan I-2019, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Januari, Februari, dan Maret 2019 dengan tepat waktu.

Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan I-2019, terdapat satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Januari 2019, dua MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Februari 2019, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Maret 2019.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 8 ◇ Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Jaringan Kantor	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Transaksi Afiliasi	60	61
2.	Transaksi Afiliasi Bersama Dengan Transaksi Material	1	4
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	16	5
4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	8	1
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	0	0
6.	Pembagian Saham Bonus	1	0
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	2	0
8.	Pembagian Dividen Saham	0	0
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	10	17
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	0	0
11.	Pembelian Kembali Obligasi	1	0
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	5	0
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	0	2
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	0	2
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	1	3
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	2	0
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	0	2

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 9 ◇ Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2018		LT 2018	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	518	73,2%	83	12,7%
2.	Terlambat	0	0%	0	0%
3.	Belum Menyampaikan	176	24,9%	564	85%
4.	Emiten Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	8	1,1%	9	1,4%
5.	Belum Wajib Menyampaikan	6	0,8%	6	0,9%

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan I-2019 terdapat 143 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana 119 laporan tepat waktu, dan 24 laporan terlambat. Selanjutnya, selama triwulan I-2019 OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 238 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 36 laporan hasil pemeringkatan efek, 55 hasil RUPS, serta 15 laporan penjatahan Penawaran Umum. OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan I-2019 sebanyak 547 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Selama triwulan I-2019, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 12 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- a. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- c. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- d. Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- g. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- h. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan pengumuman;

- i. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

OJK melaksanakan penelaahan atas 52 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 25 laporan dari Akuntan, 10 laporan dari Konsultan Hukum, 14 laporan dari Penilai, tiga laporan dari Notaris dan tujuh laporan Perubahan Data ASPM.

OJK melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) dan pemetaan/*mapping* yang dilakukan terhadap beberapa lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE);
- b. Pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga Bank Kustodian (BK);
- c. Pemetaan/*mapping* terhadap tiga Notaris Pasar Modal
- d. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Konsultan Hukum; dan
- e. Sedang melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Konsultan Hukum (KH) lainnya.

Dari kegiatan pemeriksaan dan/atau *mapping* hingga tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kepatuhan PPE telah diselesaikan.

Terkait Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal tahun 2019 akan dilakukan terhadap 12 KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Pada triwulan I-2019, OJK telah mengirimkan berkas pemeriksaan kepada 12 KAP.

OJK juga melakukan penelaahan dan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan atas tiga permohonan persetujuan sebagai Bank Kustodian dan mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar atas satu permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat.

Selama Triwulan I-2019, OJK telah melakukan penelaahan atas enam permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal. Pada Triwulan I-2019, OJK telah mengeluarkan enam Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai dengan triwulan I-2019 OJK telah melaksanakan pemeriksaan Pasar Modal sebanyak 46 pemeriksaan yang terdiri dari dua Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi, 16 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan 28 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

Selain itu, terdapat satu pemeriksaan yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan dugaan pelanggaran antara lain ketentuan terkait Manipulasi Pasar.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan I-2019, OJK telah menetapkan sebanyak 226 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 10 ◇ Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		Perintah Tertulis	
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	65	130 dengan total denda sebesar Rp8.679.740.000		1 Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi kepada Perusahaan Efek
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	3	18 dengan total denda sebesar Rp5.495.000.000	1 Pembekuan Izin Wakil Perusahaan Efek kepada Perorangan	
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	8	-		
Total	76	148	1	1

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2018 dan 2019, selama triwulan I-2019 OJK menetapkan 58 Surat Teguran Pertama dan 14 Surat Teguran Kedua dan 16 pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak enam rekomendasi sanksi administratif, 12 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta dua rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan I-2019, OJK menindaklanjuti 25 Permohonan Keberatan di mana sembilan Keberatan telah ditanggapi dan 16 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan I-2019, OJK melakukan analisis terhadap delapan laporan keuangan berkala Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 11 ◇ Analisis Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
Januari 2019	1	1	-	-
Februari 2019	-	4	-	-
Maret 2019	-	2	-	-

2. Pemeriksaan (on-site supervision)

Pada periode triwulan I-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan Perusahaan Asuransi Umum dan lima Perusahaan Asuransi Jiwa.

Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan 12 LHP yang terdiri dari empat LHP Sementara dan delapan LHP Final.

3. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2019, OJK telah mengenakan sanksi dan/atau pencabutan sanksi kepada 19 perusahaan. Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari dua surat pencabutan sanksi peringatan pertama dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 12 ◇ Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	Pencabutan Sanksi PKU
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3		
Terlambat menyampaikan pelaksanaan rekomendasi	2	-	-	-	-	-	-	-
Tidak melakukan penyesuaian uang pertanggungan dan tarif premi	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan belum menampilkan ringkasan laporan keuangan tahunan serta ringkasan laporan keuangan triwulanan pada situs web Perusahaan	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat menyampaikan Laporan penunjukan AP KAP	6	-	-	-	-	-	7	-
Perusahaan belum melakukan pemisahan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan Direktur yang membawahi fungsi teknis	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan belum melakukan pemisahan fungsi klaim dan <i>underwriting</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan belum memiliki dukungan treaty untuk produk CAKAP	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan belum melakukan reviu kinerja produk	1	-	-	-	-	-	-	-
Terdapat anggota Direksi yang belum memiliki sertifikasi manajemen risiko	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan melakukan transaksi derivatif saham	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan tidak memohon persetujuan OJK untuk perubahan kepemilikan	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat menyampaikan laporan treaty 2019	2	-	-	-	-	-	-	-
Tidak memenuhi beberapa ketentuan terkait APU dan PPT	1	-	-	-	-	-	-	-
Tidak menyampaikan surat penunjukkan KAP	3	-	-	-	-	-	3	-
Tidak memenuhi jumlah minimum rasio kecukupan investasi	1	-	-	-	-	-	-	-
Terkait pemenuhan pemenuhan <i>single present policy</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	-	-	-	-	-	5	-
Melaksanakan perubahan kepemilikan sebelum memperoleh persetujuan dari OJK	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat menyampaikan laporan bulan Januari 2019	1	-	-	-	-	-	-	-

Penyebab	Penaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	Pencabutan Sanksi PKU
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3		
Jumlah komisaris, jumlah kominde, RBC, RKI, ekuitas, nilai hutang klaim lebih dari 30 hari	-	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan tidak menyampaikan laporan berkala penunjukkan AP dan KAP	-	-	-	-	-	-	5	-
Perusahaan belum memenuhi jumlah dan komposisi dewan komisaris	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat melakukan pembayaran denda	-	-	-	-	-	-	1	-
Tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan penambahan modal disetor Perusahaan kepada OJK	1	-	-	-	-	-	-	-
Tidak menyampaikan surat penunjukkan KAP	1	-	-	-	-	-	1	-
Tidak memenuhi jumlah Direksi	1	-	-	-	-	-	-	-
Melanggar peraturan yang berlaku	-	-	-	1	-	-	-	-
Laporan Keuangan yang tidak di-upload di web	-	-	-	1	-	-	-	-
Total	21	-	-	2	-	-	22	1

4. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan I-2019, OJK menindaklanjuti sebanyak 35 pengaduan terkait klaim asuransi.

5. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahaan Cadangan

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan I-2019, OJK telah memproses 23 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan I-2019, OJK menerima 30 permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan I-2019, terdapat tiga permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (off-site supervision)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana

Pensiun pada triwulan I-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 13 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
Dana Pensiun Pemberi Kerja	203	204	201	2	1	4
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	25	25	0	0	0
Total	228	229	226	2	1	4

2. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun, yaitu:

- Dana Pensiun Jakarta International Hotels dan Development;
- DPLK Pasaraya;
- Dana Pensiun Asuransi Ramayana;
- Dana Pensiun Pfizer Indonesia;
- Dana Pensiun Cardig Group;
- DPLK Jiwasraya;
- Dana Pensiun Jiwasraya;
- Dana Pensiun Pegawai Gelora Senayan;
- Dana Pensiun Pertani.

Pada triwulan I-2019, OJK telah menerbitkan empat LHP Sementara (LHPS).

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan I-2019, OJK telah mengenakan sanksi peringatan tertulis pertama kepada 28 Dana

Pensiun, sanksi peringatan tertulis kedua kepada tiga Dana Pensiun, sanksi peringatan tertulis ketiga kepada satu Dana Pensiun, teguran tertulis pertama kepada tiga Dana Pensiun, teguran tertulis kedua kepada dua Dana Pensiun, dan sanksi denda administrasi kepada 13 Dana Pensiun.

Tabel II - 14 ◇ Penegakan Kepatuhan terhadap Dana Pensiun

Penyebab	Peringatan			Teguran			Denda Administrasi
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3	
Sanksi Denda Atas Penyampaian Laporan Penunjukkan AP dan/atau KAP Dalam Rangka Audit Laporan Keuangan Dana Pensiun Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	10
Teguran tertulis tidak menyampaikan realisasi pengkinian data 2017	-	-	-	1	-	-	-
Sanksi Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Tahun 2017	-	-	-	-	-	-	1
Sanksi Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	1
Sanksi Denda atas Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT	-	-	-	-	-	-	1
Peringatan Tertulis terkait kewajiban pihak utama melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis terkait kewajiban pihak utama melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis kedua terkait kewajiban pihak utama melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	-	1	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis Kedua terkait penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja Investasi oleh Dewan Pengawas Periode Semester I Tahun 2018	-	-	-	-	1	-	-
Teguran tertulis kedua terkait pelanggaran batasan investasi per jenis dan per pihak	-	-	-	-	1	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait keterlambatan menyampaikan laporan keuangan bulan Desember 2018	6	-	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait tidak menyampaikan laporan keuangan bulan Desember 2018	4	-	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait keterlambatan menyampaikan laporan keuangan bulan Januari 2019	1	-	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait tidak menyampaikan laporan keuangan bulan Januari 2019	1	-	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait keterlambatan menyampaikan laporan keuangan bulan Februari 2019	1	-	-	-	-	-	-
Teguran Tertulis pertama terkait tidak menyampaikan laporan keuangan bulan Februari 2019	1	-	-	-	-	-	-
Peringatan tertulis terkait belum menyampaikan laporan rencana inklusi	2	-	-	-	-	-	-
Peringatan tertulis terkait keterlambatan penyampaian laporan rencana literasi dan inklusi	4	-	-	-	-	-	-
Peringatan tertulis terkait penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	2	-	-	-	-	-	-
Teguran Pertama terkait kewajiban pembayaran SIPO tahap IV tahun 2018	-	-	-	2	-	-	-
Peringatan Tertulis Pertama Terkait Pemenuhan SBN	5	-	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Kedua Terkait Pemenuhan SBN	-	2	-	-	-	-	-
Peringatan Tertulis Ketiga Terkait Pemenuhan SBN	-	-	1	-	-	-	-
Total	28	3	1	3	2	-	13

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan I-2019, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Desember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019 dan enam laporan keuangan bulanan periode

Desember 2018, Januari 2019 dan Februari 2019 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, belum dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan per triwulan I-2019.

D. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan I-2019, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan

modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Desember 2018-Februari 2019.

Tabel II - 15 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019
LBPP	5	11	6	180	174	179
LBPMV	4	9	2	62	57	64
LBPPI	0	0	0	2	2	2

*1) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-

Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari delapan Perusahaan Pembiayaan dan lima Perusahaan Modal Ventura.

Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS).

Tabel II - 16 ◇ Pemeriksaan (*On-site Supervision*) Lembaga Pembiayaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	Commerce Finance	Perusahaan Pembiayaan
2.	Buana Sejahtera Multidana	Perusahaan Pembiayaan
3.	AEON Credit Service Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
4.	Asia Pacific Ventura	Perusahaan Modal Ventura
5.	Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance	Perusahaan Pembiayaan
6.	Karya Ventura	Perusahaan Modal Ventura
7.	Sarana Sumbar Ventura	Perusahaan Modal Ventura
8.	Bringin Srikandi Finance	Perusahaan Pembiayaan
9.	Nusa Surya Ciptadana	Perusahaan Pembiayaan
10.	Astra Sedaya Finance	Perusahaan Pembiayaan
11.	Oto Multiartha	Perusahaan Pembiayaan
12.	Sarana Jatim Ventua	Perusahaan Modal Ventura
13.	Maju Raya Sejahtera	Perusahaan Modal Ventura

Tabel II - 17 ◇ Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	5
LHPF telah dikirimkan	11

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan I-2019, OJK mengenakan 196 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari 126 sanksi peringatan pertama (SP 1), 24 sanksi peringatan kedua (SP 2), 30 sanksi peringatan ketiga (SP 3), dan 16 sanksi pembekuan kegiatan usaha.

4. Perkembangan Penerapan Risk Based Supervision

Selama triwulan I-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap delapan Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan batas

waktu penyampaian laporan *self assessment* atas tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan terdapat 166 Perusahaan Pembiayaan yang telah melaporkan.

5. Sosialisasi Fidusia

OJK melaksanakan Sosialisasi Fidusia di Bojonegoro, Tasikmalaya, Bandung, dan Solo. Peserta kegiatan sosialisasi adalah pimpinan atau perwakilan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat terdiri dari OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak selaku narasumber.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pemberian Izin Usaha LKM

15 izin usaha yang terdiri dari tiga izin usaha bersyarat dan 12 izin usaha penuh. Sementara itu, terdapat 19 izin usaha LKM yang tidak berlaku kembali, sehingga sampai dengan triwulan I-2019 terdapat 174 LKM.

Tabel II - 18 ◇ Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha

No.	Nama LKM	Jenis Usaha	Asal Daerah
1.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sariro Utomo	Konvensional	Grobogan
2.	Koperasi LKMA Arta Makmur Sejahtera	Konvensional	Magelang
3.	Koperasi LKMA Sido Makmur Sentosa	Konvensional	Grobogan
4.	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Surya Mandiri	Konvensional	Pemalang
5.	Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Tani Mugi Rahayu Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang	Konvensional	Pekalongan
6.	Koperasi LKMS MM Sejahtera Propinsi Bengkulu	Syariah	Bengkulu
7.	Koperasi LKM Agribisnis Mojo Agung Sejahtera	Konvensional	Kendal
8.	Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur	Konvensional	Kab Kebumen
9.	Koperasi LKM Agribisnis Mekar Jaya	Konvensional	Kab Lampung Tengah
10.	Koperasi LKMA Tani Makmur Merapi	Konvensional	Kabupaten Magelang
11.	Koperasi LKM Agribisnis Sido Jaya Abadi	Konvensional	Tulang Bawang
12.	Koperasi LKMS BWM Fajar Pelita Harapan	Syariah	Siak
13.	Koperasi LKMA Gapoktan Sido Mulyo	Konvensional	Kabupaten Pekalongan
14.	Koperasi LKMS AI Hidayah Rokan Hulu	Syariah	Kabupaten Rokan Hulu
15.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Sumber Barokah	Konvensional	Kabupaten Kebumen

2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan LKM

OJK melakukan pendampingan secara langsung untuk melihat profil dan proses bisnis LKM. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada LKM bermasalah seperti LKM yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi maupun LKM yang memiliki *fraud*.

Pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan pendampingan LKM di empat kota dengan total sebanyak lima LKM, sebagai berikut:

Tabel II - 19 ◇ Pelaksanaan Pendampingan LKM

No.	Lokasi	Nama LKM
1.	Klaten	Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Al Muttaqien Pancasila Sakti
2.	Sukoharjo	Koperasi LKMS Bank wakaf Imam Syuhodo
3.	Rangkasbitung	PT LKM Rangkasbitung
4.	Serang	1. Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanar 2. Koperasi LKM Syariah Lan Taburo

3. Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian BWM di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan I-2019, jumlah BWM terus meningkat menjadi 43 BWM. BWM yang diberikan izin selama triwulan I-2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel II - 20 ◇ LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

No.	Nama LKM Syariah
1.	Koperasi LKMS BWM Fajar Pelita Harapan
2.	Koperasi LKMS Al Hidayah Rokan Hulu

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara pelatihan pengelola BWM, evaluasi, dan monitoring dalam rangka pengembangan BWM.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan I-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 Lembaga Keuangan Khusus yang terdiri dari sembilan Perusahaan Penjaminan dan tiga Perusahaan Pergadaian. Pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Keuangan Khusus pada triwulan I-2019 sebagai berikut:

Tabel II - 21 ◇ Jumlah Pemeriksaan Langsung

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Jamkrida Kalbar
2.	PT Gadai Pinjam Indonesia
3.	PT Jamkrida Sulsel
4.	PT Jamkrida Kalteng
5.	PT Jamkrida Babel
6.	UD Ijab
7.	PT PKPI
8.	PT Jamkrida NTB
9.	PT Jamkrida Jabar
10.	PT Jamkrida Kalsel
11.	PT Jamkrida Sumbar
12.	PT Pusat Gadai Indonesia

Tabel II - 22 ◇ Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)

No.	Nama Perusahaan	Ket
1.	PT Jamkrida Kalbar	LHPS
2.	PT Gadai Pinjam Indonesia	LHPS
3.	PT Jamkrida Sulsel	LHPS

Berdasarkan pemeriksaan langsung yang telah diselesaikan, telah diterbitkan sebanyak tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS).

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan I-2019, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

1. Menyelesaikan pemeriksaan tematik sebanyak 13 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, yaitu sebanyak 11 pemeriksaan terhadap Perusahaan Pialang Asuransi dan dua Perusahaan Pialang Reasuransi, serta terdapat pemeriksaan cabang terhadap dua Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Menerbitkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);

3. Mengenaikan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 70 sanksi yang terdiri dari 36 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), lima Sanksi Peringatan Kedua (SP2), empat Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 22 Sanksi Administratif berupa Denda, dan tiga Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan I-2019.

H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan I-2019, OJK menerima 1.345 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Rincian permohonan perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan I-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 23 ◇ Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Laporan	Permohonan Triwulan I-2019	Outstanding Triwulan IV-2018	Status			
				Selesai	Proses*	Batal	Pengembalian Dokumen**
1.	Pemberian Izin Usaha	2	2	2	2	0	0
2.	Perubahan Nama	0	1	0	0	0	0
3.	Perubahan Kepemilikan	11	45	9	45	1	1
4.	Penambahan Modal	3	16	4	14	1	0
5.	Perubahan Pengurus	39	66	25	71	5	4
6.	Perubahan Alamat	7	14	4	16	0	1
7.	Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan	6	5	4	6	1	0
8.	Pendaftaran Tenaga Ahli	19	34	19	32	2	0
9.	Pendaftaran Pialang Asuransi	16	16	12	15	2	3
10.	Pendaftaran Pialang Reasuransi	2	2	3	1	0	0
11.	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	1	0	1	0	0	0

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

**) Pengembalian dokumen dilakukan apabila dokumen yang disampaikan pihak pemohon (perusahaan) belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dan harus dilengkapi secara benar jika permohonan ingin diproses

Pada triwulan I-2019 terdapat penambahan jumlah profesi terdaftar, yaitu 31 Akuntan Publik, satu Konsultan Aktuaria, dan 11 Penilai, sehingga sampai

dengan triwulan I-2019 jumlah Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai yang berkegiatan di IKNB tersaji sebagai berikut:

Tabel II - 24 ◇ Pendaftaran Profesi sampai dengan Triwulan I-2019

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada Triwulan I-2019	Total Jumlah Profesi Terdaftar sampai dengan Triwulan I-2019
Akuntan Publik	31	396
Konsultan Aktuaria	1	31
Penilai	11	159
Total	43	586

Pada triwulan I-2019 terdapat penambahan jumlah agen terdaftar di OJK sebanyak tiga Agen Penjamin Berbadan Hukum, enam Agen Penjamin Perseorangan, dan dua Agen Asuransi Berbadan Hukum. Sementara

itu, berdasarkan data laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), jumlah Agen Asuransi Perseorangan bertambah sebanyak 517 orang.

Tabel II - 25 ◇ Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan Triwulan I-2019

Jenis Profesi	Jumlah Agen Terdaftar sampai dengan Triwulan I-2019
Agen Asuransi Perseorangan	
a) Asuransi Umum	20.106
b) Asuransi Jiwa	603.605
Agen Asuransi Berbadan Hukum	6
Agen Penjamin Perseorangan	56
Agen Penjamin Berbadan Hukum	51

Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli.

dan kepatutan dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan I-2019 terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) POJK Nomor 27 tahun 2016 tersebut, penetapan hasil penilaian kemampuan

Tabel II - 26 ◇ Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan I-2019		Jumlah
	Disetujui	Tidak Disetujui	
Pemegang Saham Pengendali	9	0	9
Komisaris	31	7	38
Direksi	29	2	31
Total	69	9	78

Pada triwulan I-2019 terdapat penambahan satu Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan Pialang Reasuransi yang baru diberikan izin usaha dan terdapat pencabutan izin usaha terhadap dua Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Perusahaan

Pialang Reasuransi, sehingga jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan I-2019 adalah 234 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 27 ◇ Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Sampai dengan Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019		Jumlah sampai dengan Triwulan I-2019
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	165	1	2	164
2.	Pialang Reasuransi	43	1	1	43
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
Total		235	2	3	234

1. Permohonan dan Pendaftaran Usaha

Pada periode triwulan I-2019, terdapat satu permohonan izin usaha perusahaan asuransi umum, satu permohonan izin usaha perusahaan asuransi jiwa, dan sembilan pendaftaran perusahaan pergadaian. Selanjutnya, *outstanding* permohonan izin usaha sampai dengan triwulan IV 2018 terdiri dari satu permohonan izin usaha perusahaan asuransi umum, satu permohonan izin usaha perusahaan asuransi jiwa, tiga permohonan

pembentukan dana pensiun, empat permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan, satu permohonan izin usaha perusahaan modal ventura, dan enam permohonan izin usaha perusahaan pergadaian. Berdasarkan jumlah dimaksud, lima permohonan telah diselesaikan termasuk dua pendaftaran perusahaan pergadaian. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 ◇ Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan/ Dibatalkan
	Outstanding s.d. Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	1	2	1	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	1	2	-	1	-	1
Dana Pensiun	3	-	3	-	3	-	-
Perusahaan Pembiayaan	4	-	4	1	3	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	6	9	15	2	11	2	-
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	-	-	-	-	-	-	-
Total	16	11	27	5	19	2	1

*) Telah ditanggapi meliputi dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Pemberian izin usaha IKNB selama triwulan I-2019 yaitu:

Tabel II - 29 ◇ Pemberian Izin Usaha IKNB selama periode Triwulan I-2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Sinar Mas Ventura	Perusahaan Modal Ventura
2.	PT Asuransi Total Bersama	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT Gadai Lestari Jaya	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Asli Gadai Sejahtera	Perusahaan Pergadaian
5.	PT SGMW Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan

Sementara itu, selama periode triwulan I-2019 tidak terdapat perusahaan pergadaian yang diberikan pernyataan terdaftar, karena jangka waktu pengajuan pernyataan terdaftar bagi perusahaan

pergadaian telah berakhir. Adapun perusahaan pergadaian yang telah diberikan pernyataan terdaftar per tanggal 31 Maret 2019 sebanyak 71 perusahaan pergadaian, yaitu:

Tabel II - 30 ◇ Pemberian Pernyataan Terdaftar Perusahaan Pergadaian

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	KSU Dana Usaha	37.	PT Eka Pesona Abadi
2.	KSP Mandiri Sejahtera Abadi	38.	KSU Citra Sembilan Sembilan
3.	PT Mas Agung Sejahtera	39.	CV Berkat Mandiri Sejahtera
4.	PT Svaraputra Penjuru Vijaya	40.	PT Surya Gadai Prima
5.	PT Pusat Gadai Indonesia	41.	UD Firdana
6.	PT Persada Arihta Mandiri	42.	Koperasi Rizky Abadi
7.	Solusi Gadai	43.	Koperasi Bangun Citra Mandiri
8.	CV Soverino Ekasakti	44.	Unit Primer Simpan Pinjam Yasper
9.	UD Ijab	45.	Unit Primer Simpan Pinjam Kosipral
10.	Mitra Kita	46.	Pegadaian TOKO Mas Kresno
11.	CV Prima Perkasa	47.	Gadai Mitra Sima
12.	Gadai Murah Jogja	48.	Gadai Arta Sima
13.	PT Awi Gadai Jogja	49.	Koperasi Manfaat Bersama
14.	Mari Gadai	50.	KSU Bintang Timur
15.	Gadai Ogan	51.	Koperasi Cahaya Jaya
16.	Gadai Oke	52.	Bonar Jaya Gadai
17.	Gadai Smile	53.	Gadai Hinalang Jaya
18.	Indotech Gadai	54.	Mangun Jaya Gadai
19.	PT Nabasa Jaya	55.	Barokah Gadai Sejahtera
20.	KSU Ar Rahman Berbagi Berkah	56.	Gadai Putra Salomo
21.	CV Pioneer Kita	57.	KSU Tunas Mulia
22.	Hendrik Wibowo	58.	UD Mitra Usaha
23.	PT Cipta Dana Gadai	59.	Kembar Gadai (Sdr. Lilis Agustina Panjaitan)
24.	Fiqri Phone (Sdr. Akib Amir)	60.	Kertaraharja Gadai (Sdr. Egipson Hutabarat)
25.	CV Mitra Aci Global Perkasa (Presiden HP)	61.	Arta Gadai (Sdr. Saur Bungaran Sinaga)
26.	Bless Gadai	62.	Mangun's Jaya Gadai (Sdr. Hendrik Pandapotan S.)
27.	GM Com Gadai	63.	Gemah Ripah Gadai (Sdr. Hiras Sepril Marcos S.)
28.	Ota Jaya Gadai	64.	Maju Bersama (Sdr. Helena Sidabutar)
29.	Nimfa Gadai	65.	Kopensa (Sdr. Makmur Pakpahan)
30.	Ginting Gadai	66.	Aldi
31.	Dotri Gadai	67.	Bedjo Gadai (Sdr. Henny Suriani Siburian)
32.	PT Gadai Bagong Sejahtera	68.	Koperasi Rap Maju
33.	Koperasi Citra Bella Sarana	69.	Martua
34.	PT Pegadaian Eva Grup	70.	UD MMT
35.	Alfa Persada Gadai	71.	KSP Karunia Sejahtera Pratama
36.	MazPram Gadai		

2. Pencabutan Izin Usaha

Rincian pencabutan izin usaha IKNB selama triwulan I-2019, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 31 ◇ Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2019	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	5	1	6	3	2	1	-
Perusahaan Pembiayaan	-	4	4	-	1	3	-
Perusahaan Modal Ventura	1	4	5	4	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	1	1	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-
Total	6	10	16	7	5	4	-

*1) Telah ditanggapi meliputi dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Selama periode triwulan I-2019, terdapat tujuh pencabutan izin usaha yang telah diselesaikan, yaitu:

Tabel II - 32 ◇ Pencabutan Izin IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Dana Pensiun Citas Otis Elevator	Dana Pensiun
2.	Dana Pensiun Dystar Colours Indonesia Iuran Pasti	Dana Pensiun
3.	Dana Pensiun Avrist	Dana Pensiun
4.	PT Ventura Tunai Capital	Perusahaan Modal Ventura
5.	PT Nusa Makmur Ventura	Perusahaan Modal Ventura
6.	PT Suwadana Venture Capital	Perusahaan Modal Ventura
7.	PT Ventura Cakrawala Investama	Perusahaan Modal Ventura

Dengan adanya pemberian dan pencabutan izin usaha, maka jumlah IKNB konvensional per 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 33 ◇ Jumlah IKNB Konvensional

Jenis industri	Jumlah
I. Asuransi dan Reasuransi *	
1. Asuransi Jiwa	53
2. Asuransi Umum	75
3. Reasuransi	6
4. Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	3
5. Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
Total Asuransi dan Reasuransi	139
II. Dana Pensiun	
1. DPPK PPIP	42
2. DPPK PPMP	163
3. DPLK	25
Total Dana Pensiun	230
III. Lembaga Pembiayaan*	
1. Perusahaan Pembiayaan	183
2. Modal Ventura	58
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
Total Lembaga Pembiayaan	243
IV. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*	
1. Perusahaan Penjaminan	22
2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4. Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	22
5. Perusahaan Pergadaian –Pendaftaran	71
Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	117
TOTAL LJKNB (Konvensional)	729

3. Likuidasi

OJK menerima tiga permohonan terkait proses likuidasi perusahaan asuransi umum yang terdiri dari satu permohonan persetujuan rencana kerja likuidasi dan dua penyampaian laporan perkembangan likuidasi serta satu penyampaian laporan perkembangan likuidasi untuk perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan untuk dana pensiun, pada periode yang sama, OJK menerima tiga permohonan persetujuan rencana kerja likuidasi, satu permohonan persetujuan hasil penyelesaian

likuidasi, dan satu permohonan persetujuan perubahan tim likuidasi.

Adapun permohonan persetujuan yang telah diselesaikan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 yaitu satu permohonan terkait proses likuidasi perusahaan asuransi umum dan empat permohonan terkait proses likuidasi dana pensiun. Rincian proses likuidasi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 34 ◇ Rekapitulasi Likuidasi IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
a. Proses Pembubaran	-	-	-	-	-	-
b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	-	1	1	-	-	1
c. Laporan Perkembangan Likuidasi	-	2	2	1	-	1
d. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
a. Proses Pembubaran	-	-	-	-	-	-
b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	-	-	-	-	-	-
c. Laporan Perkembangan Likuidasi	-	1	1	-	-	1
d. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun						
a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	12	3	15	4	9	2
b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	8	1	9	-	6	3
c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi	-	1	1	-	1	-
Total	20	9	29	5	16	8

*) Telah ditanggapi merupakan dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

4. Penggabungan, Peleburan (Merger), dan Pengambilalihan (Akuisisi)

Selama periode laporan, terdapat enam permohonan pengambilalihan perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan serta 19 permohonan pengambilalihan perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan yang merupakan

outstanding dari periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, empat permohonan pengambilalihan diantaranya telah diberikan persetujuan. Namun demikian, dalam periode laporan, tidak terdapat permohonan penggabungan dan peleburan.

Tabel II - 35 ◇ Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB selama periode Triwulan I-2019

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	2	3	-	2	-	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	-	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus	16	4	20	4	15	1	-
Total	19	6	25	4	19	1	1

*) Telah ditanggapi meliputi dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Daftar permohonan pengambilalihan IKNB yang telah diberikan persetujuan selama triwulan I-2019 yaitu:

Tabel II - 36 ◇ Persetujuan Pengambilalihan IKNB selama periode Triwulan I-2019

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Asiatic Sejahtera Finance	Perusahaan Pembiayaan
2.	PT Asia Multidana	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Internusa Tribuana Citra Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
4.	PT Indosurya Inti Finance	Perusahaan Pembiayaan

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Selama periode triwulan I-2019, OJK telah menerima 52 permohonan/pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP dari seluruh subsektor di IKNB dan 136 permohonan/pelaporan yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya, sehingga jumlah permohonan/pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/

perubahan pemegang saham/perubahan PDP yang diterima OJK sampai dengan triwulan I-2019 sebanyak 188 permohonan/pelaporan. Berkenaan dengan hal tersebut, sampai dengan triwulan I-2019, 48 permohonan/pelaporan diantaranya telah diberikan persetujuan/pencatatan/ pengesahan. Rincian perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 37 ◇ Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	18	6	24	9	14	1	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	12	7	19	11	7	1	-
Dana Pensiun	43	11	54	4	50	-	-
Perusahaan Pembiayaan	34	18	52	12	29	10	-
Perusahaan Modal Ventura	21	9	30	8	17	5	-
Perusahaan Penjaminan	6	1	7	4	2	1	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1	-	1	-	1	-	-
Total	136	52	188	48	121	18	1

*) Telah ditanggapi meliputi dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6. Perubahan Nama

OJK telah menerima dua pelaporan perubahan nama IKNB yang terdiri dari satu laporan perubahan nama perusahaan asuransi jiwa dan satu laporan

perubahan nama perusahaan modal ventura. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 38 ◇ Rekapitulasi Perubahan Nama

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	1	1	1	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	-	1	1	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	-	-	2	-
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	-	-	1	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	2	5	2	-	3	-

Adapun pelaporan perubahan nama IKNB yang telah ditetapkan oleh OJK pada periode triwulan I-2019, yaitu:

a. PT Asuransi Jiwa Starinvestama (d/h PT Asuransi Jiwa Recapital); dan

b. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas).

7. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

OJK menerima 217 pelaporan terkait kantor cabang yang terdiri dari 29 pelaporan kantor cabang perusahaan asuransi umum, satu pelaporan kantor cabang perusahaan asuransi jiwa, 152 pelaporan kantor cabang perusahaan pembiayaan, 29 pelaporan kantor cabang perusahaan modal ventura, dan enam pelaporan kantor cabang perusahaan penjaminan. Adapun pelaporan kantor cabang perusahaan yang merupakan *outstanding*

dari periode sebelumnya sebesar tiga pelaporan. Dengan demikian, sampai dengan triwulan I-2019, OJK menerima 220 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan penjaminan. Berdasarkan jumlah dimaksud, 160 pelaporan diantaranya telah diselesaikan. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 39 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pembukaan Kantor Cabang	3	3	6	5	1	-
- Penutupan Kantor Cabang	-	6	6	6	-	-
- Perubahan Alamat	-	15	15	12	3	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	-	5	5	5	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
- Penutupan Kantor Cabang	-	1	1	1	-	-
- Perubahan Alamat	-	-	-	-	-	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	35	35	23	9	3
- Penutupan Kantor Cabang	-	27	27	17	-	4
- Perubahan Alamat	-	90	90	67	-	-
Perusahaan Modal Ventura						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	17	17	13	6	4
- Penutupan Kantor Cabang	-	2	2	-	1	1
- Perubahan Alamat	-	10	10	9	-	-
Perusahaan Penjaminan						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	1	1	1	12	11
- Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	1
- Perubahan Alamat	-	5	5	1	4	-
Total	3	217	220	160	36	24

*1) Telah ditanggapi meliputi dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Sementara itu, pada periode yang sama, OJK telah menerima pelaporan terkait kantor selain kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim (kantor pemasaran) perusahaan asuransi dan kantor selain

kantor cabang perusahaan pembiayaan sebanyak 146 pelaporan.

Rincian pelaporan kantor pemasaran perusahaan asuransi dan kantor selain kantor cabang perusahaan pembiayaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 40 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pembukaan KLKP	2	24	26	24	2	-
- Penutupan KLKP	-	7	7	7	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	1	24	25	24	1	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pembukaan KLKP	8	12	20	15	4	1
- Penutupan KLKP	1	16	17	17	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	4	4	8	5	3	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	1	-	1	-	-	1
Perusahaan Pembiayaan						
- Pembukaan KSKC	294	28	322	304	11	7
- Penutupan KSKC	1	11	12	11	1	-
- Perubahan Alamat KSKC	1	20	21	21	-	-
Total	313	146	459	428	22	9

8. Pelaporan /Persetujuan Produk dan Persetujuan Bancassurance

Pada periode triwulan I -2019, terdapat 150 permohonan/pelaporan produk perusahaan asuransi umum dan 234 permohonan/pelaporan produk perusahaan asuransi jiwa. Selain itu, terdapat *outstanding* permohonan/pelaporan

produk dari periode sebelumnya yang terdiri dari 58 permohonan/pelaporan produk perusahaan asuransi umum dan 83 permohonan/pelaporan produk perusahaan asuransi jiwa. Rincian pelaporan/ persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 41 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Produk

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pencatatan Nama Lain	1	2	3	3	-	-
- Pencatatan Perubahan Produk	8	10	18	17	1	-
- Pencatatan Produk Baru	-	18	18	13	5	-
- Persetujuan Bancassurance	4	32	36	31	-	5
- Persetujuan Perubahan Produk	-	3	3	-	3	-
- Persetujuan Produk Baru	45	85	130	95	34	1
- Persetujuan ASO	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pencatatan Nama Lain	-	5	5	5	-	-
- Pencatatan Perubahan Produk	24	64	88	76	12	-
- Pencatatan Produk Baru	-	-	-	-	-	-
- Persetujuan Bancassurance	14	44	58	58	-	-
- Persetujuan Perubahan Produk	5	16	21	15	6	-
- Persetujuan Produk Baru	40	102	142	101	40	1
- Persetujuan ASO	-	3	3	3	-	-
Jumlah	141	384	525	417	101	7

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB. Persetujuan *Administrative Service Only* (ASO) merupakan salah satu bentuk perluasan kegiatan usaha yang harus memperoleh persetujuan OJK. Persetujuan perluasan lingkup usaha dimaksud merupakan amanat Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketentuan dimaksud mengatur persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah akan memperluas ruang lingkup usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan I-2019, terdapat 302 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan disertai dengan 205 yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Sebanyak 220 permohonan telah diselesaikan dan sebanyak 263 diantaranya masih menunggu penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen serta 24 lainnya

dikembalikan karena tidak sesuai ketentuan dan permohonan kemampuan dan kepatutan dimaksud dibatalkan oleh perusahaan.

Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 42 ◇ Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB

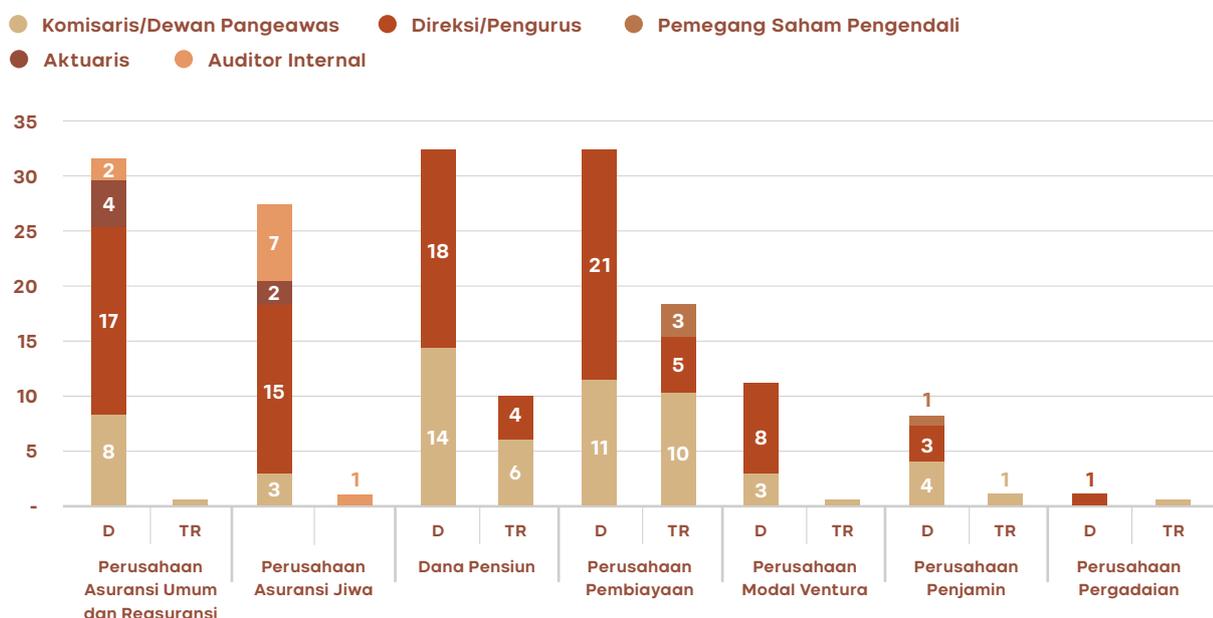
IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	17	55	72	35	12	25	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	23	52	75	45	7	23	-
Dana Pensiun	45	77	122	65	57	-	-
Perusahaan Pembiayaan	81	78	159	54	82	13	10
Perusahaan Penjaminan	15	7	22	9	8	2	3
Perusahaan Modal Ventura	24	24	48	11	29	-	8
Perusahaan Pergadaian	-	9	9	1	5	-	3
Total	205	302	507	220	200	63	24

*1) Dalam proses analisis meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan.

Selama periode laporan, dari sejumlah 220 penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB yang telah diselesaikan, terdapat 173 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya.

Adapun dari 173 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya tersebut terdiri dari 61 komisar/dewan pengawas, 92 direksi/pengurus, empat pemegang saham pengendali, enam aktuaris, dan 10 auditor internal. Jumlah kelulusan proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama dimaksud tersaji dalam grafik berikut:

Grafik II - 3 ◇ Kelulusan Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama



10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan I-2019, terdapat 180 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 15 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan IV-2018. Berdasarkan

jumlah dimaksud, sebanyak 138 pelaporan telah dicatat dan sebanyak 57 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 43 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	5	17	22	17	2	3	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	7	18	25	21	3	1	-
Dana Pensiun	3	105	108	60	48	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	29	29	29	-	-	10
Perusahaan Modal Ventura	-	9	9	9	-	-	3
Perusahaan Penjaminan	-	2	2	2	-	-	8
Total	15	180	195	138	53	4	24

*1) Dalam proses analisis meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan.

11. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada periode laporan, terdapat 89 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB. Pelaporan

dimaksud telah diselesaikan seluruhnya pada periode yang sama. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 44 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	86	86	86	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	3	3	3	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	89	89	89	-	-	24

*1) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

12. Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

Selama triwulan I-2019, terdapat 49 pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi umum dan jiwa. Selain itu, pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor

internal yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya sebanyak 5 pelaporan. Berdasarkan jumlah dimaksud, jumlah pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang telah dicatat sebanyak 44 pelaporan. Rincian pelaporan aktuaris dan auditor internal dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 45 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	1	18	19	12	-	7
- Auditor Internal	1	6	7	6	1	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	2	17	19	17	-	2
- Auditor Internal	1	8	9	9	-	-
Total	5	49	54	44	1	9

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

13. Pelaporan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan I-2019, terdapat 44 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan

asuransi dan perusahaan pembiayaan. Adapun rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 46 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	9	11	8	-	3
Perusahaan Asuransi Jiwa	11	24	35	24	-	11
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	11	11	11	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	13	44	57	43	-	14

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2019, mencakup antara lain:

1. Perumusan tools pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report*² guna memberikan gambaran kondisi bank secara lebih dini kepada pengawas;

2) Laporan yang berisi rasio utama terkait kondisi bank umum.

2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pengawasan berdasarkan Risiko khususnya terkait pengembangan tools pengawasan berbasis TI untuk mendukung serta memperlengkap proses pengawasan bank.

Selain itu, OJK juga memperkuat metode pengawasan bank umum terkait APU dan PPT dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilaksanakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) atas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan I-2019, adapun kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan yaitu meliputi:

1. Finalisasi penyusunan Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan kertas kerja penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta memberikan acuan bagi Pengawas BPR dan BPRS dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko.
2. Penyusunan dan pengkinian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Untuk penyusunan SPO tahun 2019 antara lain mencakup:
 - a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR;
 - b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR; dan
 - c. SPO terkait Tata Kelola BPR.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian tentang Praktik Bisnis Kustodian oleh Biro Administrasi Efek

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk melihat potensi praktik bisnis BAE dalam melaksanakan fungsi kustodian bagi Emiten yang efeknya diadministrasikan oleh BAE. Selanjutnya, dalam kajian ini dibahas antara lain mengenai BAE yang memiliki izin dari OJK dan lingkup kegiatan operasionalnya saat ini; Kegiatan administrasi efek yang dilakukan oleh BAE Inhouse; dan BAE yang mengadministrasikan efek Emiten.

2. Kajian tentang Pelaksanaan Fungsi Penilaian oleh Akuntan

Kajian ini dilatarbelakangi dengan wacana pemberian jasa penilaian oleh Akuntan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan:

- a. Aspek regulasi antara lain bidang jasa, perizinan dan kompetensi, serta rangkap jabatan.
- b. Kode Etik dan Standar Profesi.
- c. Praktik di Yurisdiksi lain seperti Australia dan Amerika Serikat.

3. Kajian tentang Reposisi Peran Konsultan Hukum dalam Penyusunan Prospektus Penawaran Umum

Kajian ini dilatarbelakangi praktik yang terjadi saat ini bahwa prospektus Penawaran Umum yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran disusun oleh Penjamin Pelaksana Emisi

Efek. Dalam pelaksanaannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek belum memperhatikan ketentuan yang ada sehingga prospektus yang disusun tersebut belum memenuhi kecukupan informasi yang dipersyaratkan oleh ketentuan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas prospektus Penawaran Umum, salah satunya melalui program reposisi fungsi Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai penyusun prospektus Penawaran Umum kepada Konsultan Hukum.

4. Kajian mengenai Pengaturan *Stock Split* dan *Reverse Stock Split* oleh Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia

Dalam rangka mewujudkan sektor Pasar Modal yang tangguh, stabil dan berdaya saing tinggi melalui penelitian yang bertujuan untuk pengembangan dan pengawasan Pasar Modal Indonesia, OJK perlu melakukan penyusunan kajian mengenai pengaturan *stock split* dan *reverse stock split* oleh Perusahaan Terbuka di pasar modal Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni (i) belum adanya pengaturan khusus mengenai *stock split* dan *reverse stock split* dalam peraturan pasar modal, (ii) dalam 10 tahun terakhir rata-rata terdapat 10 perusahaan yang melakukan *stock split* dan dua perusahaan yang melakukan *reverse stock split* tiap tahunnya, (iii) perlunya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pelaksanaan *stock split* dan *reverse stock split* oleh Perusahaan Terbuka.

5. Kajian mengenai Protokol atas Aksi Korporasi bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Kondisi tertentu

Tujuan Kajian ini adalah untuk memberikan fleksibilitas Emiten dan Perusahaan Publik di Bidang Jasa Keuangan untuk dapat melakukan penyelamatan atas usahanya dengan tidak mengikuti Peraturan OJK yang mengatur tentang Emiten dan Perusahaan Publik baik secara keseluruhan ataupun sebagian, kemudian untuk memberikan panduan kepada ADK dalam mengambil keputusan atas industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan khusus, dan juga memberikan waktu yang efisien kepada Emiten dan perusahaan publik untuk melakukan tindakan dalam rangka penyehatan usaha.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Sampai dengan triwulan I-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, antara lain:

1. Kegiatan Penilaian ASEAN CG Scorecard

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) untuk meningkatkan praktik tata kelola Emiten di ASEAN dan mempromosikan

Emiten ASEAN menjadi *asset class*. Upaya ini dilakukan melalui penilaian terhadap praktik tata kelola Emiten di ASEAN. *Scorecard* (standar penilaian) dimaksud disusun berdasarkan OECD *Principle of Corporate Governance*. Penilaian *Corporate Governance* dilakukan terhadap 100 *Public Listed Companies* (PLC) dengan kapitalisasi terbesar di masing-masing negara berdasarkan kriteria ACGS. Penilaian dilakukan oleh *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh masing-masing negara. Adapun kegiatan Penilaian ACGS akan dilakukan di Tahun 2019.

Dalam rangka mempersiapkan Perusahaan Tercatat di Indonesia dalam penilaian ACGS tahun 2019, OJK bersama Asian Development Bank (ADB) melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada 200 Emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dan *workshop* intensif bagi 100 Emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar.

2. Sosialisasi Pasar Modal 2019 di Denpasar dan Semarang

- a. Denpasar 30 Januari s.d 1 Februari 2019
 - 1) Audiensi dengan Gubernur Bali
 - 2) OJK Pasar Modal mengajar di SMA Negeri 3 Denpasar
 - 3) Bincang bersama wartawan daerah Provinsi Bali
 - 4) Seminar Investasi Pasar Modal di Universitas Pendidikan Nasional
- b. Semarang 13 s.d 15 Maret 2019
 - 1) OJK Pasar Modal mengajar di SMA Nasima Semarang
 - 2) Seminar Investasi Pasar Modal di Universitas Negeri Semarang
 - 3) *Workshop Go Public*
 - 4) Audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
 - 5) *Media Gathering* bersama Wartawan Provinsi Jawa Tengah
 - 6) *Bilateral Meeting* Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan PT. Sido Muncul Tbk.
 - 7) *Breakfast Meeting* Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Kelompok Usaha di Prov. Jawa Tengah

3. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- a. Sosialisasi POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);
- b. Sosialisasi POJK Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dan POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal;
- c. Sosialisasi POJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan

- d. Sosialisasi POJK Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif, POJK Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk, dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.04/2018 tentang Kegiatan Lain Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek di Jakarta.

C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

a. Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal:

1) Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo - *Third Party Repo*

Pengembangan sistem *third party repo* ini bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem repo yang efektif dan efisien serta dapat diaplikasikan oleh pelaku pasar. KPEI sebagai *third party* menyediakan layanan *back-office* atas transaksi repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, *mark to market* dan *margin management*.

2) Implementasi *General Clearing Member* (GCM)

Implementasi GCM bertujuan memberikan pilihan kepada Anggota Bursa untuk fokus pada bisnis inti (terutama pemasaran) yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta penurunan risiko secara keseluruhan, dengan resiko antara KPEI sebagai *Central Clearing Counterparty* (CCP) dengan GCM.

Proyek ini sudah melakukan persiapan yaitu kesiapan sistem dan sosialisasi kepada pelaku. Sistem untuk implementasi GCM sudah tersedia di *e-Clears* saat ini. Implementasi GCM akan dilakukan dengan peraturan BEI dan KPEI.

b. Kegiatan Pendukung:

1) Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa Dari T+3 ke T+2

Kemajuan dan integrasi sistem teknologi informasi yang memungkinkan penyelesaian transaksi lebih cepat dari T+3 guna meningkatkan likuiditas serta menurunkan persyaratan permodalan dan agunan. Perkembangan proyek saat ini yaitu proses penyusunan peraturan di OJK dan SRO. Proyek ini dinyatakan selesai dan akan dilakukan Pembayaran Dukungan Biaya Penyesuaian Sistem untuk Implementasi T+2.

2) Perusahaan Efek Daerah

Dalam rangka menyukseskan program kerja OJK terkait PED, SRO menyusun kajian mekanisme bisnis SRO guna mendukung pembentukan serta operasional PED. Saat ini telah dilakukan pembuatan kajian infrastruktur PED, sosialisasi kepada pihak terkait, FGD dengan AB terkait

konsep PED. Sedangkan, Pengembangan infrastruktur di BEI, KPEI dan KSEI, serta pengembangan BOFIS PED oleh PT Teknologi Informasi (PT TI) dan melakukan FGD dengan AB untuk membahas kesiapan sebagai AB Sponsor PED.

3) Pengembangan *Electronic Book Building*

Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana baik dalam pembentukan harga maupun Penawaran Umum; Meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses Penawaran Umum dan harga IPO yang telah ditetapkan serta Memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai *selling agent* dalam proses Penawaran Umum maka di inisiasi proyek ini.

4) Program Sistem Penyampaian Dokumen

Pencatatan Secara Elektronik (E-Registration)

Dilatarbelakangi kesamaan dokumen Penawaran Umum yang disampaikan oleh calon Emiten ke OJK dan Permohonan Pencatatan ke Bursa; kebutuhan peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses evaluasi Penawaran Umum dan Pencatatan; kebutuhan untuk memudahkan akses penyampaian dokumen oleh calon Emiten; Perlunya data/dokumen secara elektronik yang tersimpan dengan baik maka proyek *e-registration* diinisiasi dengan tujuan untuk menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Calon Emiten dan *Underwriter* dalam melakukan penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Permohonan Pencatatan kepada BEI satu pintu dan terintegrasi dalam sistem SPRINT OJK.

5) Program *IDXnet Enhancement* untuk menyediakan Pengumuman dalam dua bahasa dan Integrasi dengan SPE

Dilatarbelakangi oleh adanya redundansi pelaporan dan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Emiten, Perusahaan Publik dan Perusahaan Tercatat ("EPP") kepada BEI dan OJK serta adanya kebutuhan keterbukaan informasi EPP dalam Bahasa Inggris oleh investor asing maka TPIPM menginisiasi project ini yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan mempermudah EPP melakukan penyampaian pelaporan melalui satu pintu.
- Satu database dalam memantau keterbukaan informasi EPP
- Meningkatkan integritas data.
- Memberikan kemudahan kepada investor asing sehingga meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di dunia internasional.

c. Pengembangan ETP Tahap II

Penyusunan Spesifikasi Bisnis Perdagangan ETP

tahap II dan inisiasi Proses Pengadaan dengan pengiriman RFI telah selesai.

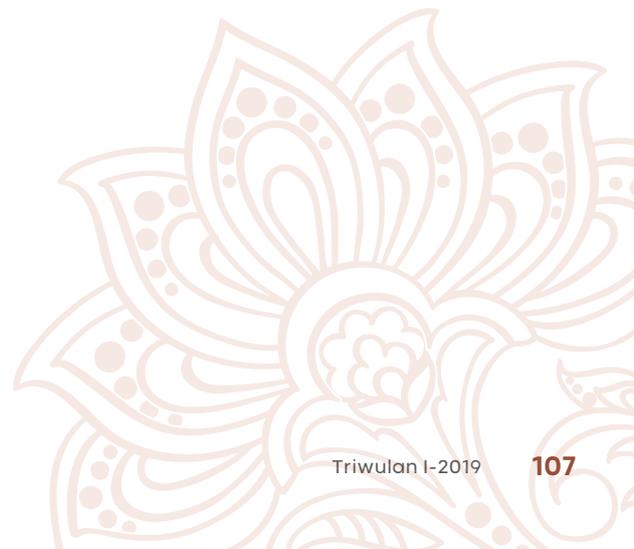
d. Pengembangan Pasar Surat Utang Regional

Posisi Indonesia atas inisiatif internasional antara lain:

- 1) Dalam mengikuti inisiatif internasional, ASEAN *Capital Market Forum (ACMF)-Working Group A* telah merevisi POJK terkait prospektus penawaran umum yang mengakomodir ASEAN *disclosure standard*.
- 2) Dalam mengikuti inisiatif internasional dalam *Asian Bond Market Initiative (ABMI)*, saat ini telah diterbitkan POJK terkait Penawaran Umum kepada Investor Profesional (POJK QIB sudah keluar 1 Agustus 2018) dan sedang disusun POJK terkait Penerbitan Surat Utang Non-IPO.
- 3) Indonesia telah memenuhi *bond scorecard* dalam *Working Committee on Capital Market development (WC-CMD)*, kecuali:
 - *Acceptance of international MTN programmes.*
 - *No Restrictions on non-resident local currency (LCY).*
 - *Availability of active futures market.*

e. IGBF tahap II

- 1) Implementasi produk *Single & Basket Bond Futures yield Based Quotation* belum dimulai, hal ini karena menunggu implementasi IGBF *Basket Bond Futures Based Quotation*.



2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan I-2019, OJK melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 17 orang, sehingga sampai dengan triwulan I-2019 terdapat 585 aktuaris yang terdiri dari 296 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 289 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan I-2019, yaitu melakukan koordinasi internal OJK terkait penyusunan SKKNI Bidang Perasuransian.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Pada triwulan I-2019 OJK melaksanakan FGD forum panel batch 1 untuk penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang telah mengajukan pencatatan diri kepada OJK. Forum panel ini terdiri dari perwakilan OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Dalam forum panel dibahas secara mendalam terkait model bisnis dari setiap IKD untuk menentukan proses maupun status selanjutnya dari IKD tersebut.

Sampai dengan triwulan I-2019, terdapat 67 Penyelenggara IKD yang mengajukan pencatatan di OJK, 12 di antara dikembalikan karena bukan menjadi ranah kewenangan OJK sedangkan 55 Penyelenggara IKD masuk ke dalam forum panel batch 1, dalam forum panel tersebut diputuskan bahwa 34 Penyelenggara IKD mendapatkan status tercatat yang terbagi dalam 12 klaster model bisnis IKD dan 23 Penyelenggara IKD di antaranya menjadi sampel objek *Regulatory Sandbox*. Adapun rincian 34 penyelenggara IKD tersebut sebagai berikut:

Grafik II - 4 ◇ Penyelenggara IKD



OJK telah memberikan Surat Tanda Tercatat kepada 34 Penyelenggara IKD dan bertempat di OJK Infinity. Dengan telah diperolehnya Surat Tanda Tercatat, proses pencatatan batch 1 telah selesai dan 34 Penyelenggara IKD dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan pada saat pengajuan pencatatan.

Bersamaan dengan pembagian Surat Tanda Tercatat batch 1, disampaikan pula bahwa proses *Regulatory Sandbox* akan segera dimulai dengan tahapan awal adalah penyusunan skenario pengujian 12 klaster model bisnis IKD. Pengujian 12 klaster model bisnis meliputi aspek: (a) hukum & peraturan per-UU-an; (b) aktivitas model & proses bisnis; (c) IT & risiko siber; (d) manajemen risiko; (e) perlindungan data & konsumen; (f) rencana bisnis; (g) aspek lainnya yang diperlukan i.e. APU-PPT.

Selain itu, pada triwulan I-2019 terdapat 74 penyelenggara IKD melakukan konsultasi di OJK Infinity. Selain itu telah dilaksanakan pula *Knowledge Sharing Ke-1* yang dipresentasikan oleh IBM dengan topik "*Untokenized Blockchain*". Peserta *Knowledge Sharing* dihadiri oleh para anggota Forum Panel IKD dan perwakilannya. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan manfaat teknologi *blockchain* dan beberapa pilot project yang sedang dikerjakan yaitu di bidang *clearing & settlement*, *remittance*, *e-KYC & identity*, dan *supply chain*.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

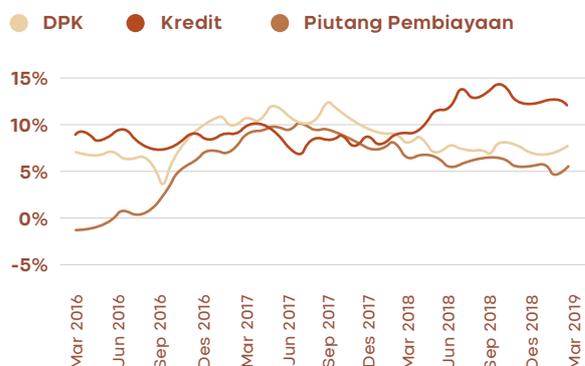
Stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik di triwulan I-2019, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang solid, solvabilitas yang tinggi, dan tingkat risiko yang terkendali. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK senantiasa memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja fungsi intermediasi industri jasa keuangan terpantau stabil seiring perekonomian domestik yang masih tumbuh solid. Kredit perbankan tumbuh stabil sebesar 11,55% (yoy) (Des 18: 11,75% yoy). Sebagian

besar pendanaan kredit bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 7,18% (yoy) (Des 18: 6,45% yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh moderat sebesar 5,17% (yoy) (Des 18: 5,17% yoy).

Grafik II - 5 ◊ Kinerja Intermediasi IJK



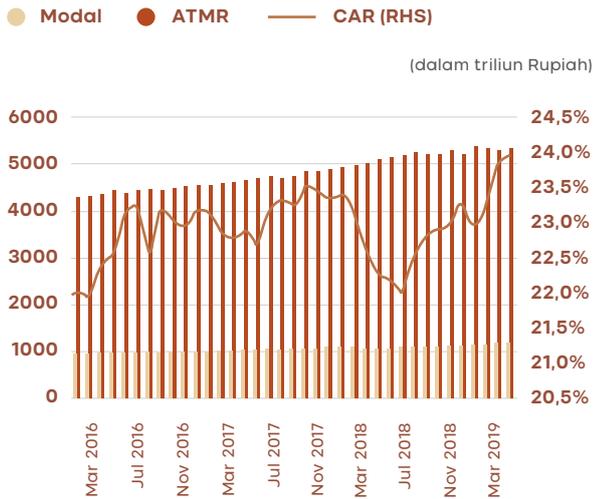
Sumber: OJK

Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber pendanaan korporasi domestik masih terpantau positif. Sepanjang triwulan I-2019, perhimpunan dana di pasar modal mencapai Rp35,8T yang berasal dari tujuh emiten baru yang sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (58,14%) dan akuisisi (24,96%).

Pasar keuangan terus melanjutkan penguatan di triwulan I-2019. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 6.468,8 (4,43% *qtq*) di akhir triwulan. *Yield* Surat Berharga Negara (SBN) tercatat turun rata-rata 48,6 *bps*, dengan penurunan terbesar berasal dari *yield* tenor jangka menengah sebesar 51,4 *bps*. *Yield* tenor jangka pendek dan panjang masing-masing turun sebesar 48,6 *bps* dan 31,3 *bps*. Performa pasar keuangan yang positif ini sejalan dengan *net buy* investor non residen di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp12,13 triliun dan Rp73,87 triliun.

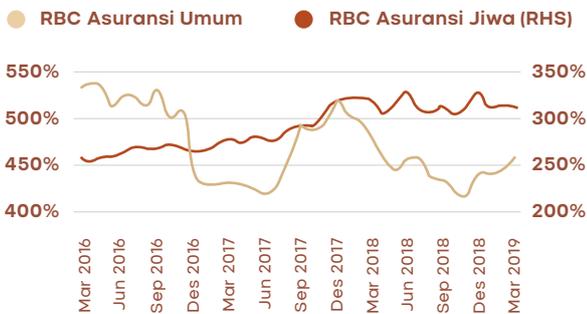
Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai sangat kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Maret 2019 tercatat sebesar 23,97%. Sementara itu, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Desember 2018 tercatat masing-masing sebesar 457%, dan 315%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Maret 2019 tercatat sebesar 2,84 kali. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi industri jasa keuangan untuk tumbuh lebih lanjut.

Grafik II - 6 ◇ CAR Perbankan



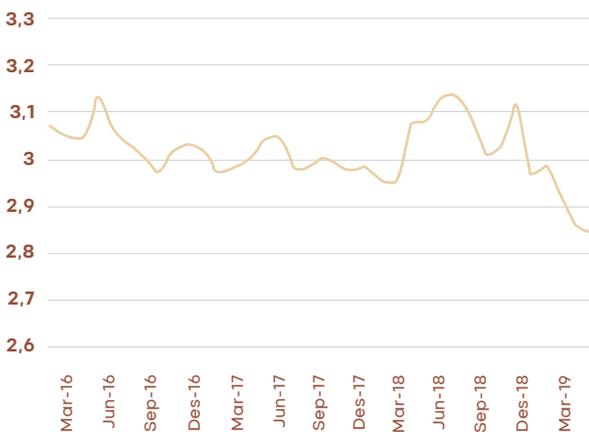
Sumber: OJK

Grafik II - 7 ◇ RBC Industri Perasuransian



Sumber: OJK

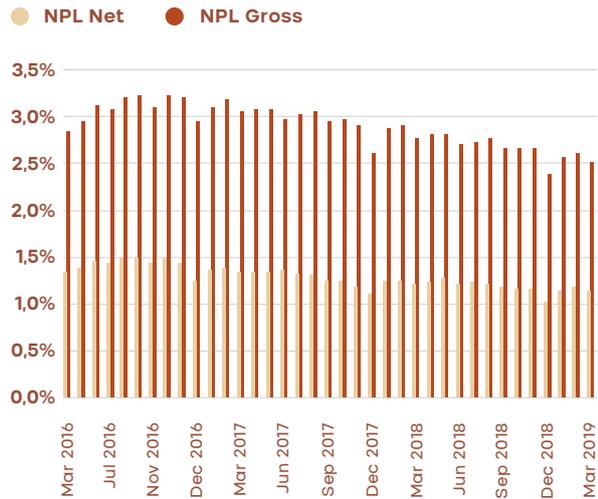
Grafik II - 8 ◇ Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih rendah. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Maret 2019 tercatat masing-masing sebesar 2,51% dan 1,12%. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan stabil di 2,87%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah

Grafik II - 9 ◇ Rasio NPL Perbankan



Sumber: OJK

Grafik II - 10 ◇ Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih rendah. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 113,18% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 23,58%, pada periode Maret 2019. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio *Posisi Devisa Neto* yang masih rendah di tingkat 2,16%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan I-2019 naik 1,78% (*qtq*) serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing naik 3,68% (*qtq*) dan 2,20% (*qtq*).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas rata-rata *peer group*, dengan pertumbuhan DPK yang masih mampu menopang pertumbuhan kredit. Risiko kredit masih berada pada level yang

terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar dibandingkan dengan negara lainnya.

Tabel II - 47 ◇ Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	11,55	7,18	2,51	2,16	23,97
Malaysia	4,99	6,29	1,45	9,77	17,37
Thailand	0,46	4,34	2,94	N.A.	18,34
Filipina	13,90	8,84	1,76	2,77	15,44
Vietnam	10,74	12,82	1,91	N.A.	12,14

Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK akan terus memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional secara berkala. Selain itu, OJK akan terus mengambil *policy measures* yang tepat dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memitigasi dampak tekanan volatilitas global di domestik.

Dengan masih tingginya risiko di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang berkaitan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

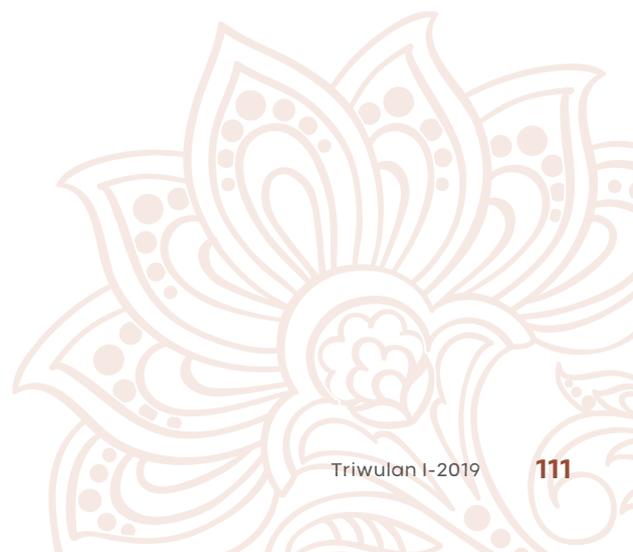
Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga akan melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkokoh ketahanan pasar domestik.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I-2019, telah dilaksanakan berbagai pertemuan level teknis

untuk membahas sejumlah isu, di antaranya pertukaran data dan informasi di antara lembaga anggota KSSK dan persiapan kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Untuk triwulan I-2019, telah dilaksanakan Rapat KSSK pada tanggal 22 April 2019 dan dihadiri oleh keempat lembaga anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga-lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama triwulan I-2019, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional terjaga dengan baik. Pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap SSK.



2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Sosialisasi Ketentuan dan Aturan

Sebagai rangkaian kegiatan sosialisasi ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan I-2019 OJK menyelenggarakan sosialisasi di Bandar Lampung dan Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung). Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, media lokal dan perwakilan pegawai Kantor OJK Provinsi Lampung. Sementara sosialisasi di Pangkal Pinang dihadiri oleh 115 peserta yang terdiri dari perwakilan PUJK, akademisi dan media lokal dan masyarakat umum.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut antara lain terkait:

1. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK LPK);
2. Peraturan mengenai literasi dan inklusi keuangan, sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, serta aturan di bawahnya; dan
3. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)

2.5.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Selama triwulan I-2019, telah dikukuhkan empat TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Wonogiri, TPAKD Kota Magelang, TPAKD Kabupaten Purbalingga, dan TPAKD Kota Makassar. Sehingga sampai dengan triwulan I-2019, sebanyak 87 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 55 TPAKD Kabupaten/Kota telah dikukuhkan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota TPAKD, selama triwulan I-2019 dilaksanakan dua kali *coaching clinic* TPAKD di Provinsi Nusa Tenggara Timur

dan Daerah Istimewa Aceh. Materi yang disampaikan antara lain arah penguatan program kerja TPAKD tahun 2019, di antaranya:

- a. Peningkatan produksi perikanan melalui program Asuransi Nelayan (Asnel);
- b. Peningkatan kapasitas nelayan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- c. Peningkatan Akses Keuangan melalui program Laku Pandai dan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat dukungan pemerintah masing-masing daerah untuk mengoptimalkan peran TPAKD dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran TPAKD antara OJK dan Kemendagri. Salah satu materi yang dibahas adalah tentang insentif berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) bagi TPAKD yang mendukung percepatan akses keuangan.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Sosialisasi dan Workshop Pengembangan BUMDes dan BUMDesa

Pada triwulan I-2019, telah dilaksanakan sosialisasi dan *Workshop* pengembangan BUMDes/BUMR di empat Provinsi yang mencakup 17 Kabupaten/Kota dan 392 Desa. Disampaikan strategi tiga pilar dalam penguatan BUMDes/BUMDes dan skema bisnis yang dikembangkan oleh OJK bersama *stakeholders* terkait. OJK memberikan fasilitasi penguatan BUMDes/BUMDes dalam bentuk *business matching*, perluasan akses keuangan, dan digitalisasi BUMDes/BUMDes.

2. Pengembangan Sistem Informasi terkait BUMDes dan BUMDesa

OJK telah melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal terkait terkait pengembangan dashboard *monitoring* fasilitasi BUMDes dan BUMDesa. Sebagai sumber data kinerja dan keuangan BUMDes, OJK juga memfasilitasi pengembangan aplikasi *marketplace* Panada sebagai sarana penjualan produk BUMDes/BUMDesa.

3. Implementasi hingga 100 BUMDes

Sampai dengan triwulan I-2019, OJK telah melakukan fasilitasi terhadap tiga BUMDesa Center (di wilayah Desa-Perdesaan) dan dua BUMR (di wilayah Desa-Perkotaan), yaitu:

- a. BUMDesa Center Jaya Makmur Desa Traktakan, Kab Bondowoso
- b. BUMDesa Center Maju Bersama, Desa Tunjungtirto, Kab Malang
- c. BUMDesa Wonorejo Maju Sejahtera, Desa Wonorejo, Kab Sukoharjo
- d. BUMR Center Karang Joang Kreatif, Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan

- e. BUMR Center Gunungpati Mukti Mulyo, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang

C. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur produk keuangan sesuai seperti asuransi dan/atau produk investasi lainnya yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. (tambahkan penjelasan fitur dan perkembangan SiMUDA e/g jumlah rekening, saldo rata-rata, saldo keseluruhan).

Selain itu, untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap program SiMUDA, OJK melakukan sosialisasi program SiMUDA pada kegiatan OJK *Goes to Campus* kepada mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Universitas Muhammadiyah Makassar bersama bank peserta SiMUDA. Kegiatan tersebut diikuti oleh total 2.228 mahasiswa.

D. Kajian Inklusi Keuangan

Dalam rangka penyusunan Kajian Inklusi Keuangan tahun 2019, OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) "Peluang dan Tantangan Pengembangan Model Inklusi Keuangan bagi pekerja Sektor Informal Melalui Produk Dana Pensiun Mikro". FGD tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi mengenai Dana Pensiun dengan mengundang narasumber internal, Kementerian, Perwakilan Asosiasi, Perusahaan Dana Pensiun, dan Akademisi.

E. Indeks Inklusi Keuangan

Dalam rangka persiapan penghitungan indeks inklusi keuangan yang akan dilaksanakan tahun 2019, OJK melaksanakan FGD Metode Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Menggunakan Data Sekunder. Narasumber pada kegiatan FGD tersebut adalah akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selaku founder DEFINIT. Pada kesempatan tersebut, disampaikan materi mengenai perbedaan antara definisi indeks inklusi keuangan dan tingkat inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan merupakan perbandingan antara jumlah rekening dengan jumlah populasi. Sedangkan indeks inklusi keuangan merupakan score board indeks komposit inklusi keuangan yang digunakan untuk membandingkan posisi/peringkat dari suatu wilayah.

2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Edukasi Keuangan Masif

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan

bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia baru sebesar 29.6%, sedangkan indeks inklusi masyarakat Indonesia sebesar 67.8%. Tingkat literasi yang lebih rendah dibanding tingkat inklusi atau penggunaan produknya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan produk dan layanan di lembaga keuangan formal tidak diikuti dengan pemahaman yang cukup. Sebagai upaya OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan dalam rangka mencapai target literasi keuangan 35% dan inklusi keuangan 75% sesuai dengan Peraturan Presiden No.50 tahun 2017 dan Perpres No.82 tahun 2016, selama triwulan I-2019 OJK melaksanakan sejumlah kegiatan edukasi secara masif melalui Pagelaran Seni Budaya, OJK *Goes to Campus* dan *Financial Expo*.

1. Pagelaran Wayang

Sepanjang triwulan I-2019, OJK melaksanakan lima pagelaran wayang di Kabupaten Ciamis, Lampung Timur, Langkat, Temanggung dan Wonosobo.

Materi yang disampaikan adalah Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, Budaya Menabung dan Berinvestasi dan Pengenalan Produk Lembaga Jasa Keuangan. Untuk memeriahkan pagelaran wayang tersebut, terdapat partisipasi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam bentuk pembukaan *booth – booth* pemberian informasi produk keuangan.

2. OJK Goes to Campus dan Financial Expo

OJK menyelenggarakan dua kegiatan OJK *Goes to Campus* dan *Financial Expo* di Universitas Pattimura, Ambon dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan tugas dan fungsi OJK terkait edukasi dan perlindungan konsumen, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, generasi muda dalam mengelola keuangan serta mengajak generasi muda untuk mulai memanfaatkan produk maupun layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menata keuangannya menjadi lebih baik.

3. Financial Expo

Sebagai upaya untuk memperluas akses keuangan masyarakat, OJK mengadakan *Financial Expo* di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dimeriahkan oleh partisipasi PUJK melalui pembukaan *booth – booth* menarik dari PUJK yang berisi pemberian informasi, pembukaan rekening dan *activity* lain pendukung kegiatan. Selain itu, diselenggarakan juga *Talk Show* menarik mengenai pemilihan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

B. Edukasi Keuangan bagi Komunitas

Edukasi Keuangan bagi komunitas memiliki 10 target sasaran sesuai dengan dengan Revisit SNLKI 2017. Adapun pemilihan kota pelaksanaan edukasi keuangan mengacu pada hasil indeks literasi keuangan yang rendah. Sepanjang triwulan I-2019, OJK melaksanakan empat kegiatan edukasi keuangan bagi komunitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Edukasi Keuangan bagi Pelajar Setingkat Sekolah Menengah Atas (Visit OJK)

OJK bekerjasama dengan Perbanas Institute telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi Pelajar Setingkat Sekolah Menengah Atas. Peserta mendapatkan materi pengenalan OJK, perencanaan keuangan dan kunjungan ke Layanan Konsumen 157. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai OJK, Industri Jasa Keuangan serta pengelolaan keuangan.

2. OJK Goes to School

Kegiatan OJK *Goes to School* telah diselenggarakan di Kota Wonosobo dengan menasar siswa SD dan SMP. Kegiatan tersebut masing-masing diikuti oleh 174 siswa/i dan 102 siswa/i. Materi yang disampaikan pada kegiatan terdiri dari Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pentingnya Menabung untuk Masa Depan dan Pengenalan SimPel/SimPel iB.

3. Edukasi Keuangan bagi Karyawan dan Profesional

OJK telah melaksanakan Edukasi Keuangan bagi Karyawan dan Profesional yang merupakan investor saham pemula. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di sektor Pasar Modal. Pada kegiatan tersebut, peserta dibekali dengan materi Pengenalan Pasar Modal, Perencanaan Keuangan, Pengenalan Reksa Dana dan Investasi melalui *Financial Technology* (FinTech) serta Optimalisasi Investasi Reksa Dana.

C. Training of Trainers (ToT) bagi Guru SMP dan SMA

Sebagai upaya OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan OJK melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) bagi guru dan dosen antara lain untuk memberikan pemahaman tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan serta memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan kepada guru/dosen tingkat perguruan tinggi, agar selanjutnya dapat digunakan untuk mengajar materi literasi keuangan

kepada siswa/mahasiswa serta berbagi ilmu kepada guru/dosen lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas. Sepanjang triwulan I-2019, OJK melaksanakan dua ToT bagi Guru SMP dan SMA di Jambi dan Palembang.

D. Galeri Investasi Mobile

Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong peluncuran Galeri Investasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat sekitar kampus, dengan meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi *Mobile*. Tujuan dari peluncuran Galeri Investasi *Mobile* kepada masyarakat adalah untuk menanamkan pentingnya perencanaan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor pasar modal, membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud, serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi.

Pada triwulan I-2019, OJK meluncurkan Galeri Investasi *Mobile* (GIM) di Universitas Jambi dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Peluncuran program GIM tersebut dilanjutkan dengan kegiatan edukasi keuangan dalam bentuk Seminar Pasar Modal di Indonesia dengan peserta adalah masyarakat di lingkungan Universitas.

Sebagai tindak lanjut dari peluncuran GIM tersebut, akan dilaksanakan *monitoring* kinerja Galeri Investasi untuk memantau perkembangan transaksi yang dilakukan di Galeri Investasi *Mobile*.

E. Workshop SiPEDULI

Penyelenggaraan *Workshop* SiPEDULI, merupakan upaya untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagaimana amanat Perpres No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen untuk mencapai target indeks literasi keuangan pada tahun 2019 menjadi 35%.

Sepanjang triwulan I-2019, OJK melaksanakan *Workshop* dengan peserta PUJK di wilayah pengawasan KR/KOJK dan Staf EPK. Adapun kota pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Cirebon, Madiun, Banda Aceh, Palangkaraya dan Surabaya dengan rata-rata peningkatan Partisipasi PUJK dalam penyampaian laporan dan *draft* realisasi kegiatan ke dalam sistem (SiPEDULI) adalah sebesar 31,17%.

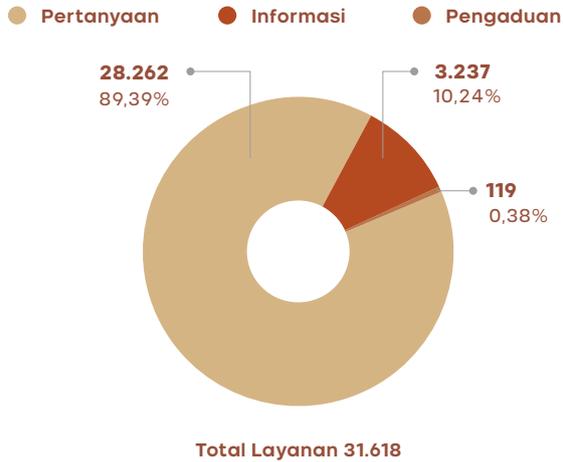
2.5.4 Perlindungan Konsumen

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

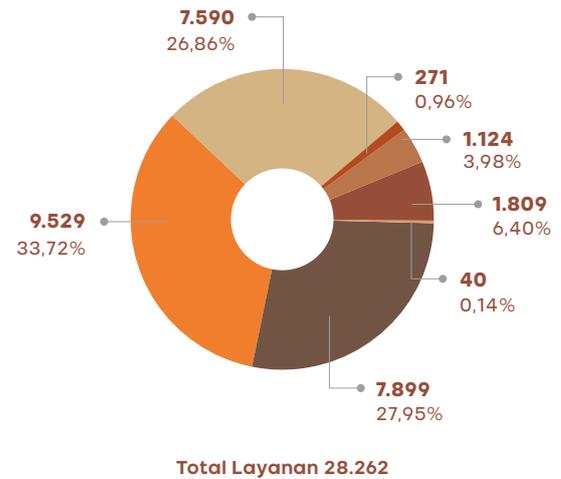
Pada triwulan I - 2019, layanan konsumen OJK menerima 31.618 layanan yang terdiri dari 3.237 Informasi, 28.262 pertanyaan dan 119 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 54,68%

(11.177 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 28.262 pertanyaan, terdapat 195 layanan yang diklasifikasikan sebagai layanan berindikasi pengaduan.

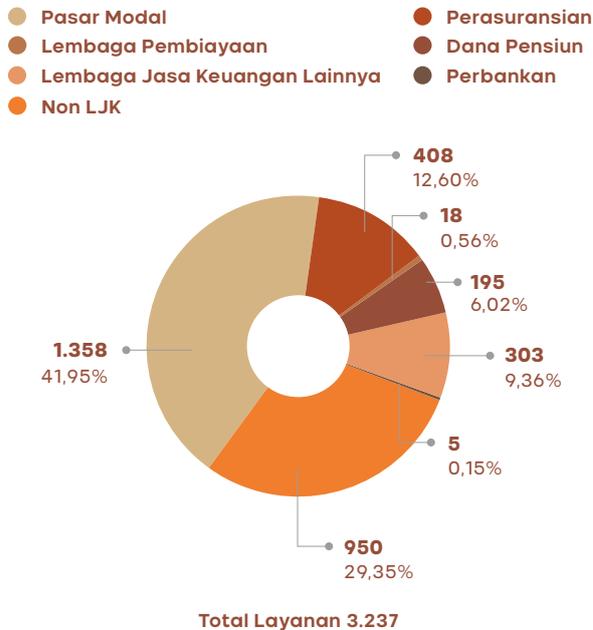
Grafik II - 11 ◇ Penerimaan Layanan Triwulan i-2019



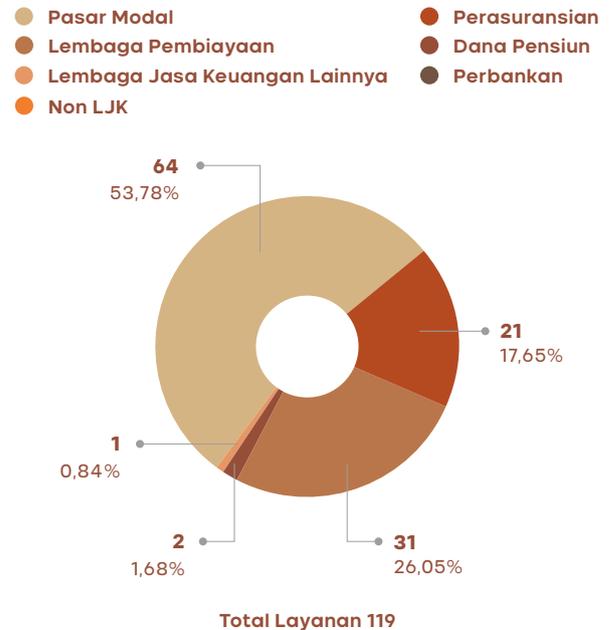
Grafik II - 12 ◇ Layanan Pertanyaan Triwulan i-2019



Grafik II - 13 ◇ Layanan Informasi Triwulan I-2019



Grafik II - 14 ◇ Layanan Pengaduan Triwulan I-2019

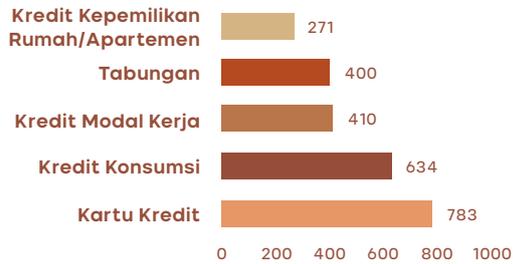


Sumber: OJK

Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu kartu kredit pada perbankan, saham konvensional pada pasar modal, produk asuransi berjangka (*term life*) pada perasuransian, produk manfaat pasti pada

industri dana pensiun, produk pembiayaan konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan penerima pinjaman dana pada IKNB-lainnya. Pada produk penerima pinjaman dana, sebagian besar berkaitan dengan industri *Financial Technology (FinTech)*.

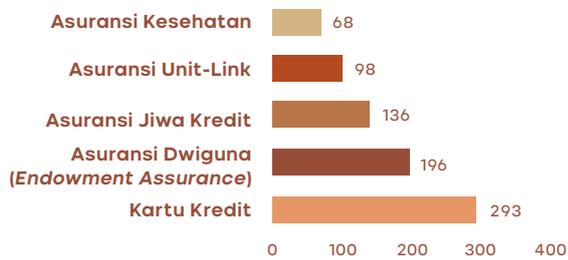
Grafik II - 15 ◇ 5 Besar Jenis Produk Perbankan



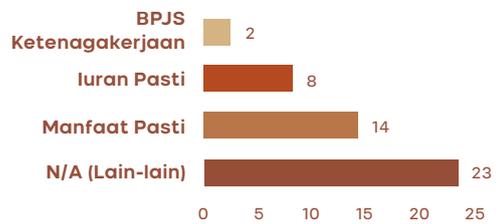
Grafik II - 16 ◇ 5 Besar Jenis Produk Pasar Modal



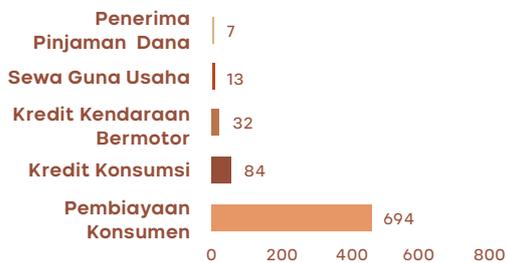
Grafik II - 17 ◇ 5 Besar Jenis Produk Perasuransian



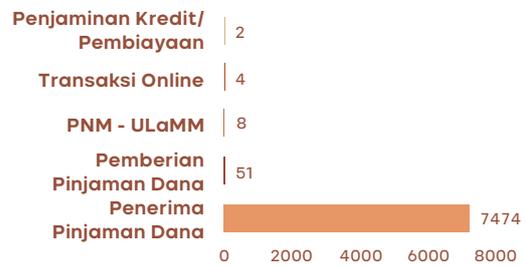
Grafik II - 18 ◇ Jenis Produk Dana Pensiun



Grafik II - 19 ◇ 5 Besar Jenis Produk Lembaga Pembiayaan



Grafik II - 20 ◇ 5 Besar Jenis Produk IKNB - Lainnya

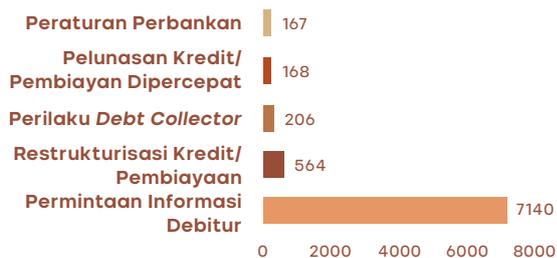


Sumber: OJK

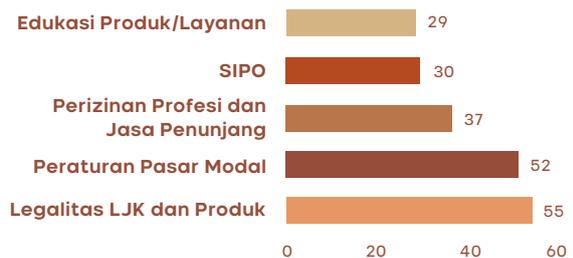
Pada triwulan I - 2019, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu permintaan informasi debitur pada perbankan, legalitas LJK dan produk pada pasar modal, kesulitan

klaim pada perasuransian, tidak dapat mencairkan manfaat pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya.

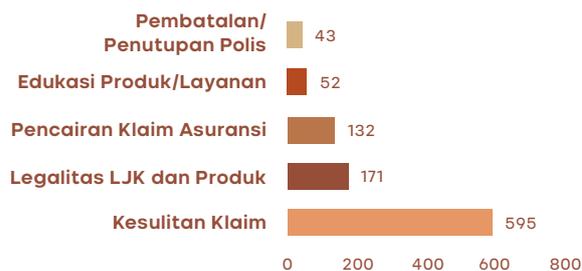
Grafik II - 21 ◇ 5 Besar Jenis Permasalahan Perbankan



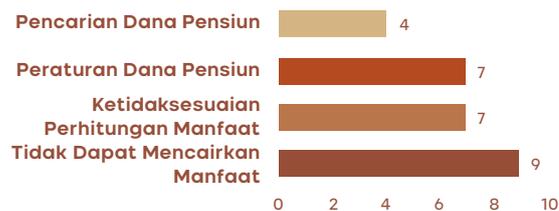
Grafik II - 22 ◇ 5 Besar Jenis Permasalahan Pasar Modal



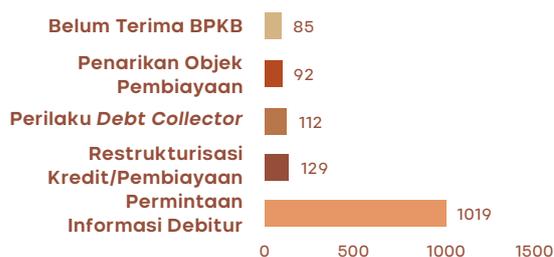
Grafik II - 23 ◇ 5 Besar Jenis Permasalahan Perasuransian



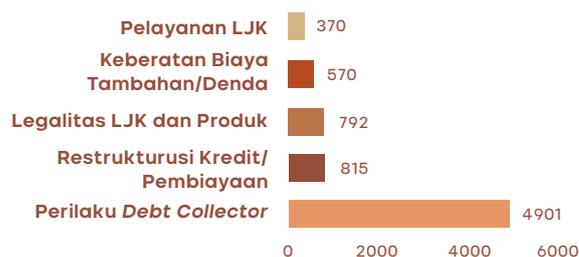
Grafik II - 24 ◇ Jenis Permasalahan Dana Pensiun



Grafik II - 25 ◇ 5 Besar Jenis Permasalahan Lembaga Pembiayaan



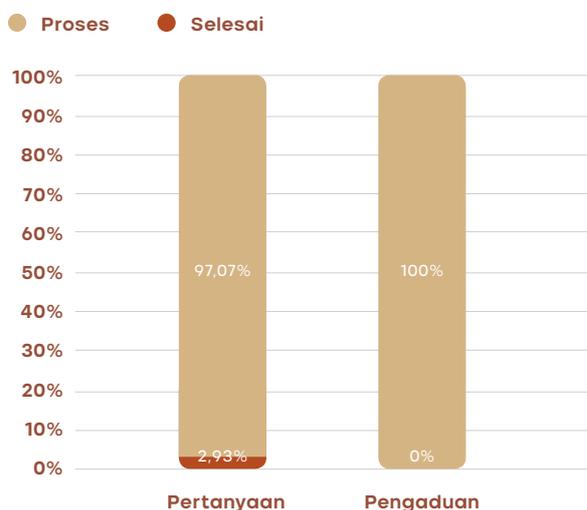
Grafik II - 26 ◇ 5 Besar Jenis Permasalahan IKNB - Lainnya



Sumber: OJK

Pada layanan yang masuk di triwulan I - 2019, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 97,07% (27.435 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebanyak 100% (119 pengaduan).

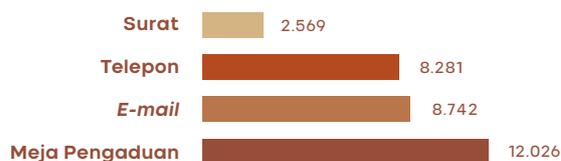
Grafik II - 27 ◇ Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan meja pengaduan. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 28 ◇ Kanal Layanan



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan I - 2019, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui *walk in* atau datang langsung ke kantor OJK.

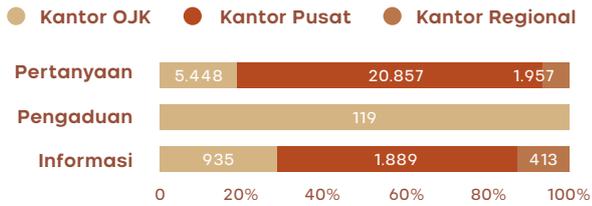
Tabel II - 48 ◇ Penerimaan Layanan OJK

Akses Layanan	Total Layanan
Kantor Pusat	22.865
Kantor Regional	2.370
Kantor OJK	6.383
Total	20.441

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 72,32% dari total penerimaan layanan pada triwulan I-2019.

Grafik II - 29 ◇ Penerimaan Layanan Triwulan I-2019

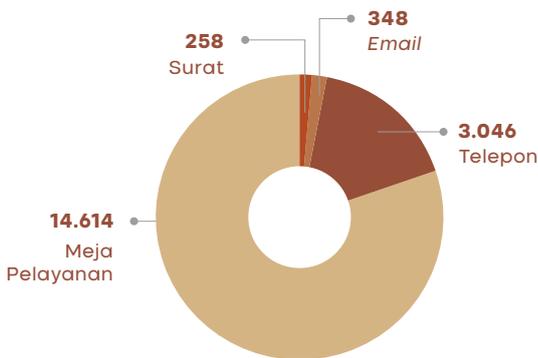


Sumber: OJK

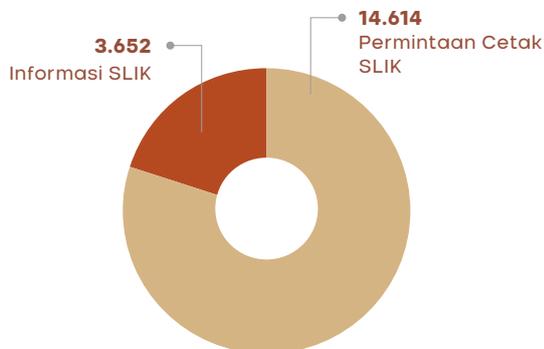
B. Data Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Salah satu kelebihan SLIK adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR, 142 BPRS, 32 Lembaga Pembiayaan, lima Perusahaan Modal Ventura, delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan satu Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut yang diberikan melalui platform informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.

Grafik II - 30 ◇ Data SLIK



Grafik II - 31 ◇ Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK



Sumber: OJK

Pada Triwulan I - 2019, sebanyak 18.266 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun *call center*. Permintaan informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. Disamping itu, SLIK juga dapat memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

C. Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan I-2019, OJK melakukan tiga kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di kota Yogyakarta, kota Bali, dan kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan Asistensi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

D. Coffee Morning bersama Working Group Internal Dispute Resolution

Dalam rangka memperkuat infrastruktur perlindungan konsumen serta sebagai sarana komunikasi terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk *Working Group Internal Dispute Resolution/WG IDR* yang beranggotakan 38 PUJK yang terdiri dari 21 sektor perbankan, 11 sektor asuransi, dan enam sektor pembiayaan.

OJK juga menyelenggarakan pertemuan dengan *WG IDR* yang mengusung tema "overview layanan Konsumen 2018 dan pengenalan penegakan disiplin pelaku pasar (*market conduct*)" dengan konsep "*coffee morning* perlindungan Konsumen" di Jakarta.

2.5.5 Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen

A. Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS

Terdapat 62 permohonan penyelesaian sengketa

yang diterima oleh LAPS pada semester 2 tahun 2018. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 31 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPS pada semester 2 tahun 2018 terdiri dari enam hal yakni

restrukturisasi atau *rescheduling* kredit, keringanan tanggungan kredit, permasalahan agunan kredit, penyalahgunaan kartu kredit, sanggahan transaksi *online*, dan permasalahan penolakan pencairan deposito.

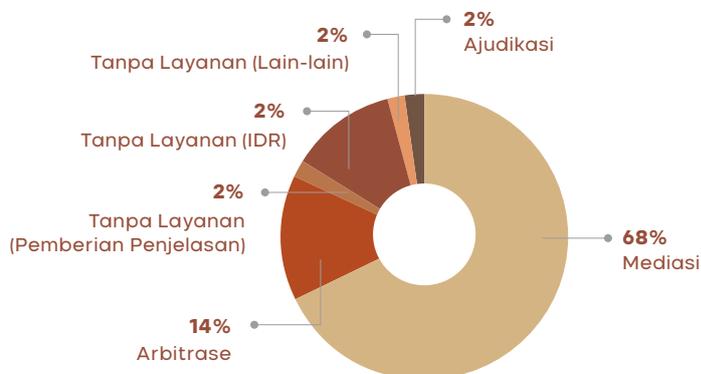
Tabel II - 49 ◇ Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	21	1	22
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPI)	6	0	6
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	1	0	1
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	20	11	31
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	0	0	0
Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)	2	0	2
Total	50	12	62

Dari 50 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 34 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, satu permohonan ditindaklanjuti melalui layanan adjudikasi,

dan tujuh permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak delapan permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti pemberian penjelasan dan rekomendasi.

Grafik II - 32 ◇ Permohonan Layanan yang Disetujui LAPS



Sampai dengan periode pelaporan, permohonan layanan yang diselesaikan LAPS sebanyak 33 permohonan dari 50 permohonan yang disetujui untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 17 permohonan masih dalam proses karena beberapa hal yakni menunggu kelengkapan dokumen, menunggu jawaban termohon, dan menunggu konfirmasi waktu pelaksanaan layanan dari kedua belah pihak.

B. Kegiatan Komunikasi mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan oleh Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen

OJK melaksanakan kegiatan pemberian informasi

kepada PUJK dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap LAPS dalam rangka penyelesaian-penyelesaian sengketa konsumen yang kredibel, efektif dan efisien.

Kegiatan dimaksud dilakukan bersama dengan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang diselenggarakan di Bali. Dalam kegiatan tersebut diinformasikan ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang telah dilakukan OJK, serta memberikan pemahaman kepada perwakilan PUJK serta wakil masyarakat melalui aktifis akademis tentang pentingnya keberadaan LAPS di sektor jasa keuangan dan pengenalan beberapa LAPS yang ada di Indonesia yaitu, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) dan Badan Arbitrase Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI). Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui masih terdapat tantangan dan hambatan di PUJK atau masyarakat yang belum mengetahui ketentuan perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh OJK, belum memahami fungsi dan peran OJK dalam melakukan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa melalui LAPS.

Sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) biasanya diawali dengan adanya laporan pengaduan akibat kerugian atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen karena tidak terpenuhinya hak dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak.

C. Knowledge Sharing mengenai Sumber Daya, Renumerasi dan Struktur Organisasi LAPS Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

OJK sebagai regulator berkepentingan untuk memastikan bahwa konsumen dan PUJK mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan efisien. Oleh karena itu OJK memberikan dukungan penuh kepada LAPS antara lain berupa:

- Mendorong integrasi LAPS
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- Penyediaan ruangan Kantor OJK sebagai tempat penyelesaian sengketa di daerah
- Melakukan sosialisasi yang intensif tentang eksistensi LAPS kepada konsumen, masyarakat, maupun PUJK.

OJK bersama dengan asosiasi industri sektor jasa keuangan dan ke-6 LAPS telah menyusun bersama *roadmap* penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan yang mana salah satu visi utamanya adalah terwujudnya LAPS yang terintegrasi di sektor jasa keuangan.

Sebagai langkah awal untuk melakukan integrasi, keenam LAPS telah mendirikan sekretariat bersama yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menerima dan meneruskan permintaan penyelesaian sengketa
- Menggalakkan kegiatan sosialisasi peranan LAPS
- Mempersiapkan upaya pengintegrasian LAPS.

Berikut beberapa alasan utama mengapa integrasi tersebut diperlukan:

- Menyediakan layanan LAPS yang konsisten dan terstandar. Dengan terintegrasi, prosedur penyelesaian sengketa di berbagai sektor akan sama.
- Semakin banyaknya produk dan layanan di

sektor jasa keuangan yang bersifat *hybrid*, yang memiliki karakteristik produk dari beberapa sektor sekaligus. Produk seperti ini diperkirakan akan semakin banyak di masa mendatang, terutama dengan hadirnya konsep *Financial Technology* (Fintech). Jenis produk seperti ini berpotensi membingungkan konsumen terkait kepada LAPS mana mereka akan mengadu jika terdapat permasalahan.

- Meningkatkan efisiensi layanan. Dengan terintegrasi LAPS menjadi satu lembaga, maka diharapkan dapat menekan biaya operasional karena pengeluaran dapat dimanfaatkan secara bersama-sama (*economic of scale*). Pengeluaran dimaksud contohnya seperti prasarana gedung, pembangunan sistem informasi dan infrastruktur, kegiatan komunikasi, kesekretariatan, dan lain-lain.

2.5.6 Market Conduct

A. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK telah melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) terhadap sampel Bank Umum, Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembangunan Daerah sepanjang triwulan I-2019 dengan tema Perjanjian Baku. Tujuan dari TS ini adalah untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh PUJK terutama dalam melaksanakan perjanjian dengan konsumen, mulai dari penyusunan perjanjian baku, implementasi, hingga evaluasinya.

Selanjutnya, menyikapi maraknya platform peminjaman *online* yang muncul belakangan ini, OJK juga melaksanakan Operasi Intelijen Pasar terkait hal ini. Kegiatan ini mengambil sampel 15 Fintech yang terdaftar dan berizin dari OJK. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menganalisis potensi kerawanan pinjaman *online*, terutama dari sisi perlindungan konsumen.

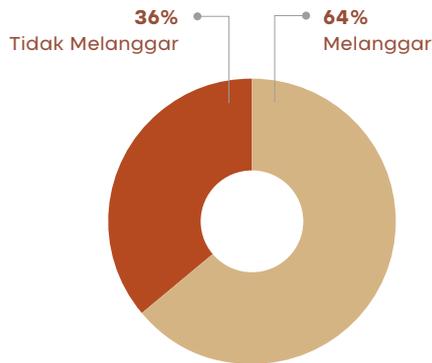
B. Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. *Monitoring* harian yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 44 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 43 iklan dari sektor perbankan dan 1 iklan dari sektor IKNB. Berdasarkan hasil analisis, dari 44 iklan di media cetak ditemukan 28 iklan (64%) masih melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun

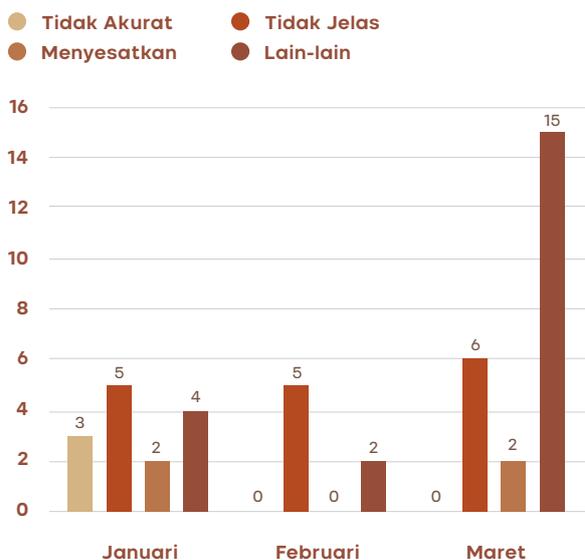
2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Grafik II - 33 ◇ Pelanggaran Iklan



Kategori yang paling banyak dilanggar selama periode laporan berturut-turut adalah Lain-Lain (21), Tidak Jelas (16), Menyesatkan (4), dan Tidak Akurat (3). Termasuk dalam kategori Lain-Lain adalah tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” dan/atau pernyataan yang dicantumkan tidak terbaca (ditulis dengan ukuran yang terlalu kecil, dicantumkan tidak secara horisontal, atau warna tidak kontras dengan latar belakang). Termasuk dalam kategori Tidak Jelas adalah iklan yang informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuannya tidak lengkap. Termasuk dalam kategori Menyesatkan adalah iklan yang materinya berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dengan masyarakat. Termasuk dalam kategori Tidak Akurat adalah iklan yang mencantumkan klaim dan/atau menggunakan data, namun tidak mencantumkan sumber data yang kredibel.

Grafik II - 34 ◇ Tren Pelanggaran Iklan



C. Peluncuran Pedoman Iklan Jasa Keuangan

Melihat masih banyaknya pelanggaran iklan yang dilakukan oleh PUJK, serta mengingat urgensi pengaturan iklan sebagai lini pertama pengenalan masyarakat kepada produk dan/atau layanan lembaga jasa keuangan, OJK menyusun Pedoman Iklan Jasa Keuangan sebagai *guideline* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan penyesuaian dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, serta Etika Priwara Indonesia.

Dalam pedoman iklan ini objek pemantauan iklan diperluas dari sekadar PUJK sesuai tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjadi seluruh Lembaga Jasa Keuangan.

Penyusunan Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini melibatkan asosiasi LJK selaku *stakeholder*. Pedoman Iklan Jasa Keuangan pertama kali diluncurkan dalam acara *Coffee morning* bersama ADK EPK tanggal 12 Maret 2019. Pedoman Iklan saat ini sudah dapat diunduh di *minisite* Sikapiuangmu dan situs resmi OJK.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan I-2019, OJK menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dua pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan empat berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 50 ◇ Penyidikan

Penyidikan	
Perkara Perbankan	
1. Perkara Bank Umum dan	3
2. Perkara BPR/S	
Perkara Pasar Modal	
3. Perkara Emiten PP	3
Perkara IKNB	
-	0
Total	6

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya mengirim dua berkas perkara yang keseluruhannya adalah perkara perbankan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Secara total, terdapat empat berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

2.6.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya pemenuhan infrastruktur yang berupa penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan I-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Review Nota Kesepakatan OJK dengan Instansi penegak hukum;

- Penyusunan ketentuan terkait *Restorative Justice* di Sektor Jasa Keuangan;
- Penyusunan ketentuan pembentukan *Task force* dalam rangka penguatan koordinasi penyelesaian perkara tindak pidana sektor jasa keuangan;
- Kajian Kewenangan Penyidik OJK dalam melakukan upaya paksa; dan
- Kajian putusan pengadilan atas perkara Perbankan dan IKNB.

2.6.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan I-2019, Satgas Waspada Investasi melaksanakan pembekalan Tim Kerja SWID di Kendari, Kupang, Palembang dan Cirebon.

2.6.4 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada triwulan I-2019, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 47 Entitas investasi ilegal dan 399 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK.

Grafik II - 35 ◇ Entitas yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi



2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.7.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

Sebagai tindak lanjut sidang *Financial Action Task force (FATF) Plenary Meeting* pada Oktober 2018 di Paris, Indonesia resmi mulai mengikuti proses *Mutual Evaluation Review (MER) FATF* pada September 2019. Proses ini merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui dalam rangka memperoleh keanggotaan Indonesia dalam FATF. MER bertujuan untuk menentukan kesiapan Indonesia menjadi anggota penuh FATF melalui asesmen kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan rekomendasi FATF dan melalui evaluasi atas efektivitas perangkat peraturan dan otoritas lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar FATF.

Keberhasilan MER FATF memerlukan keterlibatan aktif dari industri dan asosiasi sektor jasa keuangan. Koordinasi dan keterlibatan aktif antara OJK dengan industri dan asosiasi sektor jasa keuangan merupakan bagian penting dalam penilaian efektivitas implementasi penerapan program APU PPT dalam konteks *preventive measures*.

Hasil MER Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) Tahun 2017/2018* yang merupakan bekal awal untuk menangani defisiensi yang sudah teridentifikasi dan rekomendasi dalam laporan hasil MER APG dipenuhi melalui *Priority Actions Plan* OJK yang mencakup: (i) Penyempurnaan ketentuan APU PPT di SJK, (ii) Peningkatan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di seluruh SJK, (iii) Penguatan pengawasan APU PPT terhadap grup konglomerasi, (iv) Penerapan sanksi administratif secara tepat waktu yang lebih *dissuasive* jika tindakan lain tidak meningkatkan kepatuhan, (v) Peningkatan pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT, serta penerapan APU PPT berbasis risiko, kepada pelaku industri jasa keuangan, (vi) Peningkatan kerja sama terkait APU PPT di tingkat nasional dan internasional, dan (vii) Pengelolaan statistik APU PPT yang terintegrasi.

Untuk mendukung keberhasilan MER, di triwulan I-2019 OJK melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* "Persiapan MER Indonesia oleh FATF" dengan industri jasa keuangan dan pengawas terkait. Di samping itu, OJK juga sedang menyusun konsep *Technical Compliance (TC)* untuk kemudian diserahkan kepada PPAK selaku koordinator nasional MER.

2.7.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas pengawasan program APU PPT di industri jasa keuangan, diperlukan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan. Untuk mendukung hal tersebut OJK melaksanakan program sertifikasi level 1 bagi seluruh pengawas, dan program pelatihan lanjutan dengan mengangkat *topical* atau *current issues* tertentu.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada industri jasa keuangan, OJK secara mandiri maupun bekerja sama dengan asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT. Selama triwulan I-2019m OJK melaksanakan pelatihan untuk industri jasa keuangan bertema "Peran Bank dalam Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan TPPU-TPPT dan *Fraud* di Sektor Perbankan" dan Sosialisasi APU PPT pada acara "Evaluasi Kinerja BPR/S Tahun 2018" di wilayah Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

2.7.3 Koordinasi Kelembagaan

OJK melaksanakan asistensi program APU PPT kepada sejumlah bank dan perusahaan efek, menghadiri undangan pembahasan program simplifikasi pembukaan rekening efek nasabah dan rekening dana nasabah dan mengadakan *industrial testing* Sistem Informasi Program APU dan PPT (SIGAP) tahap 2 dengan seluruh asosiasi sektor jasa keuangan.

Sementara itu, pada triwulan I-2019 OJK melaksanakan koordinasi dengan PPAK, antara lain dalam bentuk koordinasi pelaksanaan *joint audit* 2019, perpanjangan Nota Kesepahaman (NK), rapat rencana pengkinian penilaian risiko TPPU (*Sectoral Risk Assessment/SRA*), penyusunan Rencana Aksi tahun 2019 atas Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan rapat terkait Implementasi Aplikasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.8.1 Kerjasama Domestik

Selama periode triwulan I-2019, OJK telah melakukan penandatanganan kerja sama sebagai berikut:

Tabel II - 51 ◇ Kerjasama Domestik

No.	Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerjasama
1.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan	Koordinasi Dan Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
2.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Penguatan Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
3.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Mahkamah Agung (MA) dan Bank Indonesia (BI)	Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan.
5.	Nota Kesepahaman antara OJK dengan Universitas Sebelas Maret (UNS)	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan Dan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Nota kesepahaman tersebut diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Di samping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 54 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI antara lain terkait akses pembiayaan perbankan untuk pelaku usaha UKM dan UMKM, perkembangan terkini kondisi dan isu strategis di industri perbankan Indonesia tahun 2019, peran OJK terhadap pelaku usaha perbankan kepada UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat, mengenal OJK dalam fungsi dan kewenangannya, membedah peran OJK dalam masyarakat, peran dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas perbankan nasional, implementasi pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen

sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen, sikapi uangmu dengan bijak, waspada investasi bodong, peran OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, peran dan fungsi OJK melalui pagelaran wayang kulit, Keuangan Syariah, peranan OJK dalam rangka meningkatkan perekonomian dan sosialisasi tentang investasi ilegal, refleksi bank syariah dan urgensinya terhadap perekonomian negara, hadapi era revolusi industri 4.0, edukasi anti Rentenir dan bijak dalam berinvestasi.

2.8.2 Kerjasama Internasional

A. Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional

a. Penguatan Peran dan Posisi OJK dalam Perundingan Jasa Keuangan

Kerja sama bilateral dan regional diperlukan sebagai penguatan peran dan posisi OJK dalam perundingan jasa keuangan. Adapun peran OJK dinilai dari posisi/*stance* OJK yang dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan *counterparts* dalam penyelesaian perundingan perdagangan internasional untuk sektor jasa keuangan, baik untuk bilateral, regional (ASEAN), maupun plurilateral:

Adapun sampai dengan triwulan I-2019 telah dilakukan :

1. **Pertemuan Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL), Bangkok**
OJK menyampaikan bahwa komitmen liberalisasi ASEAN *Banking Integration Framework* (ABIF) terkait *Qualified ASEAN Banks* (QAB) adalah kesepakatan bilateral antara 2 negara AMS

dan tidak relevan untuk disejajarkan dengan liberalisasi perbankan secara umum, sehingga WC-FSL menyepakati bahwa dalam *composite scoremap* tidak memasukkan QAB namun dimasukkan dalam detail perbankan.

2. Pertemuan Intersesi Working Group on Trade in Services (WG-TiS), Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Jakarta, tanggal 11-14 Februari 2019

Pada pertemuan intersesi ini dilakukan pembahasan *outstanding issues* pada draf teks *Title on Investment and Trade in Services – Section E. Financial Services*. Posisi OJK pada pasal yang memuat obligasi mengenai *Self-Regulatory Organisation* (SRO) dapat diterima oleh *counterpart* dan diadopsi bersama.

b. Penguatan Hubungan Kerjasama Kelembagaan OJK dengan Otoritas Keuangan Asing maupun Lembaga Internasional

Dalam rangka penguatan hubungan kerja sama kelembagaan OJK dengan otoritas keuangan asing maupun lembaga internasional diperlukan penguatan hubungan kerjasama kelembagaan OJK dengan Otoritas Keuangan asing maupun lembaga internasional. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembahasan perjanjian kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal OJK (*counterparts*). Selain itu realisasi kegiatan dari implementasi kerjasama kelembagaan (baik yang didasarkan pada perjanjian kerjasama formal maupun tidak) yang telah dilakukan OJK dengan otoritas keuangan negara lain dan lembaga internasional tersebut. Adapun sampai dengan triwulan I telah dilakukan:

1. Negosiasi Pembahasan Perjanjian Kerjasama Internasional

- a. Pembentukan *Working Group Banking and Finance* Indonesia dan Russia (OJK-BI-BKF);
- b. Negosiasi MoU OJK - *Securities Commission Malaysia on Fintech Cooperation*;
- c. Negosiasi MoU OJK - *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF);
- d. Finalisasi MoU OJK - *Monetary Authority of Brunei Darussalam on Consultation, Cooperation, and Exchange of Information* (menunggu konfirmasi penandatanganan);
- e. Finalisasi MoU OJK - Reserve Bank of India (menunggu konfirmasi penandatanganan);
- f. MoU OJK – IFC *on Credit Reporting System* Telah dilakukan pembahasan internal namun atas pandangan satuan kerja terkait, maka MoU tersebut belum perlu dilaksanakan.

2. Implementasi Kerjasama Internasional

- a. Korea *Financial Supervisory Service* (FSS) – 18 Maret 2019

Bilateral Meeting Ketua Dewan Komisiner OJK- *First Senior Deputy Governor* Kwang-Yeol Yoo terkait *program capacity building* dan *membership* IFSC.

- b. Deutsche Bundesbank – 14 Maret 2019 *Bilateral Meeting* Ketua Dewan Komisiner OJK Burkhard Balz, *Executive Board Member* terkait perkenalan Bundesbank dengan OJK
- c. Embassy of Luxembourg - 25 Februari 2019 *Bilateral Meeting* Bapak Fahri Hilmi - *Ambassador* Jean-Paul Senninger terkait MoU OJK – CSSF serta pelaksanaan seminar Bursa Efek Indonesia dengan *Association of the Luxembourg Fund Industry* (ALFI).
- d. International Labour Organization *Focus Group Discussion* OJK dan ILO dalam rangka memperoleh pandangan dan masukan dari satuan kerja terkait di OJK, asosiasi industri jasa keuangan, Kementerian/Lembaga, dan organisasi internasional terkait atas hasil riset ILO '*Financing Small Businesses in Indonesia: Challenges and Opportunities*'. *Launching* riset ILO dimaksud akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2019
- e. Embassy Korea *Pertemuan* dengan Satgas Waspada Investasi terkait adanya Fintech ilegal Korea di Indonesia.
- f. Al Baraka Banking Group *Courtesy Visit* kepada Deputi Komisiner Internasional dan Riset terkait pembahasan rencana akuisisi 2 (dua) bank syariah.
- g. Japan Embassy *Courtesy Visit* OJK ke Kedutaan Jepang dalam rangka *update* kelangsungan program Global Financial Partnership Center (GLOPAC) dan rencana kunjungan Japan FSA ke Indonesia.

B. Kerjasama Hubungan Multilateral

OJK senantiasa memelihara hubungan kerjasama Multilateral di antaranya dengan ikut serta dalam penerapan Best Fit International Standards antara lain. Adapun sampai dengan triwulan I-2019 telah dilakukan:

1. Pemetaan Isu terkait implementasi standar internasional, yang terdiri dari :

- a. Koordinasi internal pemetaan *Global Financial Sector Reform* (GFSR) salah satunya untuk mengidentifikasi tahap awal implementasi standar internasional
- b. Koordinasi internal pembahasan isu implementasi standar internasional dan isu *Global Financial Sector Reform* (GSFR) di antaranya mengenai:
 - i. Progress Rekomendasi *Financial Sector Assessment Program* (FSAP)
 - ii. IFSB tahun 2019 (pembahasan program, anggota WG Takaful);
 - iii. FSB (membership FSB SRC, survey FSB terkait SME dan IFRS 9)

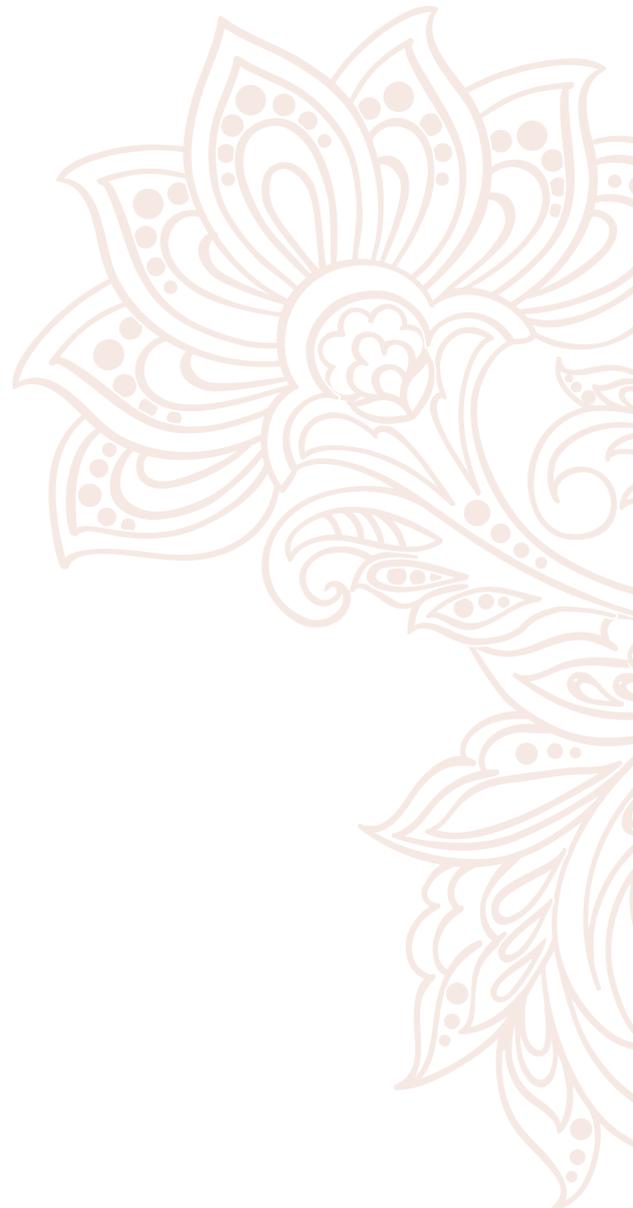
- iv. ROSC AA
- v. MER FATF
- vi. *Membership*: IOSCO, FinCoNet, AITRI, dan IAIS

C. Pengembangan Fungsi Investor Relation Unit

Dalam rangka mengembangkan fungsi *investor relation unit*, OJK menyelenggarakan kegiatan penyediaan informasi pada pertemuan dengan *rating agencies* yang terkait proses bisnis utama *rating agencies* dalam rangka pemenuhan permintaan informasi terkait sektor jasa keuangan di Indonesia. Adapun pada triwulan I-2019 terdapat dua kunjungan dalam rangka *Sovereign Credit Rating Rating Agency* yaitu Moody's dan *Rating and Investment Information Inc.(R&I)* yang didukung penyediaan informasinya.

Selain itu, pemberian layanan tersebut juga diberikan kepada para pemangku kepentingan industri jasa keuangan di Indonesia di antaranya lembaga atau perusahaan internasional, lembaga pemerintahan asing, kampus/akademisi asing, termasuk institusi dan perorangan dari dalam negeri, antara lain:

1. *U.S Embassy*;
2. *Credit Suisse Sekuritas*;
3. *Bernstein Research*;
4. *Nomura Sekuritas Indonesia*





03

Tinjauan Industri dan Operasional
Sektor Jasa Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan lima POJK yang mengatur Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah



Kajian Survei Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah



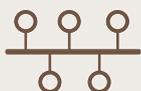
Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian



Working Group Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah



Penyusunan Program Kerja Utama Transformasi Perbankan Syariah



Kajian Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 – 2024



Kajian Skema Sukuk

Event



IKNB Syariah bekerjasama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong, Universitas Ibnu Khaldun, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)



Workshop penguatan kinerja DPS pada Dana Penusun Syariah



Roadshow Seminar Multifinance Syariah



Pendampingan Penerbitan Sukuk Wakaf



3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah mampu memperkuat ketahanan modal dalam setahun terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 138 bps (yoy), meski dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah yang terjaga. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan

sebesar 2,16% (qtq) dan 2,87% (qtq), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 0,52% (qtq).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama triwulan I 2019 selalu berada di atas *threshold* (*threshold* 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK), yaitu masing-masing sebesar 139,50% dan 25,86%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan I-2019 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,18%.

Tabel III - 1 ◊ Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2018		Pertumbuhan (qtq) Triwulan I-2019		Pertumbuhan (yoy) Triwulan I-2019	
	I-2018	IV-2018	I-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	439,32	489,69	492,23	20,87	+4,45	2,54	+0,52	52,91	+12,04
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,80	5,96	5,94	-	+0,03	-	-0,02	-	+0,14
DPK (Rp Triliun)	347,15	379,96	390,87	16,78	+4,62	10,91	+2,87	43,71	+12,59
Pembiayaan (Rp Triliun)	294,70	329,28	336,39	10,08	+3,16	7,11	+2,16	41,69	+14,15
Jumlah NPF (Rp Triliun)	11,94	9,98	11,21	-1,03	-9,39	1,24	+12,40	-0,72	-6,07
Jumlah Bank									
- BUS	13	14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,69
- UUS	21	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-4,76
- BPRS	167	167	165	-1,00	-0,60	-2,00	-1,20	-2,00	-1,20
Jumlah Kantor	2.620	2.724	2.746	54,00	2,02	22,00	0,81	126,00	4,81
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF Gross (%)	3,86	2,85	3,18	-	-0,37	-	+0,33	-	-0,68
NPF Net (%)	2,19	1,74	1,91	-	-0,25	-	+0,17	-	-0,28
ROA (%)	1,59	1,59	1,58	-	-0,14	-	-0,01	-	-0,01
BOPO (%)	85,65	85,49	85,58	-	1,30	-	+0,09	-	-0,07
FDR (%)	84,32	86,11	85,44	-	-1,25	-	-0,68	-	+1,12
BUS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	294,27	316,69	318,06	10,57	+3,45	1,37	+0,43	23,79	+8,08
DPK (Rp Triliun)	244,82	257,61	262,71	6,12	+2,43	5,10	+1,98	17,89	+7,31
Pembiayaan (Rp Triliun)	190,06	202,30	205,92	3,76	+1,90	3,62	+1,79	15,86	+8,34
Jumlah NPF (Rp Triliun)	8,67	6,60	7,09	-1,00	-13,11	0,49	+7,48	-1,58	-18,25
CAR (%)	18,47	21,39	19,85	-	+0,14	-	-1,54	-	+1,38
NPF Gross (%)	4,56	3,26	3,44	-	-0,56	-	+0,18	-	-1,12
ROA (%)	1,23	1,28	1,46	-	-0,13	-	+0,18	-	+0,23
BOPO (%)	89,90	89,18	87,82	-	+1,09	-	-1,36	-	-2,08
FDR (%)	77,63	78,53	78,38	-	-0,42	-	-0,15	-	-0,75
Jumlah Kantor	1.822	1.875	1.886	13,00	0,70	11,00	0,59	64,00	3,51

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qtq) TW-IV 2018		Pertumbuhan (qtq) TW-I 2019		Pertumbuhan (yoy) TW-I 2019	
	I-2018	IV-2018	I-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp Triliun)	133,93	160,64	161,76	9,83	+6,52	1,12	+0,70	27,82	+20,77
DPK (Rp Triliun)	95,09	114,22	120,03	10,26	+9,87	5,80	+5,08	24,94	+26,22
Pembiayaan (Rp Triliun)	96,56	117,89	121,07	5,91	+5,28	3,18	+2,70	24,52	+25,39
Jumlah NPF (Rp Triliun)	2,38	2,53	3,31	0,12	+5,06	0,77	30,40	0,93	+38,94
NPF Gross (%)	2,46	2,15	2,73	-	0,00	-	0,58	-	+0,27
ROA (%)	2,40	2,24	1,82	-	-0,19	-	-0,43	-	-0,58
BOPO (%)	72,64	75,38	79,80	-	2,50	-	4,42	-	+7,16
FDR (%)	101,54	103,22	100,87	-	-4,50	-	-2,34	-	-0,67
Jumlah Kantor	348	354	364	14,00	4,12	10,00	2,82	16,00	4,60
BPRS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	11,11	12,36	12,41	0,47	+3,92	0,05	+0,39	1,30	+11,66
DPK (Rp Triliun)	7,25	8,13	8,14	0,40	+5,11	0,00	+0,01	0,89	+12,29
Pembiayaan (Rp Triliun)	8,08	9,08	9,40	0,40	+4,66	0,31	+3,44	1,32	+16,33
Jumlah NPF (Rp Triliun)	0,89	0,84	0,82	-0,16	-16,05	-0,03	-3,19	-0,07	-7,70
CAR (%)	20,60	19,33	20,19	-	-0,45	-	+0,86	-	-0,41
NPF Gross (%)	10,98	9,30	8,71	-	-2,29	-	-0,60	-	-2,27
ROA (%)	2,38	1,87	2,36	-	-0,42	-	+0,49	-	-0,02
BOPO (%)	84,23	87,66	87,00	-	+1,48	-	-0,66	-	+2,77
FDR (%)	111,53	111,67	115,50	-	-0,48	-	+3,83	-	+3,97
Jumlah Kantor	450	495	496	27,00	5,77	1,00	0,20	46,00	10,22

Sumber: OJK, diolah

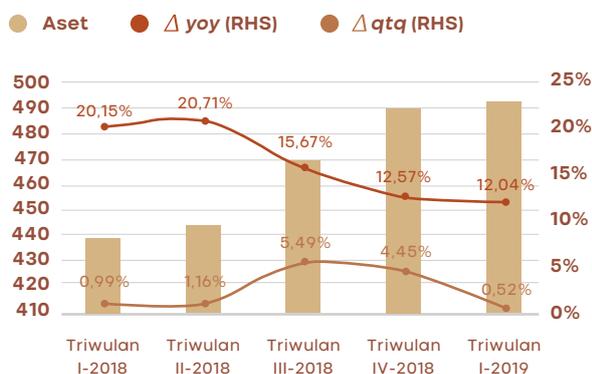
Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2019

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit (12,04%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 5,94% terhadap perbankan nasional, mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,96%. BUS, UUS, dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 0,43% (qtq), 0,70% (qtq) dan 0,39% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 64,62%, 32,86%, dan 2,52%.

Dilihat dari komponennya, aset perbankan syariah utamanya ditempatkan pada pembiayaan yang disalurkan (PYD) dengan porsi sebesar 66,40%, surat berharga yang dimiliki (14,17%), dan penempatan pada Bank Indonesia (11,59%). PYD tumbuh 2,16% (qtq) atau 14,15% (yoy), penempatan perbankan syariah pada surat berharga mengalami peningkatan 5,76% (qtq) atau 37,81% (yoy). Di lain pihak, penempatan pada Bank Indonesia mengalami penurunan 9,05% (qtq) atau turun 10,65% yoy. Di sisi pasiva, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang sebesar 2,87% (qtq) atau 12,59% (yoy), sementara modal terjaga dengan pertumbuhan sebesar 0,09% (qtq), meski secara tahunan meningkat 18,77% (yoy).

Grafik III - 1 ◊ Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber: SPS, Maret 2019

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,96% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,68%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,62% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,55% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan I-2019.

Grafik III - 2 ◇ Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)



Sumber: SPS, Maret 2019

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan I-2019 tumbuh sebesar 0,54% (*qtq*) atau 11,08% (*yoy*). Pertumbuhan sumber dana perbankan syariah ditopang oleh DPK yang tumbuh 2,87% (*qtq*) atau 12,59% (*yoy*), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,62% (*qtq*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 57,79%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 29,82%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 12,39%.

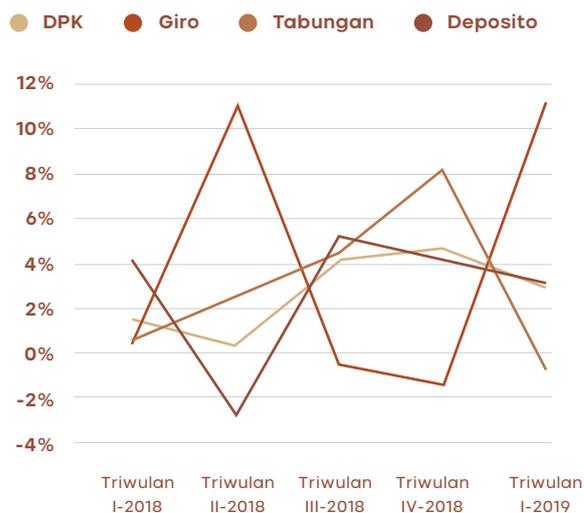
Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan I 2019, Deposito tumbuh dengan laju sebesar 3,17% (*qtq*), atau secara tahunan tumbuh 9,77% (*yoy*). Di sisi lain, Tabungan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,74% (*qtq*), meski secara tahunan tumbuh 15,06% (*yoy*). Sementara giro menunjukkan peningkatan dengan laju tertinggi sebesar 11,09% (*qtq*) atau 20,84% (*yoy*), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan (-1,50%, *qtq*).

Tabel III - 2 ◇ Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2018		2019	Porsi	<i>qtq</i> (%)			<i>yoy</i> (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19	Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19
Modal Kerja	100.520	108.483	109.978	32,69%	-2,20%	1,58%	1,38%	13,60%	5,55%	9,41%
Investasi	68.832	77.047	79.352	23,59%	1,11%	3,95%	2,99%	11,83%	13,17%	15,28%
Konsumsi	125.348	143.747	147.061	43,72%	2,24%	3,95%	2,31%	16,56%	17,25%	17,32%
Total	294.699	329.277	336.390	100,00%	0,42%	3,16%	2,16%	14,41%	12,21%	14,15%

Sumber: SPS, Desember 2018

Grafik III - 3 ◇ Pertumbuhan DPK Bank Syariah (*qtq*)



Sumber: SPS, Desember 2018

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan I-2019 tumbuh 2,16% (*qtq*), melambat dibandingkan posisi triwulan IV-2018 yang tumbuh sebesar 3,16% (*qtq*). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada seluruh jenis penggunaan, baik Konsumsi, Investasi, maupun Modal Kerja. Pada periode laporan, pembiayaan Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,31% (*qtq*), 2,99% (*qtq*), dan 1,38% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja masing-masing tumbuh sebesar 3,95% (*qtq*), 3,95% (*qtq*), dan 1,58% (*qtq*). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 43,72% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 32,69% dan 23,59%.

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 56,46% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan I-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,05% (qtq) atau 11,83% (yoy), atau meningkat sebesar Rp3,70 triliun (qtq). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang tumbuh sebesar 10,27% (qtq) atau meningkat Rp2,53 triliun (qtq).

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua dengan laju sebesar 4,02% (qtq) atau mengalami peningkatan sebesar Rp980 miliar (qtq). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan

Perorangan lainnya yang tumbuh 12,80% (qtq) atau meningkat Rp685 miliar (qtq).

Sementara itu, pada sektor non-produktif, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% (qtq) atau mengalami peningkatan sebesar Rp3,39 triliun (qtq), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan I-2018 yang sebesar 2,24% (qtq). Di kategori Rumah Tangga, kontributor pertumbuhan triwulanan terbesar merupakan pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang tumbuh 4,34% (qtq) atau secara nominal meningkat Rp1,99 triliun (qtq). Kontributor pertumbuhan pembiayaan rumah tangga berikutnya adalah untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang tumbuh 1,90% (qtq) atau meningkat Rp1,37 triliun (qtq).

Tabel III - 3 ◇ Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018		2019	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19	Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19
Lapangan Usaha	164.973	180.785	184.483	56,46%	-1,02%	2,63%	2,05%	12,99%	8,47%	11,83%
Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	10.396	11.497	12.168	3,59%	-0,23%	-2,92%	5,83%	9,61%	10,35%	17,05%
Perikanan	1.048	1.204	1.169	0,38%	-28,36%	1,43%	-2,95%	-29,79%	-17,63%	11,58%
Pertambangan dan Pengalihan	6.551	5.410	5.306	1,69%	-4,56%	-6,23%	-1,92%	-4,12%	-21,19%	-19,01%
Industri Pengolahan	21.440	24.363	25.343	7,61%	-0,10%	3,25%	4,02%	6,91%	13,52%	18,20%
Listrik, gas dan Air	11.150	16.600	16.274	5,18%	0,96%	1,04%	-1,96%	34,96%	50,30%	45,96%
Konstruksi	21.273	24.648	27.180	7,70%	-4,16%	9,16%	10,27%	47,64%	11,04%	27,77%
Perdagangan Besar dan Eceran	32.472	33.166	33.462	10,36%	-1,12%	-0,28%	0,89%	10,75%	1,00%	3,05%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.730	4.728	4.789	1,48%	3,24%	13,59%	1,28%	8,89%	30,86%	28,39%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9.833	9.374	9.254	2,93%	-2,51%	-8,29%	-1,28%	-5,33%	-7,06%	-5,89%
Perantara Keuangan	18.590	19.569	18.352	6,11%	-5,07%	7,43%	-6,22%	2,68%	-0,07%	-1,28%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.218	13.315	12.903	4,16%	-0,88%	5,16%	-3,09%	7,60%	8,02%	5,61%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5	4	10	0,00%	-26,23%	-44,96%	150,99%	-32,37%	-48,52%	75,14%
Jasa Pendidikan	4.794	5.460	5.760	1,71%	-2,27%	6,08%	5,50%	16,73%	11,30%	20,15%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.981	4.788	5.343	1,50%	-0,99%	14,71%	11,58%	23,31%	19,09%	34,20%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.699	5.353	6.038	1,67%	34,70%	-12,86%	12,80%	48,27%	7,63	-9,87%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasnya	462	938	757	0,29%	-14,27%	139,51%	-19,21%	-32,91%	74,14%	64,11%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	118.787	133.611	137.006	41,73%	2,24%	4,15%	2,54%	16,84%	15,00%	15,34%

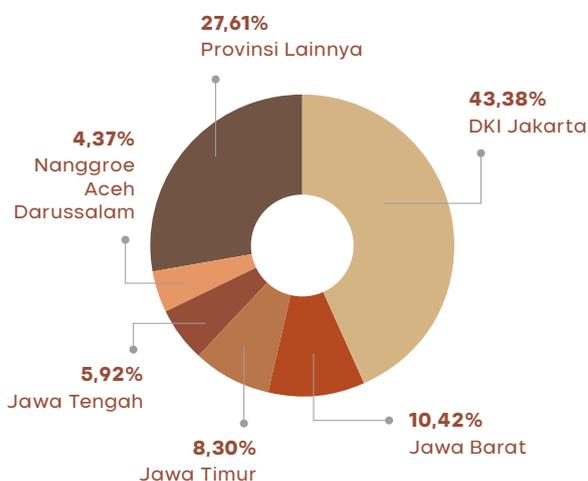
Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018		2019	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I		Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19	Triwulan I - 18	Triwulan IV - 18	Triwulan I - 19
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	62.321	71.887	73.256	22,45%	2,73%	4,57%	1,90%	16,77%	18,50%	17,55%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	2.092	2.670	2.818	0,83%	6,94%	6,23%	5,52%	36,08%	36,51%	34,69%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	2.119	3.272	3.348	1,02%	-0,72%	0,35%	2,31%	-0,90%	4,15%	7,33%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.779	9.919	9.731	3,10%	-3,39%	-3,97%	-1,89%	13,55%	-2,00%	-0,49%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk Multiguna)	41.476	45.862	47.852	14,32%	2,91%	5,57%	4,34%	18,50%	13,79%	15,37%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2.861	5.797	5.505	1,81%	0,93%	-4,69%	-5,05%	-0,04%	104,47%	92,37%
Total	286.621	320.193	326.993	100,00%	0,32	3,12%	2,12%	14,40%	12,08%	14,09%

Sumber: SPS, Maret 2019

Kualitas pembiayaan perbankan syariah yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan I-2019 terjaga di bawah threshold 5% meski mengalami peningkatan 33 bps (*qtq*) menjadi 3,18%. Peningkatan NPF didorong oleh meningkatnya NPF pada sektor Lapangan Usaha sebesar 41 bps (*qtq*) menjadi 4,24%. Sektor Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) juga mengalami peningkatan NPF sebesar 19 bps (*qtq*) menjadi 1,76%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,02%, khususnya DKI Jakarta (43,38%), Jawa Barat (10,42%), Jawa Timur (8,30%), dan Jawa Tengah (5,92%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 4,37%.

Grafik III - 4 ◇ Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS, Maret 2019

D. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam threshold. Pada triwulan I-2019, FDR perbankan syariah sebesar 85,44%, turun 68 bps (*qtq*) dibandingkan triwulan IV-2018 yang sebesar 86,11%, meski secara tahunan meningkat sebesar 112 bps (*yoy*) dari triwulan I-2018 yang sebesar 84,32%. Penurunan FDR selama triwulan I-2019 didorong oleh penurunan FDR UUS sebesar 234 bps (*qtq*) menjadi sebesar 100,87%. FDR BUS mengalami penurunan sebesar 15 bps (*qtq*) menjadi sebesar 78,38%. Sementara, FDR BPRS mengalami peningkatan dari triwulan IV-2018 yang sebesar 111,67% menjadi sebesar 115,50% pada triwulan IV-2018.

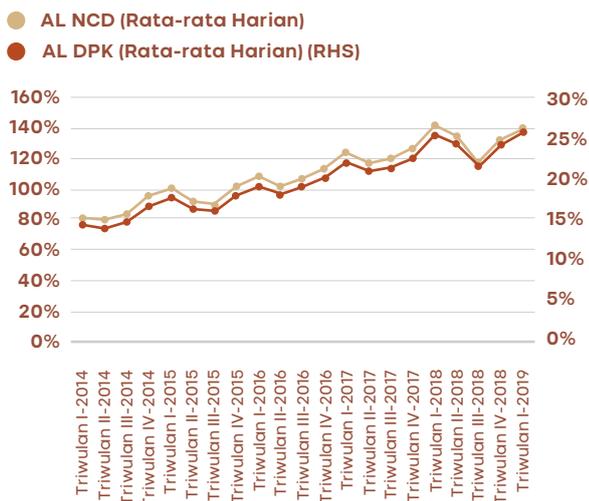
Likuiditas yang memadai juga ditunjukkan oleh rata-rata harian AL/NCD selama triwulan I-2019 sebesar 139,50% dan rasio AL terhadap DPK sebesar 25,86%.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan I-2019 sebesar 139,50%, meningkat dibandingkan pada triwulan IV-2018 sebesar 131,86%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan I-2019 sebesar 25,86%, meningkat dibandingkan triwulan IV-2018 yang sebesar 24,30%.

Tabel III - 4 ◇ Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	Triwulan I - 15	Triwulan I - 16	Triwulan I - 17	Triwulan I - 18	Triwulan I - 19
AL/NCD	100,18%	107,43%	123,38%	141,05%	139,50%
AL/DPK	17,61%	18,96%	21,83%	25,40%	25,86%

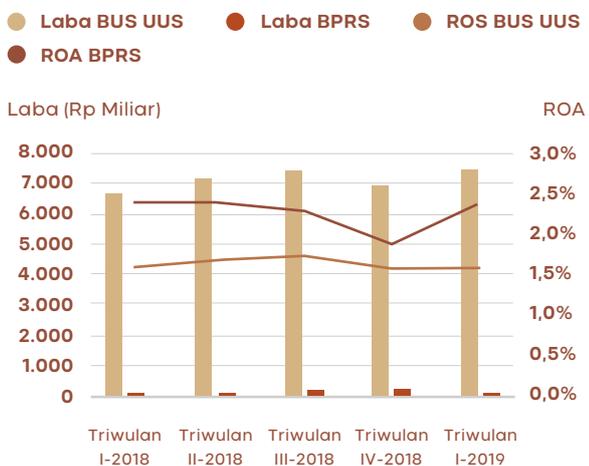
Grafik III - 5 ◇ Indikator Likuiditas Harian BUS



E. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan I-2019 sebesar 1,58%, cukup stabil jika dibandingkan triwulan I-2018 maupun triwulan IV-2018 yang sama-sama sebesar 1,59%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan dan efisiensi bank syariah yang terjaga. Kenaikan laba selama triwulan I-2019 sebesar 7,74% (*qtq*) dari Rp6,93 triliun pada triwulan IV-2018 menjadi Rp7,47 triliun. Sementara itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami peningkatan 49 bps (*qtq*) menjadi 2,36% pada triwulan I-2019.

Grafik III - 6 ◇ Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: SPS, Maret 2019

F. Permodalan

Pada triwulan I-2019, CAR BUS mengalami penurunan 154 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 19,85%, dengan jumlah modal sebesar Rp37,11 triliun. Modal BUS mengalami pertumbuhan sebesar 0,95% (*qtq*), sementara aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BUS sebesar Rp186,94 triliun, mengalami peningkatan 2,32% (*qtq*). Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami peningkatan, dari 19,33% pada triwulan IV-2018 menjadi 20,19% pada triwulan I-2019.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

A. Perkembangan Saham Syariah

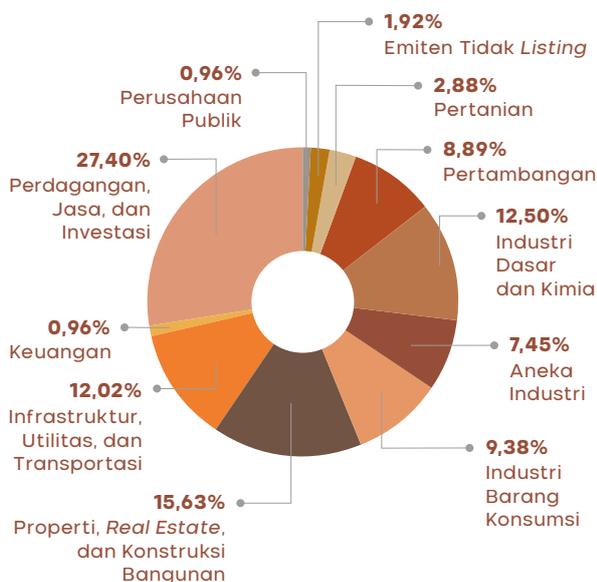
Pada triwulan I-2019 terdapat penambahan tiga saham yang masuk ke dalam DES Periode II atas hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu:

Tabel III - 5 ◇ Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten
1.	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
2.	PT Meta Epsi Tbk.
3.	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir Maret 2019 berjumlah 416 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 114 saham (27,40%).

Grafik III - 7 ◇ Judul Siaran Pers Triwulan I-2019



Kinerja saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index (JII)* dan *Jakarta Islamic Index (JII) 70* secara umum meningkat. Pada akhir Maret, ISSI ditutup pada level 190,17 poin atau meningkat sebesar 3,35% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 184,00. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir Maret 2019 sebesar Rp3.798,99 triliun atau kapitalisasi pasar seluruh Saham sebesar Rp7.356,38 triliun, meningkat sebesar 3,61% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir periode triwulan IV-2018 sebesar Rp3.666,70 triliun.

Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 704,69 atau meningkat 2,84% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.302,45 meningkat 2,81% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan JII 70, pada akhir Maret 2019, ditutup pada level 227,55, meningkat 2,63% dibandingkan pada akhir periode triwulan III-2018. Kapitalisasi JII70 per akhir Maret 2019 ditutup pada level Rp2.794,25 triliun, meningkat 7,13% dibandingkan akhir tahun 2018.

Tabel III - 6 ◇ Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	1.672,10	2.557,85	-	4.219,02
2014	1.944,53	2.946,90	-	5.228,04
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
Triwulan I-2018	2.123,50	3.584,60	-	6.884,88
Triwulan II-2018	2.047,17	3.427,58	2.510,03	6.511,73
Triwulan III-2018	2.072,79	3.543,32	2.554,25	6.737,43
Triwulan IV-2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
Triwulan I-2019	2.302,45	3.798,99	2.794,25	7.356,38

Tabel III - 7 ◇ Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	585,11	143,71	-	4.274,18
2014	691,04	168,64	-	5.226,95
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,711
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
Triwulan I-2018	704,28	183,59	-	6.188,99
Triwulan II-2018	654,77	173,25	217,42	5.799,24
Triwulan III-2018	664,92	178,09	221,72	5.976,55
Triwulan IV-2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
Triwulan I-2019	704,69	190,17	234,11	6.468,76

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan I-2019 terdapat penerbitan sebanyak 22 Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,33 triliun, dan tidak terdapat sukuk korporasi yang jatuh tempo selama periode tersebut.

Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 121 seri atau meningkat sebesar 22,22% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp 24,63 triliun atau meningkat sebesar 15,62% dibandingkan akhir tahun 2018.

Tabel III - 8 ◇ Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79
Triwulan I-2018	27.583	144	16.104	84
Triwulan II-2018	29.933	156	16.338	90
Triwulan III-2018	33.657	164	20.062	97
Triwulan IV-2018	36.121	175	21.299	99
Triwulan I-2019	39.449	199	24.626	121

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

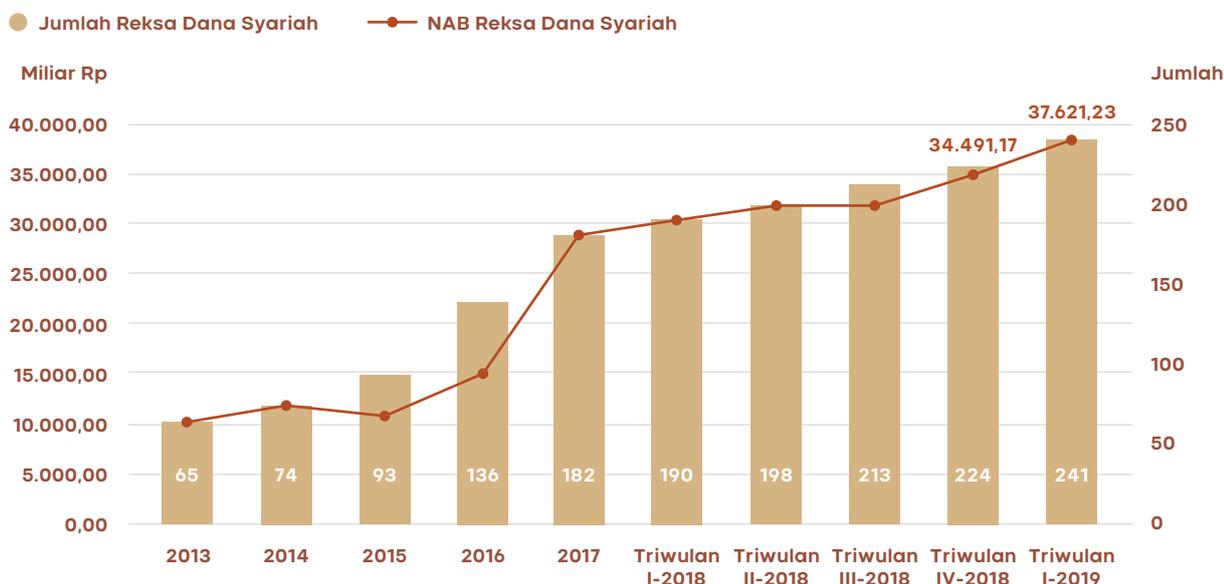
Pada triwulan I-2019 terdapat 24 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta enam Reksa Dana Syariah bubar. Reksadana bubar tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir Maret 2019, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak

241, dengan NAB sebesar Rp37,08 triliun atau meningkat 7,59% dari sisi jumlah namun menurun 1,10% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 11,48% dari total 2.099 Reksa Dana dan 7,58% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp515,09 triliun.

Tabel III - 9 ◇ Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33t	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
Triwulan I-2018	190	1.659	1.849	10,28%	31.108,82	465.395,08	496.503,90	6,27%
Triwulan II-2018	198	1.723	1.921	10,31%	32.167,28	454.394,70	486.561,99	6,61%
Triwulan III-2018	213	1.822	2.035	10,47%	31.797,51	462.292,76	495.090,27	6,42%
Triwulan IV-2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,50	505.390,67	6,82%
Triwulan I-2019	241	1.858	2.099	11,48%	37,08	478,01	515,09	7,58%

Grafik III - 8 ◇ Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Sampai dengan triwulan I-2019, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 65 seri, atau meningkat 1,54% dibandingkan periode sebelumnya,

nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp682,72 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 5,61% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 9 ◇ Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



Tabel III - 10 ◇ Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (Rp Triliun)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
Triwulan I-2018	581,64	57
Triwulan II-2018	612,20	58
Triwulan III-2018	645,35	60
Triwulan IV-2018	646,45	65
Triwulan I-2019	682,72	66

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan dengan triwulan I-2019, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- Terdapat satu Manajer Investasi Syariah yaitu PT. Paytren Aset Manajemen serta 53 Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Syariah (UPIS).
- Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 28 Penjamin Emisi Efek.
- Terdapat 11 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajer Investasi, PT Maybank Asset Management, PT Eastspring Investment Indonesia, PT Indosurya Asset Management dan PT RHB Asset Management Indonesia.
- Bank Kustodian yang mengelola reksadana syariah 14 bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank Bukopin, CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Permata, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank.
- Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah (sistem *online trading* syariah) berjumlah 13 Perusahaan Efek yaitu: PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani,

PT First Asia Capital, PT MNC Securities, PT Phillip Securities Indonesia, PT Henan Putihrai Securities, dan PT RHB Sekuritas.

- Terdapat delapan Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk.

- Terdapat 92 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2019, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 7,81% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp104,11 triliun. Aset industri perasuransian Syariah masih mendominasi dengan porsi sebesar 41% dari total aset IKNB Syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 11 ◇ Aset IKNB Syariah

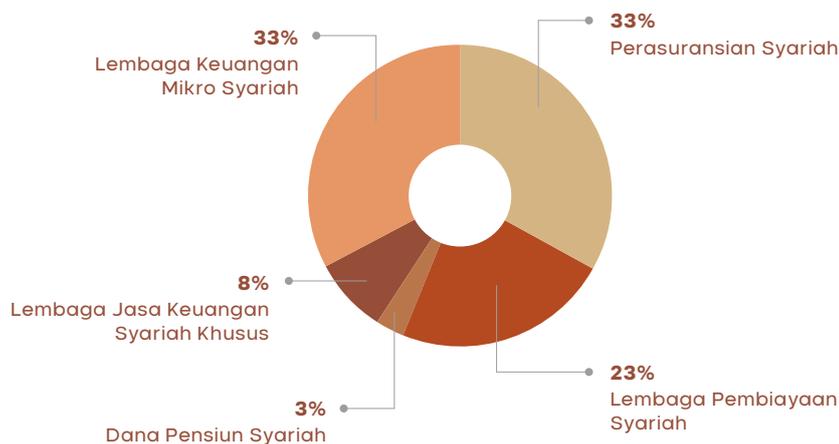
(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Perasuransian Syariah	42,83	42,06	41,93	41,78	43,61
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	32,77	29,51	28,23	25,71	27,06
3.	Dana Pensiun Syariah	-	-	-	3,50	6,24
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	23,00	23,84	26,18	25,33	26,93
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,11	0,15	0,24	0,24	0,27
Total		98,71	95,56	96,58	96,56	103,58

Sampai akhir triwulan I-2019, terdapat 62 perusahaan perasuransian Syariah, 43 lembaga pembiayaan Syariah, lima Dana Pensiun Syariah, 15 lembaga jasa

keuangan Syariah khusus, dan 62 lembaga keuangan mikro Syariah.

Grafik III - 10 ◇ Jumlah Entitas IKNB Syariah



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan I-2019, industri perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 4,38% dan 3,35% menjadi Rp43,61 triliun dan Rp 38,20 triliun dibandingkan

triwulan IV-2018. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan I-2019, mengalami penurunan sebesar -10,41% menjadi Rp 3,53 triliun, sedangkan klaim bruto meningkat 21,02% menjadi Rp 2,13 triliun.

Tabel III - 12 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	35,17	34,37	34,38	34,30	35,75
	Asuransi Umum Syariah	5,90	5,91	5,77	5,69	5,55
	Reasuransi Syariah	1,76	1,78	1,78	1,79	1,78
	Jumlah	42,83	42,06	41,93	41,78	43,08
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	31,47	31,28	31,71	31,87	33,05
	Asuransi Umum Syariah	3,85	3,82	3,71	3,78	3,77
	Reasuransi Syariah	1,23	1,22	1,25	1,31	1,34
	Jumlah	36,55	36,32	36,67	36,96	38,16
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,33	5,31	8,95	11,04	3,05
	Asuransi Umum Syariah	0,49	0,99	1,23	1,84	0,47
	Reasuransi Syariah	0,12	0,41	0,64	0,87	0,22
	Jumlah	3,94	6,71	10,82	13,75	3,74
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	0,32	0,59	0,89	1,30	0,38
	Asuransi Umum Syariah	0,21	0,37	0,53	0,79	0,20
	Reasuransi Syariah	0,13	0,28	0,45	0,66	0,15
	Jumlah	1,76	3,55	5,57	7,64	0,73
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,45	3,51	4,05	4,05	4,27
	Asuransi Umum Syariah	3,12	3,06	2,88	2,23	2,53
	Reasuransi Syariah	0,66	0,71	0,73	0,79	0,78
	Jumlah	8,23	7,28	7,66	7,07	7,58

*) Triwulan I-2019 merupakan data bulanan Maret 2019

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledge*, 1 perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari tiga Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan dua

dana pensiun yang menjual paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp 6,24 triliun.

B. Industri Perasuransian Syariah

Sampai dengan akhir triwulan I-2019 terdapat 35 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan 31 perusahaan berbentuk UUS.

Tabel III - 13 ◇ Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Komponen	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019
1.	Kas dan Setara Kas	1.353	553	655	580	1.238
2.	Aset Tagihan Derivatif	15	43	49	23	15
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	26.172	23.800	21.751	19.297	18.008
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	-	8	3	3
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	57	54	23	17	29
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	112	118	116	109	139
9.	Aset Pajak Tangguhan	22	20	20	23	22
10.	Rupa-Rupa Aset	2.664	2.532	2.245	2.126	2.735
Total Aset		30.395	27.120	24.867	22.179	22.189

Sedangkan untuk perusahaan modal ventura syariah berjumlah empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1,50 triliun. Selain itu, pada lembaga pembiayaan terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah dengan aset sebesar Rp3,37 triliun.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, perusahaan pergadaian, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pada triwulan I-2019 ini jumlah perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak enam perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan empat UUS dengan total aset per 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp 1,52 triliun. Selanjutnya, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah saat ini berjumlah tujuh perusahaan yang terdiri atas unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan enam perusahaan pergadaian swasta, dengan total aset Rp 8,64 triliun.

Untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit syariah dari perusahaan dimaksud dengan total aset masing-masing sebesar Rp2,01 triliun dan Rp14,76 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 62 lembaga berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp278 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

A. Perkembangan Saham Syariah

Selama triwulan I-2019 OJK menerbitkan dua peraturan tentang Bank Umum yang juga berlaku untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum (POJK Sekuritisasi Aset).

Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rancangan SEOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, rancangan SEOJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, rancangan SEOJK tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan rancangan SEOJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Beberapa rancangan SEOJK tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.2.2 Pengaturan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I-2019 OJK melaksanakan kegiatan dalam rangka revisi dua peraturan terkait Pasar Modal Syariah, yaitu:

1. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 terkait Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Tujuan revisi peraturan ini adalah untuk menghasilkan suatu kerangka peraturan penerbitan reksa dana syariah yang komprehensif dan terkini, sehingga

tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga alternatif investasi yang aman bagi investor.

2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 terkait Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Tujuan revisi peraturan ini adalah untuk mengakomodasi dinamika penerapan ketentuan mengenai ASPM pada POJK tersebut antara lain perizinan, pelaporan, pelaksanaan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), rangkap jabatan, serta pengawasan ASPM. Selain itu, juga akan dilaksanakan penyelarasan regulasi terkait di sektor perbankan syariah dan IKNB syariah.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan I-2019 OJK menerbitkan dua peraturan terkait IKNB Syariah, yaitu:

1. POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan

POJK ini merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha

Syariah Perusahaan Pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dalam perekonomian nasional, meningkatkan pengaturan prudensial, dan meningkatkan perlindungan konsumen.

2. SEOJK nomor 4/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan ini berisikan ketentuan Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, tata cara penyampaian dan ketentuan lainnya.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2019 OJK melaksanakan kegiatan pengawasan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan DPS, perizinan produk baru, jaringan kantor, dan perizinan lainnya.

Tabel III - 14 ◇ Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank dan DPS

Keterangan	Disetujui	Dikembalikan	Ditolak	Dibatalkan	Dalam Proses	Jumlah
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus Bank	8	13	4	2	9	35
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon DPS	6	2	-	-	3	11
Total Permohonan						46

Terkait Perizinan Produk Baru, terdapat 10 permohonan masuk dengan satu perizinan produk baru dinyatakan tidak disetujui dan sembilan perizinan produk baru yang masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 32 permohonan jaringan kantor

perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 12 permohonan telah disetujui, satu permohonan tidak disetujui dan 19 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

OJK juga menerima permohonan perizinan lainnya yaitu:

Tabel III - 15 ◇ Permohonan Perizinan

Jenis Permohonan	Jumlah
Persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah	6
Izin usaha Bank Syariah	3
Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah (konversi)	4
Pemisahan (<i>spin off</i>)	1

Dari permohonan yang OJK terima tersebut, satu permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah telah disetujui.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES).

Sampai dengan akhir triwulan I-2019, terdapat 11 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT CIMB Principal Asset Management,
2. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT BNP Paribas Investment Partners,
4. PT Schrodgers Investment Management Indonesia,
5. PT Aberdeen Asset Management,
6. PT Bahana TCW Investment Management,
7. PT Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT Maybank Asset Management,
9. PT Eastspring Investments Indonesia,
10. PT Indosurya Asset Management, dan
11. PT RHB Management Asset Indonesia

Pada triwulan I-2019 OJK melakukan pengawasan terhadap satu Pihak Penerbit DES dan laporan hasil pemeriksaan tersebut telah diselesaikan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Perasuransian Syariah

Realisasi pemeriksaan sampai dengan triwulan I-2019, telah dilakukan pemeriksaan langsung sebanyak empat perusahaan perasuransian syariah dengan pemeriksaan seluruh aspek risiko dan satu perusahaan reasuransi syariah (*full fledged*) dengan pemeriksaan sebagian aspek risiko.

Terkait pengawasan terhadap Perasuransian Syariah (*Onsite*), per triwulan I-2019, OJK telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS). Kedua LHPLS tersebut saat ini sedang dimintakan tanggapan kepada Perusahaan, sebelum ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final.

Selain pengawasan *onsite*, juga dilakukan pengawasan *offsite* dalam bentuk analisis laporan – laporan yang disampaikan perusahaan kepada OJK dan dalam bentuk rapat eksekutif (*executive meeting*). Dalam triwulan I-2019 telah dilakukan rapat eksekutif dengan dua perusahaan asuransi syariah.

B. Pengawasan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2019, target pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus ditetapkan sebanyak delapan perusahaan yang terdiri atas lima perusahaan pembiayaan syariah, dua perusahaan modal ventura syariah, dan satu perusahaan penjaminan syariah. Adapun realisasi pemeriksaan sampai dengan 31 Maret 2019 sebanyak tiga perusahaan, yang seluruhnya merupakan perusahaan pembiayaan syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus secara *on-site*, OJK telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS). Selain itu, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan *on-site* terhadap satu Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Selain pengawasan *on-site*, telah dilakukan rapat eksekutif dengan dua perusahaan pembiayaan syariah terkait permasalahan yang dihadapi kedua perusahaan tersebut.

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan I-2019, OJK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha

- Pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah sehubungan dengan konversi Perusahaan Pembiayaan PT Pro Mitra Finance menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah PT Trihamas Finance Syariah serta mencabut unit usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT Trihamas Finance Syariah (d/h Pro Mitra Finance).
- Pencabutan izin Unit Usaha Syariah (UUS) PT Celebes Artha Ventura.
- Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dalam Rangka Konversi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.

2. Perizinan dan Pelaporan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Unit Syariah, Kantor selain Kantor Cabang Syariah, serta Kantor di luar Kantor Pusat

- Perizinan dan pelaporan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Unit Syariah, Kantor selain Kantor Cabang Syariah, serta Kantor di luar Kantor Pusat pada perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus sebanyak 13 kantor sedangkan untuk asuransi dan dana pensiun syariah sebanyak satu kantor.

3. Pencatatan Perubahan Susunan Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS serta Tenaga Ahli

- Pada perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus pencatatan berjumlah enam orang sedangkan pada perusahaan perasuransian dan dana pensiun syariah berjumlah tujuh orang.

4. Pencatatan Produk IKNB Syariah

- OJK telah mencatat 25 produk Asuransi Jiwa Syariah, tiga produk Asuransi Umum Syariah, lima produk Asuransi Jiwa Syariah, sembilan persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* produk Asuransi Syariah.
- Selanjutnya, OJK juga telah mencatat tiga produk pada perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus.

5. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

No.	Jenis Industri	Jumlah Pihak Utama	
		Lulus	Tidak Lulus
1.	2013	4	1
2.	2014	1	1
3.	2015	4	6
4.	2016	-	-
Jumlah		9	8

- OJK telah melaksanakan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebanyak 17 pihak utama di Bidang IKNB Syariah.

6. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

- OJK melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan pada 22 pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah.
- Sedangkan untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus pemenuhan syarat keberlanjutan telah dicatat sebanyak 17 pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Seluruh perizinan dan pelaporan telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jenis industri.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan I-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah dilakukan melalui:

1. Sosialisasi Struktur Dana dan Penyempurnaan

Pedoman Laporan Bulanan BPRS kepada industri BPRS.

2. *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengawas Bank Syariah Batch I.

Selain itu, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kajian Survei Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Dalam rangka memperdalam hasil kajian serta Survei Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah yang telah dilakukan sebelumnya, OJK melakukan analisis lebih mendalam terkait preferensi masyarakat dalam memilih layanan maupun produk perbankan. Hasil kajian merupakan atribut yang dinilai penting oleh masyarakat dalam menentukan pilihan pada layanan maupun produk perbankan. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2019 dilakukan Kajian Survei Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. Sampai dengan periode pelaporan telah dilakukan *in-depth interview* terkait strategi dan taktik pemasaran guna merespon perubahan-perubahan pasar muslim yang begitu cepat.

2. Penyusunan Program Kerja Utama Transformasi Perbankan Syariah

Jangka waktu *Roadmap* Perbankan Syariah berakhir pada tahun 2019, maka dibutuhkan arah kebijakan dan program kerja untuk 5 tahun berikutnya. Terkait hal tersebut tengah disusun program kerja utama (*quick wins*) perbankan syariah yang mengacu pada Kajian Transformasi Perbankan Syariah Indonesia yang telah selesai pada tahun 2018. Terdapat 3 inisiatif strategis dengan masing-masing inisiatif memiliki 3 arah kebijakan pada *quick wins* tersebut.

3. Working Group Pengembangan Produk

Dalam rangka mendorong pengembangan industri perbankan syariah khususnya dalam hal peningkatan produk dan layanan perbankan syariah, telah dilakukan rapat pembahasan produk dengan *Working Group* Perbankan Syariah Asbisindo dan telah disepakati 2 rencana kerja utama, yaitu: (1) Pembahasan produk/ isu terkait pengelolaan dana haji di bank syariah dan, (2) Pembaharuan kodifikasi produk untuk dijadikan sebagai pedoman industri perbankan syariah. Guna pembahasan intensif isu-isu pengembangan produk dimaksud, telah dibentuk *Working Group* Produk Perbankan Syariah yang melibatkan perwakilan industri perbankan syariah.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 – 2024

Merespon perkembangan pasar modal syariah selama lima tahun terakhir yang telah mengalami

kemajuan, baik dalam hal jumlah dana kelolaan maupun jumlah produk yang diterbitkan, OJK merasa diperlukannya pengembangan pasar modal syariah secara komprehensif. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan rencana pengembangan yang terstruktur dan terencana, yang tertuang di dalam *Kajian Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024*.

Kajian ini berisikan evaluasi implementasi Roadmap Pasar Modal Syariah 2015–2019, identifikasi faktor pengembangan pasar modal syariah, serta landasan penyusunan panduan pengembangan.

2. Materi Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi

Dalam rangka menciptakan lulusan universitas siap pakai di industri pasar modal syariah, OJK berinisiatif untuk merumuskan konsep silabus materi pasar modal syariah untuk diimplementasikan di perguruan tinggi berdasarkan tinjauan kebutuhan industri. Konsep silabus tersebut telah terlebih dahulu diperkenalkan dan selanjutnya pada tahun ini akan dilakukan penyempurnaan atas modul tersebut, antara lain untuk memperoleh masukan terkait isi modul dan memperoleh komitmen dari perguruan tinggi yang terlibat.

3. Kajian Mengenai Skema Sukuk

Salah satu upaya pengembangan sukuk korporasi Indonesia adalah dengan mendorong perkembangan sukuk korporasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui diversifikasi skema penerbitan menggunakan SPV, yang merupakan praktik yang umum digunakan di dunia internasional. Praktik penerbitan sukuk dengan *Special Purpose Vehicle (SPV)* telah diterapkan di Indonesia, yaitu pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Akan tetapi, penerbitan sukuk korporasi menggunakan SPV berbadan hukum Perseroan Terbatas berpotensi menghadapi hambatan berupa kompleksitas dan biaya. Namun demikian terdapat rencana pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, terkait pembentukan badan hukum khusus yang didirikan untuk pengembangan Pasar Modal yang tunduk terhadap Undang-Undang Pasar Modal.

4. Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan memberikan alternatif sumber permodalan petani di Indonesia, OJK mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian sekaligus menjadi sarana investasi baru bagi investor. Salah satu rekomendasi adalah penerbitan *pilot project* produk investasi syariah di pasar modal dengan

menggunakan sukuk dan/atau reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (RDPT syariah) dengan *underlying asset* berupa beberapa portofolio subsektor pertanian. Selain itu, dapat juga menggunakan reksa dana syariah berbasis sukuk (RDSBS) dengan aset yang mendasarinya berupa *Medium Term Notes (MTN)* syariah yang diterbitkan perusahaan/anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertanian.

5. Perilaku Harga Saham terkait Penerbitan Daftar Efek Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan harga, volume perdagangan, dan volatilitas harga saham pada sebelum dan sesudah pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) khususnya pada saham yang keluar dari DES. Hal tersebut juga dapat dianalisis lebih lanjut apakah dikarenakan mekanisme *supply* dan *demand* yang terjadi secara wajar atau terdapat manipulasi harga saham. Hasil dari kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pengaturan reksa dana syariah yang saat ini mengatur periode penjualan efek yang keluar dari DES selama 10 hari. Pengaturan yang berbasis data tersebut diharapkan dapat mendorong industri pasar modal syariah, khususnya reksa dana syariah yang memiliki basis portofolio saham.

6. Kajian Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Kajian ini merupakan lanjutan dari Kajian Pengembangan Sukuk Daerah yang disusun tahun 2016. Kajian ini memuat perkembangan sukuk daerah baik dari sisi regulasi hingga perkembangan kebutuhan pendanaan daerah. Penerbitan sukuk daerah masih memiliki beberapa kendala yakni terkait kendala payung hukum. Oleh karena itu, kajian ini membahas mengenai harmonisasi peraturan dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. Selain itu, kajian ini juga berfokus pada pemetaan potensi daerah yang dinilai berdasarkan beberapa indikator seperti kapasitas fiskal, kemampuan finansial daerah serta dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Harapannya, kajian ini dapat menjadi stimulus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung penerbitan sukuk daerah.

7. Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Melakukan Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan rekomendasi hasil kajian produk investasi berbasis wakaf, akan dilaksanakan *pilot project* penerbitan sukuk wakaf di 2019. Dalam rangka mendukung pelaksanaan hal tersebut, dilakukan pendampingan bekerja sama dengan konsultan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan

dan pengalaman di bidang wakaf dan pasar modal. Sampai triwulan I-2019, proses pendampingan mencakup identifikasi pihak-pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Penelitian IKNB Syariah

Pada triwulan I-2019 OJK melaksanakan beberapa penelitian, sebagai berikut:

- Penelitian mengenai Optimalisasi *Branding* Produk Asuransi Syariah di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Identifikasi kondisi eksisting sistem pemasaran asuransi Syariah;
 - b. Mengetahui perbedaan persepsi masyarakat mengenai produk asuransi Syariah dan asuransi konvensional;
 - c. *Rebranding* produk asuransi Syariah;
 - d. Menentukan strategi meningkatkan daya Tarik masyarakat terhadap produk asuransi Syariah.

B. Pengembangan IKNB Syariah

Dalam triwulan I-2019, OJK melakukan kegiatan pengembangan IKNB Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosialisasi IKNB Syariah bekerjasama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari acara Seminar Industri Keuangan Non Bank Syariah bagi civitas akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan diskusi mengenai Industri Keuangan Non Bank Syariah bagi dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kegiatan ini diadakan dengan tema "Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi IKNB Syariah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong. Geliat ekonomi syariah di pulau paling timur di Indonesia ini juga memerlukan dukungan IKNB Syariah untuk lebih berkembang. Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika sekolah tinggi terbesar di Sorong tersebut. Dengan mengusung tema yang sama dengan kegiatan di Cirebon, diharapkan akan membawa angin segar untuk keuangan syariah di kota Sorong.

Dalam rangka kegiatan pengembangan IKNB Syariah, OJK bekerjasama dengan Universitas Ibnu Khaldun, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyelenggarakan kegiatan Seminar *Link & Match* Industri Asuransi Syariah untuk dosen dan mahasiswa Universitas Ibn Khaldun dan pameran booth industri asuransi syariah.

OJK juga menyelenggarakan kegiatan *workshop* penguatan kinerja DPS pada Dana Penisiun Syariah dengan mengundang narasumber dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan DSN-MUI. Kegiatan *workshop* ini dihadiri oleh seluruh DPS pada Dana Pensiun Syariah.

Selanjutnya, OJK juga bekerjasama dengan Kementerian Agama dan AASI menyelenggarakan kegiatan diskusi terbatas asuransi syariah dan pameran produk asuransi syariah perjalanan umrah dengan tema "Sinergi Stakeholders Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Asuransi Syariah Perjalanan Umrah", dengan mengundang 120 orang yang terdiri dari manajemen dan pegawai Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah.

2. Roadshow Seminar *Multifinance* Syariah

OJK bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi syariah di berbagai kota. Pada triwulan I ini acara diadakan di kota Bogor, Jawa Barat dan kota Bukittinggi, Sumatera Barat dengan menghadirkan narasumber dari OJK, perwakilan MES Pusat dan perwakilan dari perusahaan pembiayaan. Topik yang dibahas dalam *roadshow* ini adalah:

- Isu Strategis dan arahan Kebijakan Pengembangan *Multifinance* Syariah di Indonesia.
- Bedah Akad dan Landasan Syar'i Pembiayaan Multiguna Syariah di Indonesia.
- Mekanisme Pembiayaan Multiguna Perusahaan *Multifinance* Syariah.

3. Asuransi Mikro

OJK melaksanakan kegiatan terkait pengembangan asuransi mikro, yaitu *Sharing Knowledge* dari PT Asuransi Central Asia mengenai Asuransi Pertanian Berbasis Indeks. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meng-*update* informasi mengenai produk asuransi pertanian berbasis indeks dan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan asuransi mikro pertanian berbasis indeks pada masa-masa mendatang.





04

Manajemen Strategis
dan Tata Kelola Organisasi



4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja di OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada triwulan I-2019, siklus MSAK berada pada tahap operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, serta penandatanganan kesepakatan kinerja 2019 bagi Satuan Kerja yang terdampak reorganisasi. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2018 sebagai pertanggungjawaban kegiatan OJK kepada publik.

Grafik IV - 1 ◇ Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK mengacu pada Peta Strategi 2019 yang merupakan kelanjutan hasil evaluasi dari strategi tahun-tahun sebelumnya. Di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kepuasan *Stakeholders* terhadap kinerja OJK yang diukur dengan survei kepuasan pelayanan yang ditujukan pada *Stakeholders* OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, Media, Akademisi, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui indeks integritas organisasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan KPK dan pengelolaan keuangan yang andal.

2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks kinerja SJK yang terdiri dari indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK antara lain rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui peningkatan indeks inklusi dan literasi keuangan.

3. Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, penguatan *surveillance* stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan serta penerapan *best fit international standard*.

4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan kontribusi SJK pada sektor ekonomi prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.

5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui perlindungan konsumen yang kredibel dan optimalisasi pemanfaatan *Fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan.

6. Mewujudkan Ekonomi Syariah Melalui Peningkatan Keuangan Syariah

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan SJK syariah.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK

Inisiatif strategis (IS) merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (Destination Statement) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK Wide 2019. Sehubungan dengan pelaksanaan IS dan PK OJK 2019 sampai dengan triwulan-I 2019 adalah sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mendorong inovasi keuangan digital sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan Memaksimalkan pemanfaatan fintech untuk pertumbuhan, efisiensi, dan inklusi keuangan. Selama triwulan I-2019 task force IS-1 (i) telah mendapatkan asistensi dalam bentuk Technical Assistance dari Asian Development Bank (ADB) dan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) untuk melakukan kajian pengembangan kerangka dan panduan Regulatory Technology (Regtech) dan Supervisory Technology (Suptech). Progress saat ini task force IS-1 dalam tahap penyusunan kerangka awal kajian; (ii) pemberian status pencatatan terhadap 34 penyelenggara inovasi keuangan digital.

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI) yang handal dan aman. Terdapat dua aplikasi yang menjadi fokus pengembangan sistem informasi yaitu (i) OJK Box (O-BOX), yang merupakan aplikasi yang menyajikan informasi rasio dan data-data keuangan dari lembaga jasa keuangan (LJK) untuk dirangkum menjadi suatu data dimana data tersebut disampaikan melalui repository LJK ke repository OJK secara periodik; dan (ii) Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), yang merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengakomodir Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyampaikan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara online. Seiring dengan perkembangan kewajiban pelaporan baru Perbankan secara online, dipandang perlu adanya aplikasi yang dapat digunakan dalam menyampaikan pelaporan Perbankan melalui satu pintu. Solusi dari kebutuhan tersebut dijawab dengan menggunakan APOLO sebagai media penyampaian kebutuhan pelaporan baru yang ada di Perbankan.

Sampai dengan triwulan I-2019, progres penyelesaian pengembangan aplikasi OBOX tahap I yang akan diterapkan kepada 10 bank pilot project telah mencapai 100%. Task force IS-2 telah melakukan *system integration test* (SIT), *user acceptance test* (UAT) dan uji coba penerapan aplikasi dimaksud dengan 10 bank pilot project. Implementasi (Go-Live) OBOX tahap I pada 10 bank rencananya akan dilaksanakan pada April 2019.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Tujuan IS ini adalah pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya-upaya konkrit yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: (i) Pemutakhiran *Dashboard* pemantauan capaian target Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar keuangan (SNPPPK) dan penyusunan spesifikasi kebutuhan dan desain aplikasi pengembangan *dashboard* SNPPPK antara lain *executive dashboard*, fungsi *project structure*, fungsi *project portfolio* dan notifikasi email; (ii) Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas teknis dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan ObDa di Jawa Barat dan Bali; (iii) Edukasi dan promosi penerbitan dan investasi DINFA (dana investasi infrastruktur) kepada BUMN dan Asosiasi IKNB di Sumatera Barat.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Tujuan pelaksanaan IS-4 adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: (i) penyusunan draft RPOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi IKNB dan harmonisasi dengan penilaian tingkat kesehatan IKNB; (ii) penyusunan naskah akademik dan draft RPOJK Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Dana Pensiun); (iii) penyusunan Draft Handbook Know Your Non Bank Financial Institution (KYNBFI); (iv) penyusunan indikator dan threshold yang akan digunakan dalam pedoman Sistem Peringatan Dini (EWS).

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Selama triwulan I-2019, OJK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) penyusunan kajian atas rencana pembuatan dashboard keuangan; (ii) penyusunan user requirement pengembangan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) generasi-II; dan (iii) implementasi Vendor Management System (VMS) pada SIPROJEK (e-procurement OJK), tahap selanjutnya akan dilakukan penyesuaian atas modul VMS berdasarkan hasil implementasi tersebut.

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Tujuan dari pelaksanaan IS-6 adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan stakeholders utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada IS-6 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV-2018 antara lain: (i) pembangunan *prototype* aplikasi integrasi data penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK); (ii) pengembangan beberapa modul penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) dalam SPRINT, antara lain untuk Manajer Investasi (MI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) di Pasar Modal. Modul PKK untuk Bank Umum Konvensional, Dana Pensiun, Dana Pensiun Syariah, Asuransi Konvensional, dan Asuransi Syariah telah dikembangkan, namun belum digunakan karena terdapat permasalahan teknis minor yang perlu diperbaiki; dan (iii) penyusunan PDK Manajemen Kelangusngan Bisnis (MKB) OJK.

7. Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Tujuan pelaksanaan IS-7 adalah untuk mewujudkan rancang bangun sistem informasi sebagai pedoman pengembangan sistem informasi di OJK untuk mendukung proses bisnis pelaksanaan core function dan memperkuat manajemen internal maupun kapasitas organisasi. Inisiatif ini juga akan mengupayakan peningkatan IT *security* dan pengelolaan data OJK. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: (i) mengembangkan *prototype Executive Information System Dashboard* SJK Terintegrasi (EXIST) dan telah dilaporkan pada RDK untuk mendapatkan masukan mengenai penyempurnaan fungsi dan indikator yang perlu ditampilkan pada EXIST; (ii) penyusunan *user requirement* dalam rangka pengembangan Portal Integrasi Pelaporan OJK-BI; (iii) melaksanakan pembahasan Nota Kesepahaman OJK-BI-LPS sebagai payung hukum Integrasi Pelaporan; (iv) melakukan benchmarking terkait implementasi Master Data Management (MDM) dan Middleware dengan Bank Mandiri dan BCA; (v) melakukan benchmarking dengan lembaga sejenis yang telah melakukan implementasi Big Data Analytics (BI, DJP, Jakarta Smart City, Pemkot Bandung); dan (vi) penyusunan *user requirement Big Data Analytics* untuk Market Intelligence EPK.

8. Percepatan Akses Keuangan

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk melakukan sinergi aksi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target tingkat inklusi keuangan sebesar 75% dan target literasi keuangan sebesar 35% di 2019. Selama triwulan I-2019, IS-8 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dengan Kemendagri tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran TPAKD; (ii) telah ditandatanganinya draft Keppres hari Indonesia Menabung oleh Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan telah memasuki proses legal drafting; (iii) finalisasi penyusunan *user requirement* Sistem Pelaporan TPAKD Terintegrasi; (iv) finalisasi kuesioner Survei Nasional Literasi Keuangan; dan (v) penyampaian *Term of Reference* (ToR) kepada KR/KOJK terkait penyusunan kajian potensi unggulan/sector prioritas di daerah yang akan digunakan dalam rangka penyusunan program kerja TPAKD sehingga menjadi lebih efektif dan selaras dengan potensi daerah.

Selain pelaksanaan keenam IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dan kegiatan dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan I-2019, progres pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

1. PK-1 Pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan pelaksanaan PK-1 adalah untuk melakukan penelitian untuk menentukan pola penyaluran KUR yang paling efektif. Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR, diperlukan terobosan-terobosan agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran, lebih luas (*outreach* lebih luas) dan tepat guna melalui koordinasi antar lembaga terkait (OJK dengan Kementerian terkait dan IJK). Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: (i) menyusun draft awal kajian pola penyaluran KUR; dan (ii) berkoordinasi dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) – Gavin Forte terkait kajian penyaluran KUR dan pembentukan pola kerjasama (cluster).

2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (Research Based Policy)

Tujuan pelaksanaan PK-2 adalah untuk menguatkan peran penelitian di organisasi sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif, inklusif, dan stabil. Selama triwulan I-2019, PK-2 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) peluncuran laman riset di situs OJK (www.ojk.go.id) dengan 7 (tujuh) working paper hasil penelitian PK-2 tahun 2018 yang telah diunggah untuk dapat diakses Insan OJK dan para stakeholders; (ii) menyelenggarakan In-House Training (IHT) penyusunan proposal penelitian bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan dan Asesmen SDM (DPAS); dan (iii) menyelenggarakan seminar riset working paper dalam rangka uji materi hasil penelitian 2018 dengan 7 (tujuh) panel dari universitas terkemuka, chief economist bank, dan akademisi lainnya, serta focus group discussion (FGD) untuk topik riset tahun 2019.

3. PK-3 Digital Economy dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan

Tujuan pelaksanaan PK-3 adalah untuk melakukan penelitian dalam merumuskan bentuk dan model sinergi yang ideal dengan *e-Commerce* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: Melaksanakan *focus group discussion* (FGD) *preliminary* dengan akademisi dari Institut Teknologi Bandung – *School of Business & Management*, perwakilan *e-commerce* dari Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, serta industri jasa keuangan untuk mendapatkan masukan dalam melakukan penyusunan kajian peran *e-commerce* sebagai channel baru dalam distribusi produk jasa keuangan, serta hubungan/*partnership* antara *e-commerce* dan lembaga jasa keuangan dan apakah kedepannya *e-commerce* Indonesia bisa menjadi ancaman sebagai kompetitor.

4. PK-4.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Tujuan pelaksanaan PK-4.1 adalah untuk meningkatkan akses keuangan ke lembaga Keuangan formal bagi masyarakat, khususnya pengusaha mikro dan guna mendukung program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi umat di sekitar Pondok Pesantren/lembaga sejenis. Selama triwulan I-2019, PK-4.1 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: (i) penyusunan user requirement Sistem Informasi BWM yang tergabung

dalam aplikasi *Executive Information System Dashboard* SJK Terintegrasi (EXIST) OJK; dan (ii) memfasilitasi pendirian 3 (tiga) BWM yaitu: BWM Pesantren As'ad di Jambi, BWM Sunan Gunung Jati Ba'alawy di Semarang, dan BWM Minhajut Thullab di Banyuwangi.

5. PK-4.2 Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan pelaksanaan PK-4.2 adalah mendorong akses keuangan, bisnis dan teknologi melalui peran BUMdes dan BUMAdes dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I-2019 antara lain: (i) melaksanakan sosialisasi dan workshop pengembangan BUMDes/BUMR di 4 Provinsi yang mencakup 17 Kabupaten/Kota dan 392 Desa. Disampaikan strategi tiga pilar dalam penguatan BUMDes/BUMAdes dan skema bisnis yang dikembangkan oleh OJK bersama stakeholders terkait; dan (ii) melakukan fasilitasi terhadap 3 BUM-Desa Center (di wilayah Desa-Perdesaan) dan 2 BUMR (di wilayah Desa-Perkotaan), yaitu: BUM-Desa Center Jaya Makmur Desa Traktakan, Kab Bondowoso, BUM-Desa Center Maju Bersama, Desa Tunjungtirta, Kab Malang, BUM-Desa Wonorejo Maju Sejahtera, Desa Wonorejo, Kab Sukoharjo, BUMR Center Karang Joang Kreatif, Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan, dan BUMR Center Gunungpati Mukti Mulyo, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang.



Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019

OJK melaksanakan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2019 di Jakarta yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur Kepala Daerah, dan para pimpinan Asosiasi dan Lembaga Jasa Keuangan serta pimpinan pondok pesantren dan pengurus 41 Bank Wakaf Mikro.



Pada acara tersebut Ketua OJK memaparkan kondisi perekonomian yang terpantau sehat dan stabil, tercermin di antaranya dari ekonomi nasional yang tumbuh sekitar 5,15% dan inflasi yang terkendali di level 3,13%. Sementara itu sektor jasa keuangan juga tercatat stabil dan sehat, yang merupakan modal penting bagi industri jasa keuangan untuk dapat tumbuh lebih baik dan meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, OJK juga menyiapkan lima kebijakan strategis yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Lima kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu:

1. Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis Pemerintah
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
3. Akses Keuangan bagi UMKM dan Masyarakat di Daerah Terpencil
4. Mempersiapkan Industri Jasa Keuangan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
5. Mereformasi Bisnis Proses Industri dan Internal OJK

1 Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis Pemerintah

- Penyediaan produk pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang, seperti: Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragunan Aset (EBA), EBA Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), Dana Investasi Real Estate

(DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)

- Pelaksanaan program keuangan berkelanjutan & *blended finance* untuk proyek pemerintah yang ramah lingkungan dan sosial



2 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

- Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas, seperti pengembangan industri ekspor, substitusi impor, pariwisata dan perumahan
- Mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- Percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- Pengembangan produk asuransi yang mendukung pariwisata & ekspor



5 KEBIJAKAN STRATEGIS OJK TAHUN 2019

"Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan"



3 Akses Keuangan bagi UMKM & Masyarakat Kecil di Daerah Terpencil

- Fasilitasi penyaluran KUR dengan skema kluster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor
- Fasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro
- Optimalisasi BUMDES untuk penguatan ekonomi masyarakat desa
- Penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan UMi
- Perluasan program Laku Pandai (*branchless banking*)
- Pengembangan Perusahaan Efek di daerah
- Relaksasi kewajiban emiten paska IPO bagi emiten UMKM
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan
- Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi



4 Mempersiapkan Industri Jasa Keuangan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

- Digitalisasi produk dan layanan keuangan
- Fasilitasi pengembangan *start up FinTech Peer-to-Peer Lending* dan *Equity Crowdfunding*
- Pengaturan yang mendorong inovasi & perlindungan konsumen
- Peningkatan literasi masyarakat terhadap *fintech*
- Penegakan hukum bagi *start-up fintech* ilegal yang merugikan masyarakat

5 Mereformasi Bisnis Proses Industri & Internal OJK

- Pengembangan pengawasan berbasis IT
- Implementasi Standar Internasional Prudensial
- Efisiensi perbankan melalui penggunaan IT
- Mendorong *platform sharing* untuk meningkatkan penetrasi & efisiensi industri perbankan syariah
- Transformasi IKNB melalui peningkatan tata kelola (*governance*), aspek prudensial, *market conduct* IKNB, penyempurnaan pengawasan

berbasis risiko, kebijakan *asset registry*, dan rencana bisnis lembaga keuangan non bank.

- Percepatan perizinan dan *fit & proper test* menjadi 14 hari kerja dari semula 30 hari kerja

- Optimalisasi perizinan terintegrasi, relaksasi proses *fit & proper test* untuk pengurus *existing* perbankan, implementasi Penawaran Umum secara elektronik & penyederhanaan proses transaksi Reksa Dana secara *online*

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Pelaksanaan Audit dan Peningkatan Kualitas Proses Bisnis Satuan Kerja

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan 11 penugasan audit. Penugasan audit terdiri dari 10 penugasan audit dilakukan di Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan serta 1 penugasan dilakukan di Kantor Pusat. OJK juga menyampaikan 8 Laporan Hasil Audit (LHA) ke Satuan Kerja terkait. Tiga LHA lainnya masih dalam tahap finalisasi.

Dalam melakukan peningkatan Kualitas Proses Bisnis Satuan Kerja di OJK, terdapat 111 rekomendasi yang telah diselesaikan yang berasal dari 108 rekomendasi yang telah jatuh tempo dan 3 rekomendasi belum jatuh tempo di periode pelaporan.

4.2.2 Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal

Sistem Informasi Audit Internal (SIAI) disempurnakan dengan berbasis pada *continuous audit* dan *continuous monitoring* (CACM). Sampai dengan periode pelaporan telah dilakukan beberapa pembahasan dengan pihak terkait di OJK serta telah teridentifikasi hal-hal yang masih memerlukan perbaikan dari hasil interkoneksi SIAI dengan sistem aplikasi SPRINT dan SIMFOSIA.

Selain itu, juga telah disiapkan beberapa skenario pengembangan CACM untuk mengintegrasikan SIAI dengan sistem aplikasi lain yaitu SIMWAS BPR dan SIMWAS BPRS.

4.2.3 Transformasi Risk and Quality Officer (RQO)

Transformasi RQO merupakan upaya pengelolaan *governance* di Satuan Kerja untuk meningkatkan efisiensi sumber daya demi mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Selain itu, transformasi juga dilakukan untuk mengelola risiko yang lebih dalam dan sistematis, memastikan kualitas proses bisnis, membudayakan *continuous improvement* proses bisnis OJK, dan meningkatkan aspek pencegahan deteksi dini atas temuan audit eksternal dan internal.

4.2.4 Lesson Learnt AIMRPK

Lesson Learnt AIMRPK merupakan kumpulan hasil asurans yang bersumber dari: (1) Pelaksanaan audit, revidu, dan pendampingan yang dilakukan AIMRPK; (2) Pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal; dan (3) pelaksanaan *self assessment* oleh Satuan Kerja. LLA bertujuan untuk menghindarkan temuan

berulang, sumber data untuk mengidentifikasi *risk event* dan penyebab risiko, mempercepat pengambilan keputusan Satuan Kerja dalam hal mengalokasikan sumber daya yang didasarkan pada informasi yang tepat dan selaras. Selain itu LLA juga digunakan sebagai sumber identifikasi *improvement* serta meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Sampai dengan periode pelaporan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan LLA adalah proses bisnis di bidang pengawasan, perizinan, EPK, organisasi dan SDM, teknologi informasi, hukum, keuangan dan logistik.

4.2.5 Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Pelaksanaan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) merujuk pada Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/PDK/2017 tentang Standar Pengendalian Kualitas OJK. Tujuan dilakukannya SPK adalah untuk menilai efektifitas atas pelaksanaan proses bisnis di OJK.

SPK diawali dengan: (1) Identifikasi proses bisnis inti disatuan kerja; (2) Pendampingan baik secara *onsite* maupun *off site*. Dalam pendampingan tersebut dilakukan pengisian *checklist*, *scoring* dan pemberian predikat; (3) Pemberian predikat kualitas atas proses bisnis Satuan Kerja. Selama triwulan I-2019, telah dilakukan pendampingan di 7 Satuan Kerja dengan tujuan untuk melakukan internalisasi SPK, memberikan konsultasi dalam menerapkan SPK dan membantu mengidentifikasi *point of improvement* pada proses bisnis di OJK.

4.2.6 Program Pengendalian Gratifikasi

Selama periode laporan, OJK telah menerima dan mengelola 52 laporan gratifikasi yaitu berupa laporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi berbentuk barang maupun uang dengan jumlah total taksiran nilai Rp 89 juta.

4.2.7 Whistle Blowing System

Whistle Blowing System Otoritas Jasa Keuangan (WBS OJK) merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan *fraud*. Pada triwulan I-2019, WBS OJK menerima total 389 laporan di mana 65 laporan mempunyai cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti serta 29 laporan telah selesai ditindaklanjuti.

4.2.8 Pengelolaan e-LHKPN

Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) melalui sistem oleh pegawai OJK atau e-LHKPN selama periode pelaporan sejumlah 99,9%. Apabila dibandingkan dengan periode pelaporan tahun 2018, terdapat peningkatan tingkat

kepatuhan dan ketepatan waktu LHKPN tahun 2017 sebesar 96,67%. OJK telah melakukan berbagai upaya guna mendukung tercapainya kepatuhan tersebut, diantaranya:

1. *Email blast reminder* pelaporan e-LHKPN secara berkala;
2. *Email blast* tingkat kepatuhan pelaporan per satuan kerja; dan
3. *Call Center* untuk membantu pelaporan LHKPN bagi insan OJK;
4. Melaksanakan klinik e-LHKPN bersama KPK untuk membantu Insan OJK dalam memperoleh informasi terkait LHKPN dan pengisian LHKPN di klinik e-LHKPN OJK.

4.2.9 Penguatan Integritas

Pada tahun 2019, OJK menginisiasi kegiatan dalam rangka penguatan integritas Insan OJK antara lain penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pejabat dan pegawai serta sosialisasi penguatan integritas. Penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen jajaran OJK untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, peraturan internal OJK termasuk kode etik, peraturan pengendalian gratifikasi, serta nilai-nilai strategis OJK. Dalam rangka penguatan integritas tersebut, juga dilaksanakan program sosialisasi kepada insan OJK dan *stakeholders* terkait.

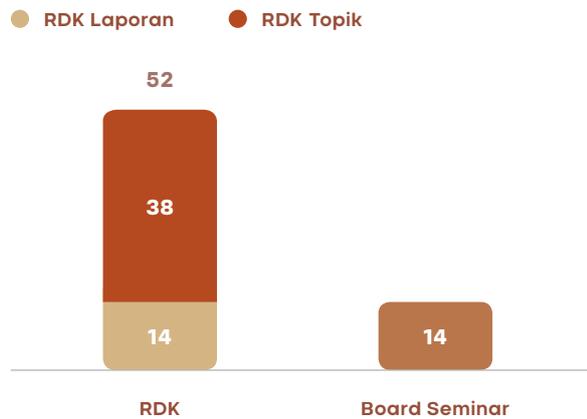
4.3 Rapat Dewan Komisiner

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamankan Dewan Komisiner untuk melaksanakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK diselenggarakan untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan bersifat strategis, dan/ atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RDK dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua minggu. Selain RDK, Dewan Komisiner juga menyelenggarakan forum Board Seminar (BS) untuk membahas materi tertentu guna memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK.

Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner secara rutin menerima hasil asesmen dan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan dengan cakupan data mingguan dan bulanan. Sementara itu, dalam RDK topik dibahas dan diputuskan sejumlah kebijakan strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dalam rangka mengatur dan mengawasi Sektor Jasa Keuangan. Sepanjang triwulan I-2019, Dewan Komisiner telah menyelenggarakan 15 kali RDK dan

delapan kali BS dengan jumlah topik yang dibahas adalah 52 topik materi RDK dan 14 materi BS.

Grafik IV - 2 ◇ Topik Materi Rapat Dewan Komisaris



Pada aspek pengaturan Sektor Jasa Keuangan, pada triwulan I-2019 RDK memberikan persetujuan terhadap tujuh Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yaitu tiga di sektor Perbankan, dua di sektor Pasar Modal, dan dua di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Di sektor Perbankan, RPOJK yang disetujui antara lain mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan secara daring oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan serta RPOJK mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. RPOJK ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2005. Melalui penyempurnaan ini, diharapkan dapat memperdalam pasar sekuritisasi di Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertera dalam standar *Basel III-Revisions to the Securitisation Framework* yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Di sektor Pasar Modal, Dewan Komisiner menyetujui dua RPOJK penyempurnaan terhadap ketentuan sebelumnya mengenai perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD). Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses perizinan WAPERD antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana perizinan dan simplifikasi dokumen perizinan. RPOJK lainnya adalah penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai penambahan modal bagi perusahaan terbuka.

Di sektor IKNB, dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di industri Dana Pensiun, RDK menyetujui penyempurnaan ketentuan mengenai Tata Kelola Dana Pensiun. Dengan penguatan ini diharapkan peran Dana Pensiun dalam mengelola program yang menjamin

kesejahteraan pesertanya pada saat masa purna bakti dapat lebih dioptimalkan. Ketentuan lain di sektor IKNB yang telah disetujui oleh RDK adalah ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan perusahaan di IKNB.

Setelah mendapatkan persetujuan di RDK, beberapa RPOJK tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebelum diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK.

Dalam forum BS telah dibahas antara lain beberapa hasil kajian, pembahasan kerja sama internasional, pengelolaan sistem informasi di OJK, dan beberapa rancangan peraturan yang akan diterbitkan OJK

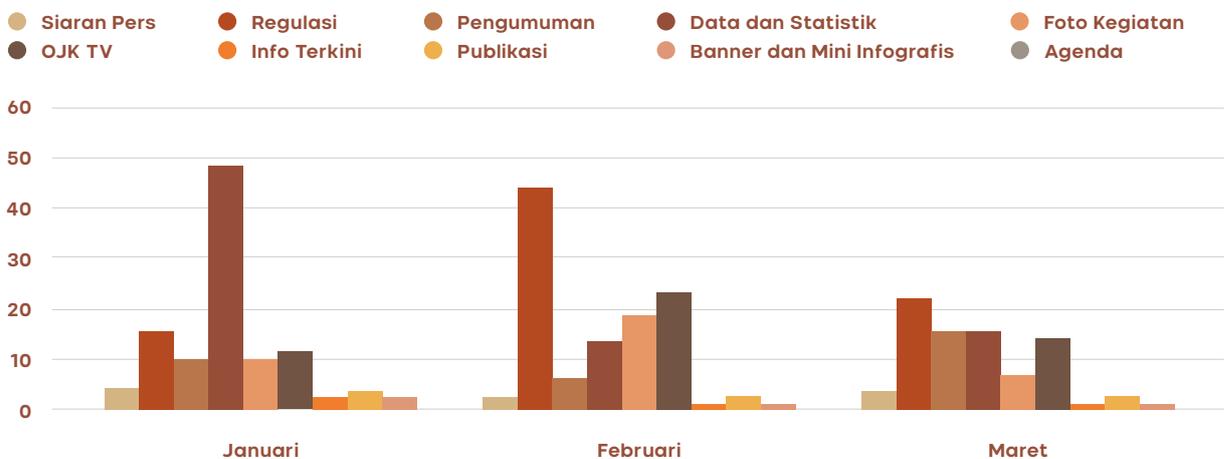
maupun rancangan peraturan yang akan diterbitkan intansi terkait lainnya yang memerlukan masukan dari OJK.

4.4 Komunikasi

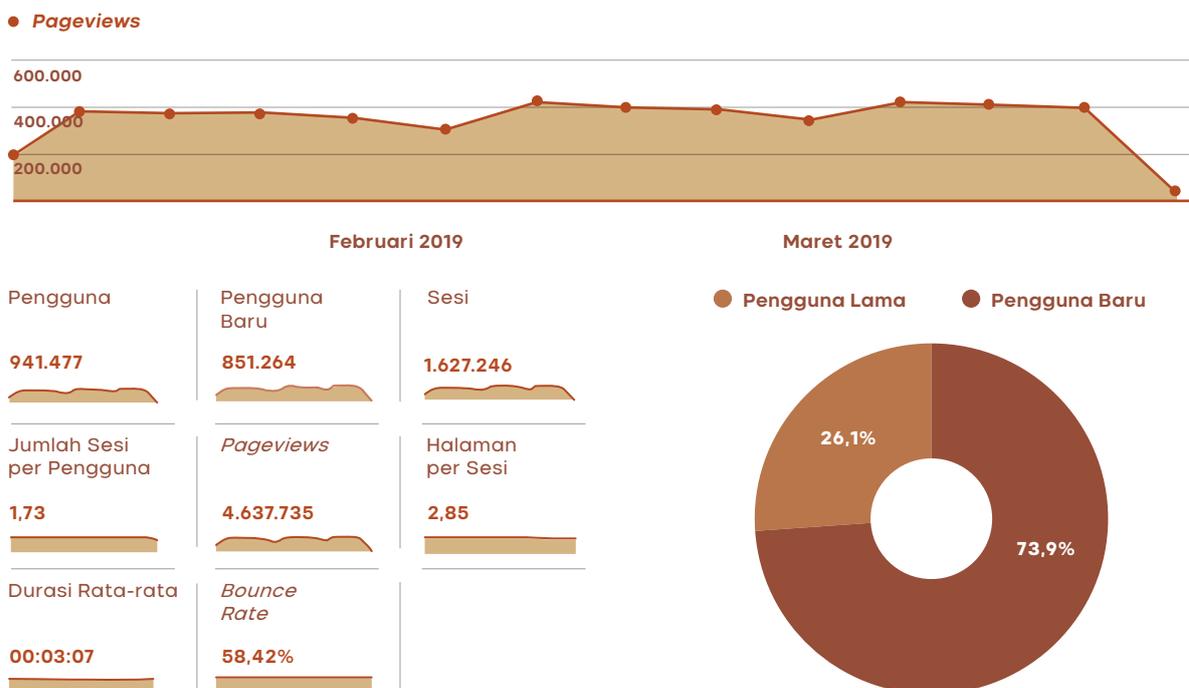
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain website OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

Grafik IV - 3 ◇ Jumlah Publikasi di Website OJK Triwulan I-2019



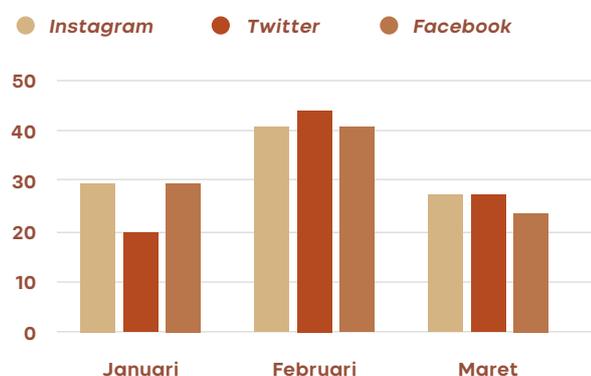
Grafik IV - 4 ◇ Statistik Pengunjung Website OJK Triwulan I-2019



Selama periode triwulan I - 2019, *website* OJK telah mengunggah 300 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini, agenda dan sebagainya. *Website* OJK juga memiliki 15 *minisite*. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* mengalami kenaikan 37,26% dari sebelumnya 685.890 menjadi 941.477 *users*. Dan jumlah halaman yang diakses naik 29,52% dari 3.580.671 menjadi 4.637.735 *pageviews* pada triwulan I-2019.

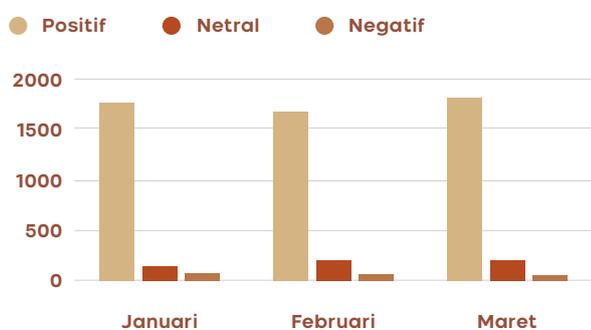
Terkait desiminasi informasi melalui media sosial OJK (*Twitter*, *Facebook* dan *Instagram*), publikasi OJK pada periode triwulan I-2019 sebanyak 287 yang meliputi infografis, kultwit, foto dan video kegiatan OJK. Media sosial *Twitter* OJK memiliki lebih dari 46.000 *followers*, *Facebook* OJK memiliki lebih dari 43.000 *followers* dan *Instagram* OJK memiliki lebih dari 168.000 *followers*.

Grafik IV - 5 ◊ Jumlah Publikasi di Media Sosial OJK Periode Triwulan I-2019



Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.175 media *online*, 14 stasiun televisi nasional dan media sosial.

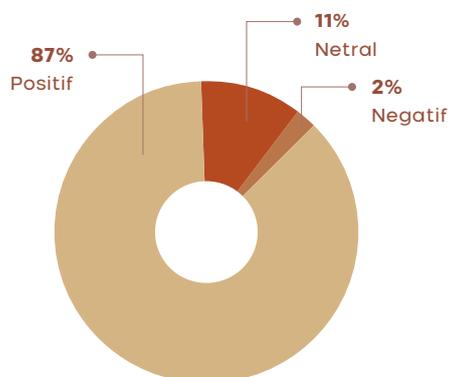
Grafik IV - 6 ◊ Jumlah Pemberitaan Triwulan I-2019



Total pemberitaan selama triwulan I-2019 sebanyak 6.230 berita, dengan rata-rata 2.076 berita perbulan atau sekitar 68 berita per harinya. Berdasarkan sentimen berita, *tone* positif memiliki persentase

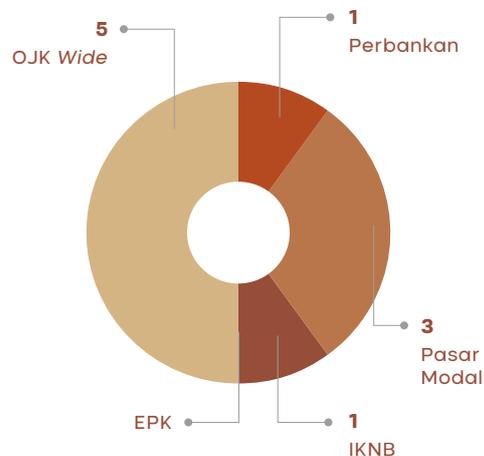
tertinggi yakni sebesar 87% (5.410 berita). Sementara, *tone* netral sebesar 11% (709 berita) dan *tone* negatif sebesar 2% (111 berita).

Grafik IV - 7 ◊ Persentase *Tone* Berita Triwulan I-2019



Terkait relasi media, selama triwulan I-2019, OJK telah menerbitkan 10 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK *Wide* sebanyak lima siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan SJK yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 8 ◊ Siaran Pers OJK Triwulan I-2019



Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 1 ◊ Judul Siaran Pers Triwulan I-2019

No.	Judul Siaran Pers	Nama LKM Syariah
1.	Kinerja Sektor Keuangan Positif, OJK Siapkan Lima Kebijakan Utama Di 2019	OJK Wide
2.	OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru	Pasar Modal

3.	OJK Dorong Pengembangan Perusahaan Pembiayaan-Ketentuan Uang Muka Ditetapkan Sangat Selektif	IKNB
4.	LPS dan OJK Tingkatkan Kerjasama Dan Koordinasi	OJK Wide
5.	OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu	Perbankan
6.	OJK Perkuat Kerja Sama Dengan Kemendagri dan PPAK	OJK Wide
7.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Di Awal 2019	OJK Wide
8.	OJK Dorong Pembangunan Daerah Manfaatkan Pasar Modal	Pasar Modal
9.	Stabilitas Dan Likuiditas Sektor Jasa Keuangan Februari Terjaga-Kinerja Intermediasi Lembaga Jasa Keuangan Meneruskan Tren Perbaikan	OJK Wide
10.	OJK Luncurkan Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek Elektronik	Pasar Modal

Selain itu, OJK menyelenggarakan jumpa pers dan *Media Briefing* sebanyak enam kali yang terdiri dari beberapa topik yaitu tiga OJK Wide, satu Pasar Modal, satu IKNB dan satu EPK. Program ini merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama yang erat dengan para wartawan media. Topik jumpa pers dan *media briefing* pada triwulan I-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 2 ◇ Jumpa Pers dan *Media Briefing* Triwulan I-2019

No.	Tema
1	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 (PTIJK 2019)
2	"Bronis" Update Perkembangan POJK 35/POJK.05/2018
3	"Bronis" Temuan Satgas Waspada Investasi Mengenai <i>Fintech</i> Ilegal"
4	"Bronis" Kebijakan Pengawasan Pasar Modal
5	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama OJK-Kemendagri-PPATK"
6	"Bronis" <i>Market Update</i> Triwulan I

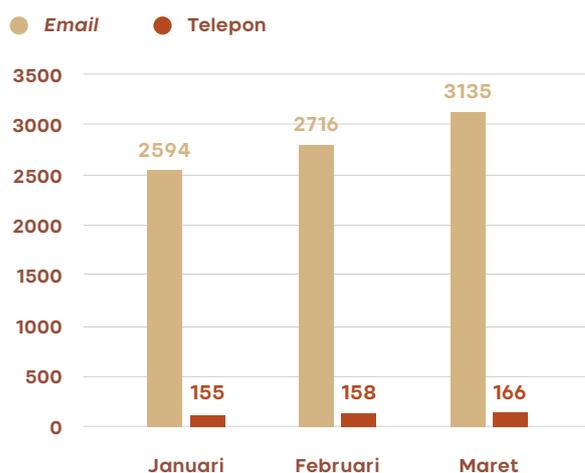
4.4.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200.

Selama periode triwulan I-2019, OJK menerima surat elektronik sebanyak 8.445 dan menerima telepon sebanyak 479 yang meliputi pengaduan dan pelaporan lembaga jasa keuangan, permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, serta peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian ditangani langsung oleh Humas dan sebagian lainnya ditangani oleh satuan kerja terkait.

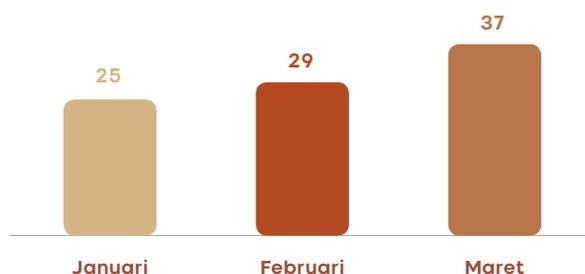
Grafik IV - 9 ◇ Jumlah Layanan Informasi Triwulan I-2019



4.4.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun *Jasa Keuangan*. Dan disiarkan di *IDX Channel* (TV Bursa). Selama triwulan I-2019, OJK TV telah memproduksi 91 liputan yang terdiri dari 47 liputan OJK Wide, delapan liputan di bidang Perbankan, tujuh liputan di bidang Pasar Modal, 17 liputan di bidang IKNB, sembilan liputan di bidang EPK dan tiga liputan terkait Audit Internal. Selama periode laporan kanal Youtube *Jasa Keuangan* telah disaksikan lebih dari 31.497 *viewers*.

Grafik IV - 10 ◇ Liputan OJK TV Triwulan I-2019



Grafik IV - 11 ◇ Statistik OJK TV Triwulan I-2019

Waktu Menonton 55.395
Menit



Durasi Nonton Rata-Rata ▼ 1.45
Menit



Penayangan 31.497



Suka 419



Tidak Suka 14



Komentar 6



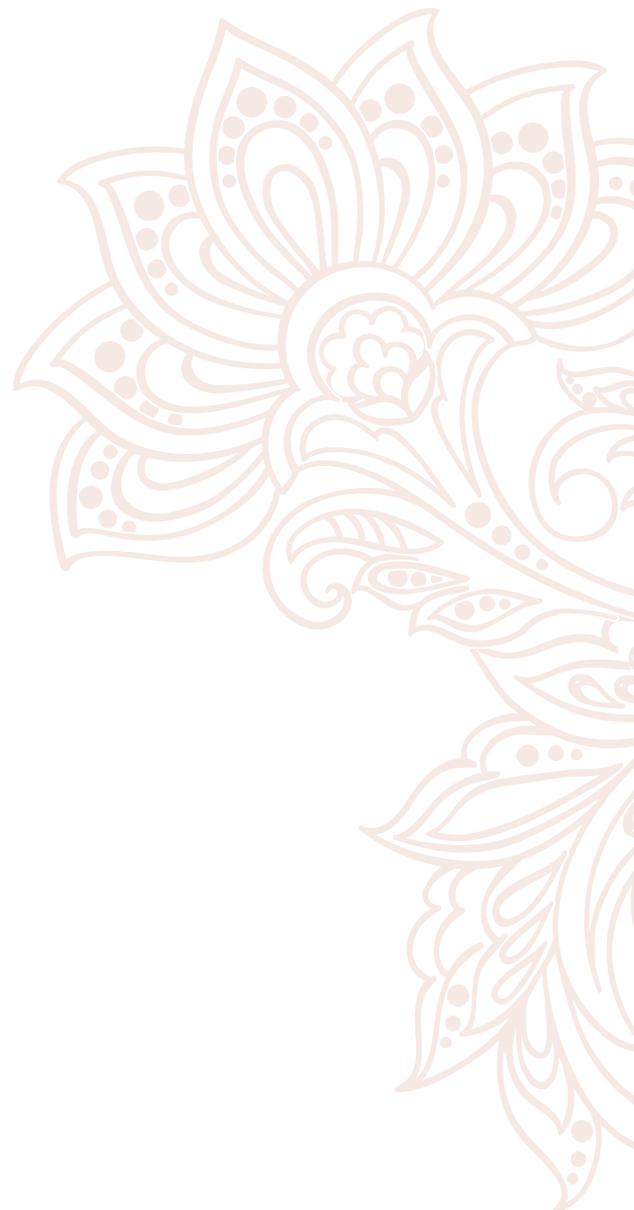
Pembagian 865



Video di Playlist ▲ 270



Subscriber 348



PR INDONESIA AWARDS (PRIA) 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih penghargaan dalam ajang tahunan *Public Relation Indonesia Awards* (PRIA) 2019. *Website* OJK (www.ojk.go.id) menerima penghargaan *Silver Winner* untuk Kategori *Website* Lembaga Negara, bersaing dengan ratusan lembaga lainnya.



Selain itu, OJK juga memperoleh penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2018 berdasarkan hasil monitoring pemberitaan korporasi, lembaga negara, kementerian hingga pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah *mainstream* di Indonesia selama periode 1 Januari - 31 Desember 2018.

Penghargaan PRIA 2019 ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Humas OJK dan tidak terlepas dari dukungan pihak internal maupun eksternal OJK. Ke depannya, diharapkan program-program Humas OJK dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

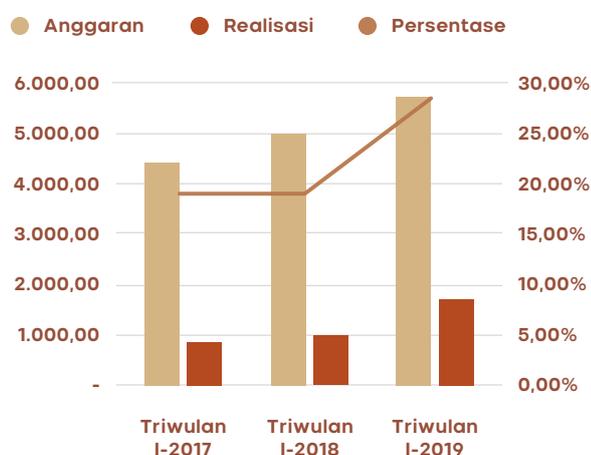
PRIA adalah penghargaan kehumasan yang diberikan untuk korporasi/lembaga baik kementerian, lembaga negara, pemerintah, maupun swasta yang rutin diadakan sejak tahun 2016. Tahun ini, PRIA membagi apresiasi ke dalam 19 kategori. Jumlah entri PRIA 2019 mencapai 476 entri, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 363 entri. Penjurian dilakukan oleh 15 juri antara lain terdiri dari pakar PR, praktisi senior PR, konsultan/agensi PR, tokoh asosiasi PR, tokoh media, fotografer senior, pakar desain dan branding serta pakar media sosial.

4.5 Keuangan

4.5.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK triwulan I-2019 adalah Rp1.605,73 miliar atau 28,27% dari pagu anggaran Rp5.679,70 miliar. Persentase realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding triwulan I-2018 yang hanya sebesar 19,03%. Peningkatan realisasi tahun 2019 merupakan indikator bahwa terdapat peningkatan kualitas OJK dalam proses menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun. Sebagaimana tahun sebelumnya, anggaran OJK Tahun 2019 dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan pungutan OJK.

Grafik IV - 12 ◊ Realisasi Anggaran Triwulan I



4.5.2 Implementasi International Organization for Standardization (ISO) 9001: 2015

Dalam rangka meningkatkan standar mutu proses bisnis pengelolaan keuangan, OJK mengimplementasikan Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Penerapan ISO 9001:2015 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan reputasi lembaga.

Penerapan Implementasi ISO 9001:2015 tersebut diawali dengan penandatanganan Kebijakan Kualitas pada *Kick-Off* ISO 9001:2015. Sampai dengan triwulan I-2019, OJK telah melaksanakan beberapa tahap dalam implementasi peningkatan mutu proses bisnis pengelolaan keuangan, yaitu:

1. *Awareness of ISO 9001:2015*, merupakan tahap pemaparan teori kepada seluruh pegawai atas implementasi ISO 9001:2015.
2. *Executive Briefing ISO 9001:2015*.
3. *Implementation of ISO 9001:2015*, merupakan tahap reviu atas persyaratan klausul Sistem Manajemen Mutu.

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022

Dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, OJK telah menyusun Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK tahun 2018 – 2022.

Adapun implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun. Salah satu program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan konsumen, khususnya pemantauan investasi ilegal dan pemantauan iklan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Dalam hal pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk pemantauan investasi ilegal, OJK akan mengumpulkan informasi aduan dari masyarakat dan informasi pendukung lainnya yang berasal dari data media *online*, sosial media, forum, dan blog. Selanjutnya, data tersebut akan diolah menggunakan *Machine Learning* dan ditampilkan dalam bentuk *dashboard* untuk mendukung pengambilan keputusan Satuan Tugas Waspada Investasi terkait legalitas suatu entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Dalam hal pemantauan iklan yang dikeluarkan oleh PUJK, OJK akan memanfaatkan teknologi *Big Data Analytics* dalam membantu menilai kepatuhan iklan produk dan layanan jasa keuangan pada sosial media terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari iklan yang dipublikasikan oleh PUJK.

4.6.2 Pertukaran Informasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga melalui pertukaran informasi, seperti dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). OJK berkoordinasi dengan BI sejak tahun 2013 melalui Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM) dan Forum Koordinasi

Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Salah satu fokus pembahasan dalam forum tersebut adalah terkait mekanisme dan koordinasi pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Sampai saat ini, OJK melakukan pertukaran data Perbankan, dengan BI secara berkala melalui Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) OJK-BI.

OJK juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPS yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) nomor (MoU-1/D.01/2019)/(MoU 2 Tahun 2019) tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman OJK-LPS tahun 2014. Saat ini, OJK dan LPS sedang menyusun mekanisme koordinasi dan pertukaran data, serta membangun sarana pertukaran informasi OJK-LPS. Adapun data yang akan dipertukarkan pada tahun 2019 adalah pelaporan BPR dan BPRS.

Secara trilateral, OJK juga bekerja sama dengan BI dan LPS melalui pembangunan Integrasi Pelaporan. Integrasi Pelaporan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Pasal 43. Pembangunan Integrasi Pelaporan bertujuan untuk mewujudkan sistem pelaporan yang efisien, menghindari redundansi, serta fleksibel, baik bagi industri dan otoritas terkait, guna mendapatkan informasi yang selaras untuk kegiatan perumusan kebijakan dan pengawasan industri jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) nomor (MoU-2/D.01/2019)/(119/1560/SJ) tanggal 19 Februari 2019 tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu ruang lingkup pada NK adalah pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK. Pelaksanaan NK ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan OJK nomor (119/1174/DUKCAPIL)/(PRJ-1/ PB.1/2019) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas OJK.

4.6.3 Jaringan Komunikasi Antar Lembaga

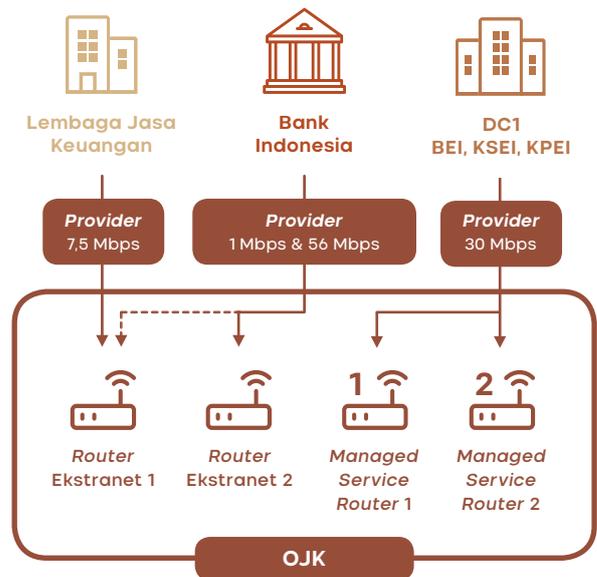
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal dan mampu mendukung pelaksanaan tugas OJK. Salah satu kebutuhan untuk pelaksanaan tugas OJK adalah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari *stakeholder* internal maupun eksternal (lembaga lain). Untuk melakukan komunikasi atau pertukaran data antar lembaga, OJK menggunakan jaringan ekstranet yang digunakan untuk:

1. Aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), Jaringan aplikasi SLIK digunakan untuk menyediakan akses LJK dalam pengiriman laporan SLIK ke OJK.

2. Jaringan OJK – Bank Indonesia (BI) Jaringan ekstranet OJK-BI digunakan untuk akses aplikasi pelaporan antar OJK-BI.

3. Jaringan JTPM (Jaringan Terpadu Pasar Modal) Jaringan Ekstranet JTPM menyediakan akses ekstranet dari SRO (BEI, KSEI, dan KPEI) untuk pertukaran data terkait Pasar Modal.

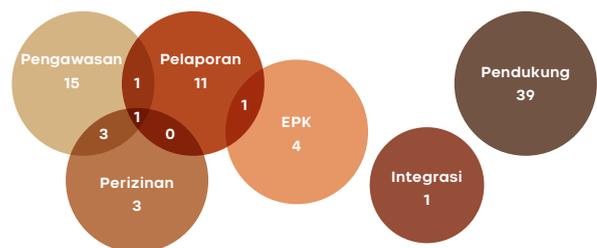
Grafik IV - 13 ◇ Topologi Jaringan Ekstranet



4.6.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sampai dengan triwulan I-2019, OJK telah mengimplementasikan 79 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Grafik IV - 14 ◇ Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK

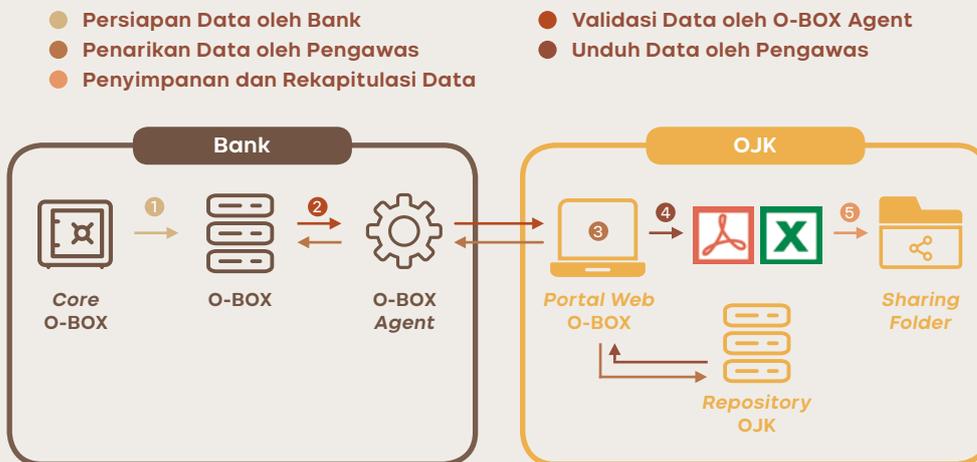


*Mengacu pada *deliverable* RBSI Januari 2019.

Aplikasi yang Selesai Dikembangkan pada Triwulan I-2019

OJK-BOX (O-BOX) merupakan sistem yang dibangun untuk mengefisiensikan pemenuhan kebutuhan Pengawas atas data detil dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat dilakukan secara *case-by-case* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mekanisme penyediaan data dilakukan oleh LJK secara rutin pada repository masing-masing LJK tersebut. Pengawas dapat memantau ketersediaan data pada *repository* setiap LJK di bawah pengawasannya dan melakukan penarikan data yang dibutuhkan melalui *user interface* web aplikasi O-BOX untuk Pengawas. Gambaran alur informasi pada aplikasi O-BOX dapat dilihat pada Gambar 1.

Grafik IV - 15 ◇ Alur Informasi O-BOX



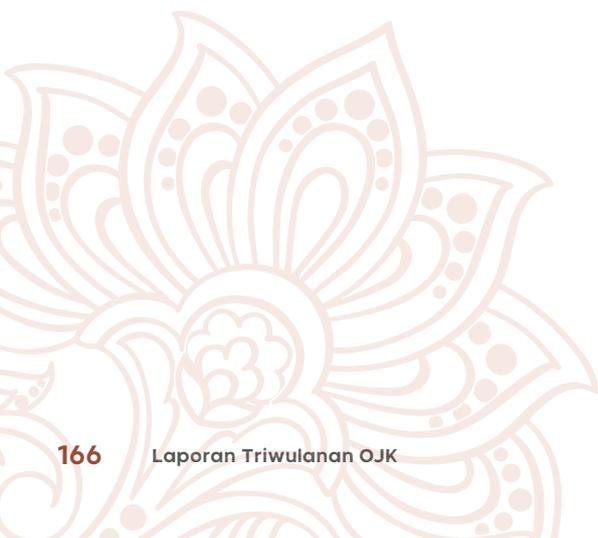
Aplikasi O-BOX selesai dibangun pada triwulan I-2019. Sebagai tahap awal implementasi, saat ini dilakukan *Pilot Project* pada lima Bank BUKU 4 dan lima Bank BUKU 3. Tahapan berikutnya akan dilakukan evaluasi dari hasil implementasi selama masa *Pilot Project* beserta masukan dari Pengawas dan LJK sebelum dilakukan implementasi penuh.

Tabel IV - 3 ◇ Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2019

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

Nama Aplikasi		Tahapan Pekerjaan
Perizinan	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	
	Sistem Informasi Perijinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA)	
Pengawasan	Aplikasi Industri Reksadana (ARIA)	
	Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM)	
	Sistem e-Monitoring Modul Pengelolaan Investasi	
	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) BPRS Modul Penyesuaian KPMM	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul Tingkat Kesehatan (TKS)	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) BPR Modul Know Your (KY) dan Quality Assurance (QA) BPR BPRS	
	Sistem Informasi Perbankan (SIP) terkait APOLO dan Performansi Tahap II	
	Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap 3	
	Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRIBAS)	
	Pelaporan	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Bulanan BPR Syariah
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul BMPK, Pelaporan Jaringan Kantor & Suku Bunga		
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Condensed Report		
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Bulanan BPR		
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Publikasi Bank Umum dan Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi untuk Bank Umum Syariah		
E-Reporting IKNB		
E-Reporting SRO Modul BEI		
Laporan Data Sumber Daya Manusia Perbankan Indonesia d/h Aplikasi Sistem Informasi SDM Perbankan (AKSES)		
Portal Bersama Pelaporan Terintegrasi OJK-BI		
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)		
Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA)		
Sistem Repository dan Engine Konversi Laporan Bulanan BPR/BPRS		
Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) Modul Pelaporan Berkala Fintech		
Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) Modul Pelaporan Berkala Asuransi		
Perizinan, Pelaporan dan Pengawasan		Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SILKM)
	Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	
EPK	Aplikasi Sikapiuangmu	
	Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI)	

	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Mobile App Financial Locator	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO)	
Integrasi	Aplikasi Database Track Record Terintegrasi untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	
	Aplikasi Single Sign On (SSO) IKNB	
	Enterprise Data Warehouse (EDW) dan Business Intelligence (BI) SJK Terintegrasi Tahap 1	
	Dashboard QPR User Interface (UI)	
	Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan	
	Data Warehouse Pasar Modal (Integrasi SPE-IDXNET)	
	Data Warehouse Pasar Modal (Pemantauan, Validasi dan Perbaikan Data)	
	Aplikasi Mobile EIS (termasuk Bank Wakaf Mikro)	
	Integrasi Bertahap Sistem Informasi Tahap 1 (Middleware)	
	Master Data Management (MDM) dan Data Referensi Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi	



4.7 Logistik

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan proses penataan dan pemindahan beberapa Satuan Kerja kantor pusat ke gedung kantor pusat baru. Secara paralel OJK masih akan tetap mengkaji mengenai kepemilikan gedung kantor pusat terpadu secara mandiri, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran serta koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OJK.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait Penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini Kantor yang telah terpisah dari gedung Bank Indonesia baik yang telah merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir periode laporan adalah sebanyak 31 Kantor, dengan rincian lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel IV - 4 ◇ Daftar Lokasi KR/KOJK Posisi Desember Tahun 2019

A. Menempati Gedung Milik OJK	KR 2 Provinsi Jawa Barat - Bandung
B. Menempati Gedung Pemerintah Provinsi	1) KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara – Kendari 2) KOJK Provinsi Sulawesi Utara – Manado 3) KOJK Provinsi Kalimantan Timur – Samarinda
C. Menempati Gedung Bank Indonesia	1) KR 1 Provinsi DKI Jakarta – Jakarta 2) KR 4 Provinsi Jawa Timur – Surabaya 3) KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat – Mataram/Lombok 4) KOJK Malang – Malang
D. Menempati Gedung Sewa	1) KR 3 Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y - Semarang 2) KR 5 Provinsi Sumatera Bagian Utara – Medan 3) KR 6 Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua - Makassar 4) KR 7 Provinsi Sumatera Bagian Selatan - Palembang 5) KR 8 Provinsi Bali dan Nusa Tenggara - Denpasar 6) KR 9 Provinsi Kalimantan – Banjarmasin 7) KOJK Tasikmalaya - Tasikmalaya 8) KOJK Tegal - Tegal 9) KOJK Purwokerto - Purwokerto 10) KOJK Jember - Jember 11) KOJK Kediri - Kediri 12) KOJK Provinsi Kepulauan Riau - Batam 13) KOJK Provinsi N.A.D - Banda Aceh 14) KOJK Provinsi Sulawesi Tengah - Palu 15) KOJK Provinsi Maluku - Ambon 16) KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat -Jayapura 17) KOJK Provinsi Lampung - Bandar Lampung 18) KOJK Provinsi Jambi - Jambi 19) KOJK Provinsi Bengkulu - Bengkulu 20) KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur - Kupang 21) KOJK Provinsi Kalimantan Tengah - Palangkaraya 22) KOJK Cirebon - Cirebon 23) KOJK Provinsi Riau - Pekanbaru 24) KOJK Provinsi Kalimantan Barat - Pontianak 25) KOJK Provinsi Sumatera Barat – Padang 26) KOJK Solo – Solo 27) KOJK Provinsi D.I.Y - Yogyakarta

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK menetapkan beberapa ketentuan demi mendukung implementasi Pengadaan Barang/Jasa OJK yang mandiri, yakni Peraturan Pengadaan Barang/Jasa OJK; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa OJK; Peraturan terkait *Tender Management*; Peraturan terkait *Vendor Management*.

Selain itu, OJK juga menetapkan ketentuan kearsipan OJK serta beberapa ketentuan terkait Manajemen Aset, yakni tentang Pemanfaatan Barang Milik OJK (BMOJK) dan Barang Milik Pihak Lainnya (BMPL), Pemeliharaan

dan Peningkatan Kapasitas BMOJK dan BMPL, dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam hal pengembangan sistem kelogistikan, OJK mempersiapkan implementasi dari SI PROJEK (Sistem Informasi *Procurement* OJK) sebagai sarana pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa OJK secara elektronik yang mandiri. Sementara itu, untuk sistem informasi persuratan dan kearsipan yakni *Record Management System* (RMS) saat ini telah memasuki tahapan *User Acceptance System* (UAT).

Diharapkan kedua sistem kelogistikan tersebut dapat sepenuhnya diimplementasikan pada 2019.

Sejalan dengan Inisiatif Strategis 6, Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis, OJK efektif mengimplementasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kendaraan Dinas (SISPANDI) dan Aplikasi Sistem Manajemen Ruang Rapat (SEMERU). Melalui implementasi Aplikasi SISPANDI, administrasi pengelolaan kendaraan dinas meliputi inventarisasi, pengalokasian, pemeliharaan, monitoring kecukupan kendaraan dan penggunaan anggaran dapat dilakukannya dengan mudah dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui implementasi Aplikasi SEMERU, pemenuhan kebutuhan ruang rapat dapat termonitor dengan baik.

4.8 SDM dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I-2019, OJK melakukan kajian untuk pengujian peraturan penampilan pegawai OJK sebagaimana Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/05/PDK/VIII/2012 tentang Penampilan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi pakaian kerja harian dengan mempertimbangkan dinamika organisasi, aspirasi, dan profil demografis terkini pegawai OJK, serta tetap memperhatikan citra dan profesionalisme lembaga OJK.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa ketentuan penampilan pegawai di OJK perlu ditinjau kembali khususnya untuk penggunaan pakaian kasual pada hari tertentu. Topik tersebut telah dibahas dan diputus dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 20 Maret 2019 dan diberlakukan secara langsung sejak diputus dalam RDK tersebut. Sebagai tindak lanjut hasil Keputusan RDK, telah disusun PDK dan SEDK tentang Penampilan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Poin yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain pegawai diperkenankan mengenakan pakaian kasual setiap hari Jumat dengan tetap berpenampilan menjunjung nilai kesopanan, kerapian, kepantasan, etika dan profesionalisme sesuai dengan citra sebagai pegawai OJK.

4.8.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

OJK secara rutin melaksanakan analisis kebutuhan SDM dengan membandingkan Formasi Efektif (FE) dengan Formasi Saat Ini (FSI). Selain itu, berdasarkan data SIMFOSIA per tanggal 1 Januari 2019, terdapat 54 pegawai, yang memasuki masa purnabakti pada tahun 2019 yang akan menambah jumlah kekosongan jabatan yang saat ini sedang terjadi di berbagai satuan kerja dan mendesak untuk segera dipenuhi.

Menindaklanjuti kondisi tersebut OJK menginisiasi pemenuhan SDM guna menjaga kelancaran dan kesinambungan tugas OJK baik dilakukan melalui pemenuhan internal (promosi/mutasi/rotasi) maupun pemenuhan eksternal (rekrutmen pegawai), yang dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan *zero growth*.

Rencana pemenuhan SDM dimaksud telah ditetapkan, yaitu penerimaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pada level staf paling banyak 100 orang yang direkrut dari perguruan tinggi negeri dengan memperhatikan keterwakilan daerah yang memiliki kantor OJK dan perguruan tinggi swasta yang termasuk dalam peringkat 10 besar nasional di Indonesia melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*).

4.8.3 Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar

OJK telah melaksanakan tahapan psikotes dan wawancara dalam rangka seleksi izin prinsip untuk tugas belajar. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, berikut detail pegawai yang memperoleh persetujuan prinsip tugas belajar:

SKIM Beasiswa	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
SKIM 1	S2 (Master)	3 orang pegawai	Izin Definitif diberikan pada bulan April 2019
SKIM 2		1 orang pegawai	Izin Definitif diberikan pada Triwulan I-2019
SKIM 3		1 orang pegawai	

4.8.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama triwulan I-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

Selama triwulan I-2019, PPKB dalam bentuk *Leadership Café* dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu:

- Leadership Cafe Level Pertama Batch 3* tahun 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang di Jakarta
- Leadership Cafe Level Pertama Batch 4* tahun 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang di Jakarta

2. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik

untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan I-2019 sebagai berikut:

a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Pada triwulan I-2019 telah diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 1 (Staf) sebanyak 2 batch dengan total peserta 86 orang (*batch 1=42 orang, batch 2=44 orang*)

b. PPK Non In House Dalam Negeri

PPK Non In House Dalam Negeri tercatat selama triwulan pertama tahun 2019 telah mengirimkan sebanyak 13 orang pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dengan sembilan judul program.

c. PPK In-House Dalam Negeri

PPK In-House Dalam Negeri selama triwulan pertama tahun 2019 telah melaksanakan 13 IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 505 pegawai.

3. Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan I-2019 tercatat 1 orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), 2 orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan top up fasilitas dari OJK), 3 orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), 1 orang pegawai untuk skim-4 (beasiswa dengan pembiayaan secara mandiri dengan penggantian dari OJK).

4.8.5 Pengembangan Sistem Informasi

OJK melakukan identifikasi dan perencanaan terkait penyempurnaan modul SIMFOSIA khususnya untuk mendukung proses pengelolaan SDM OJK. Atas hal tersebut telah dibentuk tim teknis dan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan tenaga ahli eksternal guna mempercepat proses pengembangan modul SIMFOSIA. Penyempurnaan modul SIMFOSIA antara lain mencakup tersedianya simulator promosi pegawai yang selaras dengan ketentuan mengenai promosi pegawai dan data kepegawaian OJK. Dalam waktu dekat SIMFOSIA diharapkan dapat digunakan dalam proses promosi pegawai dan sampai saat ini masih dilakukan pembahasan intensif atas penyempurnaan SIMFOSIA.

4.9 OJK Institute

Dalam rangka mewujudkan *center of excellence* di bidang jasa keuangan, OJK Institute mengemban tugas melakukan program pengembangan sumber

daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan (SJK), standarisasi profesi sektor jasa keuangan, pengelolaan riset (*pure research*) dan pendampingan pembelajaran kepada masyarakat. Adapun program pengembangan SDM yang dilaksanakan OJK Institute selama triwulan I-2019 meliputi:

4.9.1 Program Pengembangan SDM SJK

Program Pengembangan SDM SJK merupakan bentuk pemberian manfaat balik kepada sektor jasa keuangan dalam rangka membentuk SDM SJK yang kompeten dan professional. Pada triwulan I-2019, kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK Institute fokus pada penyusunan Program Pengembangan SDM SJK agar program pengembangan SDM SJK tahun 2019 terfokus dan spesifik pada topik-topik pilihan, tepat sasaran, berorientasi kedepan terkait inovasi dan transformasi, bersifat strategis dan *high impact*, program yang dilaksanakan terkait bidang tugas OJK sebagai regulator. Adapun beberapa kegiatan penyusunan program pengembangan SDM SJK yang dilaksanakan pada triwulan I-2019 adalah sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussion (FGD)* Pengembangan SDM SJK dengan 5 *Corporate University* di industri Perbankan
- b. FGD Pengembangan SDM SJK dengan Asosiasi di bidang IKNB dan Pasar Modal
- c. FGD Pengembangan SDM SJK dengan satuan kerja pengawasan dan pengaturan SJK di OJK
- d. FGD Pengembangan SDM SJK dengan beberapa tenaga ahli/pakar di sektor jasa keuangan dan *artificial intelligence*.

4.9.2 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka standarisasi kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, OJK menyusun standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Adapun realisasi tahapan penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNI selama triwulan I-2019:

- a. FGD Metodologi Penyusunan SKKNI dan KKNi;
- b. Verifikasi Eksternal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pasar Modal;
- c. FGD Penyusunan Peta Kompetensi RSKKNI Bidang (Industri) Penjaminan;
- d. FGD Teknik Perumusan SKKNI dan KKNi dengan Kemenaker;
- e. Konvensi SKKNI Pasar Modal;
- f. FGD Penyusunan SKKNI Penjaminan;
- g. FGD Penyusunan rancangan Peraturan OJK

mengenai penerapan KKNI dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di sektor jasa keuangan.

4.9.3 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Program ini merupakan salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa dengan memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK. OJK Institute telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 200 pelajar/mahasiswa dan telah membantu 62 mahasiswa untuk melakukan penelitian di OJK dalam rangka menyusun skripsi/tesis/disertasi.

4.9.4 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit OJK* adalah program diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. OJK Institute telah melaksanakan 13 program *Visit OJK* dengan 1.095 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

4.9.5 OJK Mengajar

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang terkait dalam sektor jasa keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman kepada sektor jasa keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK, mengenalkan produk dan jasa sektor jasa keuangan kepada masyarakat. Realisasi pada periode triwulan I-2019 adalah 3 kegiatan OJK Mengajar, yaitu:

- SMU Daar El Qolam, Serang-Banten | 150 siswa
- UIN Antasari, Banjarmasin | 285 peserta
- IAIN Palangkaraya, Palangkaraya | 278 peserta

4.10 Manajemen Perubahan

OJK menetapkan *Roadmap* Program Budaya Kerja OJK Way 2018-2022 guna akselerasi pencapaian visi OJK Way 2022: "Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional, dan Proaktif".

Sesuai dengan *roadmap* tersebut, program budaya OJK Way 2019 mengusung tema "Insan OJK Andal" yang terdiri dari program:

- OJK Cerdas, yaitu program pengembangan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan Insan OJK dalam melayani *stakeholders*. Sepanjang triwulan I-2019, Insan OJK telah menjalankan 249 program budaya yang ditujukan memfasilitasi peningkatan kompetensi Insan OJK, baik dalam bentuk *knowledge sharing*, *mini library*, bedah buku, kuis, dan sebagainya.

- OJK Ringkas, yaitu program penyederhanaan proses kerja dan penginian informasi sehingga memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* yang terdiri dari pemanfaatan dan pengembangan sistem/aplikasi baru maupun modifikasi proses bisnis guna percepatan kinerja.
- OJK Tangkas, yaitu program pengembangan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup seimbang (*work-life balance*) melalui kegiatan pendukung kesehatan jasmani dan rohani dengan bersinergi bersama *stakeholder/satker/bidang* lainnya. Selama triwulan I-2019, Insan OJK telah melaksanakan 224 program yang ditujukan untuk mendukung *work-life balance*.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna akselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, yakni melalui penyelenggaraan:

1. OJK Awards 2018

Sebagai bentuk apresiasi dan perwujudan komitmen OJK atas pelaksanaan Program Budaya OJK Way sepanjang 2018, serta meningkatkan *awareness* Pimpinan Satuan Kerja dan Insan OJK terhadap transformasi budaya dan manajemen kinerja, OJK menyelenggarakan OJK Award 2018 di Jakarta.

2. Olahraga bersama Anggota Dewan Komisiner

Guna memperkuat rasa kebersamaan serta meningkatkan kualitas *work-life balance* Insan OJK, disamping implementasi salah satu Program Budaya OJK Tahun 2019 yaitu "OJK Tangkas", OJK telah menyelenggarakan 2 kegiatan Olahraga bersama Anggota Dewan Komisiner di Jakarta. Pada kegiatan tersebut, Insan OJK dapat berinteraksi secara langsung dengan Anggota Dewan Komisiner.

3. Forum Budaya Kerja

Pertemuan tahunan yang menjadi wadah anggota Kelompok Mitra Perubahan Satuan Kerja dalam bertukar pikiran dan menambah wawasan terkait program budaya OJK Way 2019 beserta metode pengelolaan program perubahan terkini. Sepanjang triwulan I-2019, OJK menyelenggarakan *Change Partner Forum* yang dihadiri oleh 75 *Change Partner* OJK di Jakarta.

4. Town Hall Meeting

Salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner (ADK) dengan Insan OJK mengenai budaya kerja dan kebijakan organisasi yang diselenggarakan secara periodik setiap bulan. Wadah ini digunakan ADK dalam menyampaikan visi dan harapannya kepada Insan OJK dalam suasana yang santai dan bersifat kekeluargaan. Pada triwulan I-2019, telah diselenggarakan 3

kali *Town Hall Meeting* bersama Ketua Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Anggota Dewan Komisiner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

5. Sosialisasi *Digital Office*

Industri Jasa Keuangan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terkait layanan OJK. Untuk itu, OJK perlu melakukan perubahan digital guna mendorong transformasi proses operasional menjadi lebih cepat, fleksibel dan modern dengan dukungan sistem informasi yang andal.

Keselarasan antara visi, budaya perusahaan, dan perilaku yang diharapkan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru.

Kelompok Mitra Perubahan, sebagai jaringan informal OJK, dilibatkan secara aktif agar perubahan mekanisme formal dapat berjalan secara lancar. Sejumlah langkah telah ditempuh, diantaranya mencakup penggunaan fitur *virtual meeting* untuk koordinasi lintas Satuan Kerja.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultansi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal kepada Satuan Kerja guna mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud. Adapun hal yang telah dilakukan berupa:

1. Pendampingan dan konsultansi oleh konsultan budaya internal kepada *Change Partner* dan *Change Agent OJK*

2. Penyempurnaan sistem *monitoring program budaya* melalui:

- Penyusunan komponen penilaian yang terukur
- Penguatan konsultan budaya internal agar proses *monitoring* berjalan secara efisien dan efektif
- Penyesuaian *dashboard monitoring* program budaya (*ojkway.com*) sesuai dengan sistem penilaian program budaya tahun 2019, dengan tambahan *feature* berupa Laporan Hasil *Monitoring* oleh konsultan internal. Penyesuaian dan penyempurnaan terus dilakukan agar semakin andal, sehingga proses *self assessment* yang dilakukan oleh *Change Partner* dan *monitoring* yang dilakukan oleh konsultan internal menjadi semakin ringkas.

3. Pengukuran tingkat keberhasilan melalui:

- Verifikasi hasil *self assessment* implementasi program budaya

- Kalibrasi hasil penilaian program yang telah diverifikasi oleh konsultan internal
- Penyusunan saran dan perbaikan sebagai bentuk evaluasi kepada *Change Partner* dalam mengimplementasikan program budaya kedepannya.

Hasil *monitoring* menunjukkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya OJK *Wide* mencapai nilai 5,82 dari skala 6.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi program budaya kerja OJK *Way* adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, yakni:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini berisikan informasi tentang implementasi program perubahan, budaya, dan kinerja Satuan Kerja yang bertajuk:

- Professional is Me*
- Insan OJK Andal
- OJK Cerdas

2. Penerbitan Majalah Integrasi

Pesan Anggota Dewan Komisiner merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner dengan Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*, akun *instagram @ojkway*, dan *e-magazine website* budaya internal OJK *Way*. Tradisi ini diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi Insan OJK untuk selalu semangat berkarya dalam mengimplementasikan nilai-nilai strategis OJK. Adapun pesan yang telah disampaikan adalah:

- Insan OJK Andal oleh Ketua Dewan Komisiner
- Membangun Budaya Kerja OJK *Way* dengan Role Model oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- Worklife Balance* ala Insan OJK oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

3. Pengkinian Konten Media Kampanye

Secara berkala, OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, OJK *Way* TV, dan akun *Instagram @ojkway*. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat mudah memahami, mendukung, dan pada akhirnya mampu menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye program budaya kerja OJK *Way*, nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satuan Kerja, informasi terkini terkait kinerja OJK, serta pesan *work-life balance* untuk memacu semangat kerja Insan OJK.

Gold Winner: Apresiasi Untuk Majalah Integrasi



Untuk ketiga kalinya Majalah Integrasi mendapatkan apresiasi dalam ajang Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2019 merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Apresiasi ini diikuti oleh total 766 entri dari berbagai bidang, baik dari pemerintah, swasta, pelaku media, maupun mahasiswa. Juga melibatkan sepuluh dewan juri yang kompeten dibidangnya.

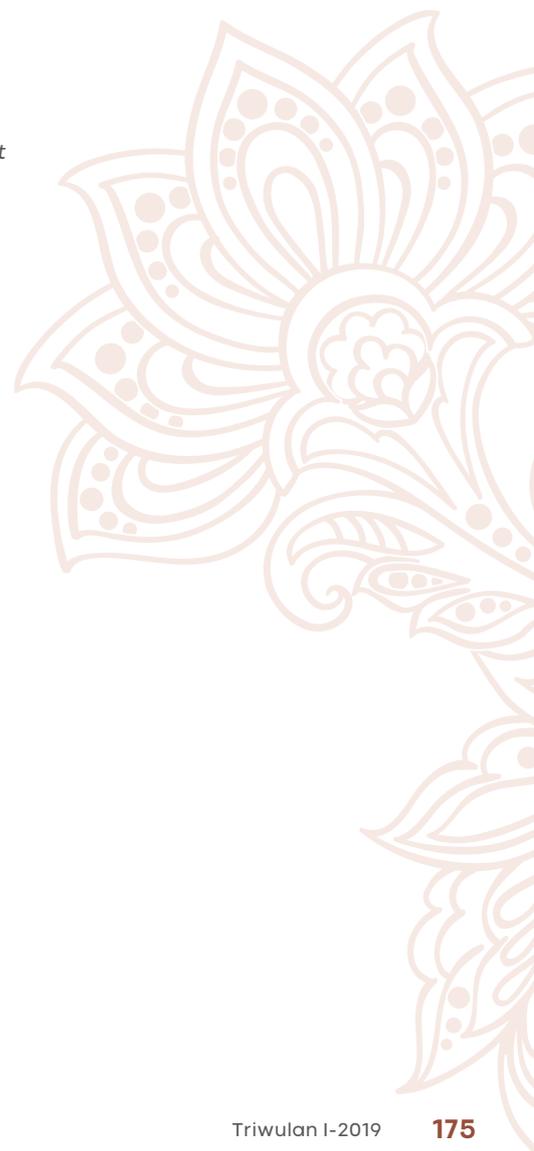
Tahun ini Majalah Integrasi kembali mendapat *Gold Winner Award* dalam kategori *The Best Government*. Edisi yang menjadi pemenang adalah Edisi Juni 2018 dengan tema "Membangun *Trust OJK*".



Singkatan dan Akronim

AAJI	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	<i>Australia Awards Scholarship</i>
AASI	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	<i>ASEAN Banking Integration Framework</i>
ACIA	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
ACKS	Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	Anggota Dewan Komisioner
AFAS	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
AHM	Anugerah Media Humas
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	<i>Anti Money Laundering</i>
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASBANDA	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASIC	<i>Australia Securities and Investment Commission</i>
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
ATISA	<i>ASEAN Trade In Services Agreement</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIN	Badan Intelijen Negara
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BRC	<i>BPD Regional Champion</i>
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CA	<i>Combined Assurance</i>
CBRC	<i>China Banking Regulatory Commission</i>
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>

CFT	<i>Combating the Financing of Terrorism</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	<i>Cash Ratio</i>
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
CTKI	Calon Tenaga Kerja Indonesia
DES	Daftar Efek Syariah
DFSA	<i>Dubai Financial Services Authority</i>
DJPU	Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	<i>Disaster Recovery Center</i>
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
Eduwan	Edukasi Wartawan
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FAPM	Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSC	<i>Financial Service Commission</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GeNTa PM	Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
GRC	<i>Governance Risk and Compliance</i>
HKHPM	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	<i>International Capital Market Association</i>
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IFAC	<i>International Federation of Accountant</i>
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFCC	<i>Integrated Financial Customer Care</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	<i>Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement</i>
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Individu
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
ILM	Iklan Layanan Masyarakat
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INDOBeX	<i>Indonesia Bond Indexes</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IRR	<i>Integrated Risk Rating</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan



KDK	Keputusan Dewan Komisioner
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOINKU	Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPMR	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	Kelompok Usaha Bersama
KYC	<i>Know Your Customer</i>
KYFC	<i>Know Your Financial Conglomerates</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LoU	<i>Letter of Understanding</i>
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
MCRA	<i>Market Conduct Risk Assessment</i>
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi ASEAN/ <i>ASEAN Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MPSJKI	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORP	<i>Outreach Program</i>
OSINT	<i>Open Source Intelligence</i>
PCE	Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	Pendidikan Calon Pejabat
PCS	Pendidikan Calon Staf
PCT	Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisioner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek



PELAKU	Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	<i>Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law</i>
PI	Penasihat Investasi
PKR	Pasar Keuangan Rakyat
PM	Pasar Modal
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPF	Program Pendidikan Formal
PPG	Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	Program Pendidikan Berkelanjutan
PPP	Program Penugasan Pegawai
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RDK	Rapat Dewan Komisioner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RGS	<i>Risk and Governance Summit</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIELOG	Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SKM	Sahabat Keuangan Maritim
SKP	Satuan Kredit Profesi
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>

SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>
TKHT	Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
TPHT	Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU LKM	Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WCFSL	<i>Working Committee on Financial Services Liberalisation</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	<i>Extensible Business Reporting Language</i>
YKP OJK	Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>
ZMET	<i>Zaltman Metaphor Elicitation Technique</i>

